

LAPORAN

KLHS RPJMD



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030



KATA PENGANTAR

Pembuatan Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 dilakukan berdasarkan amanat Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana setiap Kebijakan, Rencana dan/atau Program wajib melakukan penyusunan KLHS, baik itu penyusunan atau evaluasi.

KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ruang lingkup KLHS RPJMD Kota Bukittinggi meliputi dasar teori, kondisi umum wilayah, Capaian indikator TPB, isu strategis, kondisi pencapaian TPB pada OPD, skenario pembangunan berkelanjutan, rekomendasi arah kebijakan dan indikasi program, beserta kegiatan dalam menuntaskan indikator TPB.

Tersusunnya laporan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 ini, atas kerjasama tim pokja pembuat dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Atas bantuan semua pihak dalam penyusunan KLHS RPJMD ini, diucapkan terima kasih.

Bukittinggi, Juli 2024

WALIKOTA BUKITTINGGI

Erman Safar, S.H



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-2
1.2 Maksud dan tujuan	I-3
1.3 Ruang Lingkup	I-4
1.5 Sistematika Pembuatan KLHS	I-4
1.6 Sistematika Laporan.....	I-9
BAB II DASAR TEORI.....	II-1
2.1 Teori Perkembangan Wilayah	II-1
2.2 Sejarah Perkembangan Wilayah Perencanaan.....	II-5
2.3 Rencana Pengembangan Wilayah	II-6
BAB III KONDISI UMUM DAERAH	III-1
3.1 Kondisi Geografis, Sosial, dan Ekonomi	III-1
3.1.1 Kondisi Geografis.....	III-1
3.1.2 Karakteristik Fisik Daerah	III-4
3.1.2.1 Topografi.....	III-4
3.1.2.2 Geologi.....	III-5
3.1.2.3 Hidrologi.....	III-10
3.1.2.4 Iklim.....	III-24
3.1.2.5 Tata Guna Lahan.....	III-27
3.1.3 Kondisi Sosial	III-30
3.1.3.1 Kondisi Demografi	III-30
3.1.3.2 Angka Kemiskinan	III-32



3.1.3.3	Tingkat Pengangguran	III-33
3.1.3.4	Indeks Pembangunan Manusia	III-33
3.1.3.5	Indeks Pembangunan Gender	III-34
3.1.4	Kondisi Ekonomi	III-37
3.1.4.1	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	III-37
3.1.4.2	Struktur Ekonomi.....	III-38
3.1.4.3	Pertumbuhan Ekonomi.....	III-39
3.1.4.4	PDRB Per Kapita.....	III-40
3.1.4.5	Indeks Gini.....	III-40
3.2	Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-41
3.2.1	Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)	III-41
3.2.1.1	DDDT Air	III-41
3.2.1.2	DDDT Pangan	III-47
3.2.2	Daya Dukung Daya Tampung Jasa Lingkungan.....	III-49
3.2.2.1	Profil Jasa Penyediaan	III-54
3.2.2.2	Profil Jasa Pengaturan	III-61
3.2.2.3	Profil Jasa Budaya	III-70
3.2.2.4	Profil Jasa Pendukung.....	III-70
3.2.3	Risiko Lingkungan	III-78
3.2.3.1	Rawan Gempa Bumi	III-78
3.2.3.2	Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan.....	III-80
3.2.3.3	Bahaya Longsor.....	III-80
3.2.3.4	Bahaya Banjir Bandang.....	III-81
3.2.3.5	Bahaya Banjir.....	III-82
3.2.3.6	Bahaya Cuaca Ekstrim	III-82
3.2.3.7	Bahaya Erupsi Gunung Api	III-83
3.2.3.8	Pengelolaan Persampahan	III-90
3.2.4	Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	III-101
3.2.4.1	Perkebunan.....	III-101
3.2.4.2	Hortikultura.....	III-101



3.2.4.3	Peternakan.....	III-103
3.2.4.4	Industri.....	III-103
3.2.4.5	Pariwisata	III-107
3.2.5	Perubahan Iklim	III-109
3.2.6	Keanekaragaman Hayati.....	III-118
3.2.6.1	Kawasan Lindung	III-118
3.2.6.2	Keanekaragaman Jenis dan Genetik.....	III-121
3.3	Gambaran Umum Keuangan Daerah	III-131
3.3.1	Kinerja Keuangan Daerah.....	III-131
3.3.1.1	Pendapatan Daerah	III-131
3.3.1.2	Belanja Daerah.....	III-133
3.3.2	Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pencapaian Indikator TPB.....	III-134
3.4	Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB.....	III-134
BAB IV ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)		
		IV-1
4.1	Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	IV-1
4.2	Rincian TPB Kota Bukittinggi.....	IV-2
4.3	Evaluasi Capaian TPB Kota Bukittinggi.....	IV-4
4.3.1	Evaluasi Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Capaian..	IV-4
4.3.2	Evaluasi Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Pilar	IV-6
4.4.....	Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	IV-9
4.5	Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	IV-19
4.6	Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Ada Data	IV-23
4.7	Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target.....	IV-26
4.8	Isu Strategis.....	IV-28
4.8.1	Isu Hasil Konsultasi Publik 1.....	IV-28
4.8.2	Isu Berdasarkan Analisis Capaian TPB	IV-30



4.8.3 Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah (Muatan KLHS)	IV-32
4.8.4 Isu Berdasarkan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	IV-32
4.8.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.....	IV-34
BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	V-1
5.1 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	V-1
5.2 Proyeksi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	V-20
BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI.....	VI-I
6.1 Skenario Arah Kebijakan	VI-3
6.1.1 Skenario Arah Kebijakan Berdasarkan Capaian TPB SS (Sudah Dikerjakan dan Sudah Tercapai).....	VI-3
6.1.2 Skenario Arah Kebijakan Berdasarkan Capaian TPB SB (Sudah Dikerjakan dan Belum Tercapai).....	VI-33
6.1.3 Skenario Arah Kebijakan Berdasarkan Capaian TPB NA (Telah Dikerjakan dan Belum Ada Data).....	VI-48
6.1.4 Skenario Arah Kebijakan Berdasarkan Capaian TPB BB (Belum Dikerjakan dan Belum Tercapai).....	VI-54
6.2 Rekomendasi Berdasarkan Isu PB Strategis	VI-102
BAB VII KESIMPULAN	VII-1
7.1 Kesimpulan	VII-1
7.2 Saran.....	VII-2
DAFTAR PUSTAKA	VII-3



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jadwal Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi	I-9
Tabel 3.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi ...	III-1
Tabel 3.2	Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya	III-4
Tabel 3.3	Geologi Permukaan Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan	III-6
Tabel 3.4	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Bukittinggi	III-10
Tabel 3.5	Sungai/Batang air yang melintasi Kota Bukittinggi...	III-11
Tabel 3.6	Kondisi Embung Kota Bukittinggi.....	III-15
Tabel 3.7	Perbandingan Kualitas Air Embung Lubuak Suduik Kota Bukittinggi 6 (enam) Tahun Terakhir	III-16
Tabel 3.8	Perbandingan Kualitas Air Embung Anak Limau Kota Bukittinggi 4(empat) Tahun Terakhir.....	III-16
Tabel 3.9	Perbandingan Kualitas Air Embung Tabek Gadang di Kota Bukittinggi 3(tiga) Tahun Terakhir	III-17
Tabel 3.10	Kondisi Akuifer Kota Bukittinggi.....	III-21
Tabel 3.11	Pengamatan Unsur Iklim Kota Bukittinggi Tahun 2023.	III-24
Tabel 3.12	Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas).....	III-27
Tabel 3.13	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023	III-30
Tabel 3.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2023.....	III-31
Tabel 3.15	PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2023	III-37



Tabel 3.16	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023	III-38
Tabel 3.17	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023.....	III-39
Tabel 3.18	PDRB per Kapita Kota Bukittinggi, 2018-2023	III-40
Tabel 3.19	Perhitungan D3T Air Kota Bukittinggi	III-45
Tabel 3.20	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Bukittinggi	III-47
Tabel 3.21	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045.....	III-48
Tabel 3.22	Klasifikasi Jasa Ekosistem	III-49
Tabel 3.23	DDDTLH Jasa Penyediaan	III-54
Tabel 3.24	DDDTLH Jasa Pengaturan	III-61
Tabel 3.25	DDDTLH Jasa Budaya	III-70
Tabel 3.26	DDDTLH Jasa Pendukung	III-70
Tabel 3.27	Jumlah Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi	III-78
Tabel 3.28	Kerawanan Terhadap Gempa Bumi Di Kota Bukittinggi	III-79
Tabel 3.29	Kerawanan Terhadap Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kota Bukittinggi	III-80
Tabel 3.30	Kerawanan Terhadap Resiko Longsor Di Kota Bukittinggi	III-81
Tabel 3.31	Kerawanan Terhadap Resiko Banjir Bandang Di Kota Bukittinggi	III-81
Tabel 3.32	Kerawanan Terhadap Resiko Banjir Di Kota Bukittinggi	III-82
Tabel 3.33	Kerawanan Terhadap Resiko Cuaca Ekstrim Di Kota Bukittinggi	III-83
Tabel 3.34	Timbulan Sampah Pasar Bawah Kota Bukittinggi Per Hari Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	III-91



Tabel 3.35	Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bukittinggi	III-92
Tabel 3.36	Capaian Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	III-93
Tabel 3.37	Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022.....	III-94
Tabel 3.38	Status Bank Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022 ..	III-99
Tabel 3.39	Daftar Jenis Industri di Kota Bukittinggi.....	III-104
Tabel 3.40	Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Bulan dan Jenis Wisatawan di Kota Bukittinggi	III-107
Tabel 3.41	Daftar Nama Objek Wisata di Kota Bukittinggi	III-109
Tabel 3.42	Tabel Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bukittinggi	III-110
Tabel 3.43	Indeks iklim ekstrim ETCCDMI yang digunakan.....	III-113
Tabel 3.44	Indeks Iklim Ekstrim Wilayah Sumatera Barat.....	III-114
Tabel 3.45	Jenis Flora dan Fauna Yang Terdapat di TMSBK dan Benteng Fort de Kock.....	III-119
Tabel 3.46	Daftar Jenis Tumbuhan Liar yang ditemukan di Kota Bukittinggi	III-122
Tabel 3.47	Daftar Satwa Daratan Jenis Liar Belum Bernilai Ekonomi di Kota Bukittinggi	III-126
Tabel 3.48	Jenis Kupu-Kupu yang Ditemukan di Kota Bukittinggi	III-129
Tabel 3.49	Target dan Realisasi, Tingkat Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017- 2022	III-131
Tabel 3.50	Target dan Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022.....	III-133
Tabel 3.51	Peran Filantropi dalam Pembangunan Kota Bukittinggi	III-135
Tabel 4.1	Indikator TPB Bukan Kewenangan Daerah Kota Bukittinggi	IV-3



Tabel 4.2	Gambaran Indikator TPB Berdasarkan Pilar	IV-4
Tabel 4.3	Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Bukittinggi	IV-6
Tabel 4.4	Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar Kota Bukittinggi	IV-7
Tabel 4.5	Indikator TPB Capaian SS Kota Bukittinggi.....	IV-7
Tabel 4.6	Indikator TPB Capaian SB Kota Bukittinggi	IV-17
Tabel 4.7	Indikator TPB Capaian NA Kota Bukittinggi	IV-22
Tabel 4.8	Indikator TPB Capaian BB Kota Bukittinggi	IV-25
Tabel 4.9	Hasil Inventarisasi Isu Hasil Konsultasi Publik	IV-27
Tabel 4.10	Isu Berdasarkan Analisis Capaian TPB	IV-28
Tabel 4.11	Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah.....	IV-30
Tabel 4.12	Hasil Analisis Crosscutting antara Isu Konsultasi Publik dan TPB	IV-33
Tabel 4.13	Hasil Analisis Crosscutting antara Isu Karakteristik Wilayah (6 Muatan) dan TPB	IV-34
Tabel 4.14	Hasil Analisis Crosscutting antara Isu RPPLH Kota Bukittinggi dan TPB.....	IV-35
Tabel 4.15	Hasil Analisis Crosscutting antara Isu KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 dan TPB.....	IV-36
Tabel 4.16	Peringkat Isu TPB Prioritas Kota Bukittinggi	IV-37
Tabel 5.1	Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD/ Badan/ Unit Kota Bukittinggi	V-1
Tabel 5.1	Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD/ Badan/ Unit Kota Bukittinggi	V-1
Tabel 5.2	Capaian Indikator TPB Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bukittinggi	V-3
Tabel 5.3	Capaian Indikator TPB Bagian Hukum Kota Bukittinggi	V-3
Tabel 5.4	Capaian Indikator TPB Bagian Organisasi Kota Bukittinggi	V-4



Tabel 5.5	Capaian Indikator TPB Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bukittinggi	V-4
Tabel 5.6	Capaian Indikator TPB Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi.....	V-4
Tabel 5.7	Capaian Indikator TPB Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi	V-5
Tabel 5.8	Capaian Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi	V-5
Tabel 5.9	Capaian Indikator TPB Badan Keuangan Kota Bukittinggi	V-6
Tabel 5.10	Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	V-7
Tabel 5.11	Capaian Indikator TPB Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi	V-7
Tabel 5.12	Capaian Indikator TPB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi	V-10
Tabel 5.13	Capaian Indikator TPB Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi.....	V-10
Tabel 5.14	Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	V-11
Tabel 5.15	Capaian Indikator TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.....	V-12
Tabel 5.16	Capaian Indikator TPB Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi	V-14
Tabel 5.17	Capaian Indikator TPB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi	V-14
Tabel 5.18	Capaian Indikator TPB Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi.....	V-16



Tabel 5.19	Capaian Indikator TPB Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi	V-16
Tabel 5.20	Capaian Indikator TPB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi	V-16
Tabel 5.21	Capaian Indikator TPB Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi	V-17
Tabel 5.22	Capaian Indikator TPB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi	V-17
Tabel 5.23	Capaian Indikator TPB Dinas Sosial Kota Bukittinggi	V-18
Tabel 5.24	Capaian Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi.....	V-19
Tabel 5.25	Capaian Indikator TPB Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi	V-19
Tabel 5.26	Capaian Indikator TPB Inspektorat Kota Bukittinggi	V-19
Tabel 5.27	Capaian Indikator TPB Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik / Satuan Polisi dan Pamong Praja/ Kepolisian Kota Bukittinggi	V-19
Tabel 5.28	Proyeksi Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi	V-21
Tabel 6.1	Skenario Arah Kebijakan Capaian TPB SS (Sudah Dikerjakan dan Sudah Tercapai)	VI-3
Tabel 6.2	Skenario Arah Kebijakan Capaian TPB SB (Sudah Dikerjakan dan Belum Tercapai)	VI-33
Tabel 6.3	Skenario Arah Kebijakan Capaian TPB NA (Belum Dikerjakan dan Belum Tercapai)	VI-48
Tabel 6.4	Skenario Arah Kebijakan Capaian TPB NA (Belum Dikerjakan dan Belum Tercapai)	VI-54
Tabel 6.5	Target, Program, dan Kegiatan Dalam Pencapaian TPB Kota Bukittinggi	VI-57
Tabel 6.6	Rekomendasi Khusus Isu PB Strategis KLHS RPJMD Tahun 2025-2030 Kota Bukittinggi	VI-102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Metode Penyelenggaraan KLHS RPJMD	I-8
Gambar 3.1	Peta administrasi Kota Bukittinggi	III-3
Gambar 3.2	Peta Topografi Kota Bukittinggi.....	III-8
Gambar 3.3	Peta Geologi Kota Bukittinggi.....	III-9
Gambar 3.4	Perbandingan Debit Sungai Kota Bukittinggi	III-12
Gambar 3.5	Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi	III-13
Gambar 3.6	Perbandingan TSS Sungai Kota Bukittinggi	III-13
Gambar 3.7	Perbandingan BOD Sungai Kota Bukittinggi	III-14
Gambar 3.8	Perbandingan COD Sungai Kota Bukittinggi	III-15
Gambar 3.9	Perbandingan DO Air Sumur Kota Bukittinggi.....	III-19
Gambar 3.10	Perbandingan BOD Air Sumur Kota Bukittinggi.....	III-19
Gambar 3.11	Perbandingan Total Fosfat Air Sumur Kota Bukittinggi	III-20
Gambar 3.12	Perbandingan Flourida Air Sumur Kota Bukittinggi...	III-20
Gambar 3.13	Perbandingan Total Coliform Air Sumur Kota Bukittinggi	III-21
Gambar 3.14	Peta Geologi Kota Bukittinggi.....	III-23
Gambar 3.15	Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Bukittinggi Tahun 2022	III-25
Gambar 3.16	Grafik tren curah hujan BPP Talao bulanan periode 1981-2020.....	III-25
Gambar 3.17	Grafik trend suhu udara minimum bulanan periode 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi	III-26
Gambar 3.18	Grafik tren suhu udara maksimum bulanan periode 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi.	III-26
Gambar 3.19	Tata Guna Lahan Eksisting Kota Bukittinggi	III-27
Gambar 3.20	Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Persentase).....	III-29



Gambar 3.21	Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Bukittinggi	III-30
Gambar 3.22	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi...	III-32
Gambar 3.23	Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi	III-33
Gambar 3.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi	III-33
Gambar 3.25	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi	III-34
Gambar 3.26	Indeks Pembangunan Gender di Kota Bukittinggi	III-35
Gambar 3.27	Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bukittinggi.....	III-35
Gambar 3.28	Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Bukittinggi ...	III-36
Gambar 3.29	Jumlah Kekerasan Pada Anak dan Perempuan di Kota Bukittinggi	III-36
Gambar 3.30	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bukittinggi 2018-2023.....	III-38
Gambar 3.31	Indeks gini Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat.....	III-41
Gambar 3.32	Hasil Analisis D3T Air Pulau Sumatra	III-42
Gambar 3.33	Metode Analisis D3T Air.....	III-43
Gambar 3.34	Grafik Status D3T Air Kota Bukittinggi	III-44
Gambar 3.35	Peta D3T Air Kota Bukittinggi.....	III-46
Gambar 3.36	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Bukittinggi	III-56
Gambar 3.37	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Bukittinggi	III-57
Gambar 3.38	Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kota Bukittinggi ..	III-58
Gambar 3.39	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Bakar, Kayu dan Fosil Kota Bukittinggi	III-59
Gambar 3.40	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumberdaya Genetik Kota Bukittinggi	III-60



Gambar 3.41	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kota Bukittinggi	III-62
Gambar 3.42	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kota Bukittinggi	III-63
Gambar 3.43	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kota Bukittinggi.....	III-64
Gambar 3.44	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan. Pemurnian Air Kota Bukittinggi.....	III-65
Gambar 3.45	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Bukittinggi	III-66
Gambar 3.46	Peta Daya Tampung Jasa Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara Kota Bukittinggi	III-67
Gambar 3.47	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kota Bukittinggi	III-68
Gambar 3.48	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengendalian Hama dan Penyakit Kota Bukittinggi	III-69
Gambar 3.49	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup Kota Bukittinggi	III-71
Gambar 3.50	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kota Bukittinggi ...	III-72
Gambar 3.51	Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika (alam) Kota Bukittinggi	III-73
Gambar 3.52	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburuan Kota Bukittinggi	III-74



Gambar 3.53	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle) Kota Bukittinggi	III-75
Gambar 3.54	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Produksi Primer Kota Bukittinggi.....	III-76
Gambar 3.55	Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kota Bukittinggi	III-77
Gambar 3.56	Peta Risiko Bencana Banjir	III-84
Gambar 3.57	Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem	III-85
Gambar 3.58	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi	III-86
Gambar 3.59	Peta Risiko Bencana Kekeringan	III-87
Gambar 3.60.	Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan ...	III-88
Gambar 3.61	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor.....	III-89
Gambar 3.62	Timbulan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2020-2022	III-90
Gambar 3.63	Distribusi Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022	III-91
Gambar 3.64	Komposisi Sampah Kota Bukittinggi	III-93
Gambar 3.65	Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah	III-95
Gambar 3.66	Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tabek Gadang	III-96
Gambar 3.67	Transfer Depo Kota Bukittinggi	III-97
Gambar 3.68	Rumah Kompos Kelurahan Birugo	III-100
Gambar 3.69	Gambar Pusat Daur Ulang (PDU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.....	III-101
Gambar 3.70.	Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	III-103
Gambar 3.71.	Distribusi Jenis Wisata di Kota Bukittinggi.....	III-107
Gambar 3.72	Emisi GRK Kota Bukittinggi	III-111



Gambar 3.73	Grafik tren tahunan indeks kekeringan SPI 3 bulanan tahun 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi.....	III-112
Gambar 3.74	Grafik deret waktu indeks kekeringan SPI 3 bulanan tahun 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi	III-112
Gambar 3.75	Pergeseran kelompok indeks kekeringan SPI-3 bulanan tahun 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi per dekade.	III-113
Gambar 3.76	Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kota Bukittinggi..	III-116
Gambar 3.77	Peta Resiko Perubahan Iklim Kota Bukittinggi	III-117
Gambar 3.78	Peta Persebaran Flora Daratan Bernilai Penting di Kota Bukittinggi	III-124
Gambar 3.79	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022	III-132
Gambar 3.80	Kontribusi Komponen Realisasi PAD Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022	III-133
Gambar 3.81	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022.....	III-134
Gambar 4.1	Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi	IV-5
Gambar 4.2	Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi Berdasarkan Pilar	IV-7
Gambar 4.3	Ketidaktercapaian TPB	IV-29
Gambar 5.1	Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi Berdasarkan OPD/Unit/Badan	V-3
Gambar 5.2	Grafik Hasil Analisis Gap untuk skenario TPB BaU (Business as Usual).....	V-19
Gambar 5.3	Grafik Hasil Analisis Gap untuk skenario TPB dengan Upaya Tambahan (UT).....	V-24

KLHS RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup telah menetapkan sejumlah instrumen dalam upaya mengelola lingkungan hidup menuju kepada pembangunan berkelanjutan. Instrumen tersebut antara lain meliputi Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Audit Lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Bahkan AMDAL telah dilaksanakan sejak tahun 1986 sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982. Untuk pelaksanaan AMDAL telah ditetapkan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) yang dari waktu ke waktu mengalami penyempurnaan. Pelaksanaan Audit Lingkungan juga telah disempurnakan dengan penetapan beberapa Permen LH. Sementara itu penyelenggaraan KLHS baru dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah pada tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan KLHS. Selanjutnya ditetapkan pula Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017.

Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi pada tahun 2020-2025, maka Pemerintah Kota Bukittinggi kembali akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi untuk periode 2025-2030. Sebelum, dilakukannya penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 maka diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi rencana pembangunan Kota Bukittinggi kedepannya. Pembuatan KLHS RPJPD ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/Bangda tanggal 6 Juli 2022 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.11.2/8755/Bangda tanggal 7 Agustus 2023 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam



dokumen RPJPD, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.54/Menlhk/PKT/Pla.1.1/B/3/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Percepatan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan pasal 15 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 bahwa laporan KLHS bermanfaat bagi penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RPJPD. Dimana, pengintegrasinya adalah dari semua muatan KLHS dimasukkan ke dalam RPJPD/RPJMD.

Proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Mekanisme pelaksanaan KLHS mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 yaitu terbagi menjadi 4 (empat) tahapan utama yaitu: (1) Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD, (2) pengkajian pembangunan berkelanjutan, (3) perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian, validasi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dari Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025–2030 meliputi:

1. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1272 Tahun 2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD;
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660.11.2/754/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPJMD ke dalam dokumen RPJPD/RPJMD;
16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.54/Menlhk/PKTL/Pla.1.1/B/3/2024 tentang Percepatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan bahwa isu



strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2025-2030.

Sedangkan tujuannya adalah memberikan masukan guna:

1. Memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Kota Bukittinggi khususnya rencana teknokratik telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan memperhatikan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan kualitas RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam memberikan kontribusi terhadap materi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 dilakukan melalui:
 - a. Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang meliputi penyusunan profil kondisi umum daerah dan daya dukung lingkungan, analisis pencapaian TPB dan analisis peran stakeholder pembangunan dalam perwujudan TPB;
 - b. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dengan keluaran alternatif proyeksi kondisi tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga meneluarkan perumusan isu strategis, permasalahan, sasaran strategi daerah;
 - c. Peningkatkan penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penyusunan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi Umum Daerah

Kondisi umum daerah ini akan memuat antara lain kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kondisi geografis, demografis dan keuangan daerah.



2. Capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tercermin dari capaian indikator – indikatorTPB.
3. Pembagian peran, yang tercermin dari kontribusi Pemerintah, Pemerintah Daerah serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha dan akademisi serta pihak terkait lainnya.

1.5 Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD

Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD merupakan tata urutan/mechanisme dalam pembuatan KLHS RPJMD terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD

Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD ditentukan dengan keputusan Kepala Daerah. Tim pembuat KLHS RPJMD dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup. Tim pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD. Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Akademisi dan pihak terkait lainnya. Untuk surat keputusan pembuatan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-86-2024 Tahun 2024 tentang Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 sebagaimana terlampir pada Lampiran.

2. Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan

Dalam tahap ini Tim Penyusun melakukan pengkajian pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:

- a. kondisi umum daerah yang paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah
- b. capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan, yang menjadi dasar untuk merumuskan skenario pembangunan berkelanjutan.



- c. Pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Dalam tahap ini Tim Pembuat KLHS bersama sama dengan masyarakat merumuskan isu pembangunan berkelanjutan. Isu Strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

4. Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan

Dalam tahap ini Tim Pembuat KLHS melakukan perumusan skenario pembangunan berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang berupa target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.

- a. Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan pembangunan berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.
- b. Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan dengan memperhatikan:
 - pencapaian target tanpa upaya tambahan;
 - pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 - potensi, daya saing dan inovasi daerah;
 - daya dukung dan daya tampung daerah; dan
 - pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.
- c. Alternatif proyeksi menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah. Isu strategis berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- d. Permasalahan berupa tantangan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.



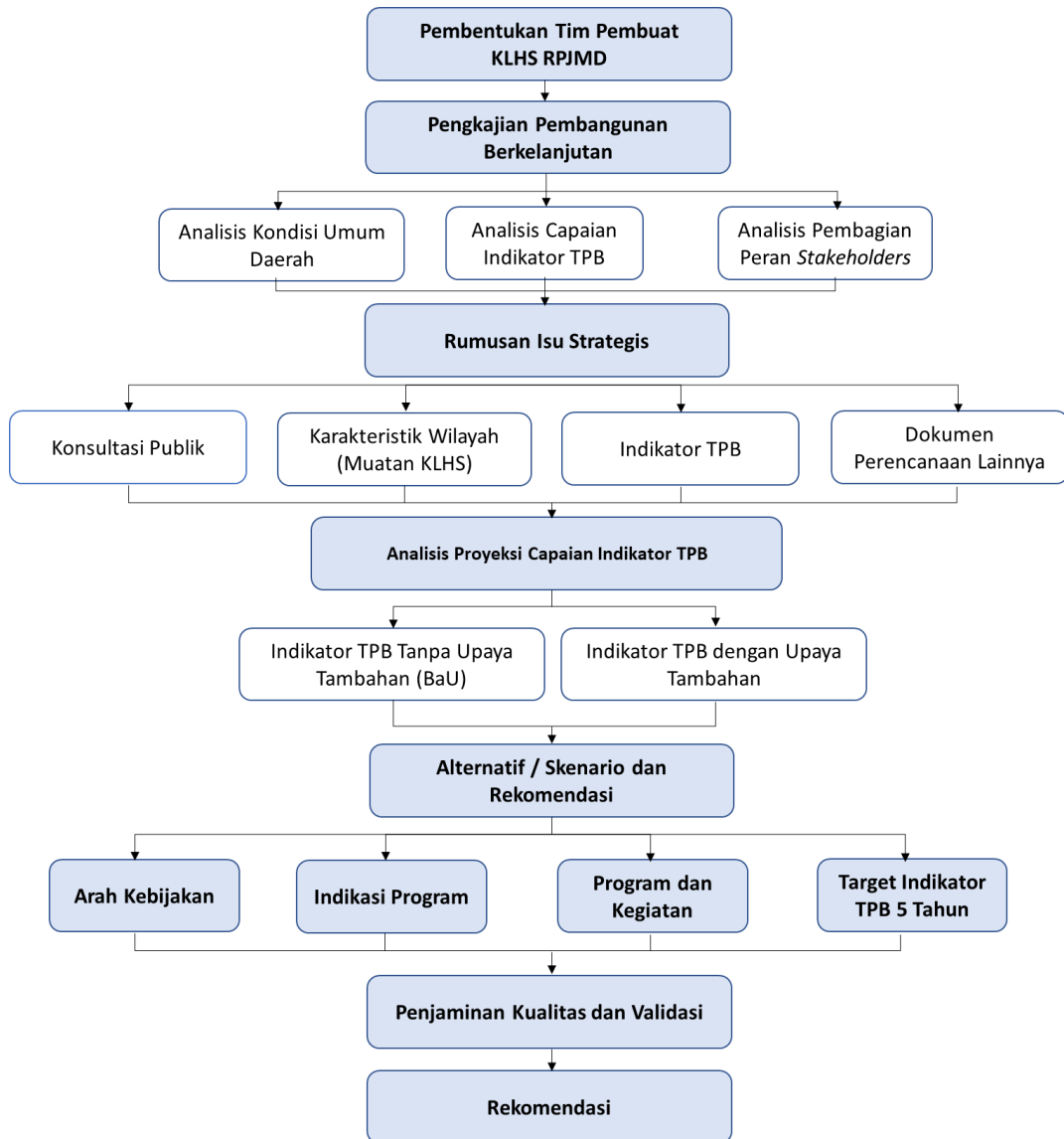
- e. Sasaran strategis berupa kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan isu strategis dan permasalahan.

Hasil tahap penyusunan skenario pembangunan berkelanjutan di Kota Bukittinggi dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD), dimana tim pembuat KLHS menyampaikan hasil penyusunan arah kebijakan pendukung TPB untuk dapat diketahui, didukung dan disetujui oleh publik.

5. Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian, dan Validasi

- a. Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD.
- b. Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD dibuktikan dengan:
 - ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
 - jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
 - berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - laporan KLHS RPJMD.
- c. Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD pada isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d. Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah.
- e. Laporan KLHS RPJMD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada gambar berikut dapat dilihat alur penyelenggaraan KLHS RPJMD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.



Gambar 1.1 Metode Penyelenggaraan KLHS RPJMD

Untuk lingkup kegiatan ini juga tertuang dalam jadwal kegiatan yang terlampir pada Tabel 1.1 berikut ini. Dan juga dilakukan pertemuan tim dengan agenda pertemuan awal penjelasan proses KLHS, penyusunan jadwal kegiatan dan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi. Kegiatan ini terdokumentasi pada Lampiran 4.

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi

No	Kegiatan	Tahun 2024					
		Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
I	Pembentukan Tim Pembuat KLHS RPJMD Kota Bukittinggi	X					



No	Kegiatan	Tahun 2024					
		Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
II	Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan						
	Konsultasi publik		X				
	Kondisi umum daerah	X	X	X			
	Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	X	X	X			
	Pembagian Peran	X					
III	Perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan			X			
	Alternatif proyeksi kondisi TPB			X			
	Perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Daerah			X			
	Konsultasi Publik				X		
IV	Penjaminan Kualitas, Pendokumentasian dan Validasi					X	

1.6 Sistematika Pelaporan KLHS RPJMD

Laporan Akhir pekerjaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi ini, terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan penjelasan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika pelaporan dari dokumen KLHS RPJMD Kota Bukittinggi.

BAB II: DASAR TEORI

Berisi penjelasan tentang teori perkembangan wilayah, sejarah perkembangan wilayah kota Bukittinggi, dan keselarasan perkembangan wilayah Kota Bukittinggi dengan teori perkembangan wilayah.

BAB III: KONDISI UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Berisi penjelasan tentang gambaran kondisi secara umum wilayah kajian baik itu kondisi fisik wilayah, demografis, kondisi keuangan daerah, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kota Bukittinggi, peran Filantropi serta peran pemangku kepentingan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Bukittinggi.

BAB IV: ANALISIS TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) KOTA BUKITTINGGI



Berisi penjelasan tentang hasil capaian indikator pembangunan berkelanjutan Kota Bukittinggi terhadap indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terdiri dari 17 tujuan serta dikelompokkan menurut pilar dan status capaian masing-masing indikator yaitu capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut kategori capaian dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menurut pilar. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai perumusan isu, dimana isu tersebut diperoleh melalui hasil crosscutting atau uji silang dari empat kelompok isu, yaitu dari isu Konsultasi Publik 1, Karakteristik wilayah, Indikator TPB yang belum tercapai, dan dokumen perencanaan lainnya.

BAB V: ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA BUKITTINGGI

Berisikan mengenai penilaian dan analisis capaian indikator TPB setiap organisasi perangkat daerah (OPD) serta ketercapaiannya dalam penggunaan anggaran untuk program yang berkaitan dengan TPB yang menjadi tugas, pokok dan fungsi OPD. Dalam bab ini dijabarkan capaian indikator TPB yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD; analisis capaian indikator berdasarkan DDDT dan proporsi anggaran; serta keterlibatan pihak lain dalam mendukung OPD menyelenggarakan program dan kegiatan untuk mencapai target dalam TPB.

BAB VI: ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI KLHS RPJMD

Berisikan mengenai alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari DDDT serta ketercapaian terhadap TPB. Pada bab ini terdiri dari: alternatif skenario dan rekomendasi DDDT daerah; alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan yaitu untuk indikator yang belum mencapai target RPJMD (sebelumnya), serta indikator yang belum memiliki data; alternatif skenario tanpa upaya tambahan (BAU-business as usual) yaitu untuk indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target RPJMD (sebelumnya). Rekomendasi untuk RPJMD yang didasarkan rumusan isu strategis yang disusun. Rekomendasi ditujukan untuk misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu tambahan rekomendasi yang ditujukan untuk keseluruhan dokumen RPJMD untuk beberapa bagian termasuk latar belakang, kondisi umum serta isu strategis Kota Bukittinggi.



BAB VII: PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari laporan KLHS RPJMD dengan mengidentifikasi pada hasil analisis DDDT daerah, analisis capaian daerah terhadap indikator TPB, analisis capaian OPD terhadap indikator TPB serta kesimpulan rekomendasi bagi Kota Bukittinggi.

KLHS RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030



BAB II DASAR TEORI



BAB II

DASAR TEORI

2.1 Teori Perkembangan Wilayah

Teori perkembangan wilayah adalah konsep yang berhubungan dengan cara manusia hidup dan berkembang di berbagai daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda. Perkembangan wilayah menurut Kindleberger dan Herrick, didefinisikan sebagai semua perbaikan dalam kesejahteraan materi masyarakat. Perkembangan berikatan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diantaranya melalui perubahan struktur ekonomi, misalnya dari pertanian ke industri dan selanjutnya jasa (Nurzaman, 2012). Sehingga, perkembangan ekonomi merupakan sebab dan juga akibat dari adanya perkembangan teknologi dan berdampak pada kehidupan sosial pada sisi tata ruang wilayah atau kota.

Berdasarkan ilmu geografi, terdapat beberapa teori pengembang wilayah, yang dapat digunakan sebagai acuan dan bahan analisis dalam merencanakan pengembangan wilayah di masyarakat (Ilham Mirzaya, 2023). Teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)

Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang ahli geografi asal Jerman, pada tahun 1933. Teori ini menjelaskan hubungan antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan pemukiman kecil di sekitarnya. Teori ini berpendapat bahwa tempat sentral adalah wilayah yang menyediakan barang dan jasa untuk penduduk sekitar dan juga kota. Pusat-pusat ini dapat berupa kota besar, pelabuhan, atau pusat industri. Menurut teori ini, ada dua aspek yang dilihat yaitu ambang dan jangkauan. Dimana, ambang merupakan sedikitnya jumlah orang yang dibutuhkan untuk kegiatan penyediaan dan distribusi barang serta jasa tetap berlangsung. Sedangkan, jangkauan adalah jarak tempuh yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa ini. Pusat kota ini menyediakan barang dengan mudah serta orang dapat mudah mengakses berbagai barang dan jasa tanpa menempuh perjalanan jauh.



2. Teori Sektoral

Teori sektoral dikembangkan oleh August Losch, seorang ekonom asal Jerman, pada tahun 1940. Teori ini merupakan pengembangan dari teori tempat sentral Christaller yang mempelajari faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya wilayah sentral. Sebagai contoh, wilayah yang ideal adalah wilayah yang dapat mendistribusikan barang dengan jarak minimal, namun keuntungan yang relatif sama. Teori ini menitikberatkan pada memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya transportasi.

3. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan dicetuskan oleh Francois Perroux, seorang ekonom asal Prancis, pada tahun 1950-an. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah, tetapi terpusat pada beberapa titik atau kutub pertumbuhan. Kutub pertumbuhan sendiri merupakan daerah atau kota yang memiliki industri unggulan atau strategis yang dapat menarik investasi, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya melalui efek penyebaran (*spread effect*) atau efek penularan (*trickle-down effect*). Namun, penerapan teori ini memberikan dampak buruk berupa *backwash effect* yaitu terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat di kutub perkembangan dengan masyarakat di wilayah luar kutub.

4. Teori Ekonomi Trickle Down

Teori ini dikemukakan oleh Hirschman di tahun 1959. Menurut Hirschman, setelah terjadi kutub pertumbuhan, akan terjadi pemfokusan pembangunan di beberapa industry saja. Tujuannya agar dapat mempengaruhi sektor lainnya.

Berdasarkan teori lainnya, perkembangan wilayah ilmu geografi, terdapat beberapa teori pengembangan wilayah berdasarkan waktu kondisis lainnya, seperti:

1. Teori Determinisme Lingkungan Alam



Teori ini menyatakan bahwa lingkungan alam memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Pengaruh kondisi alam tersebut dapat positif maupun negatif. Sebagai contoh, negara/wilayah dengan iklim tropis akan cocok menjadi aktivitas ekonomi pertanian, perkebunan, dan industri kayu hutan. Di sisi lain, kawasan iklim tropis kerap menemui masalah semacam banjir, longsor, dan wabah sejumlah jenis penyakit. Namun, kenyataannya ada beberapa negara yang punya kondisi lingkungan alam kurang menguntungkan dapat pula berkembang pesat.

2. Teori Determinisme Lingkungan Kebudayaan

Teori determinisme lingkungan kebudayaan atau *cultural determinism* menilai perbedaan kebudayaan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kemajuannya suatu wilayah. Teori ini memandang bahwa kemajuan pembangunan suatu wilayah dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya.

3. Teori Rostow

Teori ini dikembangkan oleh ekonom Walt Rostow. Rostow berpendapat pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai akibat munculnya perubahan yang fundamental pada aktivitas perekonomian maupun kondisi politik dan sosial suatu Masyarakat. Teori ini menggambarkan lima tahap perkembangan ekonomi suatu negara, yaitu: masyarakat tradisional, pra-kondisi untuk pertumbuhan, pertumbuhan yang cepat, masa konsumsi massa, dan era kebangkitan konsumsi tinggi.

4. Teori Toffler

Teori ini dikemukakan oleh Alvin Toffler, teori ini berbicara tentang perubahan sosial dan dampaknya pada wilayah. Toffler mengidentifikasi tiga gelombang perubahan: agraris, industri, dan informasi. Perkembangan wilayah menurut teori ini dipengaruhi oleh adaptasi terhadap perubahan, termasuk teknologi dan gaya hidup. Pada tahapan peradaban pertanian banyaknya masyarakat yang masih melakukan aktivitas cocok tanam atau pertanian untuk kebutuhan sendiri. Masyarakatnya juga memiliki banyak keluarga besar yang punya anggota



banyak dan saling berhubungan akrab. Sementara itu, tingkat ketergantungan antar-wilayah masih kecil. Sebab, banyak wilayah mampu menyediakan sendiri barang kebutuhan masyarakatnya.

Pada Peradaban Industri, masyarakat mulai bergantung pada Industri, baik untuk sarana pemenuhan kebutuhan maupun sumber pendapatan ekonomi. Selain peranan pasar menjadi vital, proses produksi barang juga telah menggunakan mesin dan dilakukan dalam skala besar. Pendidikan serta media massa memegang peranan penting. Selain itu, ada kecenderungan manusia mendominasi alam, pemborosan bahan baku dan energi.

Pada Peradaban Informasi, masyarakat sudah banyak menggunakan energi yang dapat diperbaharui (renewable energy). Dalam produksi, industri juga sudah semakin maju karena tidak mengandalkan tangan dan mesin biasa, melainkan sudah meningkat ke level selanjutnya. Sebagai contoh, penggunaan teknologi biologi, kimia, digital dan lain sebagainya, semakin marak di industri. Namun, ketergantungan antar-wilayah sangat tinggi dan bahkan bersifat menyeluruh.

5. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan wilayah (dependency theory) yang dipengaruhi oleh pemikiran marxis, neo marxis, dan non marxis, memuat pemahaman bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang tidak terjadi karena faktor dari internal. Penyebab utamanya adalah karena negara-negara bekas jajahan terpaksa bergabung dengan sistem ekonomi kapitalis global yang didominasi oleh negara-negara maju. Dalam praktiknya, menurut pemahaman para ilmuwan pendukung teori ketergantungan, negara-negara berkembang hanya berfungsi sebagai penyedia bahan mentah untuk industri negara-negara pusat (negara kaya). Negara yang berkembang juga menjadi pasar yang menyerap produk-produk hasil industri negara-negara maju.



2.2 Sejarah Perkembangan Wilayah Perencanaan

Bukittinggi merupakan kota berbukit dengan pemandangan alam yang indah, dikelilingi oleh tiga barisan pegunungan Merapi, Singgalang dan Sagu di Sumatera Barat bagian tengah, dengan ketinggian antara 909 M dan 941 M. Ini juga merupakan iklim udara yang sejuk. Letaknya yang strategis merupakan segitiga yang memotong Sumatera bagian utara, timur dan selatan. Dilihat dari kondisi alam dan geografis Kota Bukittinggi sendiri, Kota Bukittinggi yang memiliki potensi besar diperuntukkan sebagai industri pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa. Kota Bukittinggi memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah yang sangat dikenal baik di tingkat provinsi bahkan hingga ke pelosok tanah air.

Berdasarkan sejarah yang ada, Bukittinggi semasa pemerintahan Belanda dahulu selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan, dari apa yang dinamakan Gemetelyk Resort berdasarkan Stbl tahun 1828. Belanda telah mendirikan kubu pertahanannya tahun 1825, yang sampai sekarang kubu pertahanan tersebut masih dikenal dengan Benteng " Fort De Kock ". Kota ini telah digunakan juga oleh Belanda sebagai tempat peristirahatan opsir-opsir yang berada di wilayah jajahannya di timur ini. Oleh pemerintah Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintah militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand karena disini berkedudukan komandan Militer ke 25. Pada masa ini Bukittinggi berganti nama dari Taddsgemente Fort de Kock menjadi Bukittinggi SiYaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari Sianok, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu taba dan Bukit Batabuah yang sekarang kesemuanya itu kini berada dalam daerah Kabupaten Agam, di kota ini pulalah. Pemerintah bala tentara Jepang mendirikan pemancar radio terbesar untuk pulau Sumatera dalam rangka mengobarkan semangat rakyat untuk menunjang kepentingan perang Asia Timur Raya versi Jepang.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan. Dari bulan Desember 1948 sampai dengan bulan Juni 1949 ditunjuk sebagai ibu kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya, Bukittinggi pernah menjadi Ibukota Provinsi Sumatera dengan Gubernurnya Mr.



Tengku Muhammad Hasan. Kemudian, dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1959 Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan-keresidenan Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang sekarang masing-masing keresidenan itu telah menjadi Propinsi-propinsi sendiri. Setelah keresidenan Sumatera Barat dikembangkan menjadi Propinsi Sumatera Barat, maka Bukittinggi ditunjuk sebagai ibu kota Propinsinya. Semenjak tahun 1958 secara defacto Ibukota Propinsi telah pindah ke Padang, namun pada tahun 1978 secara de jure barulah Bukittinggi tidak lagi menjadi Ibukota Propinsi Sumatera Barat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1979 yang memindahkan ibukota Propinsi Sumatera Barat ke Padang. Sekarang ini Bukittinggi berstatus sebagai kota madya daerah tingkat II sesuai dengan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok Pemerintah di Daerah yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi Kota Bukittinggi.

Berdasarkan beberapa teori pengembangan wilayah, perkembangan Kota Bukittinggi melibatkan beberapa faktor seperti geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Secara geografis, Kota Bukittinggi terletak di dataran tinggi dengan iklim sejuk, yang mempengaruhi pola pemukiman dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal ini, dapat dikategorikan bahwa perkembangan wilayah Kota Bukittinggi adalah berdasarkan Teori Determinisasi Lingkungan Alam.

Perkembangan Kota Bukittinggi juga dapat dikategorikan sebagai Teori Perkembangan Rostow, dimana pertumbuhan ekonomi terjadi sebagai akibat munculnya perubahan yang fundamental pada aktivitas perekonomian maupun kondisi politik dan sosial suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan memainkan peran penting dalam perkembangan Kota Bukittinggi, yang awalnya merupakan pasar dan pusat perdagangan bagi masyarakat sekitar, dan kemudian berkembang menjadi pusat pariwisata, dan pusat usaha berbasis rakyat.

Selama masa kolonial Belanda, Kota Bukittinggi, mengalami berbagai perkembangan ekonomi yang signifikan. Perkembangan ini didorong oleh kebijakan kolonial Belanda yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi. Pada saat ini pemerintah Belanda juga mendirikan benteng militer Fort de Kock sebagai pusat



administratif dan militer. Belanda juga membangun jaringan jalan yang menghubungkan Bukittinggi dengan daerah lain di Sumatera Barat, termasuk jalur transportasi menuju pelabuhan-pelabuhan penting seperti Padang.

Keberadaan dan masuknya Jepang membawa dampak yang sangat negatif terhadap perkembangan ekonomi Kota Bukittinggi. Kebijakan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja, serta prioritas pada kebutuhan perang, menyebabkan penurunan kesejahteraan dan kemerosotan ekonomi lokal. Infrastruktur yang dibangun lebih berfokus pada kebutuhan militer dan tidak banyak mendukung perkembangan ekonomi jangka panjang.

Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Bukittinggi sempat menjadi pusat Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (PDRI), dan pada saat ini mulai diperbaiki kembali infrastruktur yang rusak akibat perang. Kemudian, sampai saat ini pembangunan jalan, fasilitas Kesehatan, dan peningkatan infrastruktur pariwisata terus ditingkatkan dan mendorong pengembangan industry kecil dan menengah serta perdagangan untuk tumbuh di Kota Bukittinggi.

2.3 Rencana Pengembangan Wilayah

Rencana pengembangan wilayah Kota Bukittinggi sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi (RTRW) Kota Bukittinggi meliputi beberapa arah strategi Pembangunan, yaitu:

1. Strategi untuk Pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan meliputi:
 - a. Membangun pemahaman masyarakat terkait kebencanaan dan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat;
 - b. Mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi berbasis bencana;
 - c. Meningkatkan fungsi dan kualitas ruang yang antisipatif dan adaptif terhadap bencana.
2. Strategi untuk Pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi meliputi:
 - a. Mengembangkan pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi primer maupun fungsi sekunder melalui revitalisasi pusat pelayanan kota (lama) dan pembangunan pusat pelayanan kota (baru);



- b. Mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang didukung oleh pusat pelayanan lingkungan dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan Kota Bukittinggi;
 - c. Mengembangkan permukiman perkotaan secara merata sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. Mengembangkan sistem transportasi yang berjenjang menghubungkan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi.
 - e. Mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bukittinggi.
3. Strategi untuk Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang merata dan terpadu secara regional dan nasional meliputi:
- a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, dan jaringan jalur kereta api;
 - b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kota Bukittinggi;
 - c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat di Kota Bukittinggi;
 - d. Meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu;
 - e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu dengan berbasis kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.
4. Strategi peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan meliputi:
- a. Menetapkan lokasi dan kegiatan budidaya yang meliputi perkotaan, pariwisata, industri kecil, dan pertanian, sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan;



- b. Mengembangkan kegiatan perdagangan/jasa primer skala regional, nasional, dan internasional serta perdagangan/jasa sekunder skala perkotaan, kawasan, dan lingkungan secara merata;
 - c. Mengembangkan kegiatan industri kecil yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar regional, nasional, dan internasional;
 - d. Menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan permukiman serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan yang optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat;
 - e. Mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah; dan
 - f. Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan budi daya melalui penetapan peraturan zonasi, mekanisme perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
5. Strategi untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat meliputi:
- a. mengembangkan lembaga kerjasama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan utilitas umum, pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan;
 - b. meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota; dan
 - c. mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perkotaan melalui berbagai forum dan lembaga-lembaga pendukung pengembangan perkotaan.
6. Strategi untuk pengembangan sektor pariwisata Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan sektor pariwisata Kota Bukittinggi yang terintegrasi dengan obyek-obyek wisata di sekitar Kota Bukittinggi;



- b. mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Bukittinggi sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh dan kuat;
 - c. mengembangkan sektor pariwisata melalui penetapan kawasan pariwisata, koridor pariwisata dan obyek pariwisata di Kota Bukittinggi yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi dan sistem jaringan utilitas yang handal; dan
 - d. melindungi dan mengembangkan bangunan cagar budaya di Kota Bukittinggi
7. Strategi untuk peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi meliputi:
- a. Menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan perlindungan setempat dan kawasan cagar budaya;
 - b. Mempertahankan ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan;
 - c. Memperbaiki dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung; dan
 - d. Melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.
8. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- a. Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budi daya terbangun.
9. Strategi untuk pengembangan pemanfaatan ruang secara vertikal dan campuran dengan dominasi tertentu kecuali kawasan lindung, pertahanan keamanan serta pertanian lahan basah meliputi:



- a. mewujudkan beberapa kawasan kota menjadi lebih vertikal, kompak dan terkait langsung dengan jaringan transportasi dan dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial dan daya dukung lingkungan;
- b. mewujudkan pengembangan kawasan terpadu multi fungsi dalam satu kawasan; dan
- c. menciptakan keterpaduan infrastruktur perkotaan.

KLHS RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030



BAB III KONDISI UMUM DAERAH



BAB III

KONDISI UMUM DAERAH

3.1 Kondisi Geografis, Sosial, dan Ekonomi

3.1.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kota Bukittinggi adalah 2.523,90 Ha, yang merupakan 0,06% dari seluruh luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Secara administratif, Wilayah Kota Bukittinggi dikelilingi oleh Kabupaten Agam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan dan 24 (dua puluh empat) Kelurahan (Tabel 3.1). Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (48,16 % dari total luas Kota Bukittinggi). Peta administrasi Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi

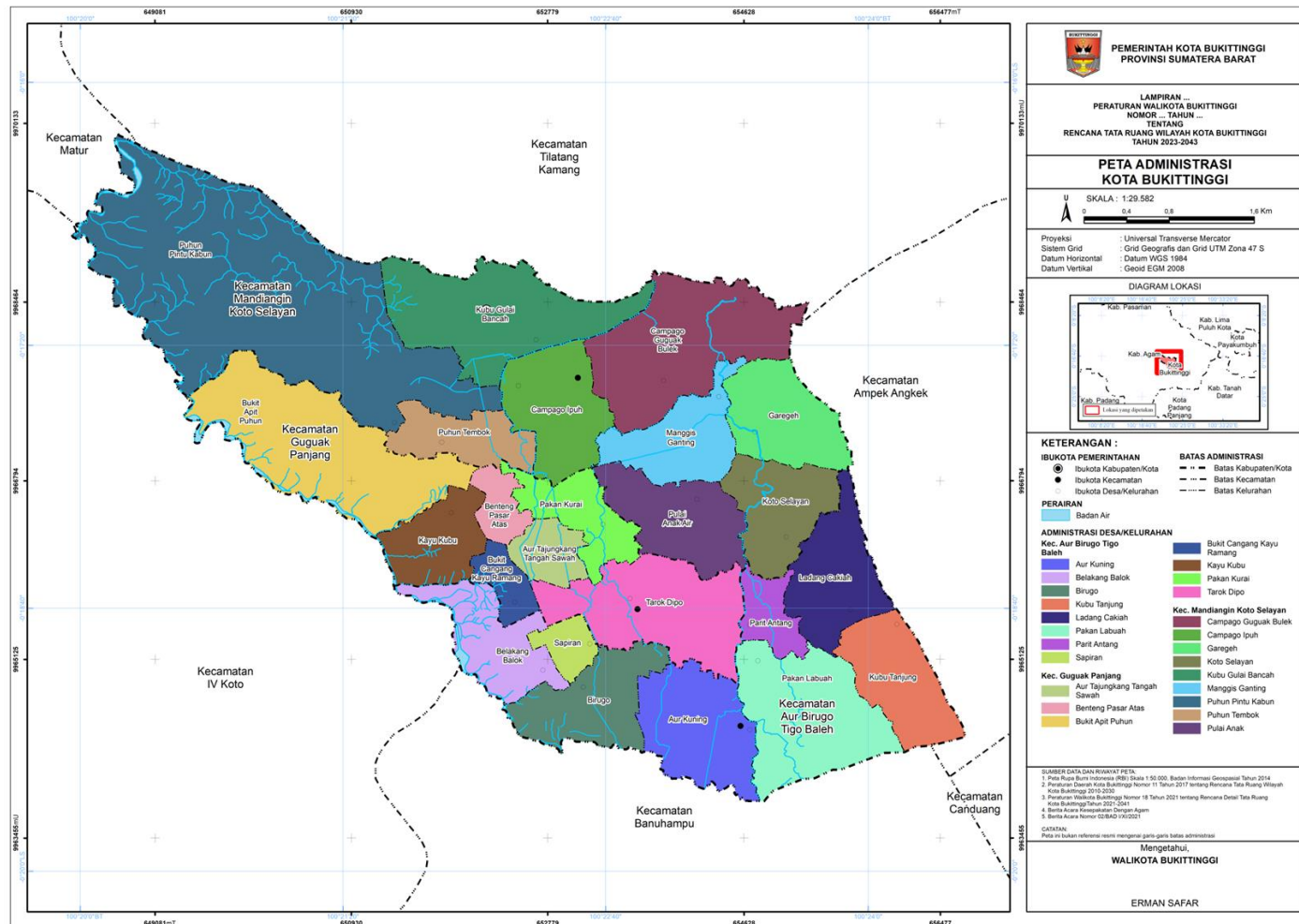
No	Kecamatan / Kelurahan	Luas dan Persentase Terhadap Kota	
		(Ha)	(%)
I	GUGUK PANJANG	683,10	27,07
1.	Bukit Cangang K. Ramang	47,00	1,86
2.	Tarok Dipo	148,00	5,86
3.	Pakan Kurai	87,00	3,45
4.	Aur Tajungkang T. Sawah	69,00	2,73
5.	Benteng Pasar Atas	56,00	2,22
6.	Kayu Kubu	91,00	3,61
7.	Bukit Apit Puhun	185,10	7,33
II	MANDIANGIN KOTO SELAYAN	1.215,60	48,16
1.	Pulai Anak Air	88,20	3,49
2.	Koto Selayan	73,00	2,89
3.	Garegeh	65,00	2,58
4.	Manggis Ginting	65,10	2,58
5.	Campago Ipuh	139,30	5,52

6.	Puhun Tembok	71,00	2,81
7.	Puhun Pintu Kabun	361,00	14,30
8.	Kubu Gulai Bancah	181,00	7,17
9.	Campago Guguk Bulek	172,00	6,81
III	AUR BIRUGO TIGO BALEH	625,20	24,77
1.	Belakang Balok	50,40	2,00
2.	Sapiran	25,70	1,02
3.	Birugo	94,00	3,72
4.	Aur Kuning	90,00	3,57
5.	Pakan Labuah	118,00	4,68
6.	Kubu Tanjung	91,10	3,61
7.	Ladang Caklah	74,00	2,93
8.	Parit Antang	82,00	3,25
TOTAL		2.523,90	100,00

Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka, 2023

Secara astronomis, Kota Bukittinggi membentang antara 100°20' - 100°25' BT dan antara 00°16' - 00° 20' LS, dengan ketinggian sekitar 780-950 meter dari permukaan laut. Secara geografis, Kota Bukittinggi berada dalam lingkup Kabupaten Agam, serta terletak pada posisi sentral dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat maupun antar provinsi terdekat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



Gambar 3.1 Peta administrasi Kota Bukittinggi



3.1.2 Karakteristik Fisik Daerah

3.1.2 1 Topografi

Kota Bukittinggi dikelilingi oleh wilayah yang memiliki kelerengan yang cukup terjal diantaranya adalah keberadaan Ngarai Sianok di batas barat kota. Kondisi ini menimbulkan beberapa resiko kebencanaan seperti terjadinya longsor atau gerakan tanah. Secara umum, kemiringan lereng (topografi) wilayah Kota Bukittinggi bervariasi antara topografi datar, berbukit-bukit dan terjal.

Wilayah terjal (kemiringan lereng >40%) berada di kawasan Ngarai Sianok, sementara itu daerah perbukitan (kemiringan lereng 16-40%) berada di kawasan Gulai Banchah, Campago Ipuh, Campago Guguk Bulek, Benteng Pasar Atas, serta Kubu Tanjung. Lahan dataran (kemiringan lereng 0-15%) terdapat sebagian besar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh bagian barat, Kecamatan Guguk Panjang bagian barat dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian tengah dan timur. Proporsi luasan lahan di Kota Bukittinggi berdasarkan klasifikasi kelerengan disajikan pada Tabel 3.2 dan peta topografi dapat dilihat Gambar 3.2.

Tabel 3.2 Proporsi Luasan Lahan di Kota Bukittinggi Berdasarkan Klasifikasi Kelerengan Lahannya

No	Lereng	Kecamatan						Jumlah (Ha)	%
		ABTB		GP		MKS			
		Ha	%	Ha	%	Ha	%		
1.	0-2%	430,22	68,81	369,77	54,313	584,27	49,06	1.384,26	54,59
2.	3-8%	88,57	14,17	96,70	14,16	71,47	5,88	256,74	9,79
3.	9-15%	25,60	4,09	52,95	7,75	180,63	14,86	259,18	10,60
4.	16-25%	9,73	1,56	23,66	3,46	94,74	7,79	128,13	5,27
5.	26-40%	4,86	0,78	29,93	4,38	73,75	6,07	108,54	4,37
6.	>40%	66,22	10,59	110,09	16,12	210,75	17,34	387,05	15,38
JUMLAH		625,20	100	683,10	100	1.215,60	100	2.523,90	100

Sumber: RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030

Berdasarkan kemampuan umum morfologinya, Kota Bukittinggi dapat dibedakan menjadi empat satuan morfologi, yaitu:

- Satuan Morfologi Dataran

Kemiringan lereng umumnya 10%, dengan ketinggian berkisar antara 865-920 mdpl. Penggunaan lahan umumnya untuk persawahan, kebun/ladang dan



permukiman, daerah ini dibentuk oleh endapan vulkanik muda berupa tufa apung.

- Satuan Morfologi Ber-relief Halus

Kemiringan lereng antara 10-15 % dengan ketinggian 850-920 mdpl, umumnya merupakan kebun/ladang belukar, permukiman dan perwasahan. Daerah ini dibentuk oleh batuan tufa apung dan sebagian oleh metamorf.

- Satuan Morfologi Ber-relief Kasar

Dibentuk oleh batuan tufa apung dengan ketinggian daerah antara 650-900 mdpl, medan cukup terjal, kemiringan lebih dari 60% satuan morfologi ini merupakan tebing Ngarai Sianok.

- Satuan Morfologi Tubuh Gunung Berapi

Kemiringan medan antara 10 -20% dengan kemiringan tempat 900 mdpl, penggunaan lahan pada satuan ini berupa semak/belukar, dan sebahagian persawahan. Daerah dengan satuan morfologi ini sangat subur, karena dibentuk oleh hasil endapan Gunung Merapi dan Gunung Singgalang berupa lava

3.1.2 2 Geologi

Kota Bukittinggi tersusun dari material padat alam, yang terdiri dari batuan dasar, tanah, dan humus. Batuan dasar di Kota Bukittinggi adalah Tufa Batu apung yang merupakan hasil dari proses kegunungapian (*volkanisme*). Tanah endapan terdapat di dasar ngarai sepanjang alur Batang Sianok, sebagai hasil erosi, transportasi dan pengendapan oleh air sungai (*aluvium*) dan oleh longsoran tebing (*koluvium*) sedangkan tanah residu (hasil pelapukan kimiawi terhadap batuan dasar) terdapat pada dataran dan lekuk perbukitan di Kota Bukittinggi (contohnya di hamparan sawah dan pemukiman).

Kawasan Bukittinggi, terletak pada suatu zona geologi yang dikenal sebagai jalur utama Sistem Sesar Sumatera yaitu pada segmen Central Barisan Fault Zone (CBFZ, Possavec et al, 1973 & Hahn & Weber, 1981). CBFZ merupakan komponen utama dari Sistem Sesar Sumatera dan kerap juga disebut sebagai "Patahan Semangko" yang membentang sepanjang tengah daratan Pulau Sumatera. Kota Bukittinggi, terletak 1.250 meter di timur dari jalur CBFZ. Untuk skala regional, jarak tersebut relatif dekat. Peta geologi dapat dilihat Gambar 3.27



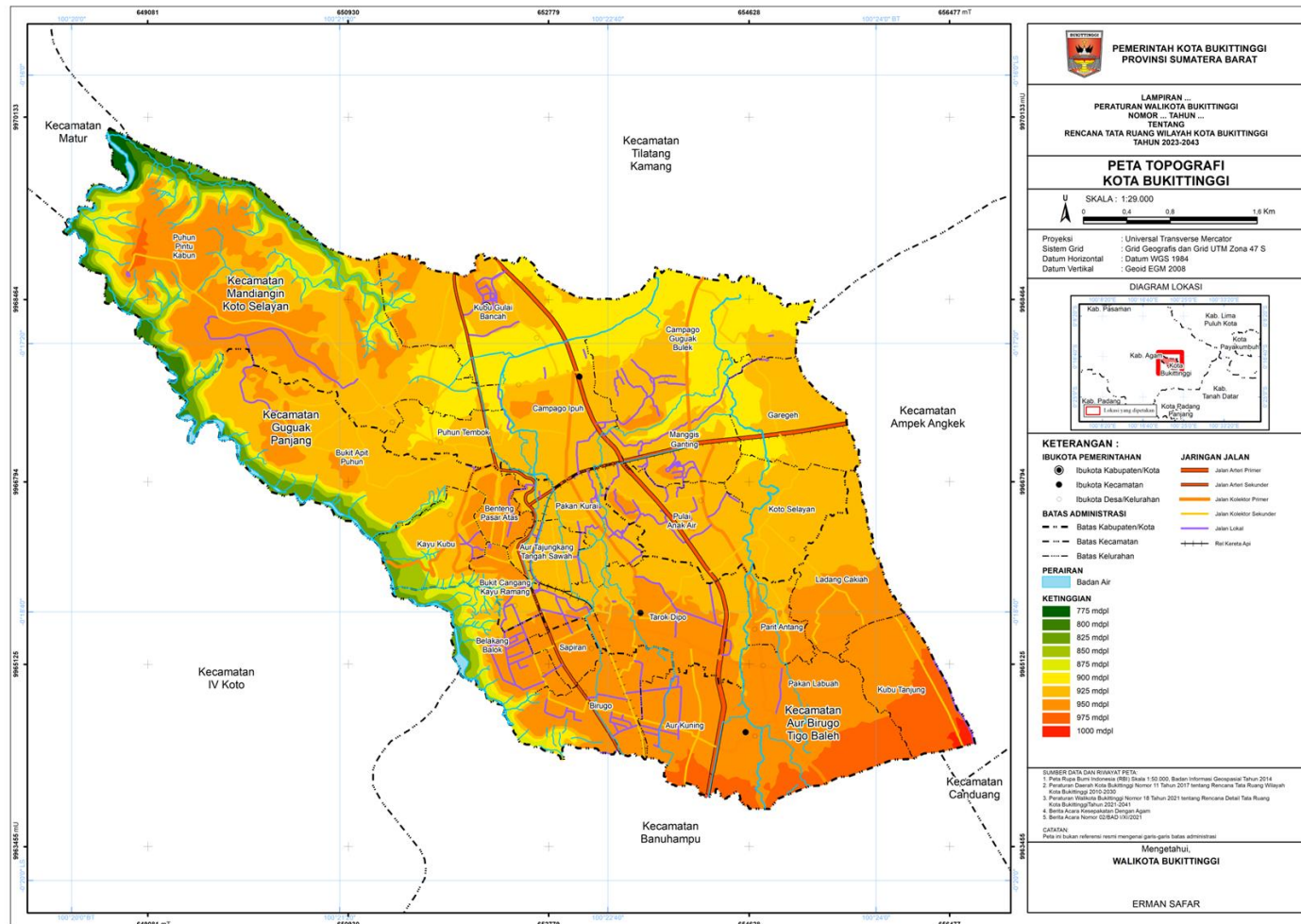
Tabel 3.3 Geologi Permukaan Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan	Geologi Permukaan	Simbol	Luas (Ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Sapiran	Lempung	Lm	23,41	0,93%
2		Belakang Balok	Lempung Lanauan	Lt	19,63	0,78%
			Tufa	Tf	30,35	1,21%
			Lempung	Lm	29,52	1,17%
3		Kubu Tanjung	Lanau Lempungan	Lnlp	85,03	3,38%
4		Ladang Cakiah	Lanau Lempungan	Lnlp	88,95	3,54%
5		Birugo	Lempung Lanauan	Lt	23,96	0,95%
			Tufa	Tf	0,21	0,01%
			Lanau Lempungan	Lnlp	51,31	2,04%
			Lempung	Lm	12,93	0,51%
6		Aur Kuning	Lempung Lanauan	Lt	11,41	0,45%
			Lanau Lempungan	Lnlp	92,93	3,70%
7		Pakan Labuah	Lanau Lempungan	Lnlp	142,48	5,67%
8		Parit Antang	Lempung Lanauan	Lt	0,50	0,02%
			Lanau Lempungan	Lnlp	31,82	1,27%
	Lempung		Lm	1,38	0,05%	
JUMLAH (Ha)					645,83	25,70%
9	Benteng Pasar Atas	Lempung Lanauan	Lt	26,63	1,06%	
		Lempung	Lm	0,11	0,00%	
10	Bukit Cangang Kayu Ramang	Lempung Lanauan	Lt	18,56	0,74%	
		Tufa	Tf	0,73	0,03%	
		Lempung	Lm	7,81	0,31%	
11	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Lempung Lanauan	Lt	5,11	0,20%	
		Lempung	Lm	29,31	1,17%	
12	Pakan Kurai	Lempung Lanauan	Lt	25,63	1,02%	
		Lempung	Lm	34,00	1,35%	
13	Kayu Kubu	Lempung Lanauan	Lt	47,63	1,90%	
		Tufa	Tf	16,53	0,66%	
14	Tarok Dipo	Lempung Lanauan	Lt	82,69	3,29%	
		Lanau Lempungan	Lnlp	16,12	0,64%	
		Lempung	Lm	40,43	1,61%	
15	Bukit Apit Puhun	Lempung Lanauan	Lt	138,90	5,53%	
		Tufa	Tf	47,55	1,89%	
		Lempung	Lm	19,54	0,78%	
JUMLAH (Ha)					557,27	22,17%
16	Mandiingin Koto Selayan	Puhun Tembok	Lempung Lanauan	Lt	30,91	1,23%
			Lempung	Lm	27,96	1,11%

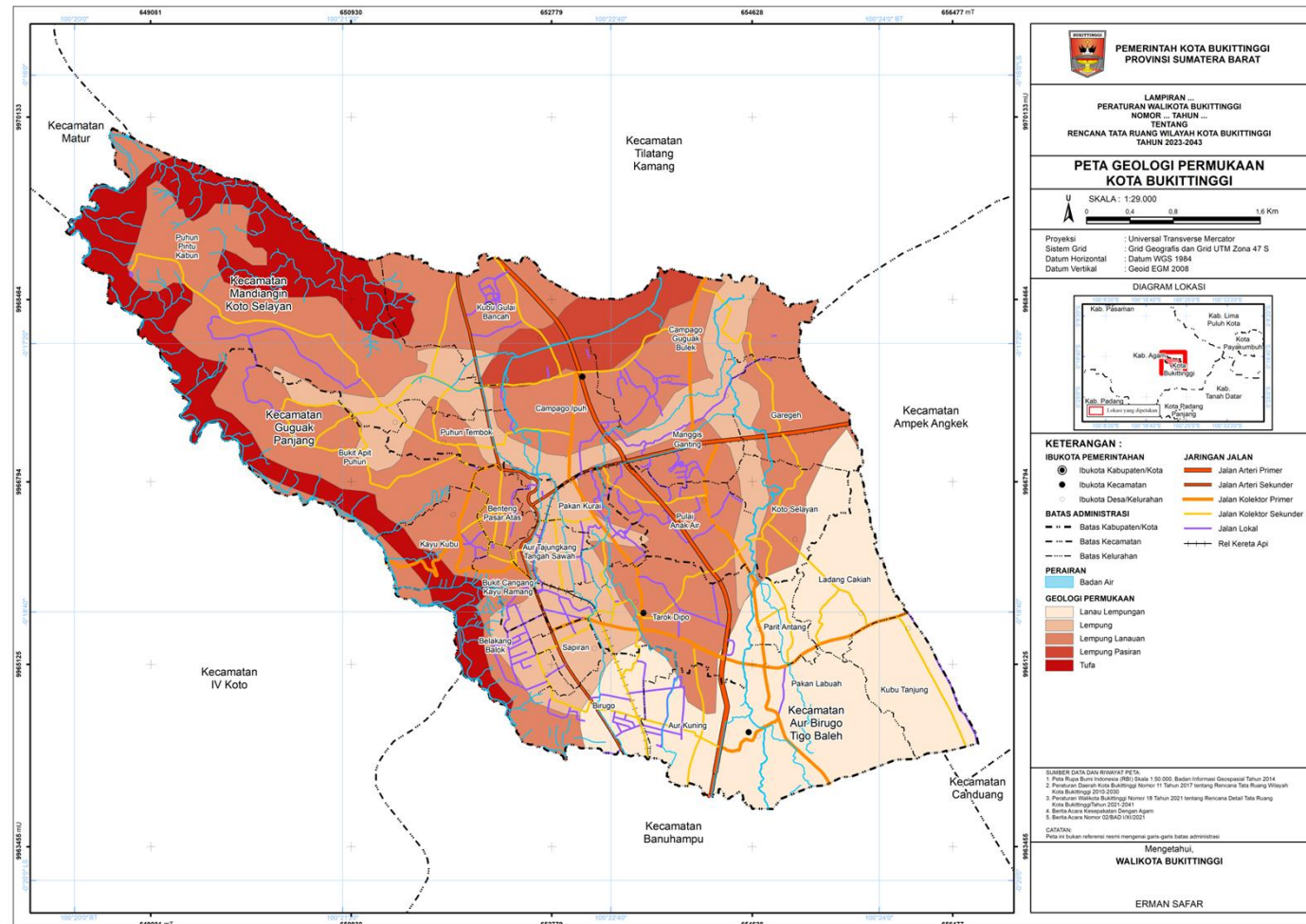


No	Kecamatan	Kelurahan	Geologi Permukaan	Simbol	Luas (Ha)	%
17		Manggis Ganting	Lempung Lanauan	Lt	42,54	1,69%
			Lempung	Lm	36,26	1,44%
18		Koto Selayan	Lempung Lanauan	Lt	41,68	1,66%
			Lanau Lempungan	Lnlp	24,38	0,97%
			Lempung	Lm	14,43	0,57%
19		Garegeh	Lempung Lanauan	Lt	65,69	2,61%
			Lanau Lempungan	Lnlp	8,97	0,36%
			Lempung	Lm	12,27	0,49%
20		Campago Ipuh	Lempung Lanauan	Lt	57,09	2,27%
			Lempung Pasiran	Lp	23,04	0,92%
			Lempung	Lm	13,63	0,54%
21		Pulai Anak Air	Lempung Lanauan	Lt	81,56	3,25%
			Lempung	Lm	9,31	0,37%
22		Campago Guguak Bulek	Lempung Lanauan	Lt	100,49	4,00%
			Lempung Pasiran	Lp	31,88	1,27%
			Lempung	Lm	37,64	1,50%
23		Puhun Pintu Kabun	Lempung Lanauan	Lt	233,34	9,28%
			Lempung Pasiran	Lp	0,37	0,01%
			Tufa	Tf	207,34	8,25%
			Lempung	Lm	48,53	1,93%
24		Kubu Gulai Bancah	Lempung Lanauan	Lt	104,13	4,14%
			Lempung Pasiran	Lp	42,08	1,67%
			Tufa	Tf	8,12	0,32%
			Lempung	Lm	6,61	0,26%
JUMLAH (Ha)					1.310,26	52,13%
TOTAL (Ha)					2.523,90	100,00%

Sumber: RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030



Gambar 3.2 **Peta Topografi Kota Bukittinggi**
Sumber: RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030



Gambar 3.3 Peta Geologi Kota Bukittinggi

Sumber: RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030



3.1.2 3 Hidrologi

Kota Bukittinggi termasuk ke dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Indragiri dan DAS Masang Pasaman. Sebagian besar wilayah Kota Bukittinggi termasuk dalam DAS Indragiri, yaitu mencapai 64,41 % (1639,84 Ha) dari luas wilayah Kota Bukittinggi sebesar 2523,90 Ha, seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	DAS Indragiri	DAS Masang Pasaman	Luas (Ha)
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Aur Kuning	101,76	2,55	104,31
	Belakang Balok	-	78,75	78,75
	Birugo	19,97	68,17	88,14
	Kubu Tanjung	84,22	-	84,22
	Ladang Cakiah	87,83	-	87,83
	Pakan Labuah	142,86	-	142,86
	Parit Antang	34,08	-	34,08
	Sapiran	3,19	20,21	23,4
Kecamatan Guguak Panjang	ATTS	64,94	9,62	34,41
	Benteng Pasar Atas	13,25	13,44	74,56
	Bukit Apit Puhun	68,39	135,42	203,81
	Bukit Cangang Kayu Ramang	-	27,1	27,1
	Kayu Kubu	0,49	63,44	63,93
	Pakan Kurai	59,62		59,62
	Tarok Dipo	130,94	8,28	139,22
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Campago Guguak Bulek	153,81	-	153,81
	Campago Ipuh	93,74	-	93,74
	Garegeh	85,98	-	85,98
	Koto Selayan	80,49	-	80,49
	Kubu Gulai Bancah	119,39	38,2	157,59
	Manggis Ganting	78,78	-	78,78
	Puhun Pintu Kabun	66,4	418,88	485,28
	Puhun Tembok	58,86	-	58,86
	Pulai Anak Air	90,85	-	90,85



Kecamatan	Kelurahan	DAS Indragiri	DAS Masang Pasaman	Luas (Ha)
Total		1639,84	884,06	2523,90

Sumber : RDTR Kota Bukittinggi, 2017

Secara umum Kota Bukittinggi dilalui oleh 3 sungai besar dan anak sungai-sungai kecil. Ketiga sungai besar tersebut adalah Batang Tambuo, Batang Sianok dan Batang Agam. Batang Agam, merupakan sungai dengan kapasitas debit air potensial yang telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air. Cakupan wilayah administratif kota Bukittinggi yang dilalui oleh ketiga sungai besar tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Sungai/Batang air yang melintasi Kota Bukittinggi

No	Nama Sungai / Batang	Lebar (m)	Kecamatan Yang Dilalui
1.	Batang Tambuo	7	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Mandiangin Koto Selayan
2.	Batang Masang	12	<ul style="list-style-type: none"> • Aur Birugo Tigo Baleh • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan
3.	Batang Agam	6	<ul style="list-style-type: none"> • Guguk Panjang • Mandiangin Koto Selayan

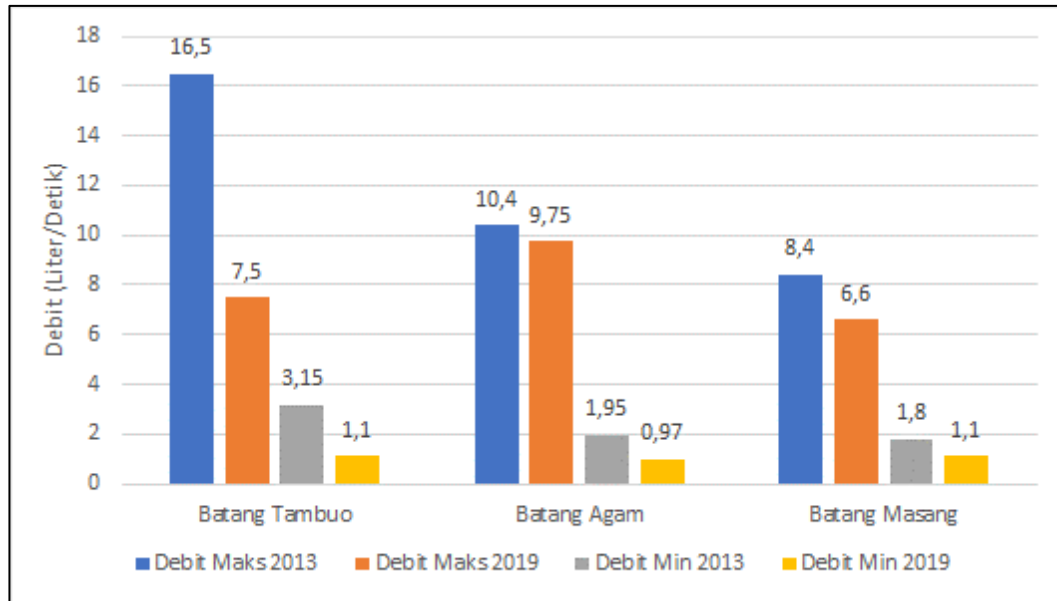
Sumber : RDTR Kota Bukittinggi, 2017

Berdasarkan perbandingan data debit sungai-sungai di Kota Bukittinggi pada tahun 2013 dan 2019 (Gambar 3.4), terdapat penurunan debit maksimal rata-rata 27% dan 51% untuk debit minimum. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi penurunan debit aliran sungai ini adalah;

- Karakteristik hujan, seperti intensitas hujan, lama hujan, dll.
- Karakteristik daerah aliran sungai, seperti jenis tanah, tutupan lahan, topografi, dll

Selain penurunan debit, kualitas sumber air seperti air sungai, air embung, air tanah/sumur masih menjadi permasalahan dan isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kota Bukittinggi. Setiap tahunnya cenderung terjadi penurunan kualitas air yang disebabkan oleh:

- Keterbatasan sarana pengolahan limbah domestik,
- Ketidapatuhan usaha/kegiatan terhadap peraturan pembuangan air limbah.
- Belum terolahnya air limbah peternakan, serta
- Pembuangan sampah ke sungai



Gambar 3.4 Perbandingan Debit Sungai Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari SLHD dan DIKPLH Kota Bukittinggi tahun 2014 dan 2020

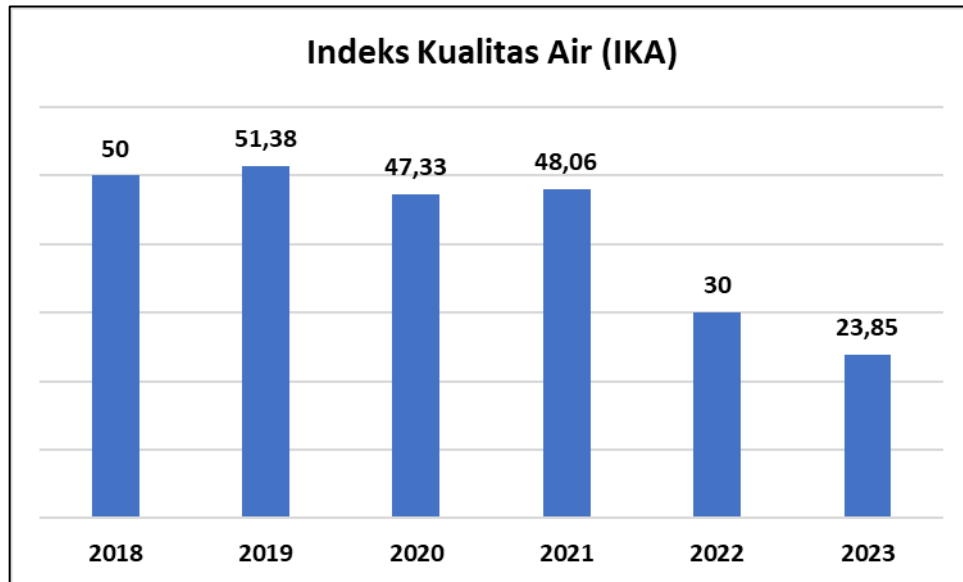
Indeks kualitas air (IKA) menggambarkan kualitas badan air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa nilai 8 parameter kualitas air (DO, COD, TSS, BOD, E Coli, Total Coliform, Total Phosphat) yang diukur pada 3 sungai besar di Kota Bukittinggi. IKA digunakan untuk menyederhanakan data kualitas air yang kompleks dalam satu informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk pengambil kebijakan dalam analisis lingkungan. Secara umum trend IKA Kota Bukittinggi cenderung fluktuatif bahkan IKA pada tahun 2022 mempunyai nilai terendah sejak 6 tahun lalu, seperti terlihat pada Gambar 3.5. Nilai IKA 0-44 termasuk pada kategori jelek, artinya kualitas air hampir selalu buruk, terancam dan tidak memenuhi standar.

Berdasarkan pengukuran parameter *Total Suspended Solid* (TSS) yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tahun 2022, tidak terdapat konsentrasi TSS yang melebihi baku mutu air kelas 1 dan kelas 2 pada Lampiran VI Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada sungai-sungai yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi, baik pada bagian hulu maupun hilir.

Dibandingkan dengan data tahun 2019 di mana pada hulu dan hilir Batang Masang terdapat konsentrasi TSS yang melebihi baku mutu kelas 1 dan kelas 2 (lihat Gambar 3.6). Pengukuran pada hulu Batang Masang (yang berada pada

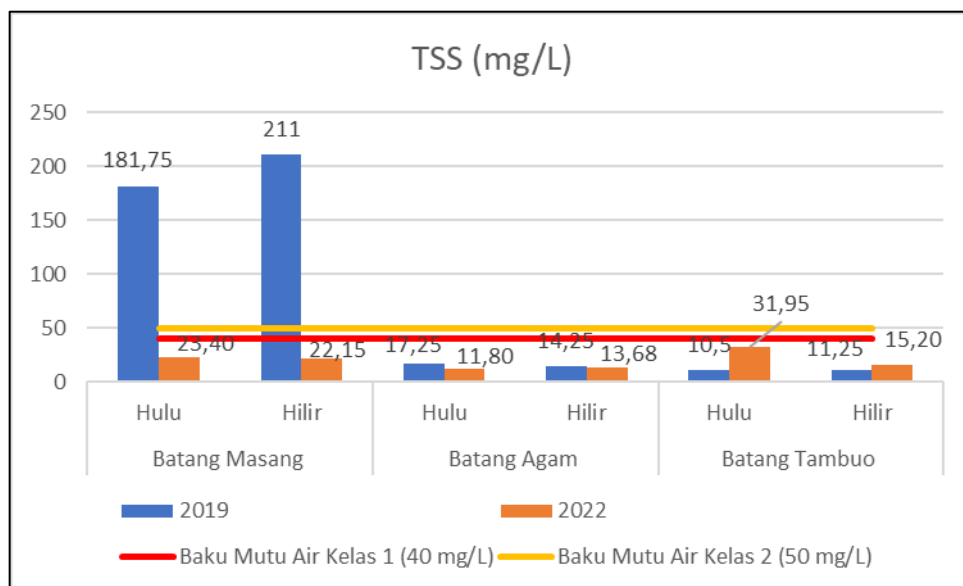


wilayah administrasi Kota Bukittinggi) sudah menunjukkan konsentrasi TSS yang cukup tinggi (181,75 mg/L), hal ini mengindikasikan tingginya konsentrasi TSS ini terjadi lintas Kabupaten/Kota. Salah satu penyebab tingginya padatan terbawa pada aliran sungai adalah karena perubahan tutupan lahan bervegetasi sehingga terjadi erosi tanah melalui aliran air.



Gambar 3.5 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Bukittinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023



Gambar 3.6 Perbandingan TSS Sungai Kota Bukittinggi

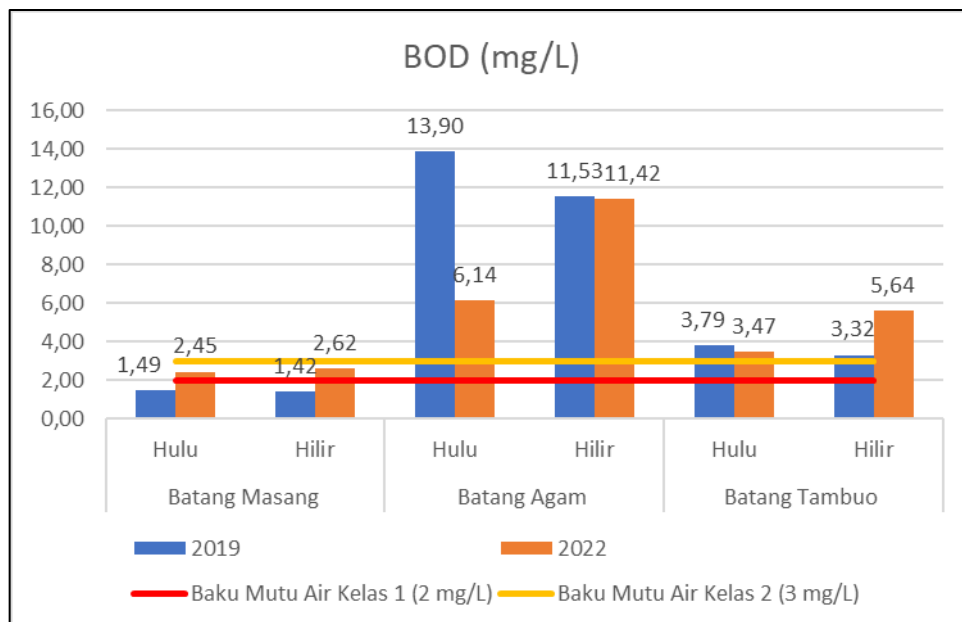
Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020 dan 2023

Secara umum parameter *Biological Oxygen Demand* (BOD) pada semua sungai di Kota Bukittinggi melebihi batu mutu baik tahun 2022 maupun tahun 2019 (kecuali di hulu dan hilir Batang Masang pada tahun 2019). Konsentrasi BOD yang



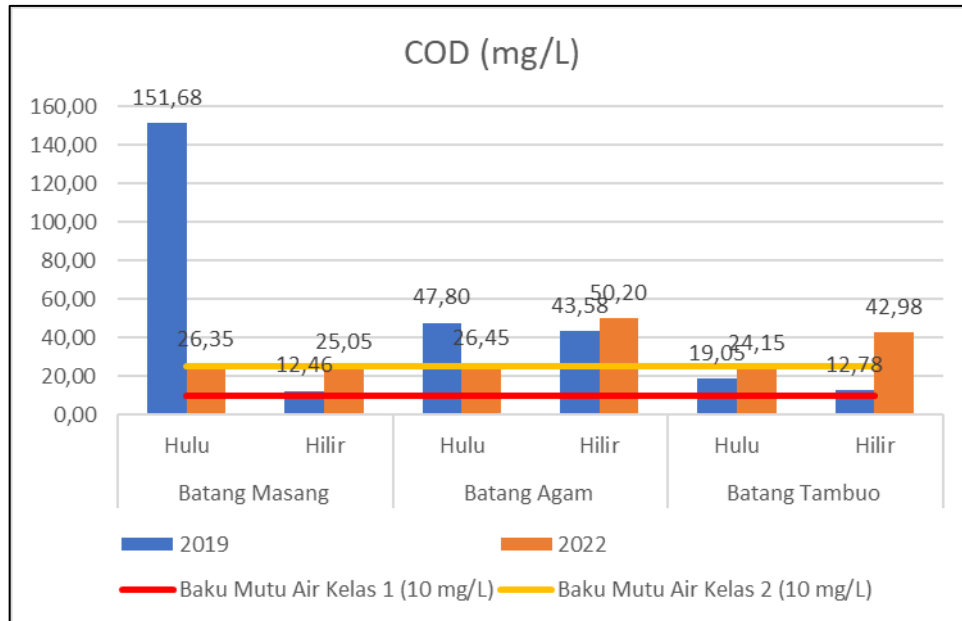
cukup tinggi terdapat pada Sungai Batang Agam dibandingkan dengan sungai lainnya (lihat Gambar 3.7).

Hal ini mengindikasikan tingginya tekanan pencemaran di Batang Agam dibandingkan dengan sungai lainnya di Kota Bukittinggi. Sumber pencemaran ini dapat berasal dari kegiatan domestik dan komersial yang mengalirkan saluran pembuangan air limbahnya ke sungai. Semakin tinggi BOD mengindikasikan bahwa semakin banyak bakteri pada badan air tersebut sehingga semakin rendah kualitas air pada badan air tersebut. Selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit diurai yang ada di perairan. Seiring dengan BOD, semua sungai di Kota Bukittinggi melebihi batu mutu kelas 1 dan 2 untuk parameter COD baik tahun 2022 maupun tahun 2019. Hal ini diperkirakan disebabkan karena tingginya limbah yang dibuang ke sungai baik oleh aktivitas domestik (rumah tangga) maupun komersial (restoran, rumah makan dll) sehingga menyebabkan peningkatan kandungan bahan organik pada sungai. Oleh karena itu secara kualitas, ketiga sungai ini tidak memenuhi syarat sebagai sumber air baku air minum, baik oleh masyarakat maupun PDAM. Perbandingan konsentrasi COD sungai Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 3.8.



Gambar 3.7 Perbandingan BOD Sungai Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020 dan 2023



Gambar 3.8 Perbandingan COD Sungai Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020 dan 2023

Selain sungai, Kota Bukittinggi memiliki 5 embung dengan total luas diperkirakan 0,86 Ha dengan total potensi volume air mencapai 5.700 m³. Semua embung ini dimanfaatkan untuk irigasi kegiatan pertanian. Kondisi embung di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Kondisi Embung Kota Bukittinggi

No.	Nama Embung	Luas (Ha)	Volume (m3)	Pemanfaatan
1	Embung Koto Selayan	0,05	500	Irigasi Kegiatan Pertanian
2	Embuang Lubuak Suduik	0,10	1000	Irigasi Kegiatan Pertanian
3	Embung Lubuak Anak Limau	0,25	2500	Irigasi Kegiatan Pertanian
4	Embung Lubuak Karambia	0,11	1100	Irigasi Kegiatan Pertanian
5	Embung Pakan labuah	0,35	600	Irigasi Kegiatan Pertanian

Sumber: DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Kualitas beberapa embung dapat dilihat pada Tabel 3.7, Tabel 3.8 dan Tabel 3.9. Secara umum terjadi perbaikan kualitas embung dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dievaluasi menggunakan baku mutu air kelas II pada Lampiran VI PP No 21 Tahun 2021, terdapat beberapa parameter yang melebihi



baku mutu diantaranya konsentrasi oksigen terlarut, klorin bebas, fenol, minyak dan lemak serta *Total* dan *Fecal coliform*.

Tabel 3.7 Perbandingan Kualitas Air Embung Lubuak Suduik Kota Bukittinggi 6 (enam) Tahun Terakhir

No	Parameter	Baku Mutu Kelas II	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Temperatur (°C)	Dev 3	25,5	27,7	26,2	25,5	24,3	24,2
2	Residu Terlarut (mg/L)	1000	113,2	126,6	136	134	120	75
3	Residu Tersuspensi (mg/L)	25	43	65	78	30	2	14,4
4	pH	6-9	7,33	tad	7,49	7,3	7,21	7,26
5	DHL		225,6	250,4	225	254	250	232
6	TDS (mg/L)	1000	113,2	126,6	136	134	120	75
7	TSS (mg/L)	50	43	65	78	30	2	14,4
8	DO (mg/L)	4	6,02	8	7,62	7,45	6,82	4,09
9	BOD (mg/L)	3	1,28	6,43	6,53	2,71	2,29	2,46
10	COD (mg/L)	25	6,02	59,6	50,1	<9.91	13,4	16,3
11	NO ₂ (mg/L)		<0,002	0,047	0,282	0,028	0,002	0,019
12	NO ₃ (mg/L)		0,473	1.605	1,02	1,84	1,66	0,221
13	NH ₃ (mg/L)		0,063	0,039	1,14	0,027	<0,012	0,1
14	Klorin bebas (mg/L)	0,03	0,2	0,08	0,092	<0.02	<0,03	0,07
15	T-P (mg/L)	0,03	0,071	0,015	tad	tad	tad	tad
16	Fenol (µg/L)	0,005	<0,002	0,008	<0,0009	0,039	0,019	<0.001
17	Minyak dan Lemak (µg/L)	1	<0,1	<0,1	<0,345	<0,345	<0.345	3,23
18	Detergen (µg/L)	0,2	<0,01	0,117	0,079	<0.01	<0,010	0,13
19	Fecal coliform (jmlh/ 100 ml)	1000	1800	300	500	<100	200	13000
20	Total coliform (jmlh/ 100 ml)	5000	12500	200	1800	12900	1300	35000
21	Sianida (mg/L)	0,02	<0,002	0,002	<0,002	<0.01	<0.020	<0.002
22	H ₂ S (mg/L)		0,036	0,015	0,032	0,032	0,015	0,008

Sumber: DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Tabel 3.8 Perbandingan Kualitas Air Embung Anak Limau Kota Bukittinggi 4(empat) Tahun Terakhir

No	Parameter	Baku Mutu Kelas II	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
1	Temperatur (°C)	Dev 3	26,1	25	25,3	21,5
2	Residu Terlarut (mg/L)	1000	124	138	95,7	42
3	Residu Tersuspensi (mg/L)	25	9	14	5	3,6



No	Parameter	Baku Mutu Kelas II	Tahun			
			2019	2020	2021	2022
4	pH	6-9	7,8	7,09	6,58	7,13
5	DHL		204	261	199	255
6	TDS (mg/L)	1000	124	138	95,7	42
7	TSS (mg/L)	50	9	14	5	3,6
8	DO (mg/L)	4	6,89	7,45	6,77	7,61
9	BOD (mg/L)	3	2,9	2,03	3,03	2,56
10	COD (mg/L)	25	13	<9.91	<9,91	25,1
11	NO2 (mg/L)		0,252	0,005	0,008	0,011
12	NO3 (mg/L)		0,041	0,449	0,073	0,567
13	NH3 (mg/L)		0,114	0,032	0,029	0,077
14	Klorin bebas (mg/L)	0,03	0,097	<0.02	0,28	0,05
15	T-P (mg/L)	0,03	tad	tad	tad	tad
16	Fenol (µg/L)	0,005	<0,0009	0,007	0,019	0,118
17	Minyak dan Lemak (µg/L)	1	<0,345	<0.345	<0,345	7,47
18	Detergen (µg/L)	0,2	0,094	<0.01	<0,010	0,074
19	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	1000	100	200	6000	4000
20	Total coliform (jmlh/100 ml)	5000	800	15400	18800	33000
21	Sianida (mg/L)	0,02	<0,002	<0.01	<0,020	<0.002
22	H2S (mg/L)		0,018	0,015	<0,002	0,019

Sumber: DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Tabel 3.9 Perbandingan Kualitas Air Embung Tabek Gadang di Kota Bukittinggi 3(tiga) Tahun Terakhir

No	Parameter	Baku Mutu Kelas II	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Temperatur (°C)	Dev 3	25	25,3	22,05
2	Residu Terlarut (mg/ L)	1000	140	121	154
3	Residu Tersuspensi (mg/L)	25	17	10,5	36,1
4	pH	6-9	7,57	6,37	7,49
5	DHL		263	251	298
6	TDS (mg/L)	1000	140	121	154
7	TSS (mg/L)	50	17	10,5	36,1
8	DO (mg/L)	4	7,45	6,26	6,22
9	BOD (mg/L)	3	2,37	2,2	1,41
10	COD (mg/L)	25	<9.91	84,9	21,4
11	NO2 (mg/L)		0,006	0,01	0,04
12	NO3 (mg/L)		1,57	0,079	0,313
13	NH3 (mg/L)		0,061	<0,012	0,385
14	Klorin bebas (mg/L)	0,03	<0.02	0,15	0,05
15	T-P (mg/L)	0,03	tad	tad	tad
16	Fenol (µg/L)	0,005	0,038	0,017	0,109



No	Parameter	Baku Mutu Kelas II	Tahun		
			2020	2021	2022
17	Minyak dan Lemak ($\mu\text{g/L}$)	1	<0.345	0,017	12
18	Detergen ($\mu\text{g/L}$)	0,2	<0.010	<0,010	0,087
19	Fecal coliform (jmlh/ 100 ml)	1000	2900	6000	7800
20	Total coliform (jmlh/ 100 ml)	5000	15100	18800	130000
21	Sianida (mg/L)	0,02	<0.010	<0.020	<0.002
22	H ₂ S (mg/L)		0,018	<0,002	<0,002

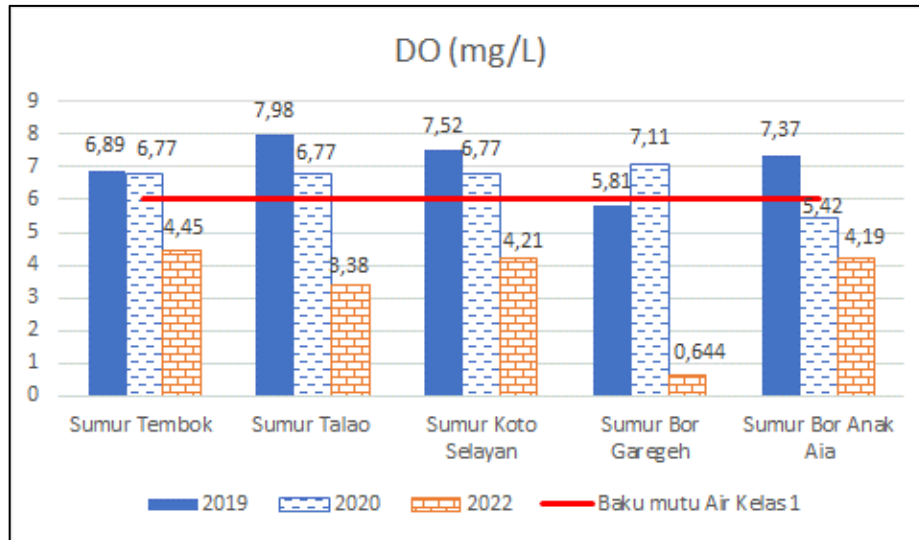
Sumber: DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Air tanah menjadi salah satu sumber air minum masyarakat Kota Bukittinggi. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Provinsi Sumatera Barat (2022), lebih kurang 16, 79% masyarakat Kota Bukittinggi memanfaatkan air tanah sebagai sumber air minum. Secara umum terdapat perbaikan kualitas air sumur di Kota Bukittinggi seperti terlihat pada Gambar 3.9 sd Gambar 3.13.

Dissolved Oxygen (DO) atau oksigen terlarut merupakan kandungan oksigen yang terkandung dalam air. Baku mutu air kelas I untuk DO adalah 6 mg/L. Semakin rendah nilai parameter DO, maka kualitas air tersebut semakin buruk. Pada tahun 2022, parameter DO di semua sumur yang dilakukan pemantauan berada di bawah baku mutu. Sehingga kualitas air sumur ini sebagai sumber air minum, perlu mendapat perhatian khusus. Namun karena praktek penggunaan air tanah sebagai air minum selalu didahului dengan pemanasan air hingga mendidih, penurunan nilai DO ini masih dalam kategori yang masih wajar dan aman.

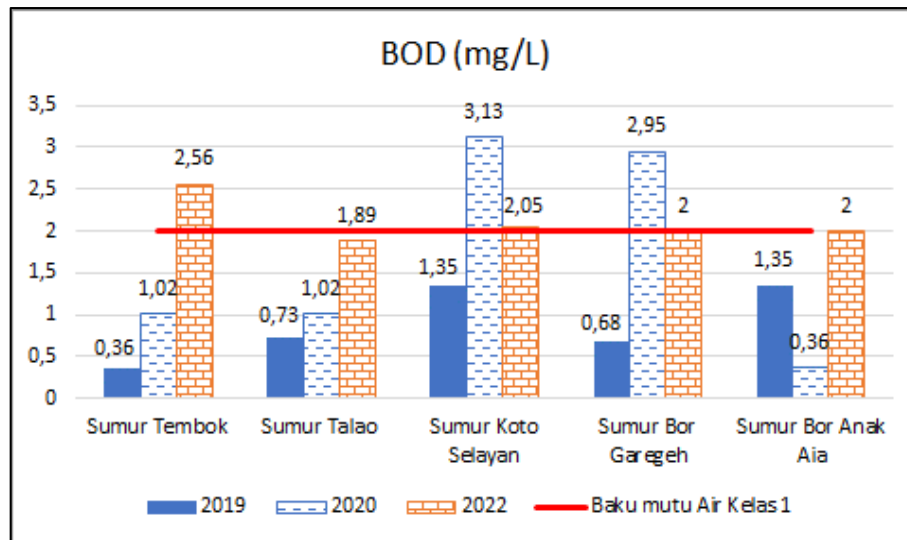
Untuk parameter BOD pada semua air sumur yang dipantau pada tahun 2022 rata-rata sudah memenuhi baku mutu air kelas 1, kecuali konsentrasi BOD pada air sumur Tembok yang sedikit melebihi baku mutu. Perbaikan kualitas sanitasi masyarakat dapat berdampak positif terhadap konsentrasi BOD pada air sumur.

Parameter Fosfat masih memenuhi baku mutu, kecuali pada air tanah pada sumur bor Garegeh. Fosfat adalah bentuk fosfor yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan dan merupakan unsur esensial bagi tumbuhan tingkat tinggi dan alga. Fosfat pada badan air dapat berasal dari limbah pupuk dan pestisida, limbah rumah tangga seperti deterjen berbahan fosfor serta limbah industri.



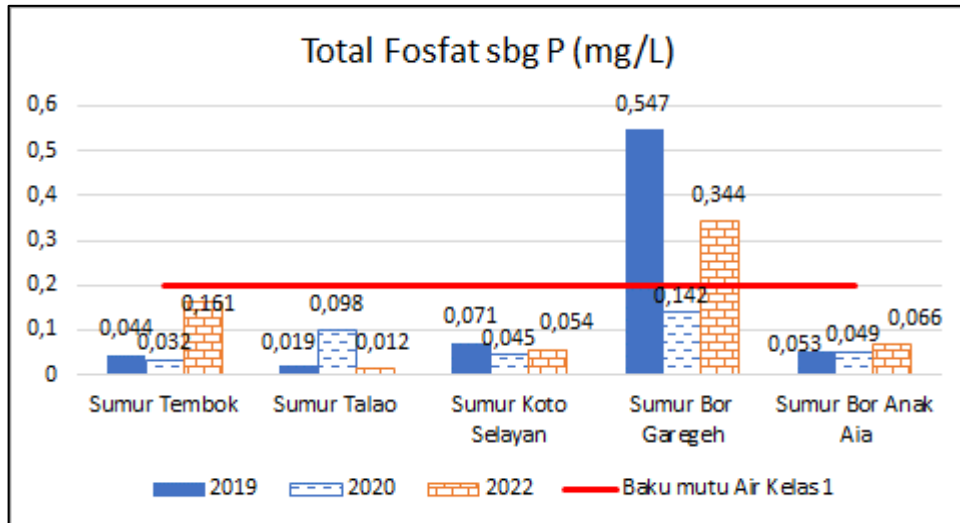
Gambar 3.9 Perbandingan DO Air Sumur Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020, 2021 dan 2023



Gambar 3.10 Perbandingan BOD Air Sumur Kota Bukittinggi

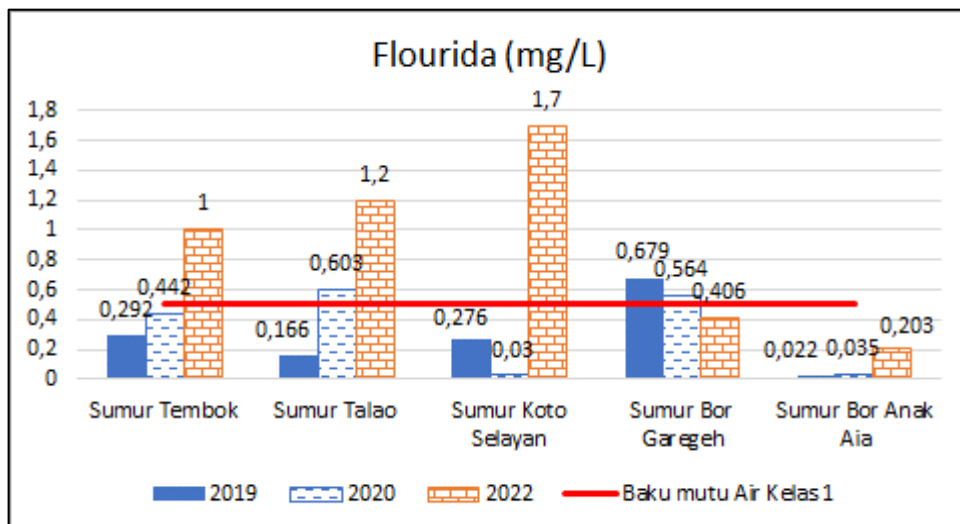
Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020, 2021 dan 2023



Gambar 3.11 Perbandingan Total Fosfat Air Sumur Kota Bukittinggi

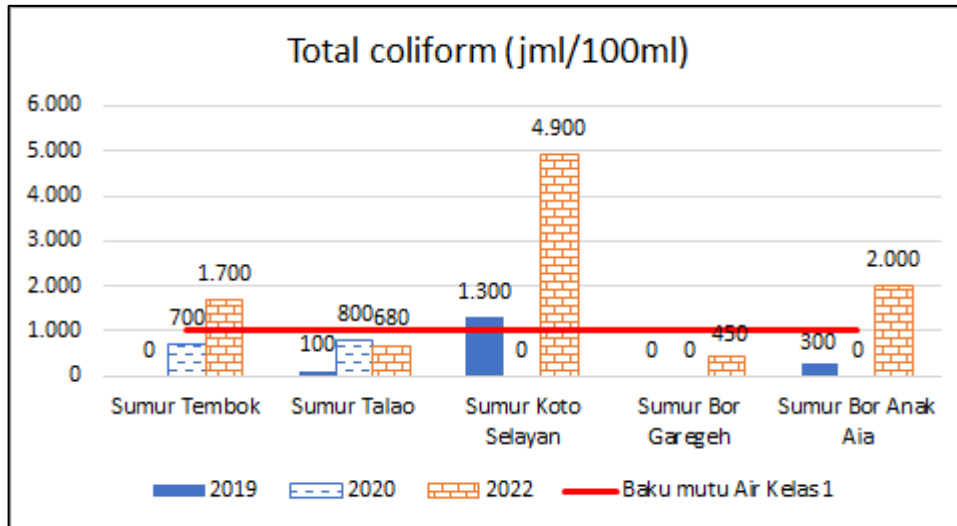
Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020, 2021 dan 2023

Sementara itu untuk parameter flourida sudah melebihi baku mutu pada 3 dari 5 sumur yang diuji kualitasnya. Flourida dapat terbentuk secara alami pada air tanah yang melewati pegunungan akibat proses mineralisasi, Sumber artificial flourida adalah dari pasta gigi. Konsentrasi fosfat dan flourida yang melebihi baku mutu pada air sumur mengindikasikan adanya transpor pencemar tersebut baik dari lahan pertanian, tangki septik rumah tangga, limbah usaha/kegiatan maupun sarana pembuangan limbah lainnya.



Gambar 3.12 Perbandingan Flourida Air Sumur Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020, 2021 dan 2023



Gambar 3.13 Perbandingan Total Coliform Air Sumur Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2020, 2021 dan 2023

Selanjutnya, untuk parameter total coliform sudah melebihi baku mutu pada 3 dari 5 sumur yang diuji kualitasnya. Konsentrasi coliform yang melebihi baku mutu pada air sumur mengindikasikan adanya transpor pencemar yang kemungkinan berasal dari tangki septik rumah tangga.

Akuifer adalah lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Karakteristik akuifer Kota Bukittinggi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu akuifer produktif dengan penyebaran luas, serta akuifer produktif sedang, seperti terlihat pada Tabel 3.10 dan Gambar 2.11

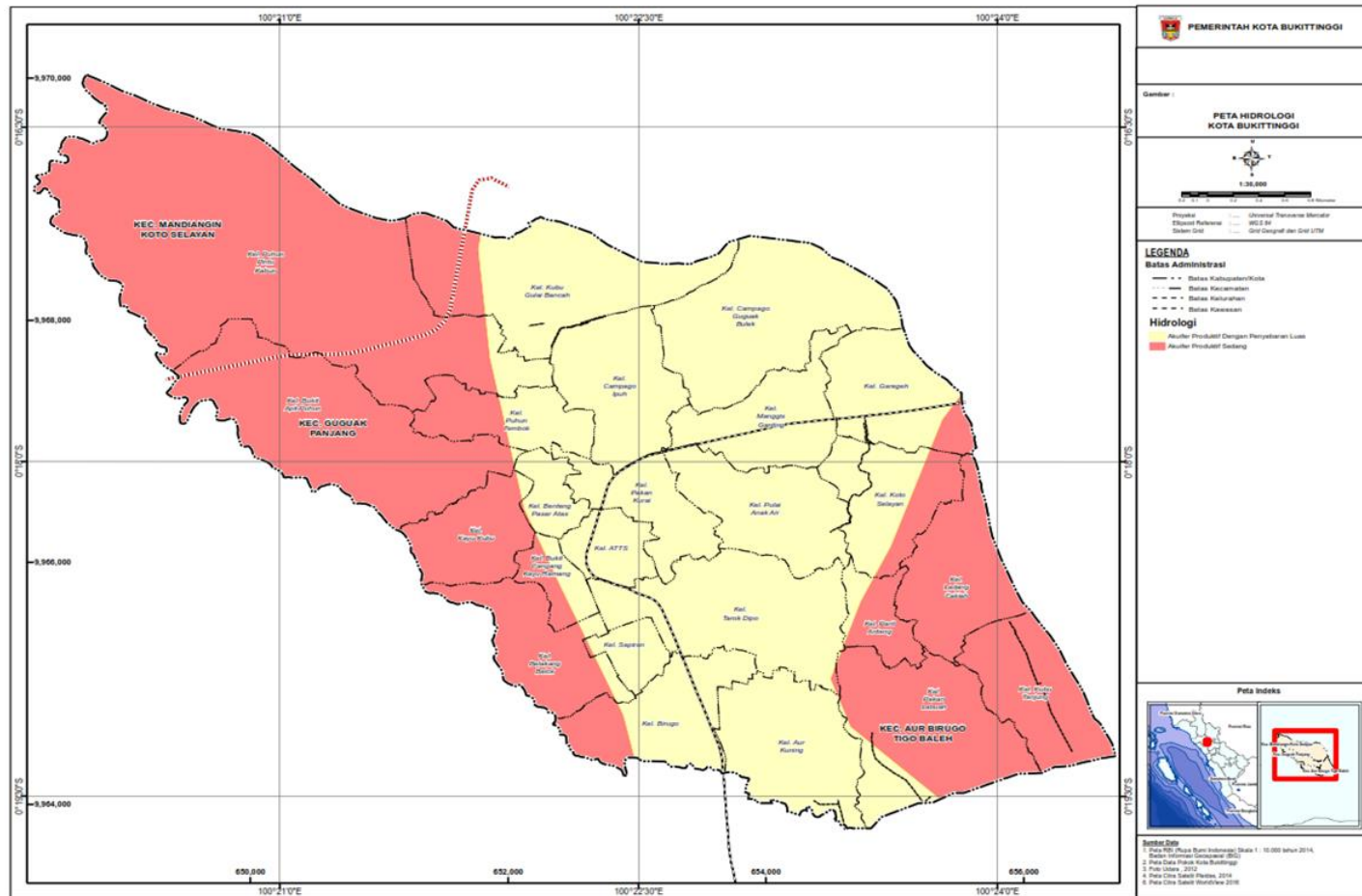
Tabel 3.10 Kondisi Akuifer Kota Bukittinggi

Kecamatan	Kelurahan	Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas	Akuifer Produktif Sedang	Luas (Ha)
Aur Birugo Tigo Baleh	Aur Kuning	104,24	0,07	104,31
	Belakang Balok	7,74	71,01	78,75
	Birugo	64,96	23,18	88,14
	Kubu Tanjung	-	84,22	84,22
	Ladang Cakiah	-	87,83	87,83
	Pakan Labuah	24,11	118,75	142,86
	Parit Antang	7,29	26,79	34,08
	Sapiran	22,86	0,54	23,4
Guguak Panjang	ATTS	34,41	-	34,41
	Benteng Pasar Atas	26,12	0,56	26,68
	Bukit Apit Puhun	0,71	203,1	203,81
	Bukit Cangang Kayu Ramang	12,5	14,6	27,1
	Kayu Kubu	1,67	62,26	63,93
	Pakan Kurai	59,62	-	59,62
	Tarok Dipo	138,19	1,03	139,22
Mandiingin Koto Selayan	Campago Guguak Bulek	153,81	-	153,81
	Campago Ipuh	93,74	-	93,74
	Garegeh	76,06	9,91	85,97
	Koto Selayan	54,28	26,21	80,49



Kecamatan	Kelurahan	Akuifer Produktif Dengan Penyebaran Luas	Akuifer Produktif Sedang	Luas (Ha)
	Kubu Gulai Bancah	117,84	39,75	157,59
	Manggis Ganting	78,78		78,78
	Puhun Pintu Kabun	16,14	469,14	485,28
	Puhun Tembok	30,89	27,97	58,86
	Pulai Anak Air	90,85	-	90,85
Total		1.216,81	1.266,92	2.483,73

Sumber: RDTR Kota Bukittinggi, 2017



Gambar 3.14 Peta Geologi Kota Bukittinggi

Sumber: RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030



3.1.2 4 Iklim

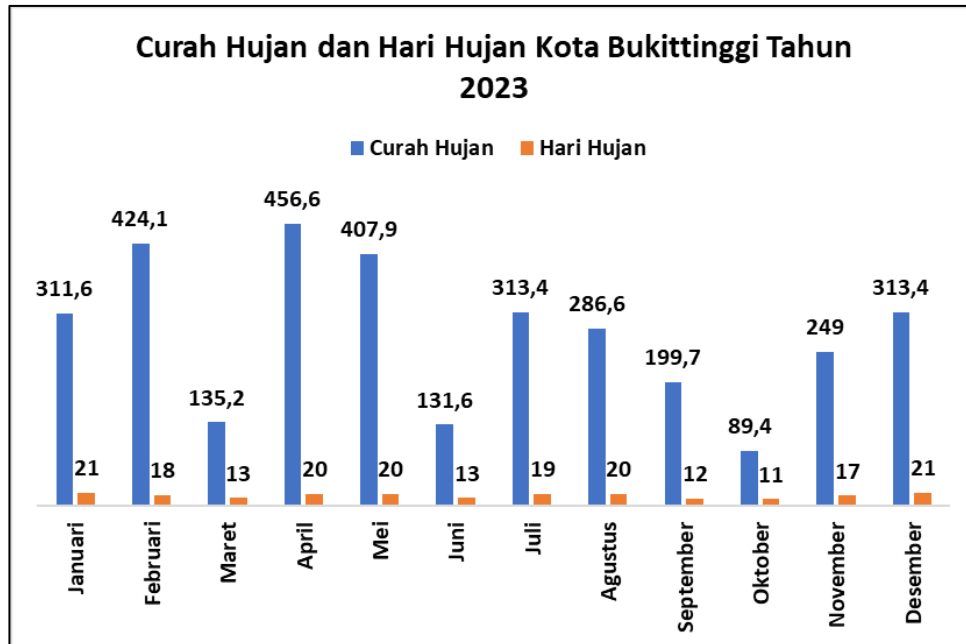
Pada tahun 2023, suhu terendah di Kota Bukittinggi adalah 22,6°C yang terjadi pada bulan Januari dan suhu tertinggi adalah 24,1°C yang terjadi pada bulan Juni. Rata-rata kelembaban Kota Bukittinggi adalah 87,4%/bulan, seperti terlihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Pengamatan Unsur Iklim Kota Bukittinggi Tahun 2023.

Bulan	Suhu/ (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (m/det)	Tekanan Udara (mbar)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Rata-rata Penyinaran Matahari (%)
Januari	22,6	86,9	4,5	930,7	311,6	21	2,3
Februari	23,0	85,0	4,9	930,5	424,1	18	2,6
Maret	23,6	84,0	5,1	930,8	135,2	13	3,1
April	23,7	87,7	3,8	930,1	456,6	20	3,4
Mei	23,8	87,8	4,0	930,9	407,9	20	3,5
Juni	24,1	84,9	3,7	930,7	131,6	13	4,6
Juli	23,1	88,6	3,7	931,3	313,4	19	3,4
Agustus	23,3	88,6	4,0	931,6	286,6	20	4,4
September	23,2	87,5	4,4	931,8	199,7	12	3,4
Oktober	23,2	90,2	3,7	932,1	89,4	11	3,5
November	23,5	89,4	3,4	931,7	249,0	17	3,8
Desember	23,5	89,0	4,1	931,0	313,4	21	2,0

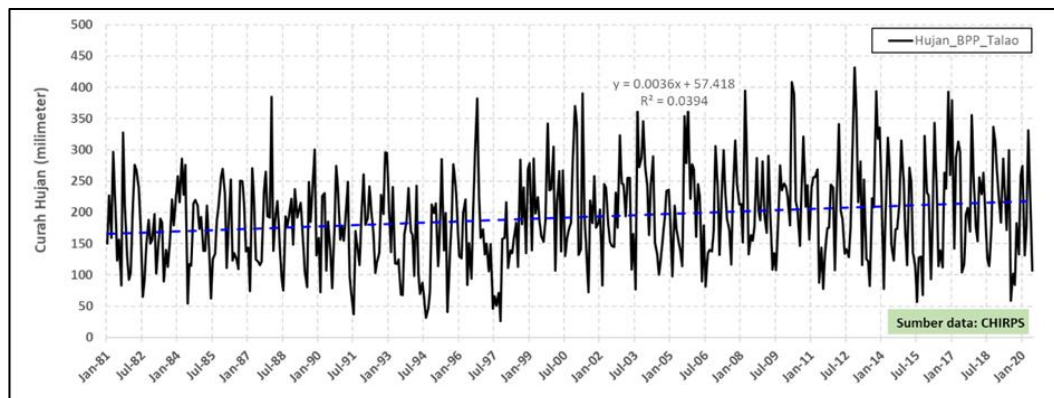
Sumber: Kota Bukittinggi dalam Angka, 2024

Berdasarkan Gambar 3.15 terlihat bahwa pada tahun 2023 curah hujan bulanan Kota Bukittinggi berkisar antara 89,4 mm yang terjadi pada bulan Oktober sampai 456,6 mm pada bulan April. Berdasarkan analisis curah hujan bulanan periode 1981-2020 pada dokumen Roadmap/ Rencana Induk Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi (2021), terlihat adanya kemiripan pola dan tren curah hujan bulanan pada 5 lokasi penelitian, yaitu BPP Talao, BPBD Kota Bukittinggi, ibu kota kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Mandiangain Koto Selayo, dan kecamatan Guguk Panjang. Hal ini mengindikasikan secara spasial, curah hujan bulanan dan juga kemungkinan pola tahunannya mempunyai kesamaan karena variasi spasial yang tidak terlalu signifikan mempengaruhi akumulasi curah hujan bulanan dan tahunannya.



Gambar 3.15 Curah Hujan dan Hari Hujan Kota Bukittinggi Tahun 2022

Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi



Gambar 3.16 Grafik tren curah hujan BPP Talao bulanan periode 1981-2020

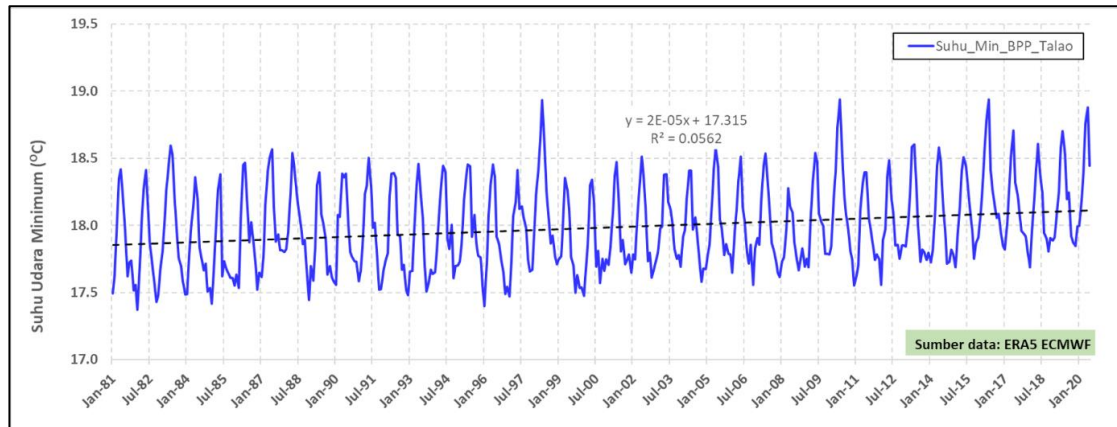
Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi

Suhu udara minimum bulanan adalah suhu terendah yang terekam dalam deretan waktu bulan kalender dalam tahun yang dimaksudkan. Pada Gambar 3.17 suhu udara minimum bulanan periode 1981-2020 di BPP Talao mengalami tren peningkatan. Namun tren peningkatan suhu udara minimum terlihat lebih landai dibanding dengan tren peningkatan curah hujan

Peningkatan suhu udara baik suhu udara minimum maupun suhu udara maksimum dapat berpengaruh pada perubahan habitat makhluk hidup, peningkatan wabah penyakit dan penurunan produktivitas pertanian. Misalnya, perkembangan vektor dan penularan malaria terjadi pada suhu 18-32 °C. Suhu udara minimum 18°C atau lebih besar berpotensi penularan malaria plasmodium



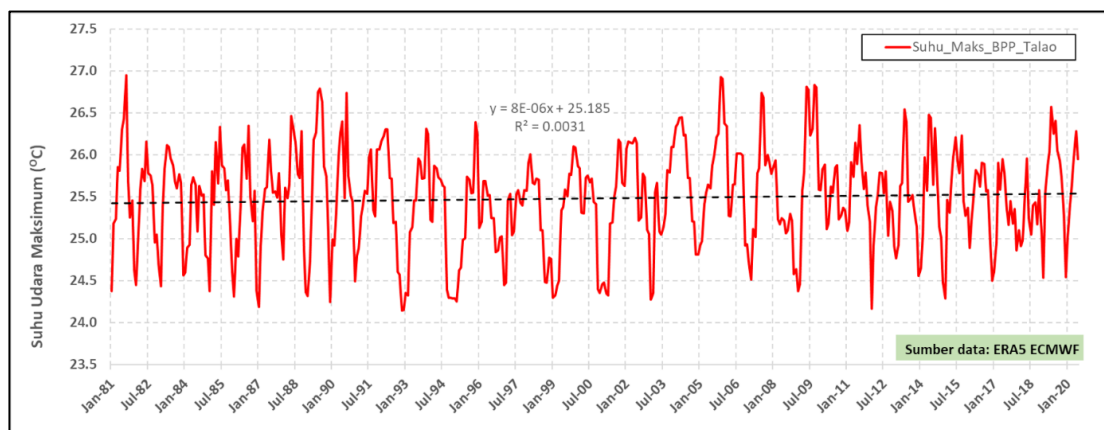
falciparum. Sementara itu, suhu minimum 16°C dan di atasnya berpotensi untuk penularan plasmodium vivax. Sehingga Kota Bukittinggi menjadi rentan terhadap penularan penyakit malaria.



Gambar 3.17 Grafik trend suhu udara minimum bulanan periode 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021

Suhu udara maksimum adalah suhu tertinggi yang terekam dalam deretan waktu bulan kalender dalam tahun yang dimaksudkan. Pada Gambar 3.18 terlihat tren kenaikan suhu udara maksimum di BPP Talao juga terlihat lebih landai dari tren kenaikan curah hujan. Terlihat variabilitas musiman dari suhu baik minimum maupun maksimum di BPP Talao ini mengikuti pola pergerakan semu dari matahari. Sementara pola tahunan jangka panjangnya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena iklim global.



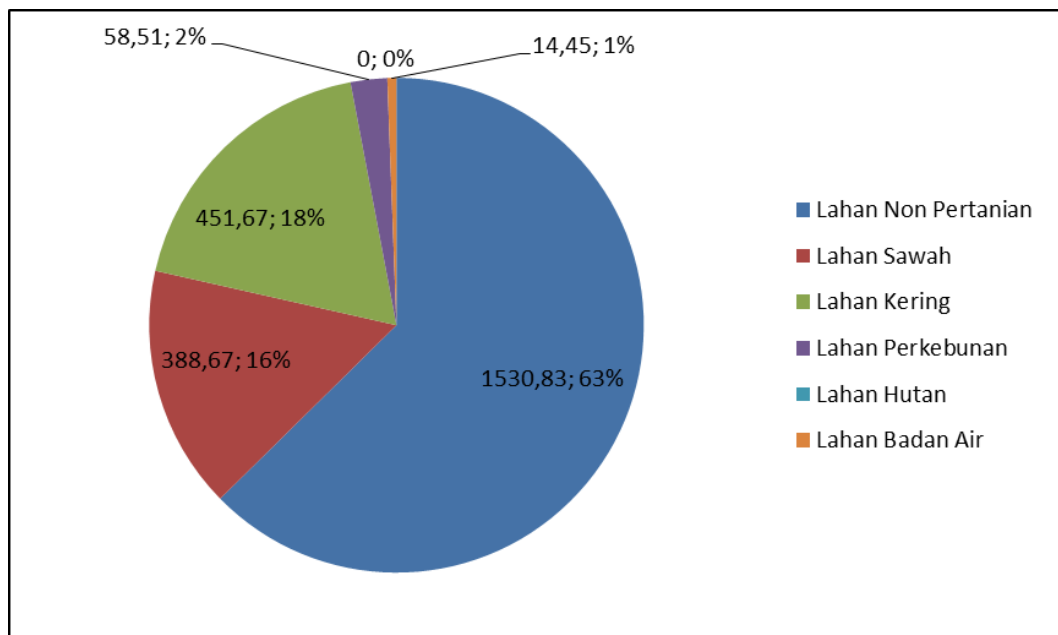
Gambar 3.18 Grafik tren suhu udara maksimum bulanan periode 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi.

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021



3.1.2 5 Tata Guna Lahan

Secara umum pemanfaatan ruang (lahan eksisting) yang terdapat di Kota Bukittinggi sudah didominasi oleh pemanfaatan lahan Non Pertanian sebesar 1530,83 Ha (63%), lahan sawah 388,67 Ha (16%), lahan kering 451,67 Ha (18%), lahan perkebunan 58,51 Ha (2%), dan penggunaan lahan badan air 14,45 Ha (1%), seperti terlihat pada Gambar 3.19. Selanjutnya, dalam rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi, hingga tahun 2030 dialokasikan pola ruang untuk permukiman meningkat menjadi 1.156,92 Ha (46% dari luas wilayah Kota). Penggunaan lahan perkebunan campuran secara umum dialih fungsikan menjadi pola ruang lainnya. Rencana pola ruang di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 3.12 dan Gambar 3.20.



Gambar 3.19 Tata Guna Lahan Eksisting Kota Bukittinggi

Sumber: DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Tabel 3.12 Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Luas)

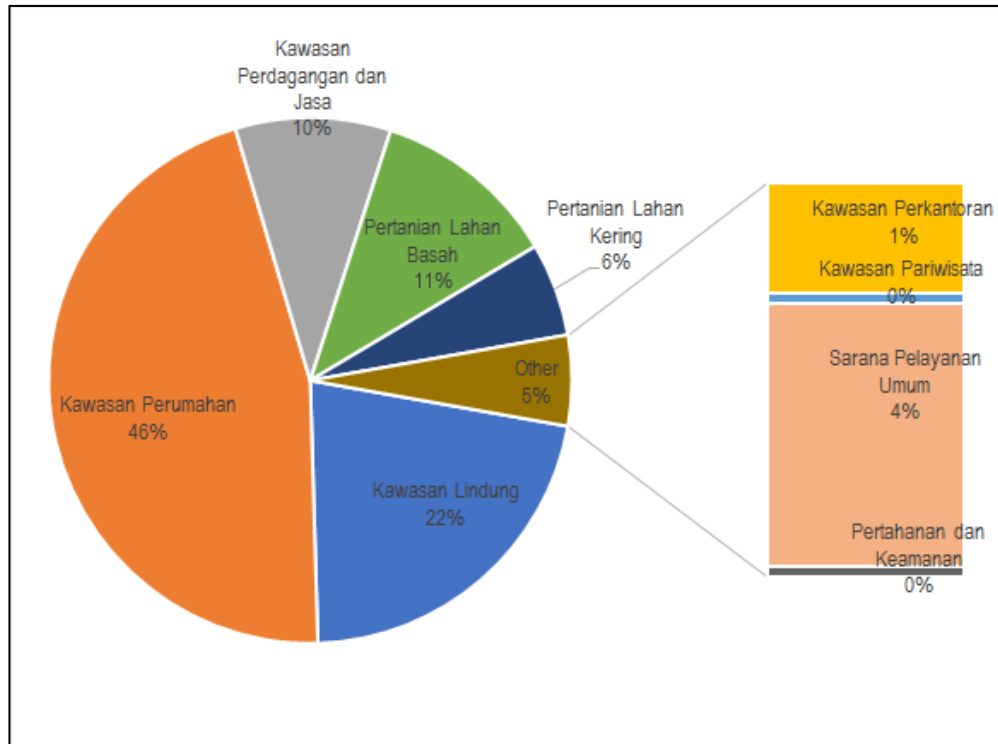
POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
Semua Kawasan		652,569	567,215	1.303,750	2.523,90
Kawasan Lindung		85,169	135,978	327,765	549,012
1. Kawasan Lindung Setempat		56,687	77,103	195,654	329,444
1.1	Kawasan Ngarai Sianok	56,687	77,103	195,654	329,444
2. Ruang Terbuka Hijau		28,482	58,875	132,111	219,568
2.1	RTH Taman	3,624	11,640	44,963	60,327



POLA RUANG		ABTB (ha)	GP (ha)	MKS (ha)	TOTAL (ha)
	Taman Kota	2,232	6,528	21,188	29,948
	Hutan Kota	1,392	5,112	23,775	30,279
2.2	RTH Fungsi Tertentu	22,013	42,992	81,731	146,736
	Sempadan Ngarai Sianok	13,858	31,693	56,285	101,836
	Sempadan Sungai	5,032	4,899	15,268	25,200
	Taman Pemakaman Umum	3,124	6,399	10,177	19,700
2.3	RTH Jalur Hijau Jalan	2,845	4,243	5,417	12,505
	RTH Jalur Hijau dan Pejalan Kaki	1,520	1,200	2,345	5,065
	RTH Ruang Di Bawah Jalan Layang	1,325	3,043	3,072	7,440
Kawasan Budidaya		567,399	431,238	975,986	1.974,888
1. Kawasan Perumahan		320,376	211,357	624,927	1156,927
1.1	Perumahan Kepadatan Tinggi	112,985	104,362	298,424	515,771
1.2	Perumahan Kepadatan Sedang	194,511	96,928	326,503	617,942
1.3	Perumahan Kepadatan Rendah	12,879	10,067	0	22,946
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa		32,759	131,424	78,229	242,411
3. Kawasan Perkantoran		8,555	10,989	19,402	38,945
4. Kawasan Pariwisata		0	4,021	0	4,021
5. Kawasan Peruntukan Lainnya		205,520	74,003	253,428	532,951
5.1	Pertanian Lahan Basah	183,390	0	106,948	290,338
5.2	Pertanian Lahan Kering	0	33,337	111,458	144,795
5.3	Sarana Pelayanan Umum	19,345	40,110	33,906	93,361
5.4	Pertahanan dan Keamanan	2,974	0,556	1,116	4,090

Keterangan: ABTB (Aur Birugo Tigo Baleh); GP (Guguk Panjang); MKS (Mandiangan Koto Selayan)

Sumber: RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

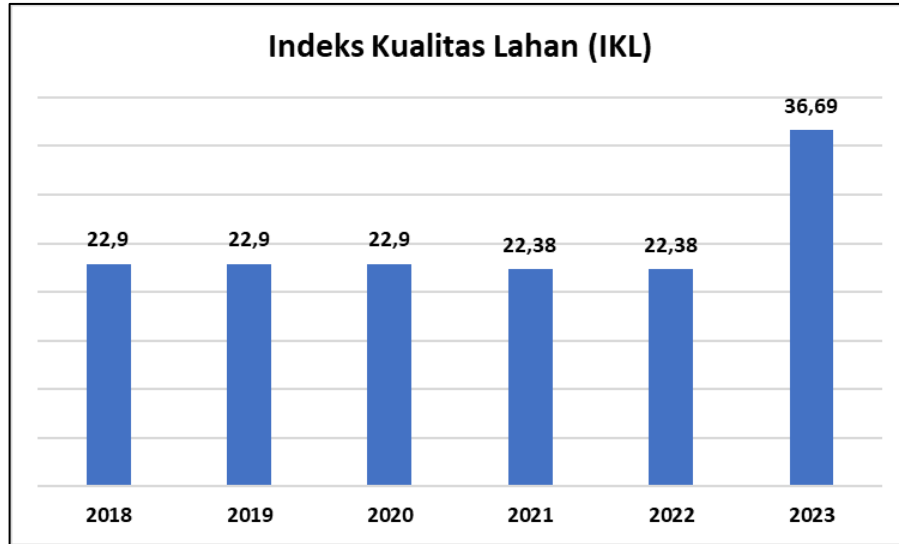


Gambar 3.20 Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Bukittinggi (Persentase)

Sumber: Diolah dari RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampai tahun 2030 rencana perluasan area terbangun di Kota Bukittinggi baik untuk permukiman maupun untuk sarana dan prasarana umum hampir dua kali lipat dari luas area terbangun saat ini. Kondisi ini jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat berpotensi meningkatkan frekuensi kejadian bencana terkait dengan perubahan iklim.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan salah satu komponen dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dibandingkan dengan IKA dan IKU, IKL mempunyai nilai terendah untuk Kota Bukittinggi. IKL Kota Bukittinggi termasuk kategori buruk, hal ini disebabkan karena sebagian besar wilayah Kota Bukittinggi merupakan lahan terbangun dan tidak mempunyai tutupan lahan berupa hutan. IKL Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Bukittinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

3.1.3 Kondisi Sosial

3.1.3 1 Kondisi Demografi

Penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2023 berdasarkan data BPS adalah 124.047 jiwa dimana laki-laki sebanyak 61.949 jiwa dan perempuan 62.098 jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 jumlah penduduk mengalami penambahan sekitar 1.736 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi yakni di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yaitu 55.570 jiwa atau sebesar 44,80% dari jumlah penduduk Kota Bukittinggi, sementara jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu 27.130 jiwa atau 21,87% dari penduduk Kota Bukittinggi. Berikut dapat dilihat grafik jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Bukittinggi.

Tabel 3.13 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2017-2023

N O	KECAMATAN	TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aur Birugo Tigo Baleh	24.971	27.536	26.996	26.602	26.683	26.798	27.130
2	Guguk Panjang	42.726	45.930	43.836	41.391	41.226	41.294	41.350
3	Mandiangin Koto Selayan	49.034	53.338	52.464	53.035	53.679	54.219	55.570
Kota Bukittinggi		116.731	126.804	123.296	121.028	121.588	122.311	124.047

Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024



Tingkat kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi tahun 2023, sebesar 5.131,63 jiwa per km², meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 4.846 jiwa per km². Angka ini menjadikan Kota Bukittinggi sebagai kota terpadat di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Guguk Panjang yakni mencapai 6.053,29 jiwa per km². Sedangkan yang paling rendah terdapat di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh yaitu sekitar 4.339,41 jiwa per km².

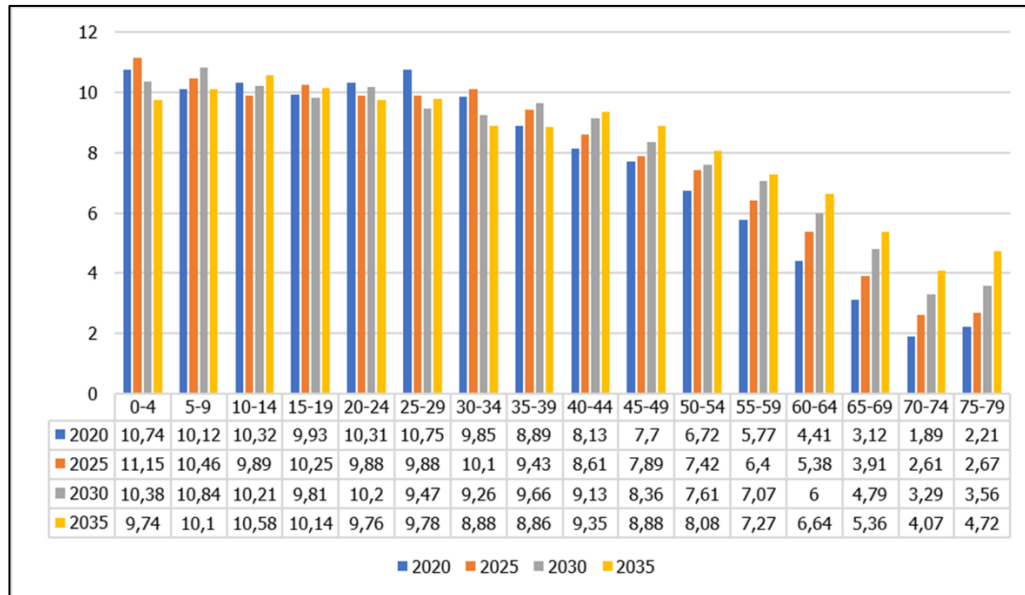
Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi mengalami penurunan pada tiap tahunnya dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021. Akan tetapi, mengalami peningkatan Kembali pada Tahun 2022 menjadi 0, 59% dari sebelumnya 0,46% tahun 2021. Pada tahun 2023 sendiri, kecamatan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan laju pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,90%. Untuk kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebesar 1,76%.

Tabel 3.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2023

NO	KECAMATAN	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Aur Birugo Tigo Baleh	2,22	0,70	0,30	0,43	0,76
2	Guguk Panjang	1,92	-0,06	-0,40	0,16	0,01
3	Mandiangin Koto Selayan	0,74	1,62	1,21	1,01	1,76
	Kota Bukittinggi	1,55	0,81	0,46	0,59	0,90

Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024

Gambar 3.22 menunjukkan proyeksi penduduk Kota Bukittinggi sampai dengan tahun 2035. Dari gambar menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia baru lahir dan usia muda. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk usai kerja. Sedangkan, peningkatan jumlah penduduk terjadi pada penduduk usia lanjut.



Gambar 3.22 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2023

3.1.3 2 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Bukittinggi mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2022. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,35% sampai dengan tahun 2020. Akan tetapi, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 5,14%, dan kembali menurun pada tahun 2022 yaitu 4,46%, dan 4,11% pada tahun 2023. Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi berada dibawah persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menandakan bahwa pengeluaran perkapita penduduk Kota Bukittinggi berada di atas garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.23 Persentase Penduduk Miskin Kota Bukittinggi

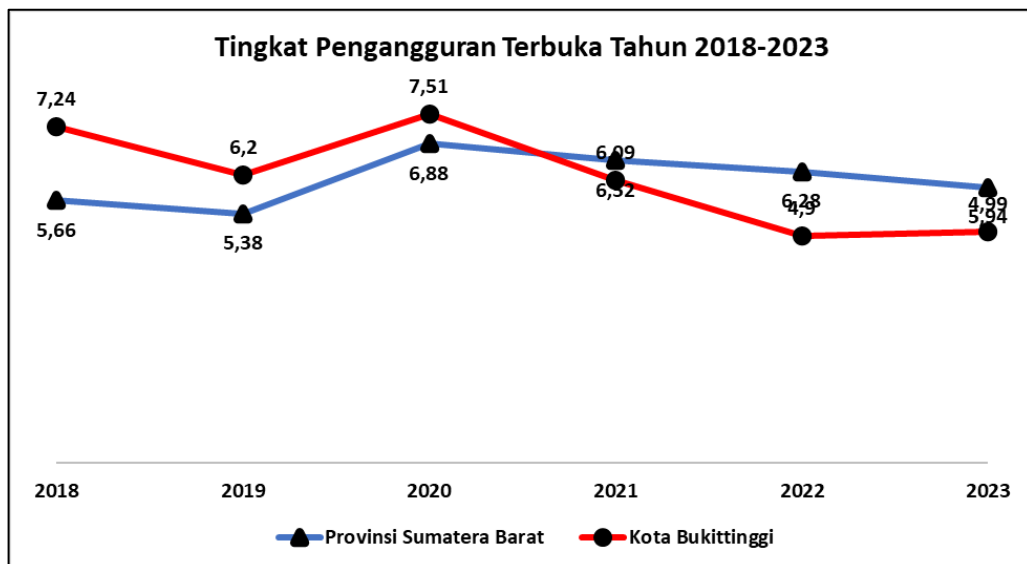
Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2023



3.1.3 3 Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan di suatu wilayah tersebut.

Berdasarkan data BPS tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi secara garis besar berfluktuatif dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Pada tahun 2018 persentase TPT Kota Bukittinggi adalah 7,24%, dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,2%. Pada tahun 2020 angka kembali meningkat menjadi 7,51%, dan mengalami penurunan sampai tahun 2023 menjadi 4,99%. Angka pengangguran terbuka ini masih terbilang tinggi, namun sudah berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

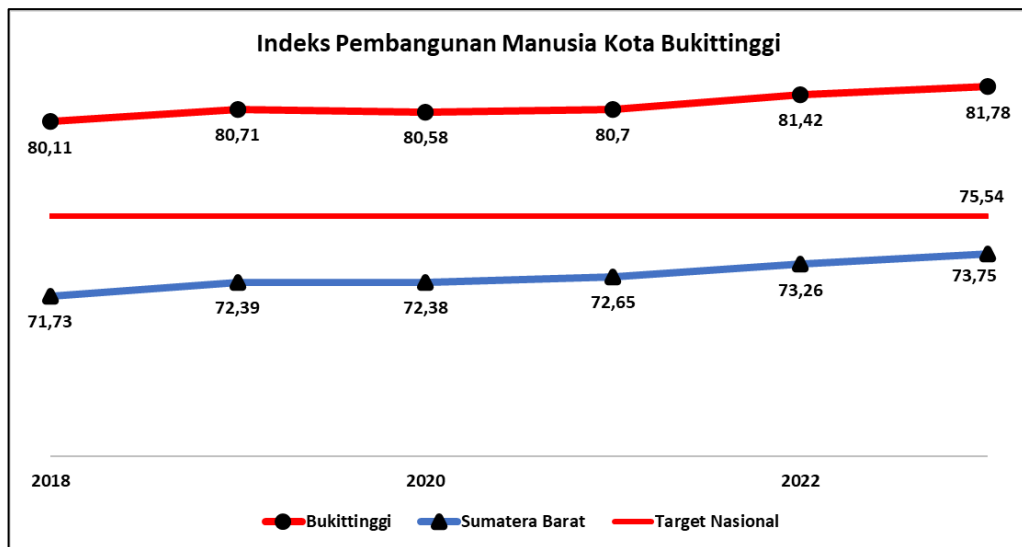
3.1.3 4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Komponen dari IPM adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, dalam menyusun



IPM dapat diartikan bahwa capaian satu komponen tidak dapat ditutupi oleh capaian di komponen lainnya. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga komponen harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Pencapaian IPM Kota Bukittinggi dalam 5 tahun terakhir masuk ke dalam kategori Tinggi dengan angka capaian > 80. Pencapaian ini berada di atas pencapaian Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jika dibandingkan nilai IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, nilai IPM Kota Bukittinggi berada di urutan kedua dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.



Gambar 3.25 Indeks Pembangunan Manusia Kota Bukittinggi

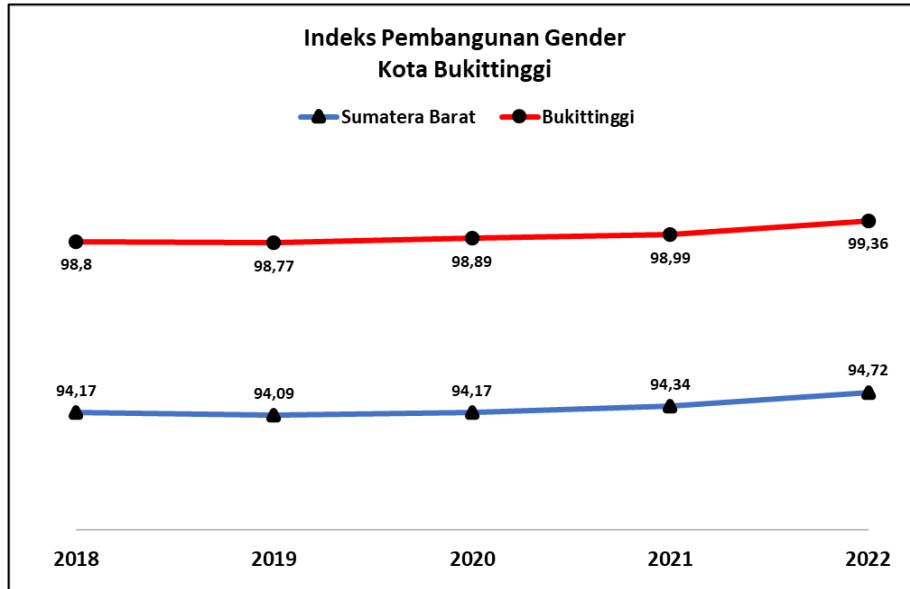
Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2023

3.1.3 5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender atau (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Dilihat dari data 5 tahun terakhir, nilai IPG Kota Bukittinggi menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai IPM dan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender di Kota Bukittinggi cukup baik. Hal ini juga sejalan dengan Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi. Indeks Ketimpangan Gender Kota Bukittinggi semakin menurun tiap tahunnya mengindikasikan bahwasanya ketimpangan gender di Kota Bukittinggi sudah menipis. Pada tahun

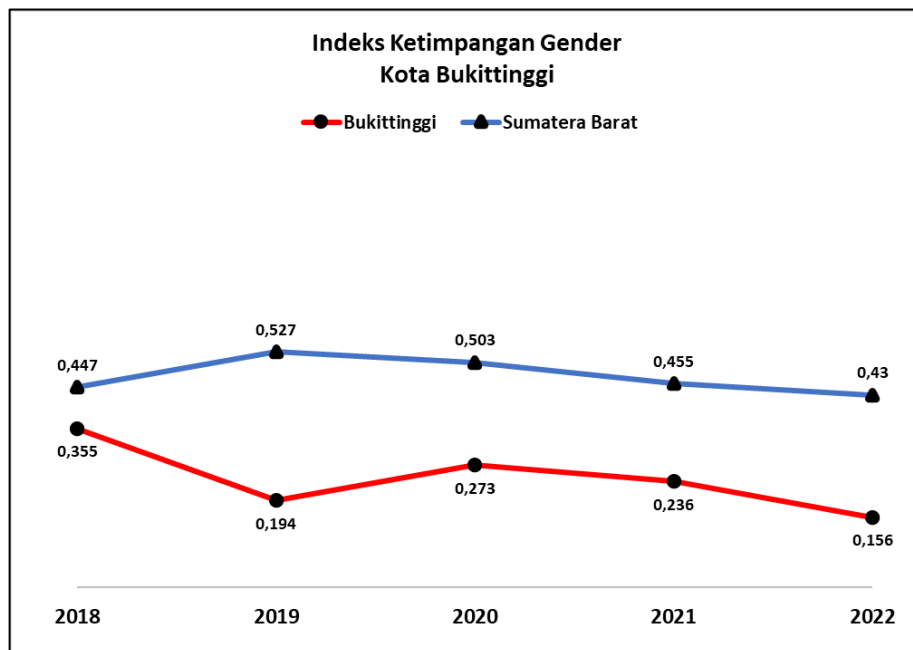


2022 Indeks Ketimpangan Gender Kota Bukittinggi adalah 0,156, menurun dari sebelumnya 0,236 pada tahun 2021. Untuk Indeks Pemberdayaan Gender Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan tiap tahunnya mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat di Kota Bukittinggi.



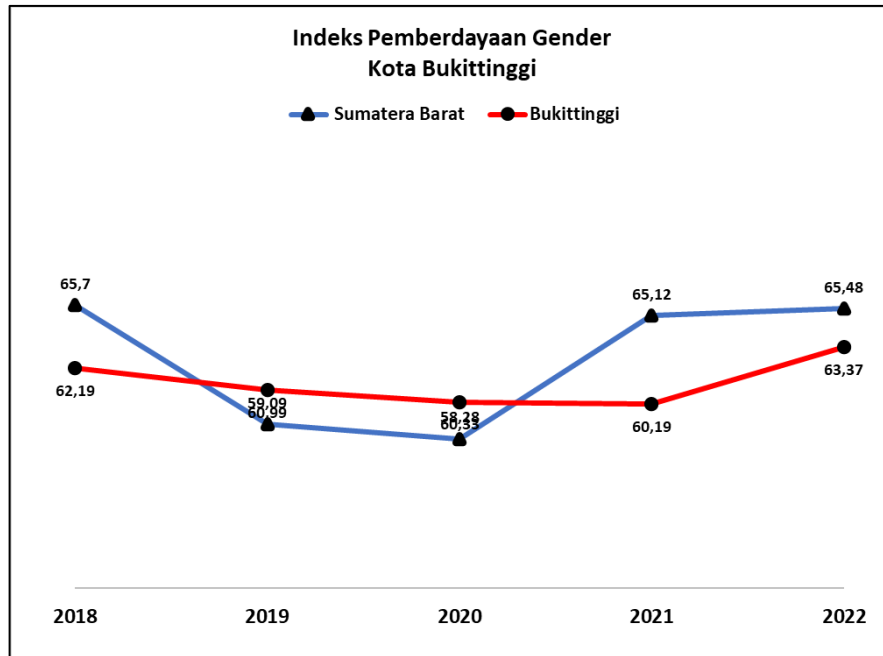
Gambar 3.26 Indeks Pembangunan Gender di Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024



Gambar 3.27 Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bukittinggi

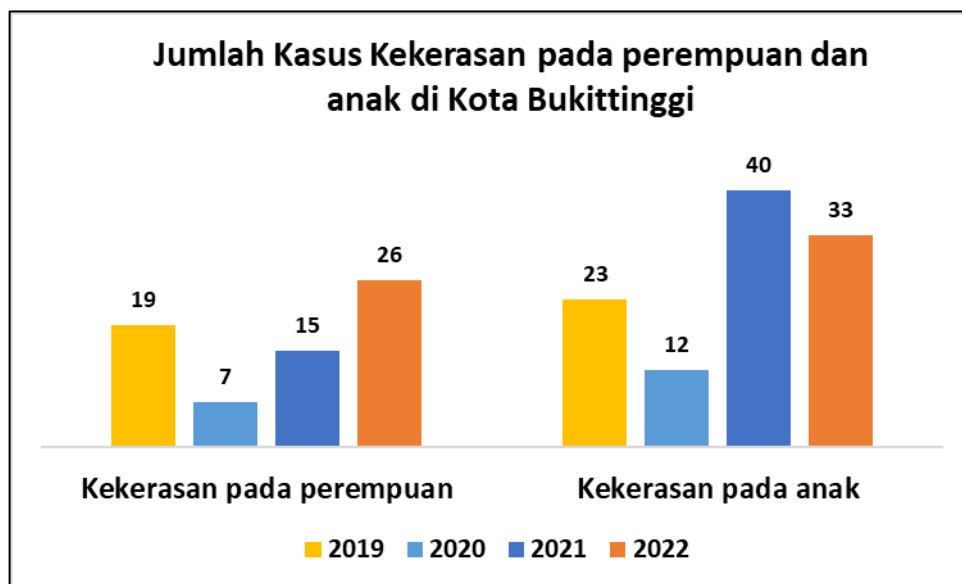
Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024



Gambar 3.28 Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

Peningkatan kualitas hidup perempuan juga membutuhkan perlindungan dari tindak kekerasan. Data empat tahun terakhir menunjukkan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Kota Bukittinggi dimana, terjadi peningkatan kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2022. (Gambar 3.29)



Gambar 3.29 Jumlah Kekerasan Pada Anak dan Perempuan di Kota Bukittinggi

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2023



3.1.4 Kondisi Ekonomi

3.1.4 1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

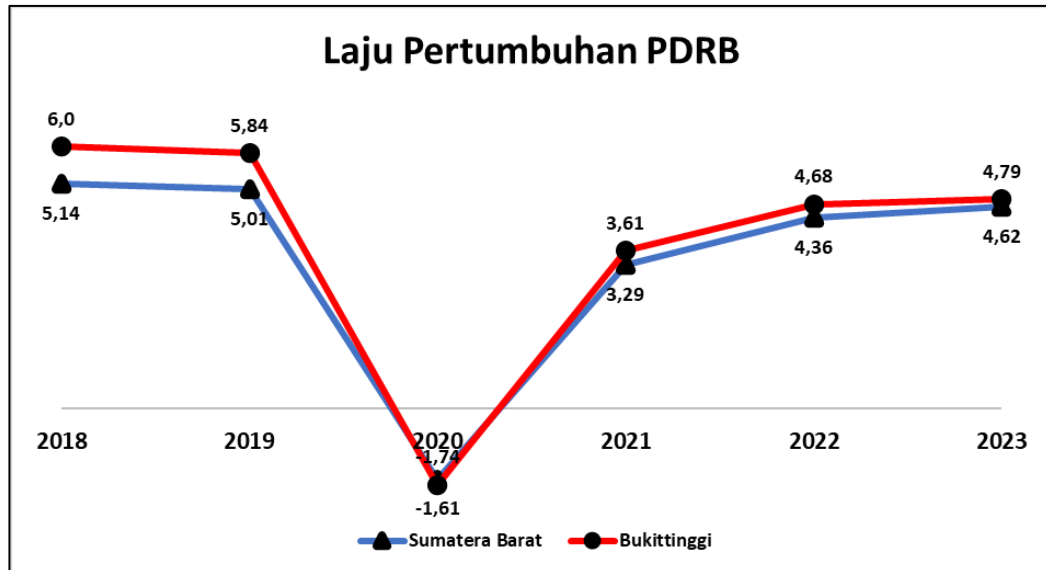
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Untuk melihat perkembangan PDRB dapat dihitung melalui 2 (dua) pendekatan yaitu: Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menghitung nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

Perkembangan PDRB Kota Bukittinggi baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) periode 2018-2023 terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Seperti terlihat pada Tabel 3.15 terjadi peningkatan dari Rp. 5.812 M pada tahun 2018 menjadi Rp 6.869 M pada tahun 2023. Sedangkan, untuk PDRB ADHB juga mengalami peningkatan dari Rp 8.011 M pada tahun 2018, menjadi Rp 11.131 M pada tahun 2023. Gambar 3.30 menyajikan laju pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bukittinggi. Laju PDRB ADHK sempat menurun sampai tahun 2020, yaitu mencapai -1,74%, dan mulai mengalami peningkatan pasca covid menjadi 4,79 pada tahun 2023.

Tabel 3.15 PDRB Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Milliar Rupiah)	8.011	8.695	8.627	9.026	10.194	11.131
PDRB ADHK (Milliar Rupiah)	5.812	6.152	6.045	6.263	6.556	6.869
Laju Pertumbuhan (%)	6	5,84	-1,74	3,61	4,68	4,79

Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024



Gambar 3.30 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Bukittinggi 2018-2023

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

3.1.4 2 Struktur Ekonomi

Selama tahun 2018-2023 struktur perekonomian Kota Bukittinggi didominasi oleh 4 (empat) lapangan usaha yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran yaitu mencapai 34,37%. Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan meingkat menjadi 10,39%, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,35%, dan Konstruksi dengan kontribusi sebesar 6,50%. Berikut dapat dilihat distribusi PDRB Kota Bukittinggi atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bukittinggi pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Bukittinggi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,2	1,14	1,18	1,16	1,1	1,06
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	5,66	5,03	5,19	5,12	4,94	5,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,72	0,72	0,69	0,68	0,64	0,62
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13
F	Konstruksi	6,64	6,65	6,7	6,58	6,45	6,50



G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	33,83	34,03	33,73	33,17	34,25	34,37
H	Transportasi dan Pergudangan	10,95	10,85	10,06	10,22	10,12	10,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6	6,05	4,7	4,77	5,06	5,02
J	Informasi dan Komunikasi	6,33	6,53	7,21	7,36	7,36	7,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,52	5,36	5,58	6,03	5,9	5,63
L	Real Estate	3,45	3,33	3,38	3,32	3,24	3,29
M, N	Jasa Perusahaan	0,64	0,65	0,64	0,62	0,61	0,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,06	6,2	6,74	6,77	6,29	6,08
P	Jasa Pendidikan	5,66	5,83	6,32	6,18	6,02	5,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,3	3,37	3,92	3,99	3,85	3,94
R, S, T, U	Jasa lainnya	3,9	4,11	3,81	3,89	4,05	4,16
	PDRB	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024

3.1.4 3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bukittinggi tahun 2023 mengalami peningkatan. Nilai PDRB Kota Bukittinggi ADHK pada tahun 2023 adalah Rp 6.869 Miliar. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 6.556 M Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi percepatan ekonomi sebesar 4,79%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 dicapai oleh lapangan Konstruksi dengan laju pertumbuhan mencapai 3,8%, disusul dengan lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 6,31% pada tahun 2023, naik 2,99%. Sementara lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan sebesar -8,16%, yaitu 5,16% pada tahun 2023. Pada Tabel 3.17 berikut dapat dilihat laju pertumbuhan produk domestik regional bruto Kota Bukittinggi ADHK menurut lapangan usaha tahun 2018-2022.

Tabel 3.17 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0.47	0.42	1.34	3.06	2.84	0,46
B	Pertambangan dan Penggalian	-0.39	-0.41	-2.74	-0.12	-0.08	1,07
C	Industri Pengolahan	-1.61	-1.43	-1.02	0.88	3.31	6,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.99	2.59	-7.29	3.15	3.69	3,63



Sektor PDRB Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.20	4.85	4.24	-2.41	-0.12	2,54
F	Konstruksi	6.97	6.49	-2.77	1.35	2.13	5,95
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.78	6.90	-1.05	3.19	4.93	4,35
H	Transportasi dan Pergudangan	8.77	5.71	-10.77	4.94	3.01	5,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.77	6.18	-23.31	4.71	13.71	5,16
J	Informasi dan Komunikasi	7.93	8.22	10.21	5.59	6.38	6,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.74	2.54	1.62	8.32	4.08	2,58
L	Real Estate	3.98	3.82	0.25	2.21	4.92	5,76
M, N	Jasa Perusahaan	4.80	5.76	-3.42	1.09	6.95	6,81
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.79	4.29	-0.42	0.82	-0.62	1,42
P	Jasa Pendidikan	6.65	8.34	7.20	1.85	3.39	1,52
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.15	7.28	12.39	5.67	4.09	6,83
R, S, T, U	Jasa lainnya	7.72	9.24	-10.93	6.01	12.58	7,49
	PDRB	6	5.84	-1.74	3.61	4.68	4,79

Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024

3.1.4 4 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Nilai ini merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Nilai PDRB per kapita Kota Bukittinggi ADHB dan ADHK sejak tahun 2018 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 PDRB ADHK per kapita tercatat sebesar 45,13 juta rupiah. Pada tahun 2023 mencapai 55,38 juta rupiah. Sedangkan, untuk PDRB ADHB pada Tahun 2018 tercatat sebesar 62,21 juta rupiah, dan terus mengaami peningkatan sampai tahun 2023 yaitu sebesar 89,74 juta rupiah. Berikut dapat dilihat pada Tabel 3.18, rincian PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2018-2023.

Tabel 3.18 PDRB per Kapita Kota Bukittinggi, 2018-2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ADHK (Juta Rupiah)	45,13	46,62	50,02	51,51	53,61	55,38
ADHB (Juta Rupiah)	62,21	65,90	71,40	74,24	83,35	89,74

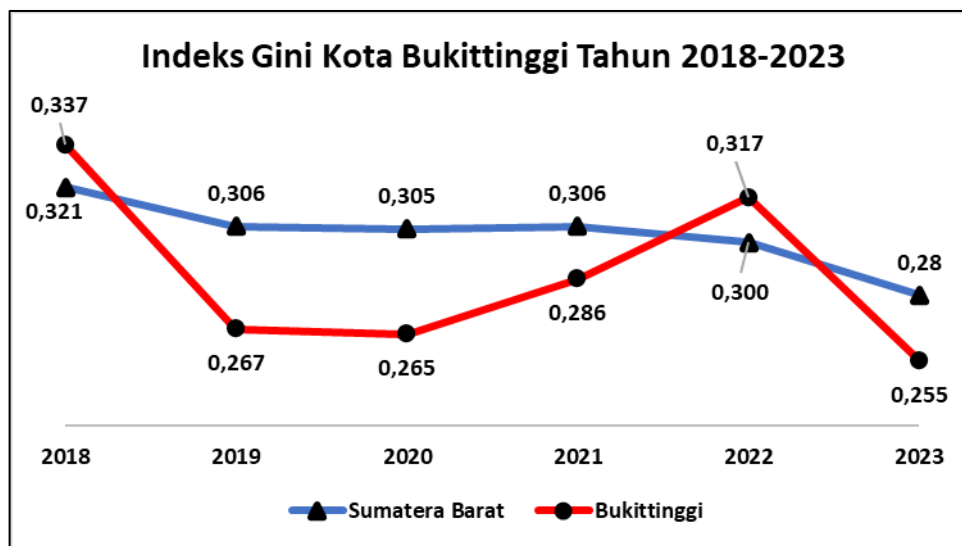
Sumber: BPS Kota Bukittinggi tahun 2024

3.1.4 5 Indeks Gini

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika nilai



Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Nilai Gini Rasio Kota Bukittinggi selama kurun waktu 10 tahun berada pada kisaran 0,265 – 0,371 yang tergolong dalam kategori sedang. Indeks gini Kota Bukittinggi meningkat dari tahun 2020 dari 0,265 menjadi 0,317 pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 0,255 pada tahun 2023. Meskipun, indeks gini Kota Bukittinggi berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, perhatian pemerintah tentang pemerataan distribusi pendapatan masih perlu ditingkatkan.



Gambar 3.31 Indeks gini Kota Bukittinggi dan Provinsi Sumatera Barat

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

3.2 Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

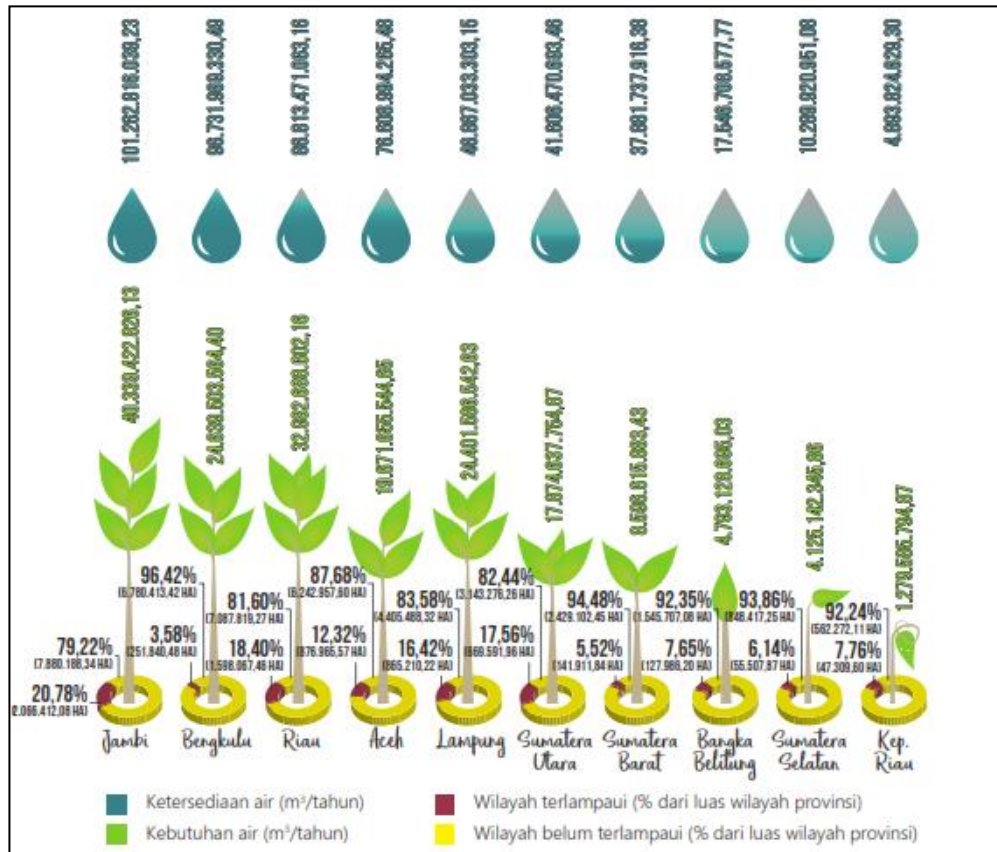
3.2.1 Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)

3.2.1.1 DDDT Air

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan daya dukung dan daya tampung air (D3TA) nasional dengan SK MenLHK No. 146/2023. Analisis dilakukan dengan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air berdasarkan grid seperti yang dijelaskan pada Gambar 3.33. Hasil analisis D3T Air menunjukkan bahwa status air di 94,48% daerah di Provinsi Sumatra Barat masih belum terlampaui, sedangkan sisanya 5,52% wilayah D3T Air sudah terlampaui, artinya ketersediaan air sudah lebih kecil dibanding kebutuhan air (lihat Gambar 3.32).

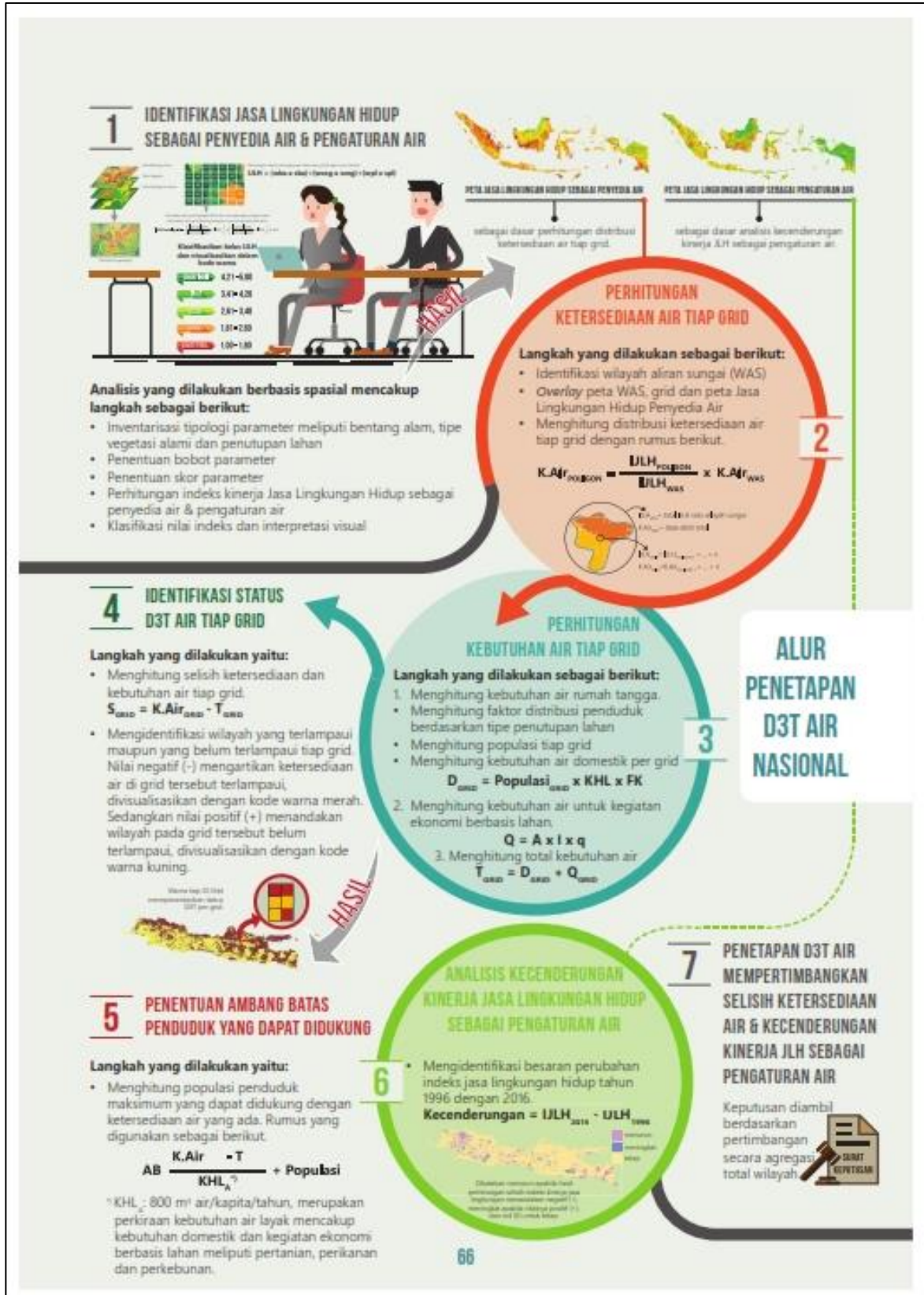


Analisis yang sama dilakukan untuk Kota Bukittinggi, hasilnya menunjukkan status D3T Air Kota Bukittinggi masih belum terlampaui untuk semua wilayah. Peta dan perhitungan D3T Air Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 3.35 dan Tabel 3.19.



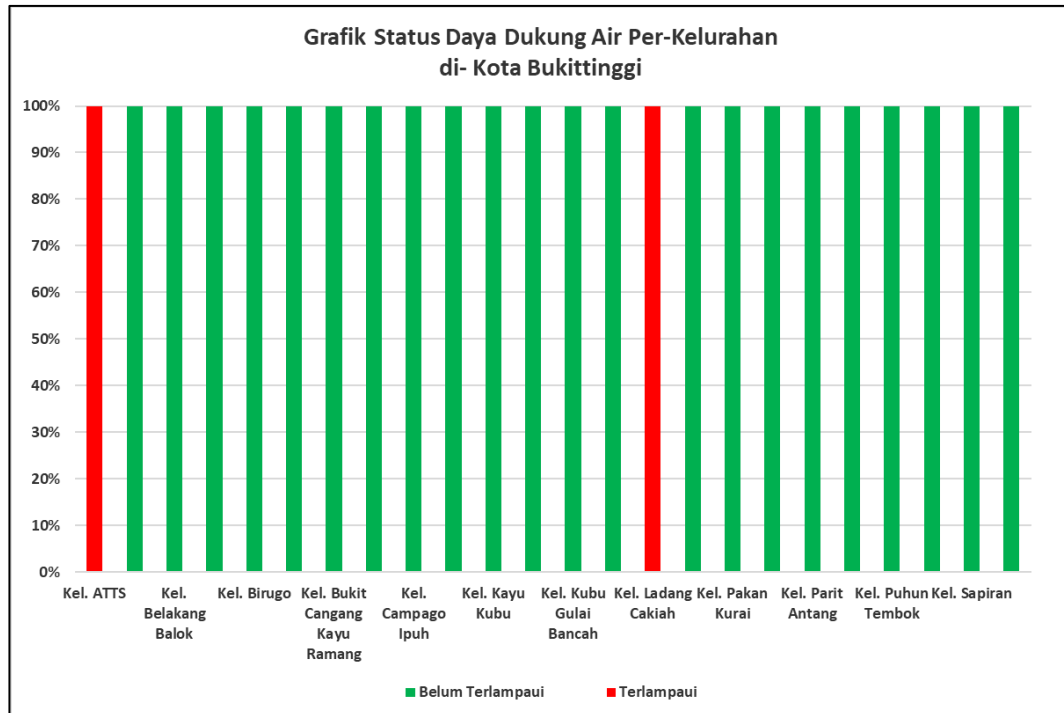
Gambar 3.32 Hasil Analisis D3T Air Pulau Sumatra

Sumber: DDDT Air Nasional



Gambar 3.33 Metode Analisis D3T Air

Sumber: DDDT Air Nasional



Gambar 3.34 Grafik Status D3T Air Kota Bukittinggi

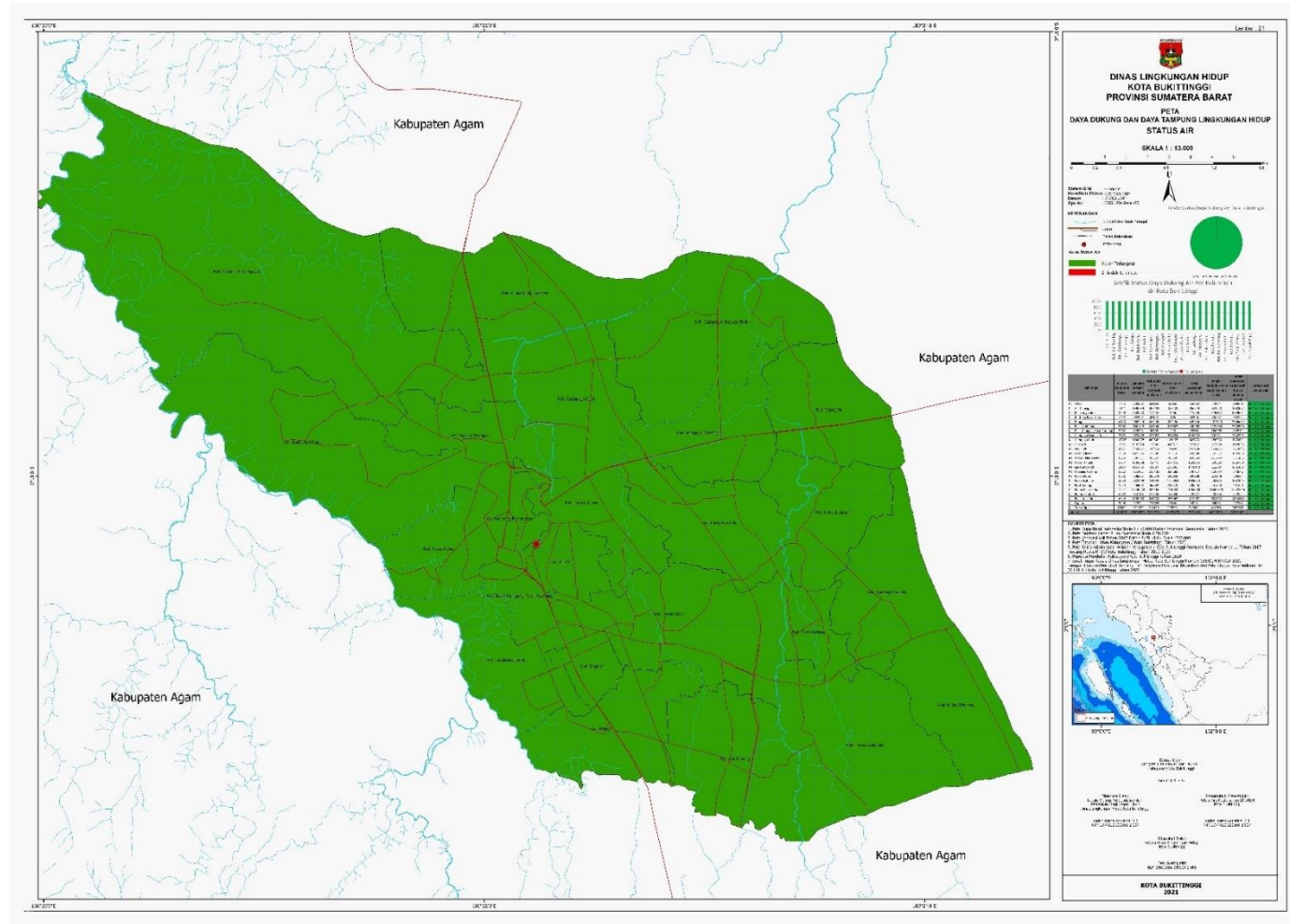
Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi



Tabel 3.19 Perhitungan D3T Air Kota Bukittinggi

Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air yang tersedia m3/tahun	Kebutuhan Air Domestik m3/tahun	Kebutuhan Air lahan m3/tahun	Total Kebutuhan Air m3/tahun	Jumlah Penduduk yang bisa di dukung (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang masih bisa di dukung (Jiwa)	Status daya dukung air
Kel. ATTS	7.452	300.608	321.926	32.856	354.782	54.174	299.849	Terlampai
Kel. Aur Kuning	7.141	1.390.939	308.491	458.428	766.919	624.020	1.380.327	Belum Terlampaui
Kel. Belakang Balok	2.649	3.309.070	114.437	1.466	115.903	3.193.167	3.309.034	Belum Terlampaui
Kel. Benteng Pasar Atas	1.438	368.527	62.122	175	62.296	306.231	368.522	Belum Terlampaui
Kel. Birugo	6.140	2.563.224	265.248	284.436	549.684	2.013.540	2.556.639	Belum Terlampaui
Kel. Bukit Apit Puhun	5.700	7.641.448	246.240	213.822	460.062	7.181.386	7.636.500	Belum Terlampaui
Kel. Bukit Cangang Kayu Ramang	2.287	825.993	98.798	919	99.718	726.275	825.971	Belum Terlampaui
Kel. Campago Guguak Bulek	7.779	2.070.488	336.053	894.554	1.230.606	839.881	2.049.785	Belum Terlampaui
Kel. Campago Ipuh	10.707	1.030.078	462.542	181.197	643.739	386.339	1.025.881	Belum Terlampaui
Kel. Garegeh	2.832	1.139.024	122.342	448.813	571.156	567.868	1.128.638	Belum Terlampaui
Kel. Kayu Kubu	4.220	2.758.460	182.304	71.420	253.724	2.504.736	2.756.806	Belum Terlampaui
Kel. Koto Selayan	1.618	1.023.585	69.898	758.110	828.008	195.577	1.006.039	Belum Terlampaui
Kel. Kubu Gulai Bancah	6.239	3.587.811	269.525	706.539	976.064	2.611.747	3.571.455	Belum Terlampaui
Kel. Kubu Tanjung	1.677	1.348.688	72.446	1.077.613	1.150.060	198.629	1.323.750	Belum Terlampaui
Kel. Ladang Cakiah	2.150	1.363.455	92.880	1.383.263	1.476.143	112.687	1.331.438	Terlampai
Kel. Manggis Ganting	5.010	851.481	216.432	324.285	540.717	310.764	843.972	Belum Terlampaui
Kel. Pakan Kurai	6.856	608.336	296.179	100.809	396.988	211.348	606.004	Belum Terlampaui
Kel. Pakan Labuah	3.273	2.028.499	141.394	1.751.931	1.893.324	135.175	1.987.946	Belum Terlampaui
Kel. Parit Antang	1.534	466.900	66.269	243.278	309.546	157.353	461.268	Belum Terlampaui
Kel. Puhun Pintu Kabun	7.527	19.540.280	325.166	711.534	1.036.700	18.503.579	19.523.815	Belum Terlampaui
Kel. Puhun Tembok	6.378	732.110	275.530	168.048	443.577	288.533	728.222	Belum Terlampaui
Kel. Pulai Anak Air	6.044	1.120.380	261.101	257.967	519.068	601.313	1.114.410	Belum Terlampaui
Kel. Sapiran	3.096	228.994	133.747	9.184	142.931	86.063	228.783	Belum Terlampaui
Kel. Tarok Dipo	16.909	1.391.672	730.469	218.833	949.302	442.371	1.386.608	Belum Terlampaui
Jumlah	126.656	57.690.050	5.471.539	10.299.478	15.771.017	41.919.033	57.451.662	

Sumber: DDDTLH Air Kota Bukittinggi



Gambar 3.35 Peta D3T Air Kota Bukittinggi
Sumber: DDDLH Kota Bukittinggi



3.2.1 2 DDDT Pangan

Sektor pertanian bukan menjadi kontribusi utama pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2023 hanya 1,00% dan mengalami penurunan tiap tahunnya. Untuk tanaman pangan sendiri, luas panen padi di Kota Bukittinggi menurun tiap tahunnya, dan produktivitas padi mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Produktivitas padi di Kota Bukittinggi mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 63,25 kuintal/ha, dari sebelumnya 66,09 kuintal/ha pada tahun 2022. Luas panen, produksi dan produktivitas padi di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Bukittinggi

No	Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kw/ha)
1	2012	910,00	5.471,83	60,13
2	2013	717,00	4.410,98	61,52
3	2014	783,00	5.052,70	64,53
4	2015	764,00	5.095,88	66,70
5	2016	800,10	5.227,05	65,33
6	2017	774,00	5.204,00	67,24
7	2018	934,82	5.481,12	58,41
8	2019	805,15	5.266,31	65,41
9	2020	619,95	3.776,37	60,91
10	2021			
11	2022	617,78	4.082,69	66,09
12	2023	559,68	3.540,22	63,25

Sumber: BPS Kota Bukittinggi, 2024

Melihat kondisi produktivitas padi eksisting, luas sawah yang cenderung mengalami perubahan fungsi dan laju pertumbuhan penduduk sampai tahun 2045, dengan kondisi seperti saat ini (*business as usual* - BAU), maka akan terjadi defisit beras pada tahun 2025. Simulasi produksi dan konsumsi beras di Kota Bukittinggi sampai tahun 2045 dapat dilihat pada Tabel 3.21 .



Tabel 3.21 Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045

				persen/tahun	Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun
Asumsi Awal				0.80	66.09	1.60	1.59
Perubahan Asumsi				0.70%	75.00	1.20	2.00
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	375.01	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2030	365.68	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2035	356.35	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2040	347.01	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
	2045	337.68	305.99	305.99	305.99	305.99	305.99
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	9,294.95	9,294.95	9,294.95	9,294.95	9,294.95	9,294.95
	2025	9,674.19	9,674.19	9,624.86	9,624.86	9,624.86	9,624.86
	2030	10,068.91	10,068.91	9,966.48	9,966.48	9,966.48	9,966.48
	2035	10,479.74	10,068.91	9,966.48	9,966.48	9,966.48	9,966.48
	2040	10,907.32	10,907.32	10,686.52	10,686.52	10,686.52	10,686.52
	2045	11,352.35	11,352.35	11,065.83	11,065.83	11,065.83	11,065.83
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	-8,019.64	-8,324.16	-8,274.82	-8,092.82	-5,686.60	-5,290.91
	2030	-8,455.53	-8,718.88	-8,616.44	-8,434.44	-5,942.82	-5,547.12
	2035	-8,907.53	-9,129.70	-8,970.19	-8,788.18	-6,208.13	-5,812.43
	2040	-9,376.29	-9,557.28	-9,336.49	-9,154.48	-6,482.85	-6,087.16
	2045	-9,862.49	-10,002.32	-9,715.79	-9,533.78	-6,767.33	-6,371.63

Sumber: Analisis, 2023



3.2.2 Daya Dukung Daya Tampung Jasa Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

Konsep jasa ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh *millenium assessment* pada tahun 2005. Dimana jasa ekosistem didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alami yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem (MA, 2005). Jasa ekosistem dikelompokkan atas empat, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Dalam setiap kelompok tersebut dibagi pula atas beberapa bagian, sehingga secara total terdapat 20 klasifikasi jasa ekosistem (De Groot, 2002), seperti terlihat pada Tabel 3.22 sebagai berikut:

Tabel 3.22 Klasifikasi Jasa Ekosistem

Klasifikasi Jasa Ekosistem	Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
1 Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian & perkebunan untuk pangan, hasil peternakan	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.
2 Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat



Klasifikasi Jasa Ekosistem		Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
		penyimpanannya), , penyediaan air dari sumber permukaan	dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (<i>akuifer</i>) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan.
3	Serat (<i>fiber</i>)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan untuk material	Serat (<i>fiber</i>) adalah suatu jenis <u>bahan</u> berupa potongan-potongan komponen yang membentuk <u>jarangan</u> memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses <u>geologis</u> . Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat <u>tumbuhan</u> /serat <u>pangan</u> , (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian & perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta <i>bio-chemical</i> .
4	Bahan bakar (<i>fuel</i>)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil	Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu- kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuk lahannya, sedangkan untuk sumber energi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.
5	Sumberdaya genetik	Pembibitan hewan, tanaman dan bioteknologi (bahan obat dan biokimia)	Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Potensi penyediaan sumberdaya genetik dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin beragam dan kompleks
Fungsi Pengaturan (Regulating)			
1	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca & karbon	Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan <i>emisi carbon diokasida</i> dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global



Klasifikasi Jasa Ekosistem	Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
		seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.
2 Pengaturan tata aliran air & banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air	Siklus hidrologi (<i>hydrology cycle</i>), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (<i>evaporasi</i>), pendinginan massa udara (<i>kondensasi</i>), hujan (<i>presipitasi</i>), dan pengaliran (<i>flow</i>). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di <u>biosfer</u> dan litosfer yaitu <u>ekosistem</u> air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.
3 Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami	Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuk lahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan.
4 Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar	Ekosistem memiliki kemampuan untuk "membersihkan" pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (<i>self purification</i>) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat
5 Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah	Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. <i>Dalam kapasitas</i> yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk <i>menetralsir</i> zat organik yang ada <i>dalam air limbah</i> . <i>Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang.</i>
6 Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara	Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai



Klasifikasi Jasa Ekosistem	Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
		polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.
7	Pengaturan penyerbukan alami <i>(pollination)</i>	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami Penyerbukan alami (<i>pollination</i>) adalah proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada jenis tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.
8	Pengendalian hama & penyakit	Distribusi habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies <i>trigger</i> dan pengendali hama dan penyakit.
Fungsi Budaya (Cultural)		
1	Tempat tinggal & ruang hidup <i>(sense of place)</i>	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, "kampung halaman" yang punya nilai sentimental Ekosistem memberikan manfaat positif bagi manusia khususnya ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera. Ruang hidup ini didukung oleh kemampuan dan kesesuaian lahan yang tinggi sehingga memberikan dukungan kehidupan baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Jasa ekosistem sebagai tempat tinggal dan ruang hidup secara sosial sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan fisik dan geografis serta peluang pengembangan wilayah yang lebih besar.
2	Rekreasi & <i>ecotourism</i>	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentang alam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan <i>ecotourism</i> .
3	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual Ekosistem bentang alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.
Fungsi Pendukung (Supporting)		



Klasifikasi Jasa Ekosistem	Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
1 Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah	Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen. Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah.
2 Siklus hara (<i>nutrient</i>)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian	Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/ pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfir, geosfir dan hidrosfir. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan siklus hara ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik langsung atau tidak langsung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi
3 Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies	Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembuatan makanan (fotosintesis). Hasil dari fotosintesis adalah oksigen. Inilah gas yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk beraktivitas dan memungkinkan tumbuhnya banyak habitat spesies. Jasa produksi oksigen bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan.
4 Biodiversitas	Perlindungan plasma nutfah	Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna.



Klasifikasi Jasa Ekosistem	Definisi	Ruang Lingkup Pengertian
		Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

3.2.2 1 Profil Jasa Penyediaan

Jasa ekosistem penyediaan adalah barang yang dihasilkan oleh ekosistem dan dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem seperti:

1. Jasa Penyedia air bersih yaitu dengan fungsi penyediaan air untuk dimanfaatkan
2. Jasa Penyedia pangan, yaitu dengan fungsi penyediaan pangan yang dikelompokkan menjadi pangan yang diperoleh langsung dari alam (contoh: produk ikan tangkapan, tanaman pangan liar, hasil hutan yang dapat dijadikan pangan); serta pangan yang diperoleh dari hasil budidaya manusia yang mengandalkan dukungan lingkungan (contoh: produk pertanian).
3. Jasa Penyedia serat, bahan bakar dan material lainnya yaitu dengan fungsi spesies atau komponen abiotik dengan potensi penggunaan kayu, bahan bakar, atau bahan dasar
4. Jasa Penyedia sumber daya genetik yaitu dengan fungsi penyediaan spesies dengan materi genetik yang (berpotensi) bermanfaat, misalnya untuk pengobatan dan spesies ornamental.

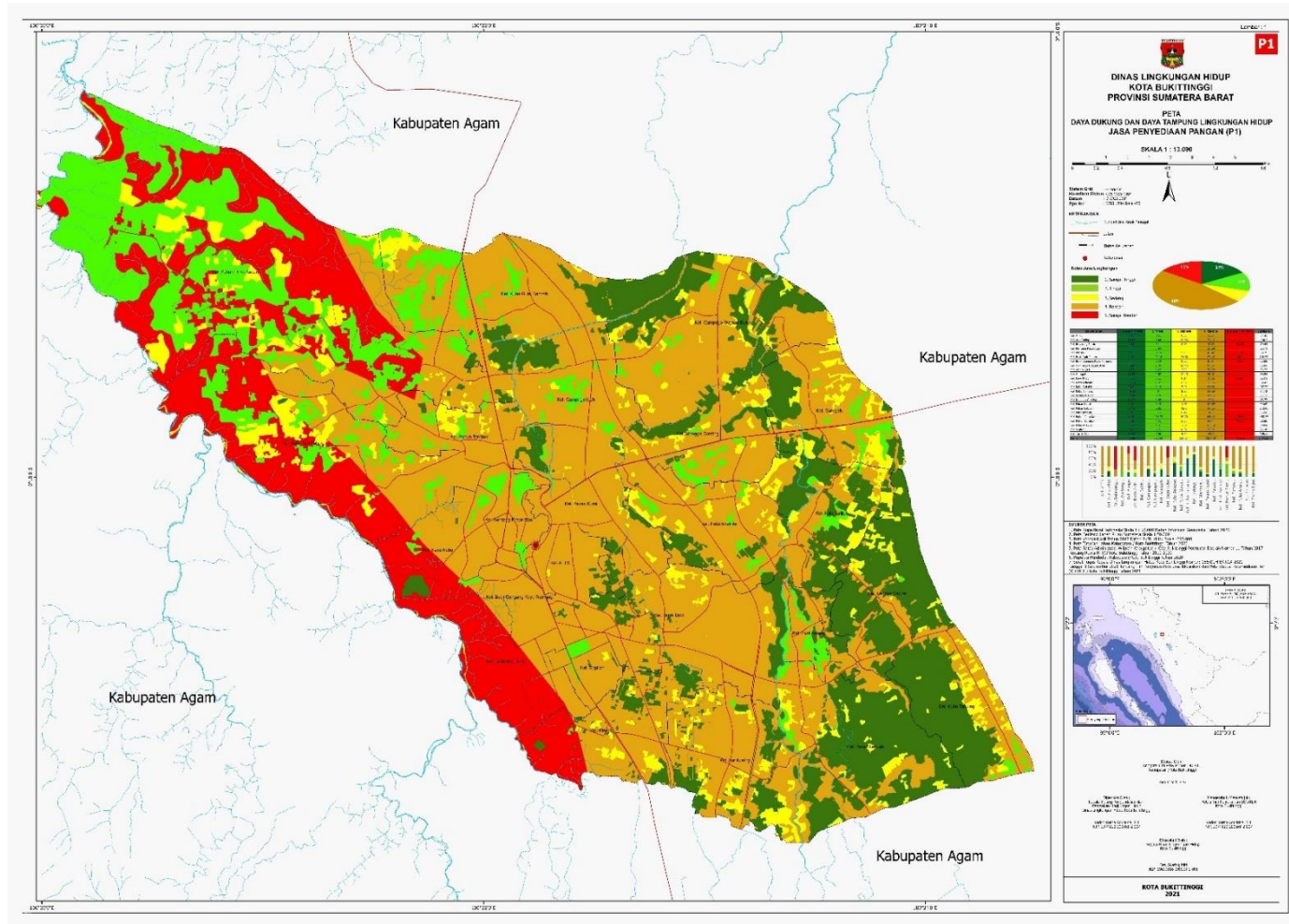
Rata-rata DDDTLH jasa penyediaan Kota Bukittinggi berada pada kategori sangat rendah dan rendah mencapai 61,11% dari luas wilayah. Semua jenis jasa penyediaan berada pada kategori sangat rendah dan rendah. DDDTLH jasa penyediaan dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut.

Tabel 3.23 DDDTLH Jasa Penyediaan

No	Nama Jasa Penyediaan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pangan	29,44%	7,5%	63,02%
2	Air Bersih	32,17%	21,9%	45,98%
3	Serat	14,85%	21,8%	63,37%

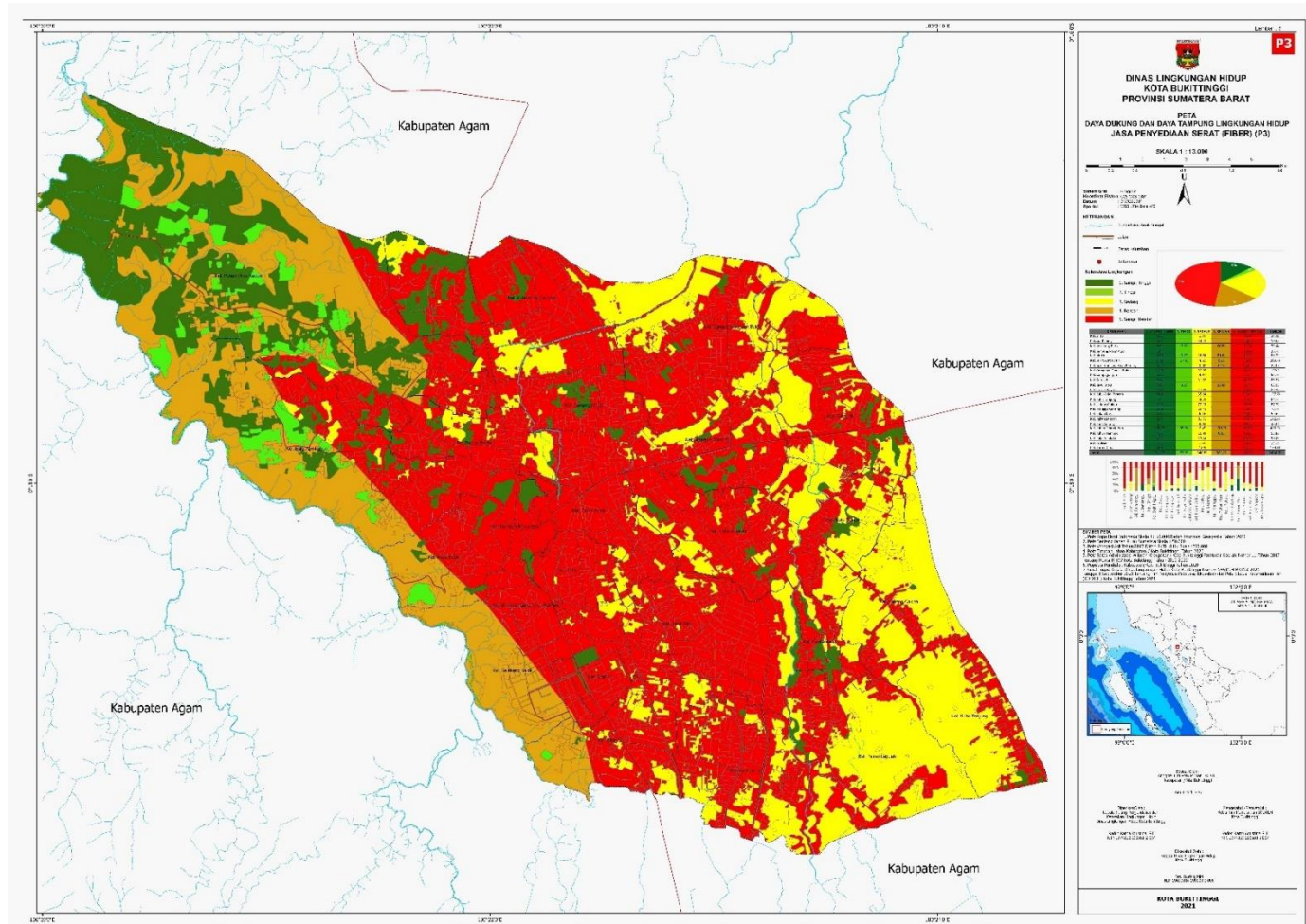


4	Bahan Bakar	12,94%	6,1%	81,01%
5	SD Genetik	18,58%	29,2%	52,19%
Rata-rata		21,60%	17,29%	61,11%



Gambar 3.36 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Bukittinggi

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021



Gambar 3.38 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kota Bukittinggi
Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021

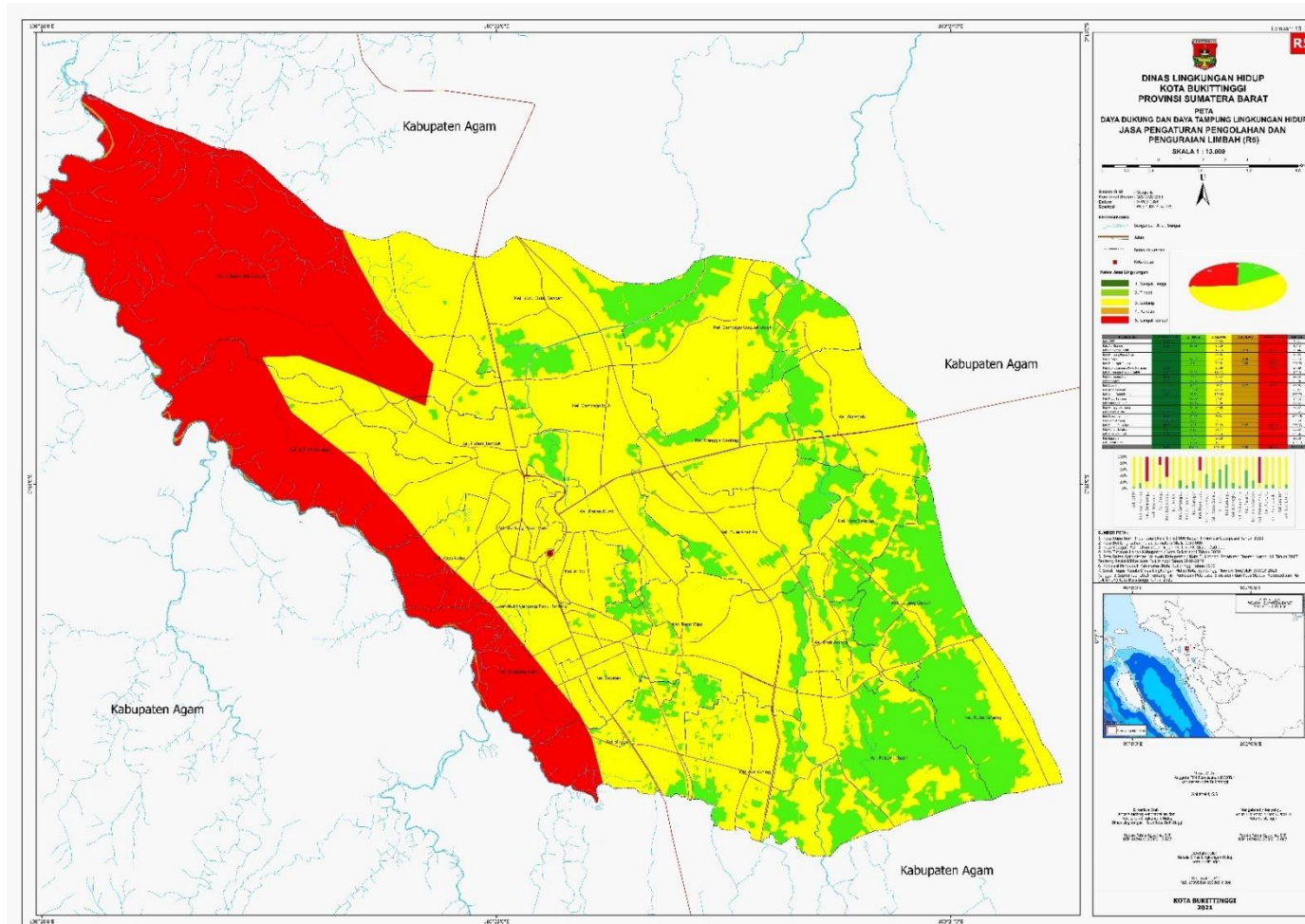


3.2.2 2 Profil Jasa Pengaturan

DDDTLH untuk jasa pengaturan di Kota Bukittinggi rata-rata juga berada pada kategori sangat rendah dan rendah. Semua jenis jasa berada pada kategori sangat rendah dan rendah, kecuali jasa Tata Aliran Air dan Banjir, jasa Pemurnian Air dan Jasa Penguraian Limbah yang berada pada kategori sedang, seperti terlihat pada Tabel dan Gambar berikut ini.

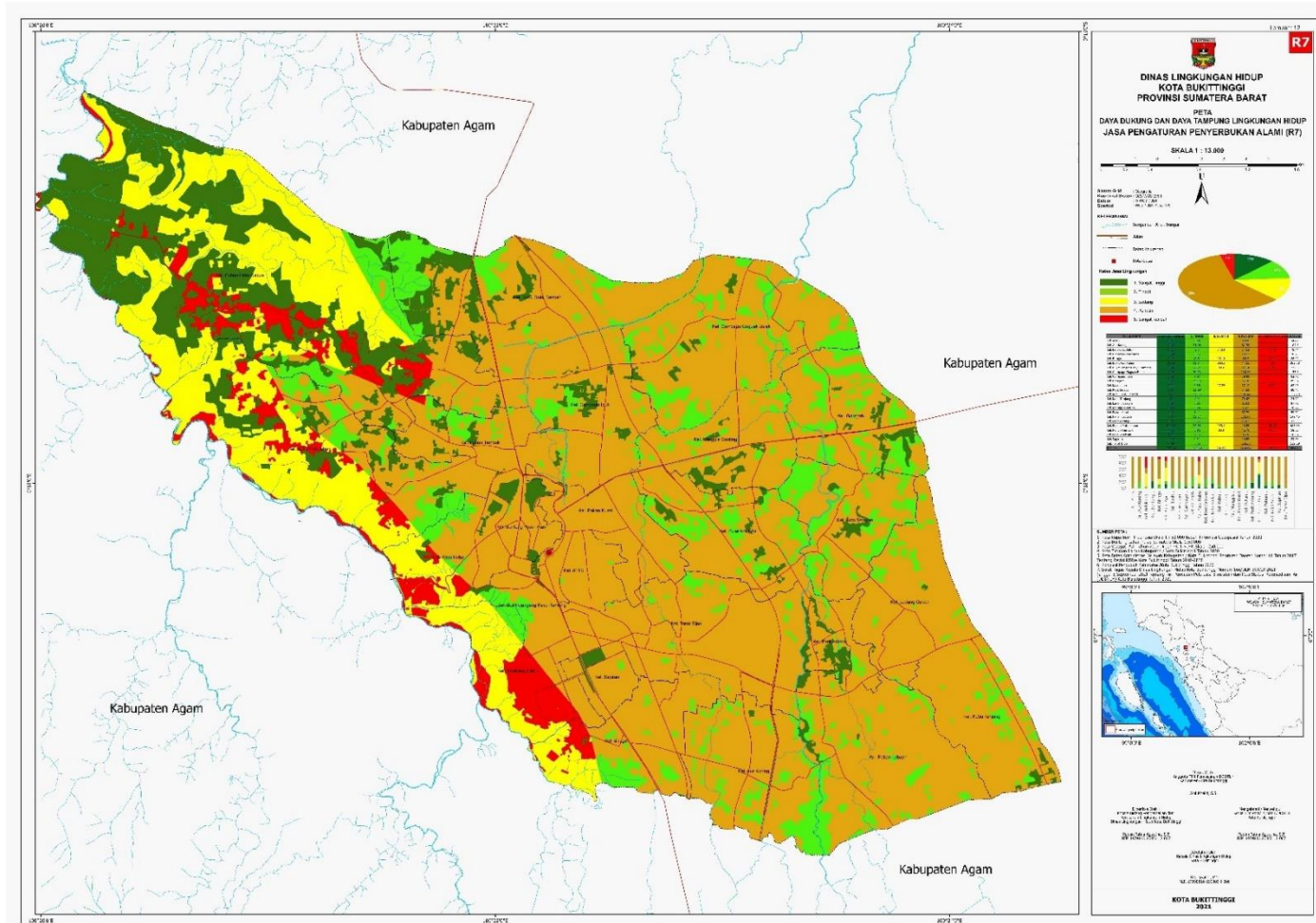
Tabel 3.24 DDDTLH Jasa Pengaturan

No	Nama Jasa Pengaturan	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Iklm	12,54%	0,4%	87,06%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	27,32%	46,8%	25,87%
3	Perlindungan Bencana	26,75%	20,1%	53,12%
4	Pemurnian Air	26,97%	47,2%	25,87%
5	Penguraian Limbah	16,92%	57,0%	26,09%
6	Kualitas Udara	4,31%	8,6%	87,06%
7	Penyerbukan Alami	23,80%	13,3%	62,92%
8	Pengendalian Hama	12,54%	17,4%	70,06%
Rata-rata		18,89%	26,35%	54,76%



Gambar 3.45 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah Kota Bukittinggi

Sumber: DDDLH Kota Bukittinggi, 2021



Gambar 3.47 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pengaturan Penyerbukan Alami (Pollination) Kota Bukittinggi

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021



3.2.2 3 Profil Jasa Budaya

Jasa budaya di Kota Bukittinggi pada umumnya mempunyai kategori sangat tinggi dan tinggi dengan rata-rata 36,13%, seperti terlihat pada Tabel dan peta di bawah ini.

Tabel 3.25 DDDTLH Jasa Budaya

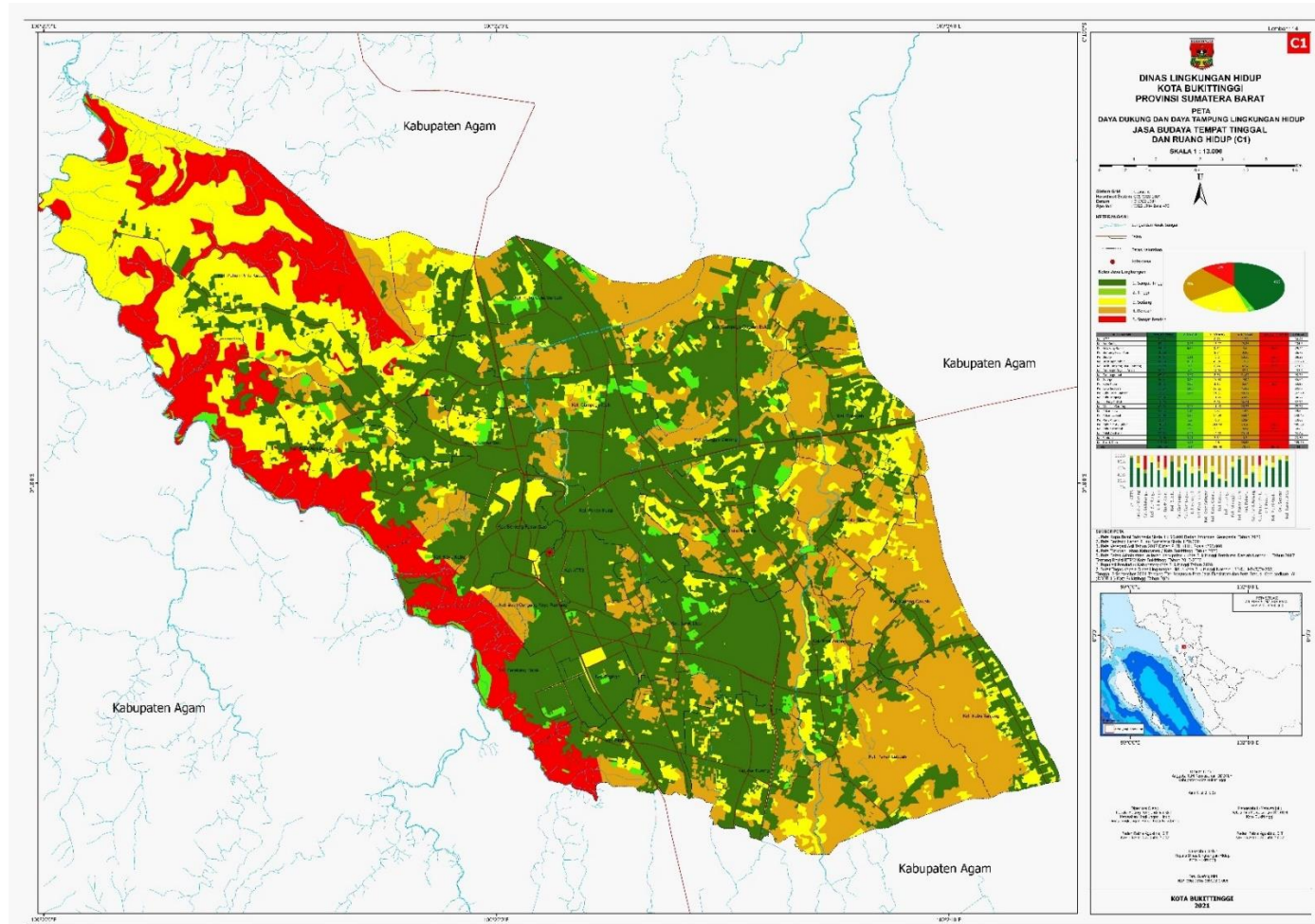
No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Iklm	45,62%	19,7%	34,69%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	45,62%	19,7%	34,69%
3	Estetika (Alam)	17,14%	57,0%	25,87%
Rata-rata		36,13%	32,12%	31,75%

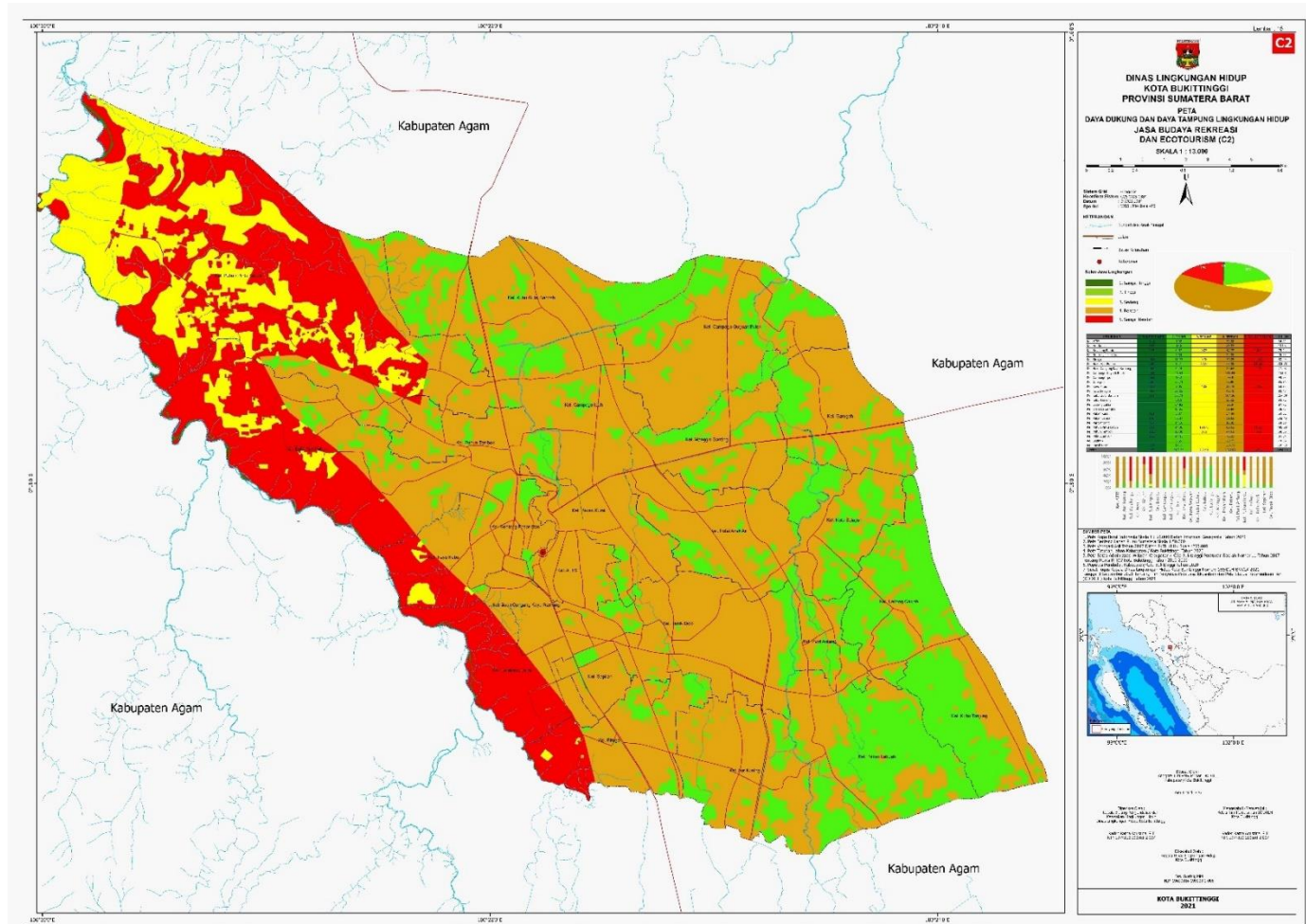
3.2.2 4 Profil Jasa Pendukung

Jasa pendukung mempunyai kategori sedang di Kota Bukittinggi. Rata-rata untuk kategori sedang adalah 60,04% dari luas wilayah Kota Bukittinggi.

Tabel 3.26 DDDTLH Jasa Pendukung

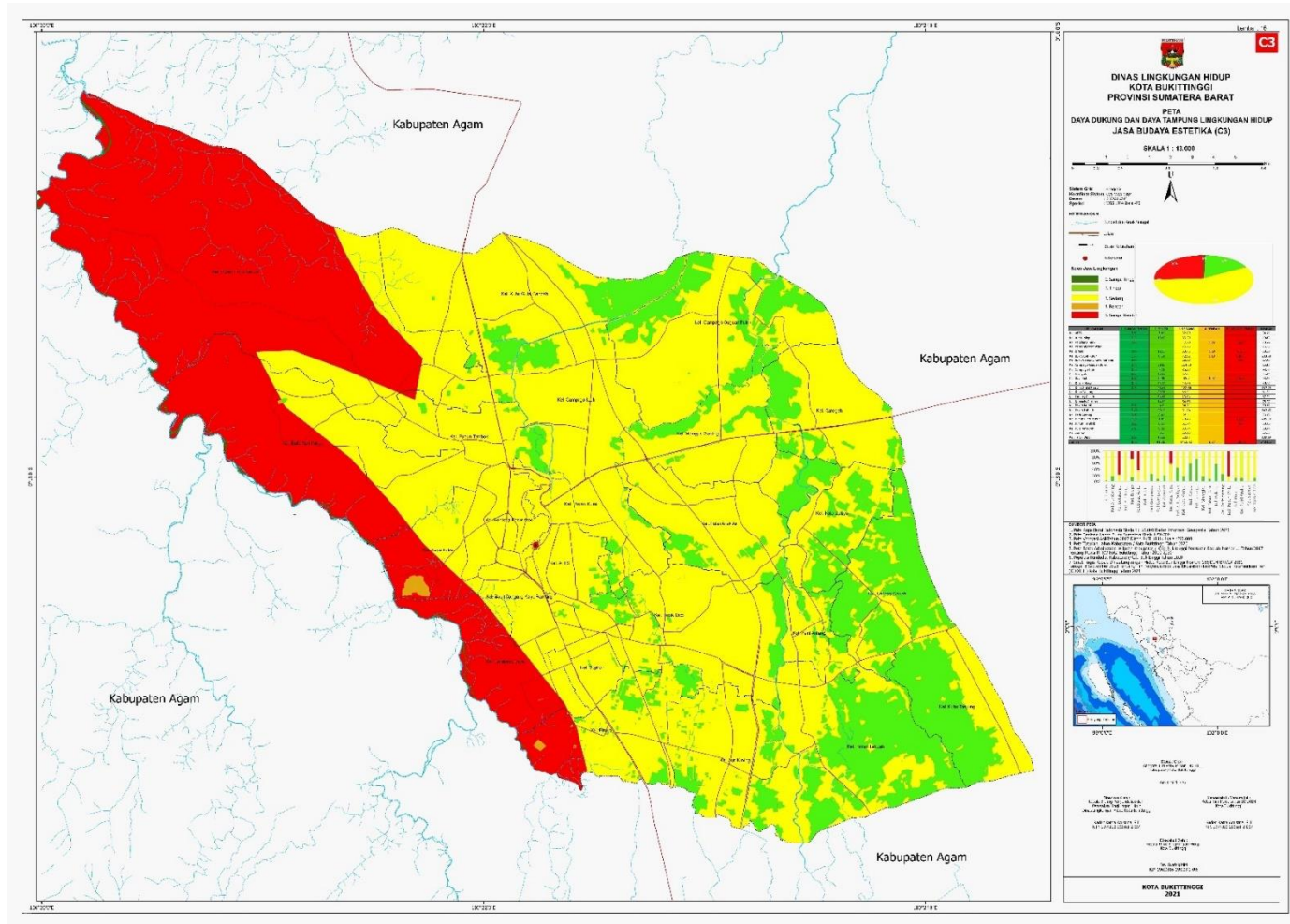
No	Nama Jasa Budaya	Persentase Luas DDDTLH		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
1	Pembentukan Tanah	20,52%	53,4%	26,09%
2	Siklus Hara	4,13%	69,8%	26,09%
3	Produksi Primer	20,70%	53,2%	26,09%
4	Biodiversitas	10,36%	63,8%	25,87%
Rata-rata		13,93%	60,04%	26,03%





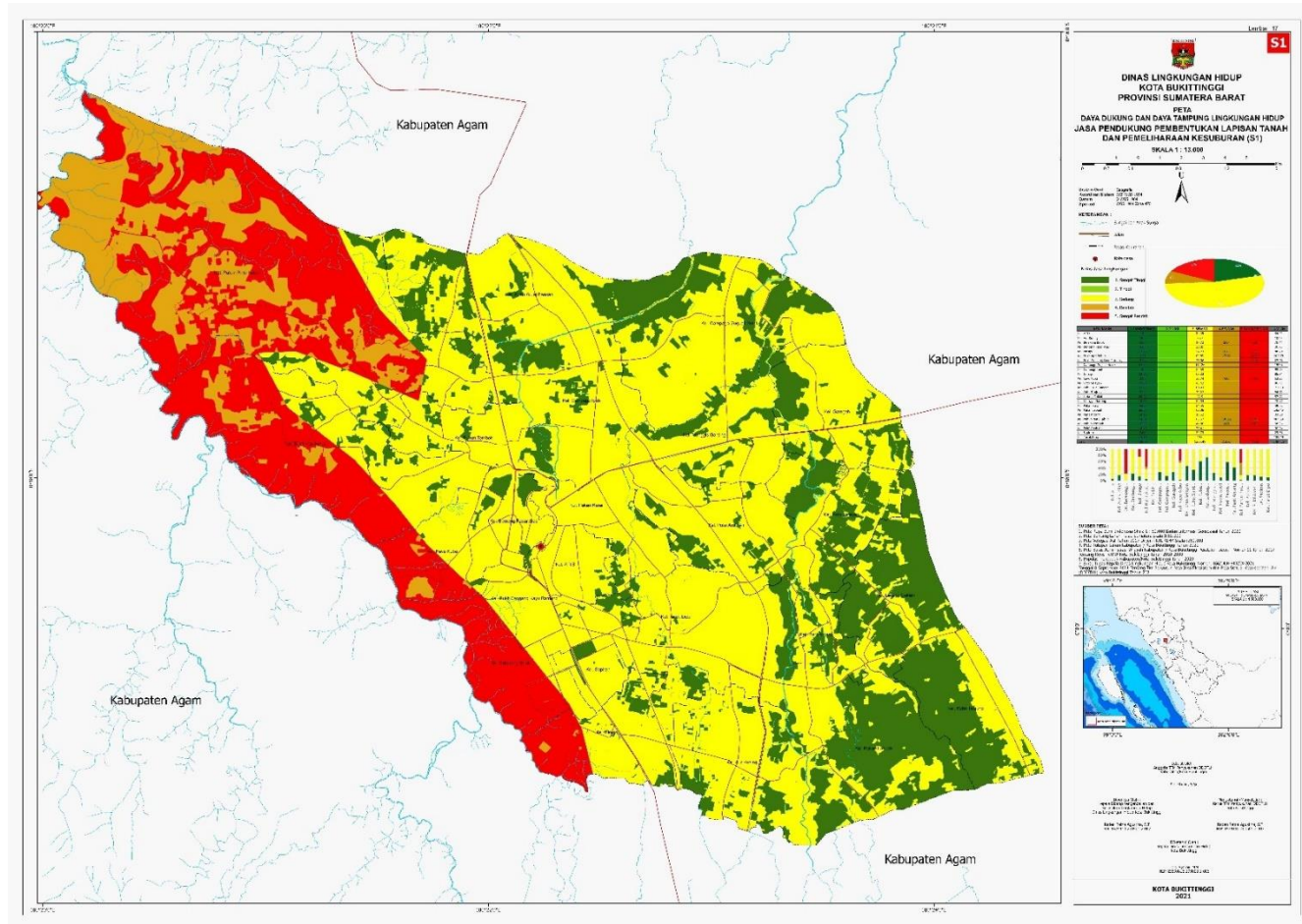
Gambar 3.50 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ecotourism Kota Bukittinggi

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021



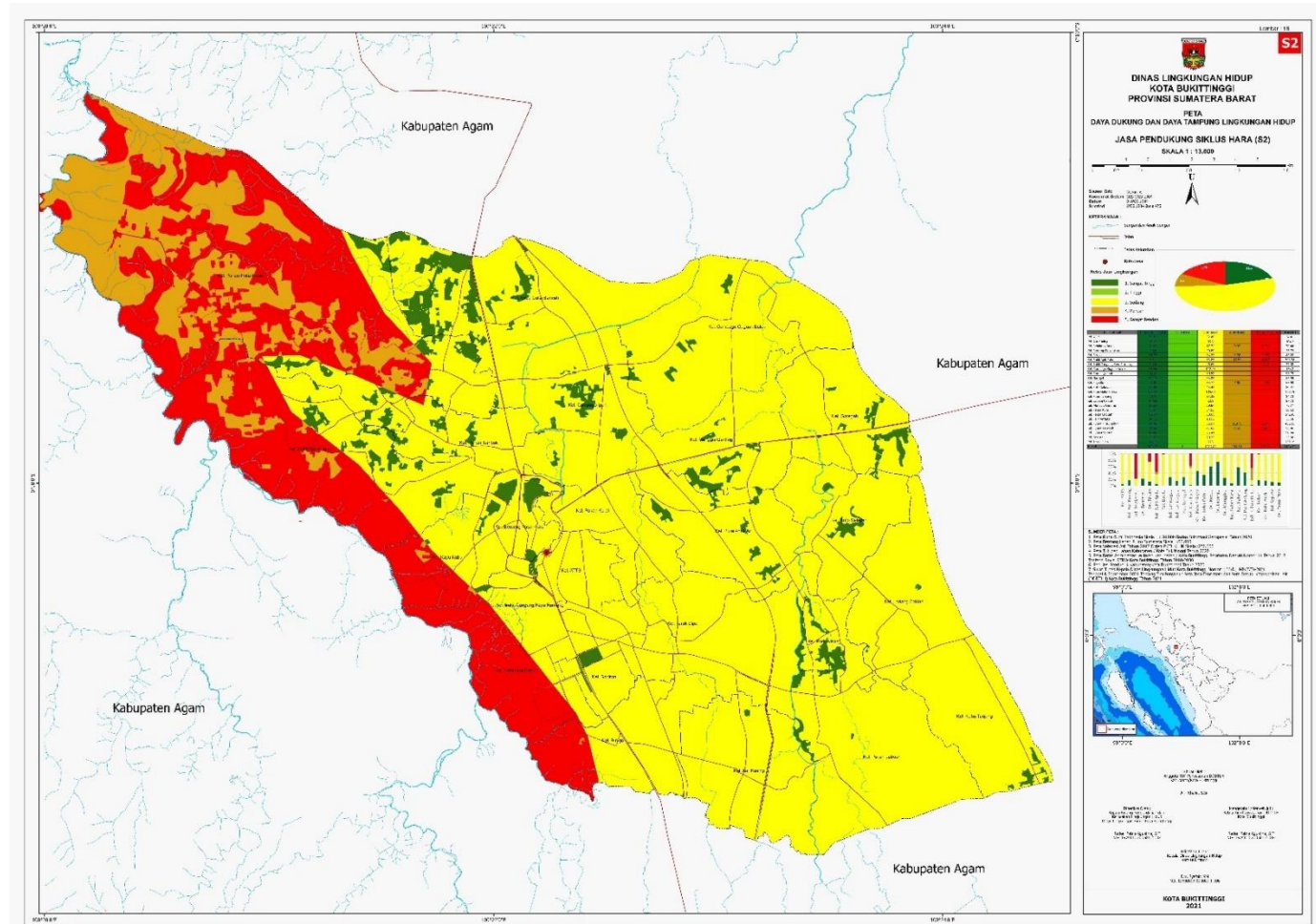
Gambar 3.51 Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Budaya Estetika (alam) Kota Bukittinggi

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021



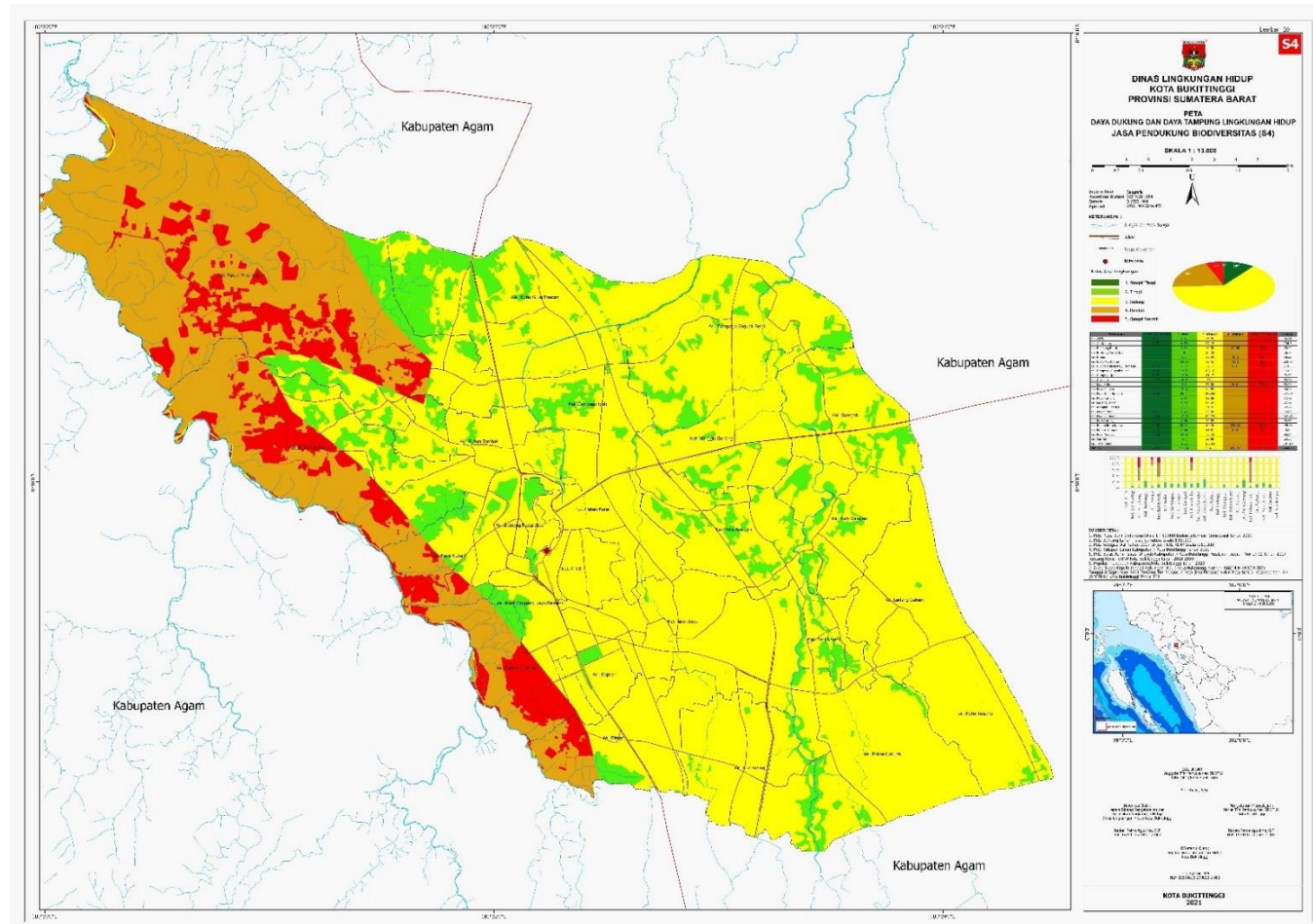
Gambar 3.52 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Kota Bukittinggi

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021



Gambar 3.53 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Siklus Hara (Nutrient Cycle) Kota Bukittinggi

Sumber: DDDLH Kota Bukittinggi, 2021



Gambar 3.55 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kota Bukittinggi

Sumber: DDDTLH Kota Bukittinggi, 2021



3.2.3 Risiko Lingkungan

Kota Bukittinggi yang memiliki morfologi permukaan yang berbukit serta berada pada jalur Patahan Sesar Semangko, mengakibatkan kota ini memiliki kerentanan terhadap bencana alam (gempa bumi dan tanah longsor). Dengan kondisi tersebut, maka harus ada kebijakan yang tepat dalam pembangunan wilayah kota serta perencanaan terhadap mitigasi bencana.

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023, terdapat kejadian bencana dalam rentang tahun 2019 sampai 2023 seperti terlihat pada Tabel 3.35.

Tabel 3.27 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Bukittinggi

NO	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian					Jumlah Kerugian				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gempa Bumi	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
2	Gunung Api	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Banjir	15	23	21	37	13	-	-	-	-	-
5	Tanah Longsor	4	9	2	6	2	-	-	-	-	-
6	Cuaca Extrim (Pohon Tumbang)	33	111	46	93	48	-	-	-	-	-
7	Pencarian Orang Hilang	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
8	Penemuan Mayat	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
10	Kebakaran	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: BPBD Kota Bukittinggi

3.2.3 1 Rawan Gempa Bumi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, Kota Bukittinggi tumbuh dan berkembang di sepanjang jalur patahan aktif Sumatera yang lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Kota ini juga dikelilingi oleh dua buah gunung berapi, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Salah satu gempa yang memberikan dampak besar adalah gempa yang terjadi pada 6 Maret 2007, dengan kedalaman 33 kilometer, Segmen Sianok bergerak dengan magnitudo 6,4 mengguncang hingga VIII Modified Mercalli Intensity (MMI) daerah sekitar Bukittinggi, Payakumbuh dan Solok. Berselang dua jam kemudian, dengan kekuatan magnitudo 6,3, pukul 12.49 WIB, Segmen Sumani ikut bergerak. Selain dirasakan di seputar Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota, gempa ini juga menggetarkan Padang dan daerah pesisir Sumbar sampai VI MMI. Gempa yang juga dirasakan sampai ke Riau dan



Semenanjung Malaka. Laporan Badan Koordinasi Nasional (Bakornas) Penanggulangan Bencana mencatat 68 orang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan akibat gempa. Selain yang meninggal, BMKG mencatat sebanyak 826 korban luka-luka. Sementara, 43.719 rumah rusak dan hancur di area sekitar Bukittinggi, Agam (timur), Tanah Datar, Solok, Payakumbuh dan Limapuluh Kota.

Saat ini, pemerintah Kota Bukittinggi melalui Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 telah menetapkan kawasan rawan bencana longsor dan gempabumi. Adapun kawasan rawan bencana longsor dan gempabumi adalah Ngarai Sianok dengan luas total kawasan $\pm 263,19$ Ha.

Tabel 3.28 Kerawanan Terhadap Gempa Bumi Di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Gempa Bumi	Luas_Ha	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Sapiran	Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)	23,41	0,93%
2		Belakang Balok		79,51	3,16%
3		Kubu Tanjung		85,03	3,38%
4		Ladang Cakiah		88,95	3,54%
5		Birugo		88,41	3,52%
6		Aur Kuning		104,35	4,15%
7		Pakan Labuah		142,48	5,67%
8		Parit Antang		33,70	1,34%
Total Luas				645,83	25,70%
9	Guguak Panjang	Benteng Pasar Atas	Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)	26,73	1,06%
10		Bukit Cangang Kayu Ramang		27,11	1,08%
11		Aur Tajungkang Tengah Sawah		34,42	1,37%
12		Pakan Kurai		59,63	2,37%
13		Kayu Kubu		64,16	2,55%
14		Tarok Dipo		139,24	5,54%
15		Bukit Apit Puhun		205,98	8,20%
Total Luas				557,27	22,17%
16	Mandiingin Koto Selayan	Puhun Tembok	Zona Rawan Tinggi (VII-VIII MMI)	58,87	2,34%
17		Manggis Ganting		78,80	3,14%
18		Koto Selayan		80,50	3,20%
19		Garegeh		86,93	3,46%
20		Campago Ipuh		93,76	3,73%
21		Pulai Anak Air		90,87	3,62%
22		Campago Guguak Bulek		170,01	6,76%



No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Gempa Bumi	Luas Ha	%
2		Puhun Pintu Kabun		489,58	19,48%
3		Kubu Gulai Bancah			
2		Kubu Gulai Bancah		160,94	6,40%
4					
JUMLAH (Ha)				1.310,26	52,13%
TOTAL (Ha)				2.513,35	100,00%

Sumber: Geoportal Inarisk BNPB, 2023

3.2.3 2 Bahaya Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan baik secara alami maupun perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Untuk lebih jelasnya mengenai bahaya kebakaran hutan dan lahan Di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.29 Kerawanan Terhadap Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Karhutla	Luas (Ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Rendah	1,24	0,35%
2		Kubu Tanjung		34,94	9,81%
3		Birugo		12,41	3,49%
4		Pakan Labuah		30,81	8,65%
JUMLAH (Ha)				79,39	22,30%
5	Mandiingin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun	Rendah	0,88	0,25%
			Sedang	1,99	0,56%
			Tinggi	0,99	0,28%
				125,32	35,20%
6	Kubu Gulai Bancah	Rendah	3,00	0,84%	
		Sedang	3,12	0,88%	
JUMLAH (Ha)				8,70	2,44%
JUMLAH (Ha)				276,58	77,70%
TOTAL (Ha)				355,98	100,00%

Sumber: Geoportal Inarisk BNPB, 2023

3.2.3 3 Bahaya Longsor

Tingkat kerentanan gerakan tanah dibagi atas empat tingkat yaitu : (1) sangat rendah, gerakan tanah jarang terjadi (2) rendah, gerakan tanah bisa terjadi bila ada gangguan, (3) menengah, gerakan tanah berpotensi terjadi bila curah hujan tinggi dan ada gangguan pada lereng, (4) tinggi, sering terjadigerakan tanah



bila musim hujan dan gerakan tanah lama aktif kembali. Lokasi yang memiliki kerentanan longsor tinggi berada pada kawasan Bukit Apit Puhun, Puhun Pintu Kabun dan Kubu Gulai Bancah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Kerawanan Terhadap Resiko Longsor Di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Tanah Longsor	Luas (Ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Rendah	2,64	0,70%
			Sedang	27,58	7,30%
2		Birugo	Rendah	1,00	0,26%
			Sedang	6,49	1,72%
JUMLAH (Ha)				37,71	9,98%
3		Bukit Apit Puhun	Rendah	13,19	3,49%
			Sedang	28,86	7,64%
			Tinggi	37,58	9,94%
4	Guguak Panjang	Bukit Cangang Kayu Ramang	Rendah	0,55	0,15%
			Sedang	0,82	0,22%
5		Kayu Kubu	Rendah	3,00	0,79%
			Sedang	20,50	5,42%
JUMLAH (Ha)				104,49	27,65%
6	Mandiingin Koto Selayan	Kubu Gulai Bancah	Rendah	4,63	1,22%
			Sedang	4,60	1,22%
			Tinggi	5,32	1,41%
7		Puhun Pintu Kabun	Rendah	4,85	1,28%
			Sedang	24,07	6,37%
			Tinggi	192,25	50,87%
JUMLAH (Ha)				235,71	62,37%
TOTAL (Ha)				377,91	100,00%

Sumber: Geoportals Inarisk BNPB, 2023

3.2.3 4 Bahaya Banjir Bandang

Lokasi yang memiliki resiko indeks banjir bandang tinggi di Kota Bukittinggi berada di Kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kelurahan Bukit Apit Puhun di Kecamatan Guguak Panjang dan di kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

Tabel 3.31 Kerawanan Terhadap Resiko Banjir Bandang Di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Banjir Bandang	Luas (Ha)	%
1	Kec. Aur Birugo Tigo Baleh	Kel. Belakang Balok	Tinggi	5,67	10,70%
JUMLAH (Ha)				5,67	10,70%
2	Kec. Guguak Panjang	Kel. Bukit Apit Puhun	Tinggi	15,87	29,96%
		Kel. Kayu Kubu		4,88	9,20%
3			Sedang	1,00	1,89%



JUMLAH (Ha)			21,75	41,06 %	
4	Kec. Mandiangin Koto Selayan	Kel. Puhun Pintu Kabun	Rendah	1,00	1,89%
			Sedang	2,83	5,34%
			Tinggi	21,73	41,02 %
JUMLAH (Ha)			25,56	48,25 %	
TOTAL (Ha)			52,97	100,00 %	

Sumber: Geoportal Inarisk BNPB, 2023

3.2.3 5 Bahaya Banjir

Indeks banjir dibagi menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Kawasan dengan indeks banjir tinggi Di Kota Bukittinggi adalah Keurahan Parit Antang, Tarok Dipo, Campago Guguak Bulek, Garegeh, Koto Selayan, Kubu Gulai Bancah, Manggis Ganting dan Pulai Anak Air.

Tabel 3.32 Kerawanan Terhadap Resiko Banjir Di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Banjir	Luas (Ha)	%
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Pakan Labuah	Sedang	0,72	0,39%
2		Parit Antang	Rendah	1,50	0,81%
			Sedang	3,13	1,69%
			Tinggi	0,39	0,21%
Total Luas				5,74	3,10%
3	Guguak Panjang	Tarok Dipo	Rendah	6,18	3,33%
			Sedang	7,84	4,23%
			Tinggi	0,43	0,23%
Total Luas				14,45	7,79%
4	Mandiangin Koto Selayan	Campago Guguak Bulek	Rendah	25,46	13,72%
			Sedang	31,90	17,20%
			Tinggi	3,04	1,64%
5		Garegeh	Rendah	5,98	3,22%
			Sedang	16,48	8,89%
			Tinggi	4,21	2,27%
6		Koto Selayan	Rendah	1,43	0,77%
			Sedang	13,14	7,09%
			Tinggi	2,23	1,20%
7	Kubu Gulai Bancah	Sedang	1,00	0,54%	
		Tinggi	13,95	7,52%	
8	Manggis Ganting	Rendah	27,69	14,93%	
		Sedang	12,02	6,48%	
9	Pulai Anak Air	Sedang	5,72	3,08%	
		Tinggi	1,05	0,57%	
Total Luas				165,31	89,11%
Total Luas Keseluruhan				185,50	100,00 %

Sumber: Geoportal Inarisk BNPB, 2023

3.2.3 6 Bahaya Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah kecepatan angin, suhu udara,



kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengakibatkan kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Lokasi yang termasuk indeks cuaca ekstrim tinggi Di Kota Bukittinggi berada di Kelurahan Belakang Balok, Birugo, Sapiran, Bukit Cangang Kayu Ramang, Puhun Pintu Kabun dan Puhun Tembok.

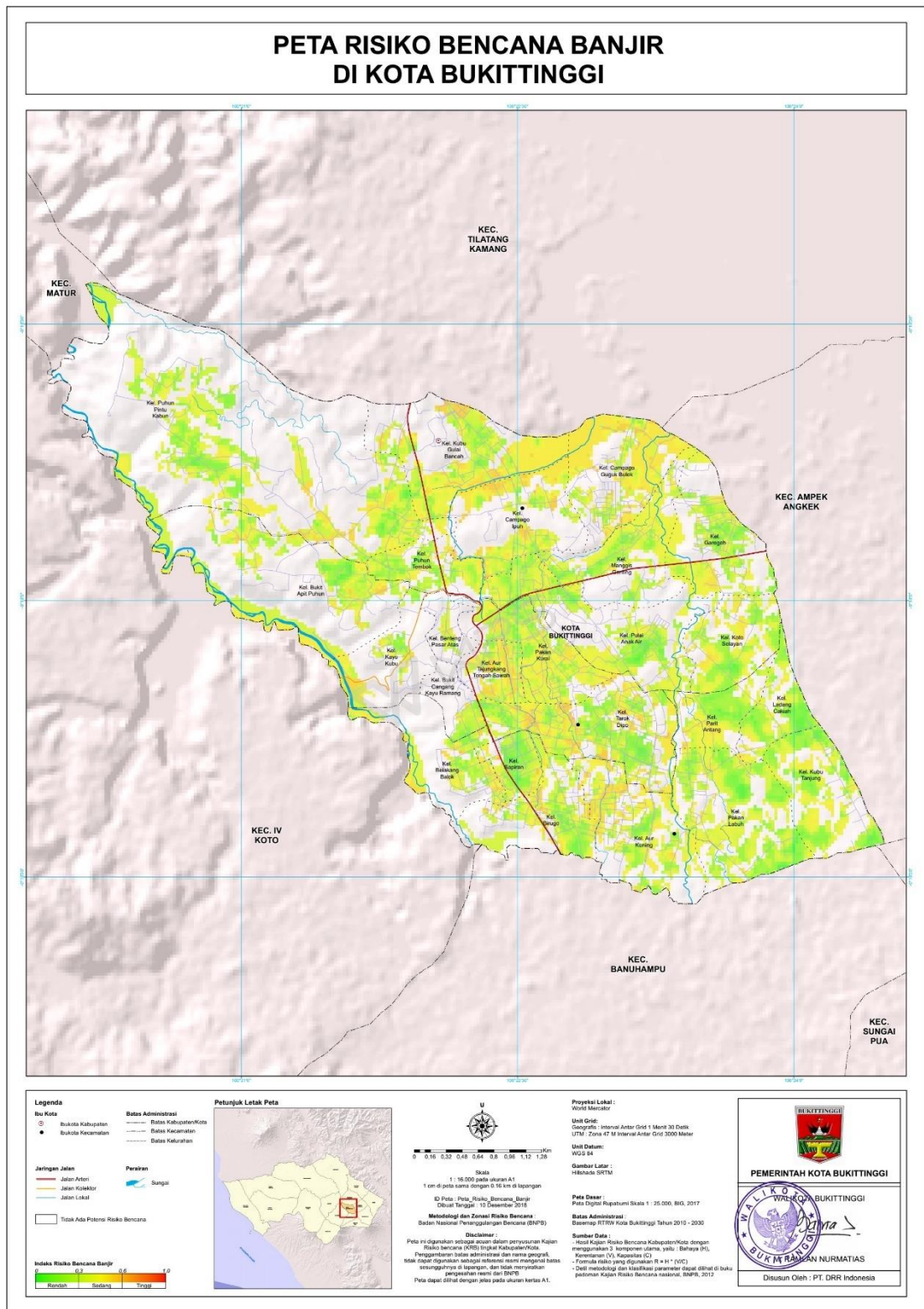
Tabel 3.33 Kerawanan Terhadap Resiko Cuaca Ekstrem Di Kota Bukittinggi

No	Kecamatan	Kelurahan	Indeks Cuaca Ekstrem	Luas (Ha)	%	
1	Aur Birugo Tigo Baleh	Belakang Balok	Rendah	28,19	4,33%	
			Sedang	17,37	2,67%	
			Tinggi	21,38	3,29%	
2		Birugo	Rendah	5,67	0,87%	
			Sedang	9,49	1,46%	
			Tinggi	6,24	0,96%	
3			Sapiran	Tinggi	0,45	0,07%
JUMLAH (Ha)				88,78	13,65%	
4		Guguak Panjang	Bukit Apit Puhun	Rendah	99,99	15,37%
	Sedang			28,01	4,31%	
5	Bukit Cangang Kayu Ramang		Sedang	0,06	0,01%	
			Tinggi	2,49	0,38%	
6	Kayu Kubu		Rendah	22,48	3,46%	
			Sedang	6,85	1,05%	
JUMLAH (Ha)				159,88	24,58%	
7	Mandiingin Koto Selayan	Puhun Pintu Kabun	Rendah	254,84	39,18%	
			Sedang	122,80	18,88%	
			Tinggi	23,41	3,60%	
8			Puhun Tembok	Tinggi	0,64	0,10%
JUMLAH (Ha)				401,69	61,77%	
TOTAL (Ha)				650,35	100,00%	

Sumber: Geoportals Inarisk BNPB, 2023

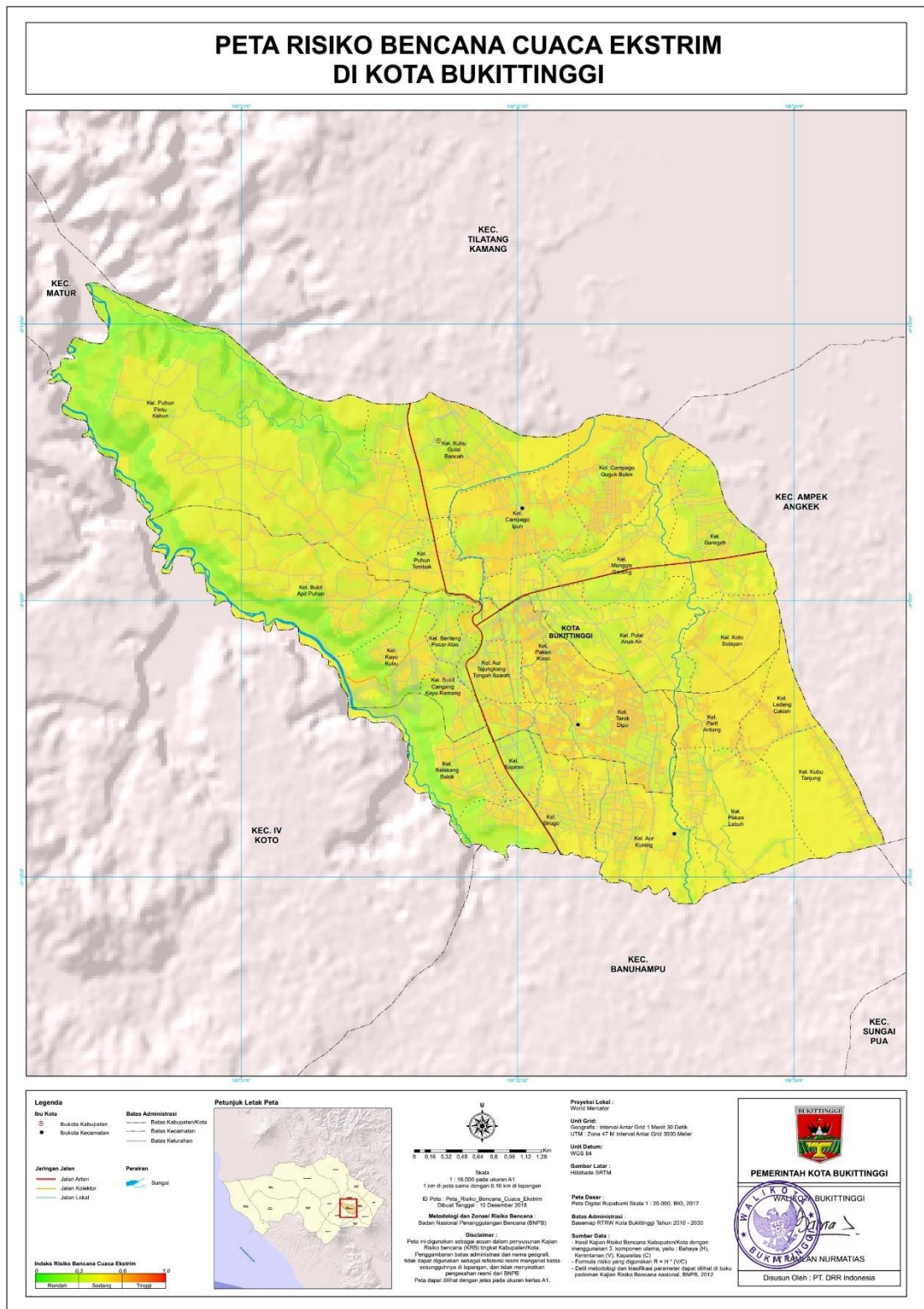
3.2.3 7 Bahaya Erupsi Gunung Api

Letusan Gunungapi Marapi tidak berdampak secara langsung terhadap Kota Bukittinggi, dampak yang timbul akibat erupsi gunung api adalah hujan abu vulkanik yang dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas warga. Kota Bukittinggi merupakan tempat pengungsi dari Kabupaten Agam bila Gunung Marapi erupsi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan kerjasama dengan Kabupaten Agam terkait penanganan pengungsi bencana erupsi gunung api serta penyediaan tempat pengungsian. Selain itu, juga perlu melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait bahaya erupsi gunung api khususnya di daerah perbatasan.



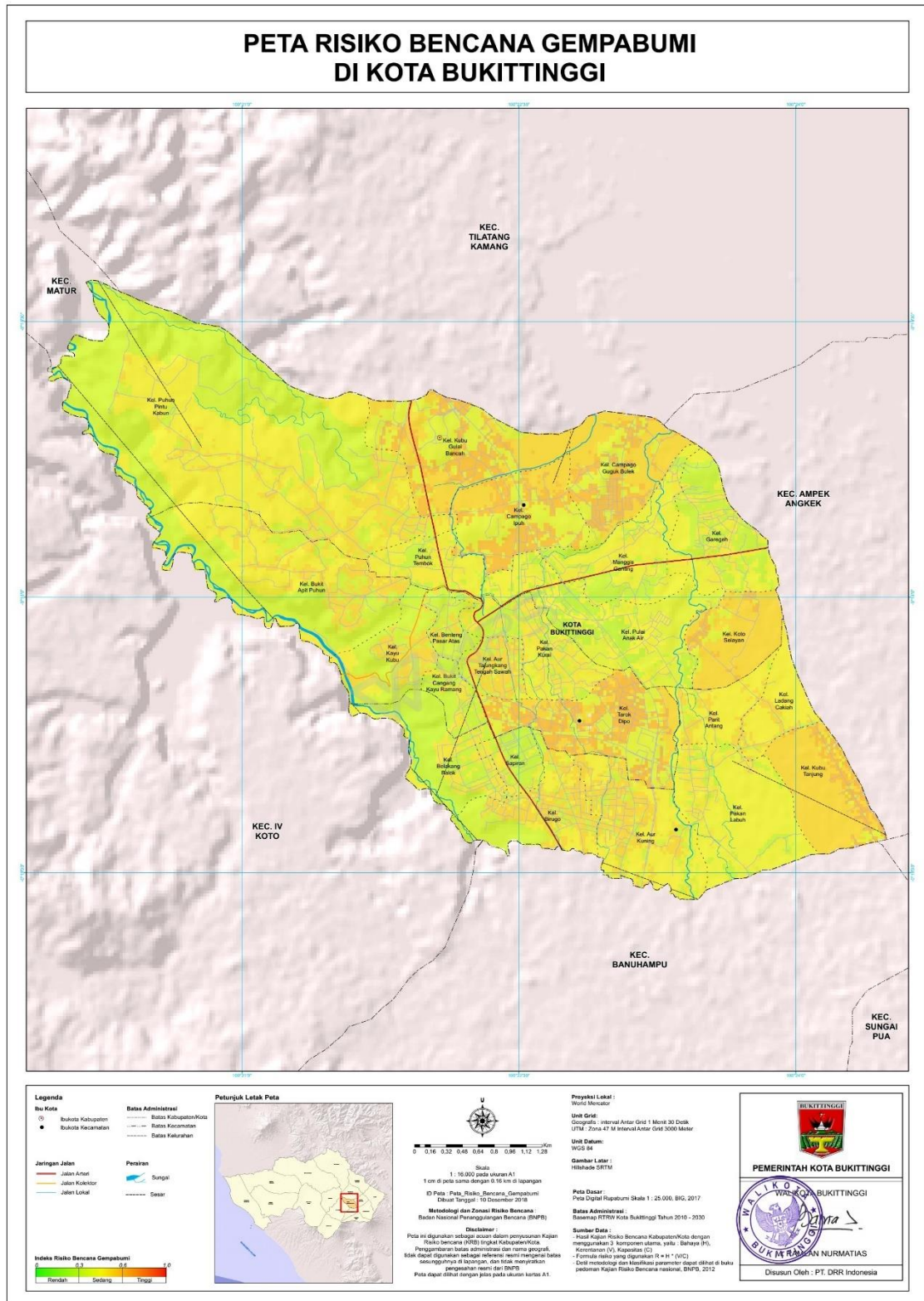
Gambar 3.56 Peta Risiko Bencana Banjir

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023



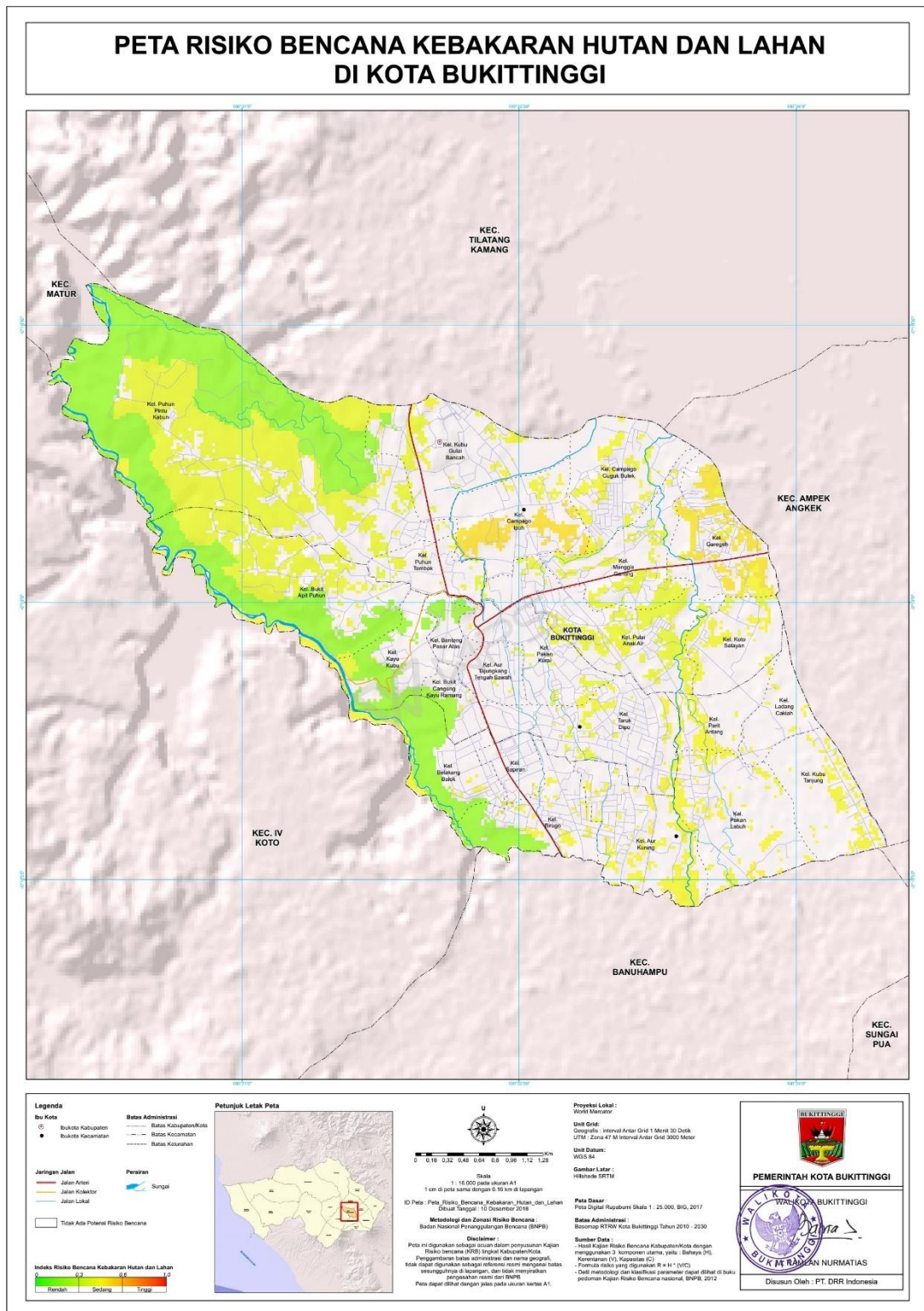
Gambar 3.57 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023

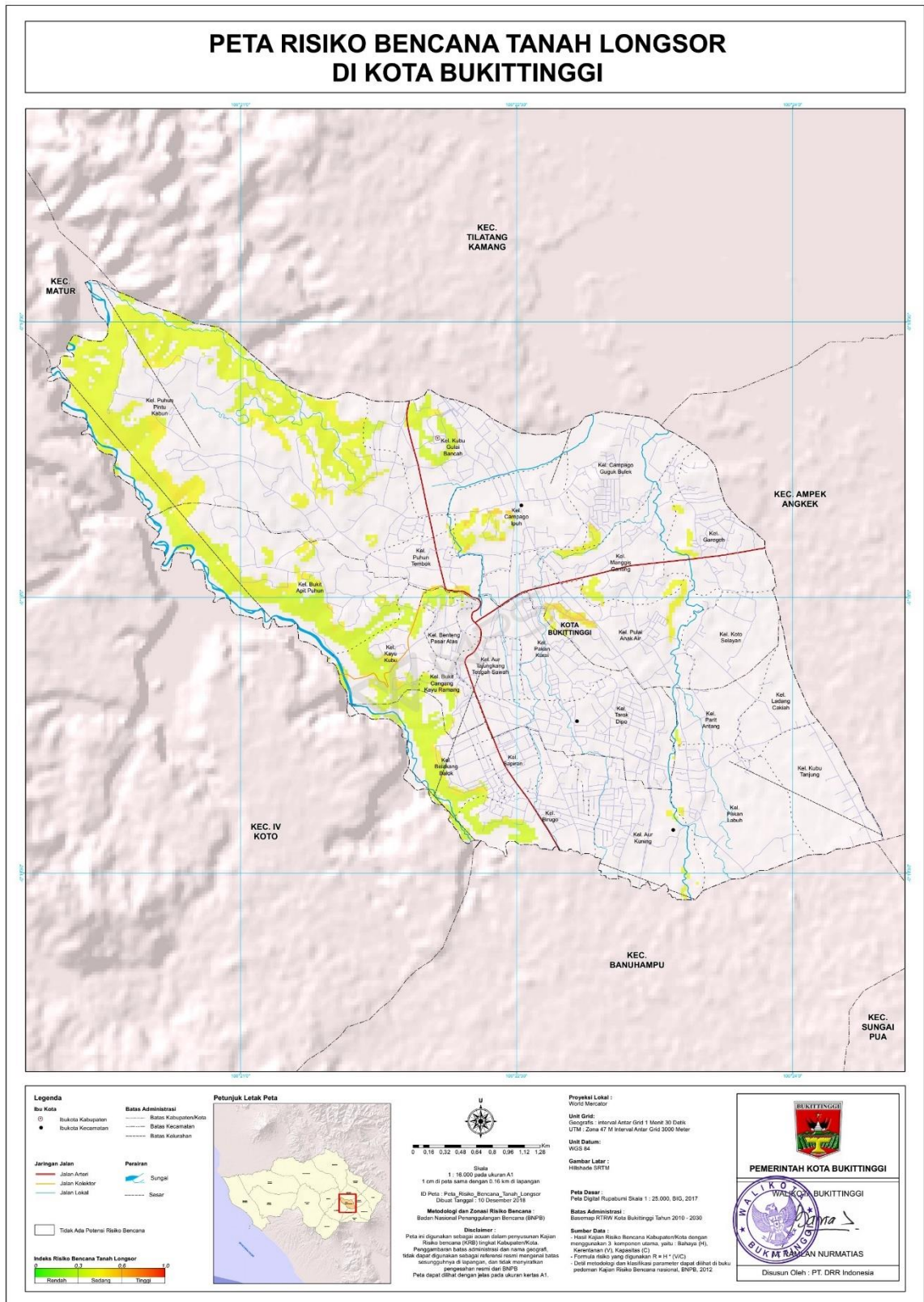


Gambar 3.58 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi

Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023



Gambar 3.60. Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023



Gambar 3.61 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor

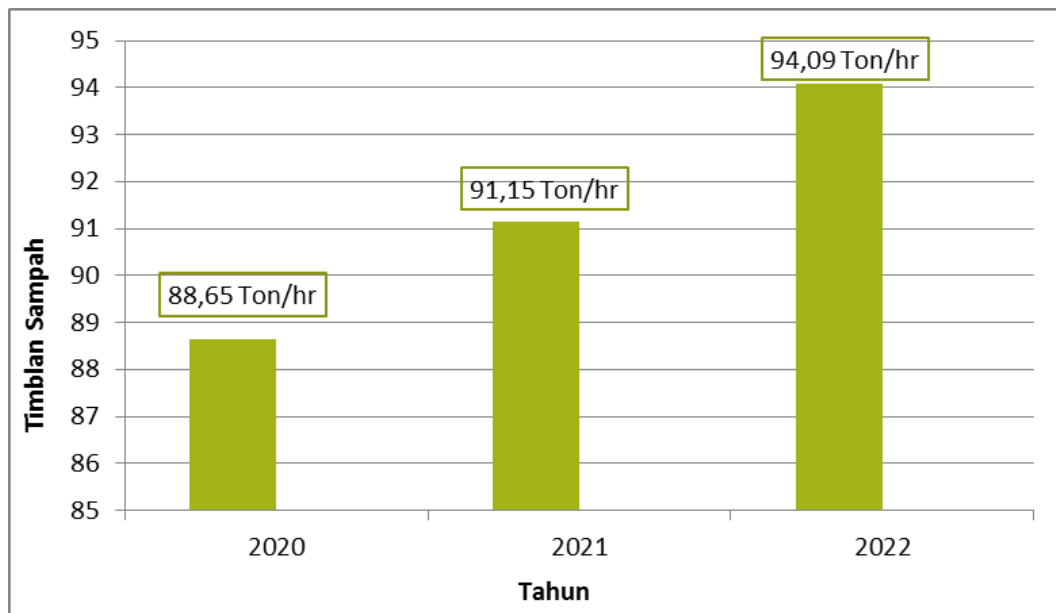
Sumber: Kajian Risiko Bencana Kota Bukittinggi Tahun 2019-2023



3.2.3 8 Pengelolaan Persampahan

Peningkatan timbulan sampah akan memberikan tekanan terhadap lingkungan dan dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan karena sampah terkait dengan hubungan nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan.

Berdasarkan Gambar 3.62 dapat dilihat timbulan sampah Kota Bukittinggi pada Tahun 2022 sebesar 94,09 Ton/hari, mengalami kenaikan jumlah timbulan sampah dibandingkan dengan timbulan sampah tahun 2021 dan 2020 yaitu masing masing 91,15 Ton/hr dan 88,65 Ton/hr. Terjadinya kenaikan timbulan sampah pada tahun 2022 disebabkan karena meningkatnya jumlah penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2022, artinya penambahan jumlah timbulan sampah berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk.



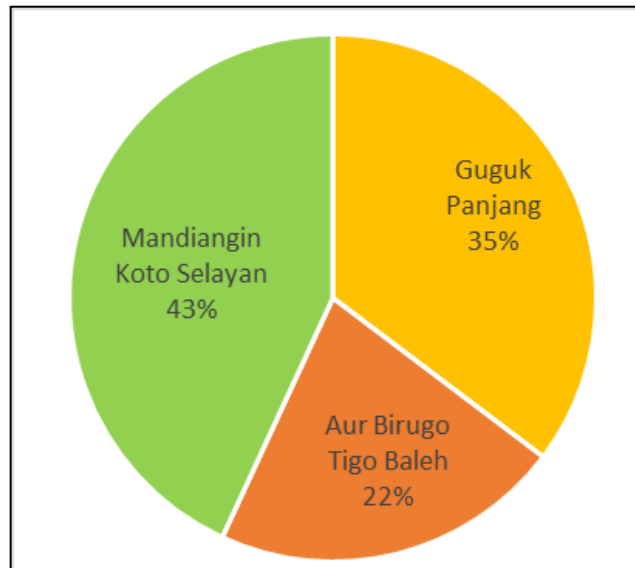
Gambar 3.62 Timbulan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2020-2022

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Distribusi timbulan sampah berdasarkan kecamatan disajikan pada Gambar 3.63. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kecamatan Mandiangin Koto Senayan memiliki jumlah timbulan sampah tertinggi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Timbulan sampah Pasar Bawah Kota Bukittinggi per hari Kota Bukittinggi Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.34. Berdasarkan tabel tersebut terlihat

peningkatan timbulan sampah di Pasar Bawah pada hari rabu dan sabtu yang merupakan "hari balai" di Kota Bukittinggi.



Gambar 3.63 Distribusi Timbulan Sampah per Kecamatan di Kota Bukittinggi Tahun 2022

Sumber: Kota Bukittinggi Dalam Angka 2022

Tabel 3.34 Timbulan Sampah Pasar Bawah Kota Bukittinggi Per Hari Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Hari	Berat Sampah (Kg/Hari)		Volume Sampah (m ³ /Hari)
		Organik	Anorganik	
1	Senin	5.252	771	5,0000
2	Selasa	5.543	792	6,0000
3	Rabu	7.305	1.006	9,0000
4	Kamis	4.765	774	5,5000
5	Jum'at	5.009	803	6,0000
6	Sabtu	8.163	1.141	12,0000
7	Minggu	5.213	861	7,0000
9	Total	41.250	6.148	50,5000
10	Rata-rata/hari	5.892	878	7,214

Sumber : DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan jumlah penduduk, dengan asumsi timbulan sampah 0,7 kg/orang/hari dapat diperkirakan timbulan sampah yang dihasilkan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut. Pada tahun 2045 diperkirakan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan adalah 98,02 ton per hari. Tabel 3.35 menunjukkan bahwa timbulan sampah tidak akan jauh berkurang dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk. Namun pola pengelolaan timbulan sampahlah yang akan mampu berperan dalam banyaknya timbulan sampah kedepannya, yaitu dapat berkurang



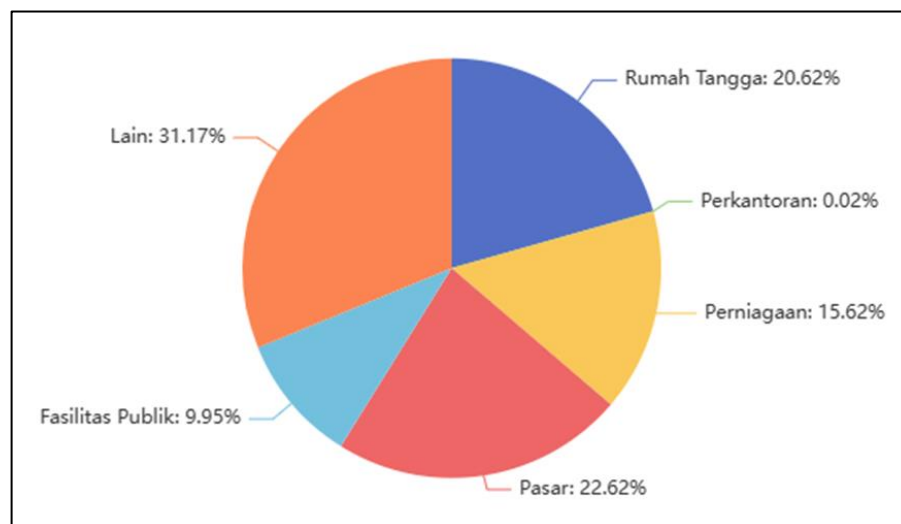
menjadi 67,04 ton per hari. Untuk dapat mengurangi timbulan sampah tersebut diperlukan pola pemanfaatan dan pengelolaan sampah di sumbernya.

Tabel 3.35 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bukittinggi

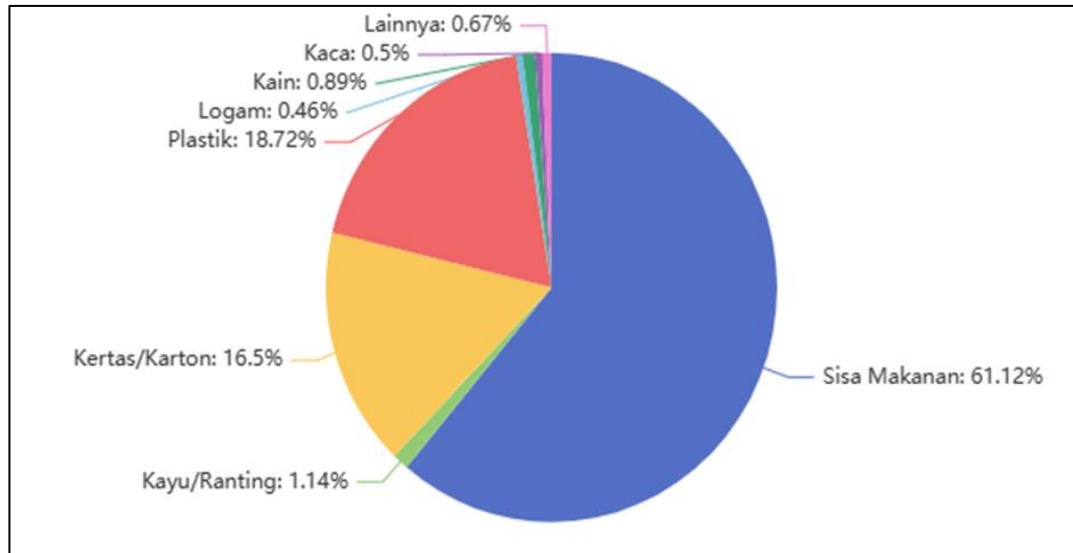
			BAU	LPP	0,59	%	
				Timbulan Sampah	0,7	kg/orang/hari	
			Asumsi	LPP	0,4	%	
Penduduk				Timbulan Sampah	0,5	kg/orang/hari	
LPP	0,59%	0,4%	Estimasi (Ton/hari)	Tahun	BAU	LPP Turun	LPP Turun + Timbulan Turun
2022	122.311	122.311		2022	85,62	85,62	61,16
2025	124.489	123.785		2025	87,14	86,65	61,89
2030	128.205	126.280		2030	89,74	88,40	63,14
2035	132.032	128.826		2035	92,42	90,18	64,41
2040	135.973	131.423		2040	95,18	92,00	65,71
2045	140.032	134.073		2045	98,02	93,85	67,04

Sumber : Hasil Analisa, 2023

Berdasarkan SIPSN KLHK, komposisi sampah Kota Bukittinggi berdasarkan sumber sampah tertinggi adalah sampah yang berasal dari pasar dengan persentase 22,62% dan diikuti oleh sampah yang berasal dari rumah tangga dengan persentase 20,62%. Sedangkan komposisi sampah berdasarkan jenis sampah tertinggi berasal dari sampah sisa makanan dengan presentase mencapai 61,12%%. Komposisi sampah Kota Bukittinggi berdasarkan jenis dan sumber dapat dilihat pada Gambar 3.64.



a) Berdasarkan Sumber Sampah



b) Berdasarkan Jenis Sampah
Gambar 3.64 Komposisi Sampah Kota Bukittinggi

Sumber: SIPSN KLHK, 2022

Berdasarkan Data Sistem Informasi Persampahan Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2022 sampah yang terkelola di Kota Bukittinggi mencapai 96,18% dari total timbulan sampah 45.707,54 per tahun, yang terdiri dari pengurangan sampah mencapai 7,09% dan penanganan sampah 89,09% seperti terlihat pada Tabel 3.36. Tingkat daur ulang sampah (*Recycling Rate*) di Kota Bukittinggi mencapai 9,28%.

Tabel 3.36 Capaian Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Indikator	2020	2022
1	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)(A)	45.368,41	45.707,54
2	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)(B)	1.649,27	3.241,35
3	%Pengurangan Sampah(B/A)	3,64	7,09
4	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)(C)	40.716,11	40.720,00
5	%Penanganan Sampah(C/A)	89,75	89,09
6	Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)(B+C)	42.365,38	43.961,34
7	%Sampah Terkelola(B+C)/A	93,38	96,18
8	Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)(D)	1.088,33	1.761,51
9	Bahan baku Sampah Tahunan (ton/tahun)(E)	292,00	2.482,00
10	Recycling Rate(D+E)/A	3,04	9,28

Sumber : Sistem Informasi Persampahan Nasional, KLHK, 2023

Sarana Pevadahan yang di sediakan oleh Kota Bukittinggi berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat Penampungan Sementara ini ada yang yang terbuat dari bahan kayu, batu dan kontainer. Pemanfaatan Tempat Penampungan Sementara di Kota



Bukittinggi di gunakan untuk pengumpulan sampah dengan Pola Komunal langsung. Kota Bukittinggi memiliki 16 unit Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tersebar di berbagai lokasi di wilayah Kota Bukittinggi dengan rincian 1 unit TPS Kayu, 11 Unit TPS Batu/Beton dan 4 unit TPS Kontainer.

Penanganan sampah di Kota Bukittinggi berupa pengumpulan dimulai dari mengumpulkan sampah dari sumber Domestik dan Non Domestik ke TPS/TPST/Transfer depo dan dilanjutkan dengan pengangkutan ke TPA regional Payakumbuh. Total sampah domestik dan non domestik Kota Bukittinggi tahun 2022 sebesar 127,689 ton/hari. Sampah Kota Bukittinggi yang masuk ke TPA regional Payakumbuh sekitar 104,761 Ton/hari (81,89% dari total timbulan sampah Kota Bukittinggi). Total sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022 menurun dibandingkan dengan Tahun 2021 yaitu berkurang sebesar rata-rata 16,29 ton/hari. Pengumpulan sampah di Kota Bukittinggi terdiri dari dua pola, pola pertama merupakan pola komunal langsung, pada pola ini sampah dibuang langsung ke TPS oleh masyarakat, yang nantinya akan dibawa truk ke TPA. Pola yang kedua adalah pola individual tidak langsung, dilakukannya penjemputan sampah oleh becak motor / mobil pick up ke sumber sampah menuju lokasi transit depo, selanjutnya diangkut oleh dump truk ke TPA. Pada umumnya pola yang banyak diterapkan di Kota Bukittinggi adalah pola Individual tidak langsung, salah satu alasannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi sumber sampah yang berasal dari luar Kota Bukittinggi.

Jumlah petugas kebersihan yang ada di DLH Kota Bukittinggi berjumlah 203 orang dengan sarana yang digunakan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah dapat dilihat pada Tabel 3.37. Semua sarana tersebut dalam kondisi baik.

Tabel 3.37 Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022

No	Jenis Alat	Jumlah (unit)	Kondisi
1	Becak Motor	40	Baik
2	Road Sweeper	1	Baik
3	Truk Sampah	17	Baik
4	SkidLoder	1	Baik
5	Amroll Truck	4	Baik

Sumber : DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023



(a) Becak Motor



(b) Road Sweeper



(c) Dump Truck



(d) Skid Loader

Gambar 3.65 Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

Kota Bukittinggi mempunyai Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, Penggunaan Ulang, Pendaauran Ulang, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir, seperti terlihat pada Gambar 3.66. Kota Bukittinggi memiliki 1 unit bangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Tabek Gadang Kelurahan Aur Kuning kecamatan ABTB. Luas lahan 150 m². Kapasitas sampah organik yang dapat diolah di TPST ini adalah 0,8 ton/hari yang berasal dari sampah organik Pasar Bawah dan Pasar Aur Kuning.



Gambar 3.66 Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Tabek Gadang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

Kota Bukittinggi memiliki Stasiun Peralihan Antara atau sering di sebut Transfer Depo (lihat Gambar 3.67). Transfer Depo adalah sarana tempat pemindahan dari alat angkut kecil (becak motor) ke alat angkut yang lebih besar (*Dump Truck*) yang selanjutnya akan diangkut ke TPA. Transfer Depo berlokasi di Belakang Kantor Dinas Lingkungan Hidup Talao, tepatnya di Talao Kelurahan Campago Guguak Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Salayan yang beroperasi pada Pukul 08.30. s/d 20.00 WIB.

Sampah yang sudah terkumpul di TPS dan Transfer Depo akan diangkut menuju TPA Regional Payakumbuh dengan *Dump truk / Compactor* sampah. Banyaknya jumlah total timbulan sampah yang tidak berimbang dengan jumlah armada pengangkutan yang tersedia, sehingga pengangkutan sampah ke TPA tidak maksimal. Untuk mengatasi permasalahan ini, 19 unit Truck melaksanakan ritasi pengangkutan ke TPA Regional sebanyak dua kali dalam sehari. Waktu ritasi pengangkutan untuk seluruh truk sampah yaitu pagi hari, sebagian truk melakukan ritasi kedua pada siang hari dan sebagian lagi melakukan ritasi kedua pada malam hari.



Gambar 3.67 Transfer Depo Kota Bukittinggi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

Berdasarkan Edaran Walikota Bukittinggi Nomor 189-45-011-2021 Tanggal 19 Juli 2021 masyarakat Kota Bukittinggi dihimbau untuk mengantarkan/mengumpulkan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) mulai pukul 18.00 sampai pukul 20.00 WIB setiap harinya, sedangkan untuk masyarakat yang sampahnya dijemput oleh becak motor / mobil Pick Up akan dijemput petugas mulai dari jam 09.00 WIB (Pagi) sampai 11.00 WIB (siang).

Keberhasilan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh dukungan peraturan yang meliputi pembentukan institusi pengelola, penetapan/pengaturan kebersihan termasuk didalamnya penetapan retribusi. Dasar hukum pengelolaan kebersihan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Beberapa produk hukum yang melingkupi penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kota Bukittinggi adalah :

1. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor 120/8/GSB-2013, Nomor 9/PK/2013, Nomor 180/12/Huk-F/2013 tentang Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
3. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan



4. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Persampahan/ Kebersihan
5. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan wadah/kemasan Makanan dan Minuman Berbahan Plastik.
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Startegi Kota Bukittinggi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
8. Surat Edaran Walikota Bukittinggi No 189-45-611-2021, Tentang Perubahan Jadwal Pembuangan Sampah di Kota Bukittinggi.

Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah keterlibatan masyarakat dalam memangku tanggung jawab baik pasif maupun aktif secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah kota untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungan. Peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan persampahan kota, namun peran serta masyarakat ini sangat tergantung kepada kondisi sosial budaya masyarakat yang membentuk karakter masyarakat itu sendiri. Beberapa peran serta masyarakat Kota Bukittinggi dalam pengelolaan sampah adalah:

1. Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah
2. Pengolahan sampah organik dengan Rumah Kompos;
3. Pengolahan sampah organik dengan Budidaya Magot

Hingga tahun 2022, terdapat 9 bank sampah di Kota Bukittinggi. Namun hanya 2 Bank Sampah yang memiliki status aktif seperti terlihat pada Tabel 3.38. Hal ini disebabkan oleh:

1. Masih belum melembaganya keinginan untuk menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing.
2. Belum ada pola baku bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.
3. Masih rendahnya persepsi dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan lancar.



Tabel 3.38 Status Bank Sampah Kota Bukittinggi Tahun 2022

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	Status
1	Aur Tajungkang Tengah Sawah	2016	Bank Sampah Mutiara Indah	Aktif
2	Kel. Campago Ipuh	2016	Bank Sampah Tanjung Indah Baru	Aktif
3	Jl. By Pass Kel. Campago Ipuh	2016	Bank Sampah Famili Raya	Tidak Aktif
4	Kel. Campagi Ipuh	-	Bank sampah Tanjung Baru (nora)	Tidak Aktif
5	Puhun Pintu Kabun	2016	Bank sampah Roy lestari	Tidak Aktif
6	Kel.Pulai Anak Aia	2016	Bank sampah jaya raya	Tidak Aktif
7	Birugo	2015	Bank sampah berkah	Tidak Aktif
8	Belakang Balok	2015	Bank sampah maidarling	Tidak Aktif
9	Tarok Dipo	2016	Bank sampah tarok dipo berseri	Tidak Aktif

Sumber : DIKPLHD Kota Bukittinggi, 2023

Selain bank sampah, terdapat 7 Unit Rumah Kompos (lihat Gambar 3.68) yang dikelola Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yang tersebar di berbagai kelurahan yaitu:

1. Rumah Kompos Kelurahan Parit Antang,
2. Rumah Kompos Kelurahan Manggis Ganting,
3. Rumah Kompos Kelurahan Campago Guguk Bulek,
4. Rumah Kompos kelurahan Bukit Apit,
5. Rumah Kompos Kelurahan Pintu Kabun,
6. Rumah Kompos Kelurahan Birugo, dan
7. Rumah Kompos Kantor DLH Kota Bukittinggi.



Gambar 3.68 Rumah Kompos Kelurahan Birugo

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

Masing-masing rumah memiliki kemampuan pengolahan sampah organik untuk diolah setiap harinya 250 kg/hari yang bersumber dari sampah rumah tangga di wilayah kelurahan setempat. Jika target sampah tidak terpenuhi dari sampah organik masyarakat, sampah organik bisa di supply dari sampah pasar. Target kompos yang harus dihasilkan adalah 50 Kg/hari.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah selanjutnya adalah budidaya Maggot. Sampah organik dimanfaatkan untuk pakan Maggot, dan maggot sendiri dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Budi Daya Magot di Kota Bukittinggi dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bawah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Ada 6 unit Rumah Maggot kelompok Swadaya Masyarakat yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Bukittinggi, yaitu:

1. Budidaya Maggot Sejati di kelurahan Bukit Apit,
2. Budidaya Maggot Ambancang Saiyo di kelurahan Gulai Bancah,
3. Budidaya Maggot berkah Ubah Nasib di kelurahan Koto selayan,
4. Budidaya Maggot Rumbala di kelurahan Campago Guguak Bulek,
5. Budidaya Maggot di Kelurahan Manggis Ganting, dan

6. Budidaya Maggot Kelurahan Parit Antang.

Selain itu dalam mendukung penerapakan 3R dan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, serta mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi mengembangkan fasilitas Pusat Daur Ulang dengan kapasitas 10 ton/hari.



Gambar 3.69 Gambar Pusat Daur Ulang (PDU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, 2023

3.2.4 Pemanfaatan Sumber Daya Alam

3.2.4 1 Perkebunan

Komoditi perkebunan dengan luas tanam paling besar di Kota Bukittinggi pada tahun 2022 adalah kelapa dan kopi. Dari seluruh jenis perkebunan tahun 2022 tercatat luas tanam kelapa dan kopi masing-masing 4,56 Ha dan 5,50 Ha dengan produksi 0,73 ton dan 0,60 ton. Tanaman kelapa paling banyak diusahakan oleh Masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, sedangkan tanaman kopi paling banyak diusahakan oleh masyarakat di Kecamatan Guguk Panjang.

3.2.4 2 Hortikultura

Luas tanam sayuran paling besar di Kota Bukittinggi pada tahun 2021 adalah tanaman cabai besar, yaitu 60 Ha, dan Bawang Daun yang memiliki luas tanam sebesar 30 Ha. Untuk sayuran dengan produksi paling tinggi adalah terong, mencapai 616,2 ton, diikuti dengan produksi cabai besar yaitu 590,3 ton, dan bawang daun mencapai 416,5 ton.



Untuk tanaman biofarmaka, Kota Bukittinggi paling banyak memproduksi kunyit, dengan jumlah produksi mencapai 3.772 kg pada tahun 2021, diikuti dengan tanaman jahe dengan jumlah produksi mencapai 2.876 kg. Jumlah produksi tanaman kunyit dan jahe mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 2.717 kg, dan 1.895 kg untuk masing-masingnya.

Untuk produksi buah-buahan di Kota Bukittinggi didominasi oleh buah salak dengan jumlah produksi mencapai 910 ton, dan sawo dengan produksi mencapai 447 ton.

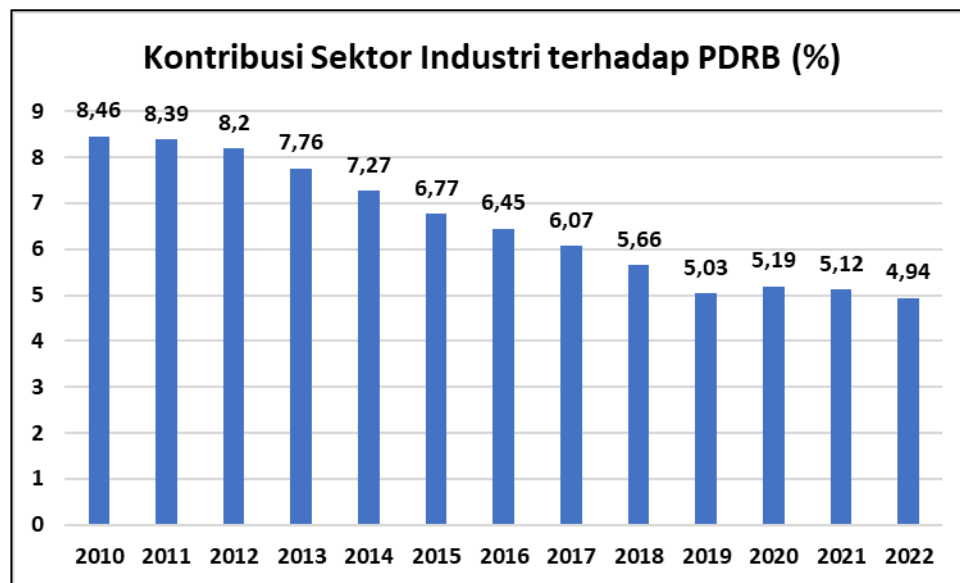


3.2.4 3 Peternakan

Populasi ternak terbesar di Kota Bukittinggi tahun 2022 adalah populasi kambing (289 ekor) dan sapi (224 ekor). Produksi daging sapi potong dan kambing berturut-turut masing-masingnya sebanyak 1.338,48 ton dan 3,25 ton pada tahun 2022. Produksi daging unggas ayam ras pada tahun 2022 mencapai 8,41 ton, dan produksi telur ayam ras sebanyak 2.746 kg, dan telur itik sebanyak 3.572 kg.

3.2.4 4 Industri

Sektor industri merupakan salah satu sektor potensial dalam perekonomian Kota Bukittinggi. Namun kontribusi sektor industri dalam PDRB Kota Bukittinggi cenderung menurun sejak tahun 2010 yang mencapai persentase terendah pada tahun 2022 lalu dengan kontribusi hanya 4,94% terhadap PDRB. Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 adalah sebesar 11,95%. Kontribusi sektor industri pada tahun 2021 merupakan kontribusi tertinggi sejak tahun 2016. Kontribusi, sebaran nilai dan jumlah per kecamatan serta daftar industri di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada



Gambar 3.70. Persentase Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Sumber: Diolah dari BPS Kota Bukittinggi 2010-2022

Jenis industri yang terdapat di Kota Bukittinggi, diantaranya adalah: Industri Makanan dan Minuman, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit, dan Industri Lainnya meliputi furniture, kertas, batu bata, dll. Jumlah unit usaha industri kecil paling banyak di Kota Bukittinggi adalah industri pangan dengan total 851 unit usaha, sedangkan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah industri sandang dengan total jumlah tenaga kerja mencapai 4.650 tenaga kerja.



Tabel 3.39 Daftar Jenis Industri di Kota Bukittinggi

No.	JENIS INDUSTRI	KBLI	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
1	PANGAN	10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan Daging Unggas	8	27	186.960.000	5.667.000.000
2		10312	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	15	47	333.883.000	2.916.439.500
3		10392	Industri Tahu Kedelai	16	62	476.505.000	5.873.276.000
4		10618	Industri Berbagai macam Tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	9	28	335.000.000	1.467.314.000
5		10710	Industri Produk roti dan kue	30	115	360.555.000	3.243.923.000
6		10732	Industri makanan dari coklat dan kembang Gula	7	15	16.450.000	256.700.000
7		10740	Industri makaroni, mie dan produk sejenisnya	1	2	30.000.000	310.200.000
8		10761	Industri pengolahan Kopi dan Teh	73	166	1.777.500.000	15.786.100.000
9		10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	5	18	40.500.000	1.178.590.000
10		10792	Industri Kue Basah	305	721	2.062.163.000	29.472.451.800
11		10793	Industri makanan dari kedele dan kacang-kacangan lainnya selain kecap dan tempe	30	55	182.950.000	2.015.629.000
12		10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya	240	716	2.260.160.000	69.412.614.400
13		11040	Industri Minuman ringan	4	14	72.500.000	125.182.800



No.	JENIS INDUSTRI	KBLI	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
14		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral	108	251	3.871.501.000	13.668.754.000
15	SANDANG	13911	Industri kain rajutan	6	18	37.000.000	46.218.000
16		13921	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan rumah tangga	66	251	1.308.777.000	11.187.670.680
17		14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	389	1.913	9.863.829.500	99.875.011.000
18		15121	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	18	54	194.010.000	1.824.964.000
19		15123	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan hewan	5	6	12.000.000	999.365.000
20		15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	122	520	1.258.800.000	22.642.780.000
21		KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	16221	Industri barang bangunan dari Kayu	27	89	1.067.300.000
22	18111		Industri percetakan Umum	90	314	3.448.550.000	12.296.532.000
23	20121		Industri pupuk alam /Non Sintetis hara makro primer	3	8	62.000.000	232.000.000
	20232		Industri Kosmetik	2	24	23.000.000	1.040.000.000
24	21021		Industri simplisa (bahan obat Tradisional)	4	9	13.500.000	272.760.000
25	23921		Industri Batu Bata dari tanah liat/ keramik	75	392	2.262.560.000	11.818.450.000



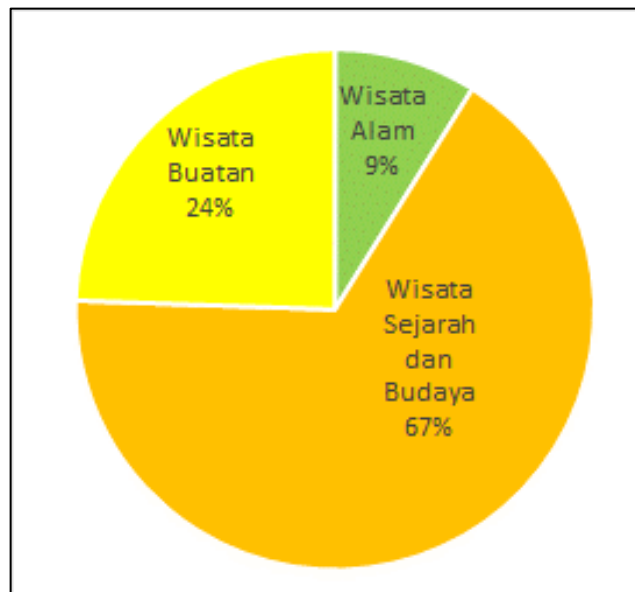
No.	JENIS INDUSTRI	KBLI	Komoditi	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi	Nilai Produksi
26		23943	Industri gips	7	19	319.000.000	1.438.000.000
27		23951	Industri Barang dari semen	7	34	259.800.000	1.397.020.000
28		23952	Industri Barang dari kapur	5	15	490.000.000	1.426.000.000
29		31001	Industri Furnitur dari kayu	54	210	1.486.800.000	9.506.600.000
30	LOGAM DAN ELEKTRONIKA	25111	Industri barang dari logam bukan alluminium siap pasang untuk bangunan	73	211	1.759.000.000	13.075.920.000
31		25112	Industri Barang dari logam Almunium siap pasang untuk bangunan	21	49	320.555.000	2.161.000.000
32		25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan wadah sejenisnya dari logam	13	17	151.000.000	608.260.000
33		29300	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	23	55	503.100.000	2.037.000.000
34	KERAJINAN	13912	Industri Sulaman/ bordir	308	1.626	12.164.510.000	78.151.732.600
35		16293	Industri kerajinan Ukiran dari kayu bukan mebeller	27	78	217.210.000	1.321.765.000
36		32909	Industri Pengolahan lain yang tidak di klasifikasikan di tempat lain	82	207	529.076.000	11.090.680.600
37		33121	Jasa Reparasi mesin untuk keperluan umum	80	201	2.661.600.000	10.996.450.000
Jumlah				2.358	8.557	52.419.604.500	453.223.953.380



3.2.4 5 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan dan sudah menjadi sumber utama ekonomi di Kota Bukittinggi. Potensi wisata yang ada di Kota Bukittinggi sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor unggulan seperti wisata alam ngarai Sihanok, Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, Janjang Seribu, wisata edukasi museum Bung Hatta dan perpustakaan dan wisata kulinernya yang mana saat ini sudah menjadi destinasi wisata nasional. Dalam mendukung perkembangan sektor wisata terdapat 75 rumah makan/restoran dan 72 hotel pada tahun 2022.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, terdapat lebih kurang 45 objek wisata di Kota Bukittinggi baik jenis wisata alam, sejarah dan budaya serta wisata buatan (lihat Gambar 3.71). Sekitar 67% objek wisata di Kota Bukittinggi merupakan jenis wisata sejarah dan budaya. Rincian objek wisata Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 3.41.



Gambar 3.71. Distribusi Jenis Wisata di Kota Bukittinggi

Sumber: Diolah dari Renstra Disparpora Kota Bukittinggi 2021-2026

Tabel 3.40 Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Bulan dan Jenis Wisatawan di Kota Bukittinggi

Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2018	547.976	31.841	5.147.635
2019	933.609	32.653	5.472.587
2020	1.471.542	2.337	2.584.626
2021	748.074	17	1.002.270



Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
2022	1.231.306	491	2.855.135

Tabel 3.40 menyajikan jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Bukittinggi. Tercatat selama tahun 2020 sampai tahun 2021 terjadi penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik mancanegara maupun Nusantara. Hal ini diakibatkan oleh COVID-19 yang saat itu terjadi, dan kebijakan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar. Namun, pada tahun 2022, seiring mulai berkurangnya kasus COVID-19 dan pelonggaran pembatasan, jumlah wisatawan Nusantara meningkat menjadi 1.231.306 jiwa, dan wisatawan mancanegara sebanyak 491 jiwa.



Tabel 3.41 Daftar Nama Objek Wisata di Kota Bukittinggi

No	Jenis wisata	Objek Wisata
1	Wisata Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Panorama 2. Ngarai Sianok 3. Panorama Baru 4. Pemandangan Balai Kota
2	Wisata Sejarah dan Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Kelahiran Bung Hatta 2. Istana Bung Hatta 3. Tugu Pahlawan Tak Dikenal 4. Monumen Bung Hatta 5. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta 6. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan 7. Benteng Ford de Kock 8. Jam Gadang 9. Museum Tridaya Eka Dharma 10. Museum Rumah Adat Nan Baanjuang 11. Lubang Jepang 12. Janjang 40 13. Janjang Gudang 14. Janjang Minangkabau 15. Janjang Pasanggrahan 16. Janjang Irian 17. Janjang Los Maco 18. Janjang Ameli 19. Janjang Los Lambuang 20. Janjang Balakang Pasa 21. Janjang Gantuang 22. Janjang Tigo Baleh 23. Janjang Syeh Inyik Batam 24. Janjang Tingkek-Tigkek 25. Janjang Parak Kopi 26. Janjang Kumango 27. Janjang Pasa Putih 28. Janjang Sovia 29. Janjang Pahlawan 30. Gedung RRI
3	Wisata Buatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Aur Kuning 2. Pasar Ateh 3. Pasar Lereng 4. Los Lambuang 5. Janjang Saribu 6. Kolam Renang Bantola 7. Lapangan Kantin 8. Lapangan Ateh Ngarai

Sumber: Renstra Disaprapora kota Bukittinggi 2021-2026

3.2.5 Perubahan Iklim

Berdasarkan data Sistem Inventarisasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan Kota Bukittinggi terhadap perubahan iklim tergolong pada kategori sedang. Sebanyak



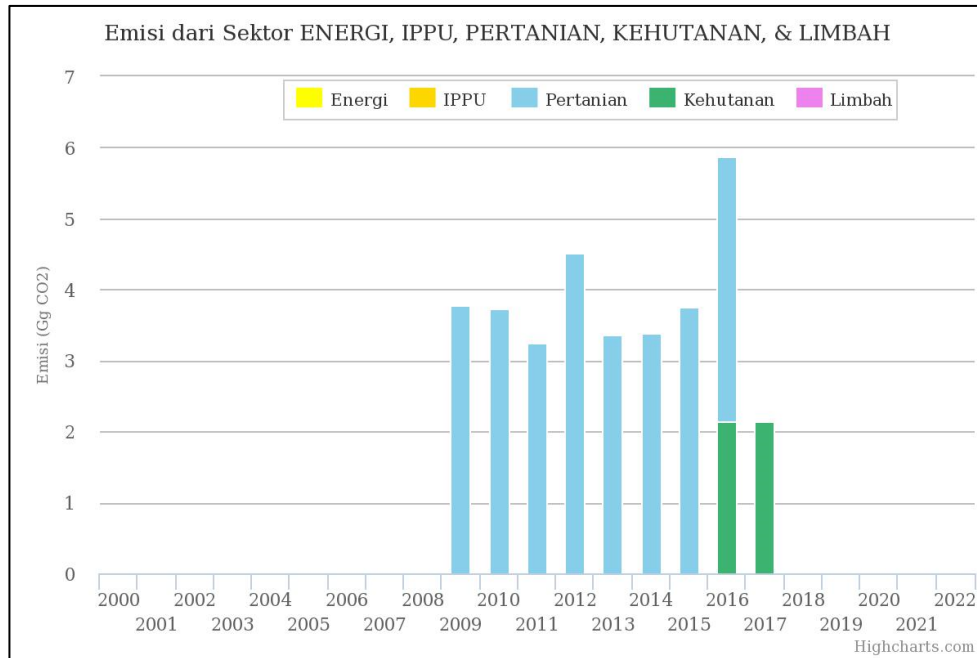
21 desa di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori sedang, 3 desa termasuk dalam kategori sangat rendah. Pada Gambar 3.77 dapat dilihat peta kerentanan perubahan iklim Kota Bukittinggi. Sedangkan risiko perubahan iklim Kota Bukittinggi berdasarkan data SIDIK KLHK dikategorikan rendah hingga sangat rendah. Peta risiko perubahan iklim Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 3.78.

Beragam aktivitas manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi. Sumber penghasil gas rumah kaca seperti penggunaan energi listrik, aktivitas kendaraan bermotor, penggunaan pestisida pada pertanian, kotoran hewan, limbah sisa makanan dan sumber lainnya. Berdasarkan data dari signsmart.menlhk.go.id, emisi gas rumah kaca pada Kota Bukittinggi dari sektor energi, IPPU, pertanian, kehutanan dan limbah tercatat dapat dilihat pada Tabel 3.42. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa emisi gas rumah kaca di Kota Bukittinggi secara umum berasal dari kegiatan pertanian.

Tabel 3.42 Tabel Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bukittinggi

No	ITEM	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertanian	3,77	3,72	3,26	4,52	3,36	3,39	3,76	3,73	0,00
4	Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15
5	Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3,77	3,72	3,26	4,52	3,36	3,39	3,76	5,88	2,15

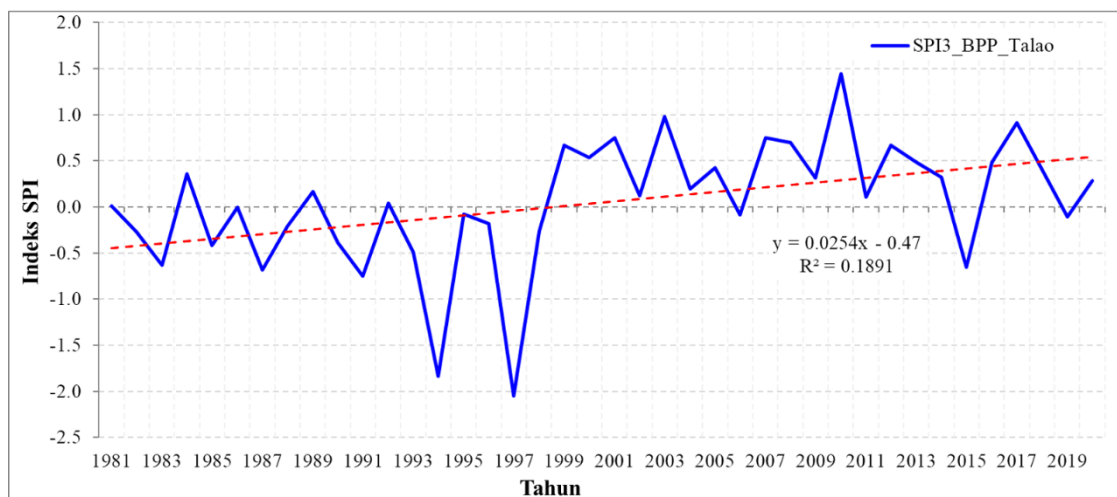
Sumber : signsmart.menlhk.go.id, 2023



Gambar 3.72 Emisi GRK Kota Bukittinggi

Sumber: *signsmart.menlhk.go.id, 2023*

Kondisi basah/kering (wet/dry) di Kota Bukittinggi digunakan Standardized Precipitation Index (SPI), merupakan salah satu indeks kekeringan meteorologi yang secara luas telah digunakan untuk memonitor terjadinya kekeringan. Gambar 3.73. merupakan grafik deret waktu indeks kekeringan SPI kumulatif 3 bulanan (SPI-3) di BPP Talao. Secara umum kondisi basah/kering dengan metode Standard Precipitation Index (SPI) kumulatif 3 bulanan (SPI-3) di Kota Bukittinggi (diwakili titik BPP Talao) menunjukkan tren tahunan yang meningkat, artinya kecenderungan tren untuk terjadinya kondisi lebih basah di Kota Bukittinggi, seperti terlihat pada Gambar 3.73.

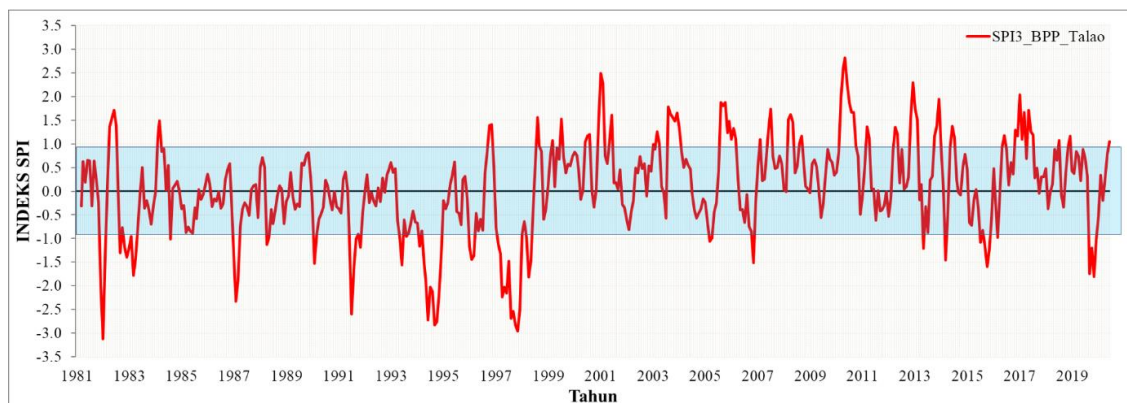




Gambar 3.73 Grafik tren tahunan indeks kekeringan SPI 3 bulanan tahun 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi.

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021

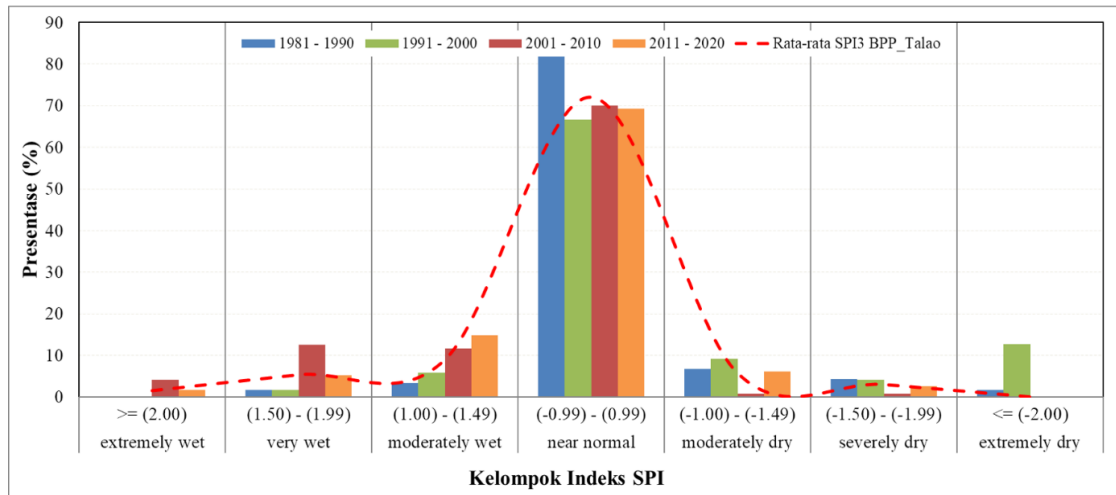
Hasil perhitungan indeks kekeringan SPI-3 dapat mencerminkan kondisi lembab (moisture) dalam jangka waktu pendek hingga menengah. Pada gambar terlihat, selama kurun waktu 1981-2020, secara umum (sekitar 70%) indeks SPI-3 di BPP Talao berada pada kondisi normal (nilai -0.99 hingga +0.99). Sekitar 15% berada pada nilai indeks (nilai kurang dari -1) yang menunjukkan kondisi kering dan 15% selebihnya berada pada nilai indeks (nilai lebih dari +1) yang menunjukkan pada kondisi basah. Jika diperhatikan pada Gambar 3.74 tersebut, kondisi kering lebih banyak terjadi pada dekade sebelum tahun 2000, sedangkan nilai indeks SPI-3 yang menunjukkan kondisi basah lebih banyak terjadi pada dekade setelah tahun 2000.



Gambar 3.74 Grafik deret waktu indeks kekeringan SPI 3 bulanan tahun 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021

Ket. Kotak warna biru muda merupakan batas normal indeks kekeringan SPI dengan nilai antara -0.99 hingga 0.99. Kondisi basah ditandai dengan nilai indeks >0.99 dan kondisi kering dengan nilai indeks <-0.99.



Gambar 3.75 Pergeseran kelompok indeks kekeringan SPI-3 bulanan tahun 1981-2020 di BPP Talao Kota Bukittinggi per dekade.

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021

Pergeseran indeks SPI-3 bulanan per dekade periode tahun 1981-2020 seperti yang pada Gambar 3.75, memperlihatkan periode 1981-1990 merupakan periode yang cenderung normal, periode 1991-2000 merupakan periode yang cenderung kering terlihat dari kelompok indeks SPI-3 yang berada pada nilai indeks kering. Sedangkan periode 2001-2010 dan 2011-2020 cenderung berada pada kondisi basah, terlihat dari nilai indeks SPI -3 yang berada pada nilai indeks basah.

Konsekuensi dari terjadinya perubahan iklim adalah sering terjadinya iklim ekstrim. Dengan demikian analisis iklim ekstrim dapat dijadikan deteksi terjadinya perubahan iklim pada suatu lokasi atau wilayah. Untuk menganalisis iklim ekstrim tersebut, metode yang paling sering digunakan adalah menggunakan indeks iklim ekstrim seperti yang direkomendasikan oleh ETCCDMI (Expert Team on Climate Change Detection, Monitoring and Indices). Sebagian dari indeks iklim ekstrim yang direkomendasikan oleh ETCCDMI seperti terlihat pada Tabel 3.43.

Tabel 3.43 Indeks iklim ekstrim ETCCDMI yang digunakan

Indeks		Keterangan	Satuan
Suhu Udara			
Intensitas			
TXx	Max Tmax	Suhu maksimum harian tertinggi	OC
TNx	Max Tmin	Suhu minimum harian tertinggi	OC
TXn	Min Tmax	Suhu maksimum harian terendah	OC
TNn	Min Tmin	Suhu minimum harian terendah	OC
DTR	Diurnal temperature range	Suhu rata-rata perbedaan antara suhu udara maksimum dan minimum harian	OC
Frekuensi			
TN10p	Cool nights	Jumlah hari dimana Tmin < persentil ke-10	% hari
TX10p	Cool days	Jumlah hari dimana Tmax < persentil ke-10	% hari



Indeks		Keterangan	Satuan
TN90p	Warm nights	Jumlah hari dimana Tmin > persentil ke-90	% hari
TX90p	Warm days	Jumlah hari dimana Tmax > persentil ke-90	% hari
Curah Hujan Intensitas			
RX1D	Max 1-day precipitation	Jumlah hujan maksimum tahunan dalam 1 hari	mm
RX5D	Max 5-day precipitation	Jumlah hujan maksimum tahunan dalam 5 hari berturutan	mm
SDII	Simple daily intensity index	Jumlah curah hujan tahunan dibagi jumlah hari hujan (hujan \geq 1.0 mm)	mm/hari
R95p	Annual contribution from very wet days	Jumlah hujan harian \geq persentil ke 95 dalam periode satu tahun	mm
R99p	Annual contribution from extremely wet days	Jumlah hujan harian \geq persentil ke 99 dalam periode satu tahun	mm
PRCPTOT	Annual contribution from wet days	Jumlah curah hujan tahunan	mm
Durasi			
CWD	Consecutive wet day	Jumlah hari hujan berturutan tahunan terpanjang, dengan jumlah hujan harian \geq 1.0 mm	hari
CDD	Consecutive dry day	Jumlah hari tanpa hujan berturutan tahunan terpanjang, dengan jumlah hujan harian < 1.0 mm	hari
Frekuensi			
R100	Precipitation above 100mm	Jumlah hari hujan tahunan \geq 100 mm	hari

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021

Hasil uji tren dari kejadian iklim ekstrim di BPP Talao, Kota Bukittinggi tersebut menunjukkan beberapa indeks iklim ekstrim yang mengalami perubahan (naik/turun) secara signifikan pada taraf uji dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji trend dari indeks iklim ekstrim tersebut seperti terlihat pada Tabel 3.44.

Tabel 3.44 Indeks Iklim Ekstrim Wilayah Sumatera Barat

Indeks suhu udara ekstrim	TXx	TNx	TXn	TNn	DTR	TN10p	TX10p	TN90p	TX90p
	0.06	2.28*	0.61	1.22	-1.79	-4.30*	-0.03	4.58*	1.46
Indeks curah hujan ekstrim	RX1D	RX5D	R95p	R99p	SDII	Prpc TOT	CDD	CWD	R50
	-0.14	0.68	1.41	0.82	1.93	2.99*	-0.93	3.23*	-0.05

Tanda *) menunjukkan bahwa uji signifikan pada tingkat kepercayaan 95%

Sumber : Roadmap Kampung Iklim Berkelanjutan Kota Bukittinggi, 2021

Pada Tabel 3.44 dapat dilihat bahwa suhu minimum dan curah hujan di Kota Bukittinggi semakin meningkat pada periode 1981-2020 ditunjukkan dengan signifikansi indeks TN10p dan TN90p untuk indeks suhu udara minimum dan indeks PrpcTOT dan CWD untuk curah hujan.



Indeks TN10p menjadi tanda/indikator bahwa jumlah hari dingin pada malam hari (cool nights) mengalami penurunan yang signifikan pada periode tersebut. Indeks TN90p yang menjadi tanda/indikator jumlah hari hangat pada malam hari (warm nights) mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 1981-2020. Sementara untuk indikator curah hujan ekstrim menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi mengalami peningkatan jumlah curah hujan tahunan (Prcptot) dan jumlah hari hujan berturut-turut (concecutive wet day/CWD) yang semakin meningkat.

Seperti Curah Hujan Tahunan, di semua wilayah Kota Bukittinggi slope nya positif berkisar antara 14 - 18 mm/tahun selama periode tahun 1981-2020. Artinya bahwa terjadi kenaikan curah hujan rata-rata tahunan sebesar slope tersebut. Demikian juga untuk indeks warm night yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya (slope positif), sementara untuk indeks cools daya mengalami penurunan (slope negatif).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.12764 tahun 2023 Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam PIPPIB. Kota Bukittinggi tidak memiliki kawasan hutan sehingga Kota Bukittinggi tidak memiliki kewajiban dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030.

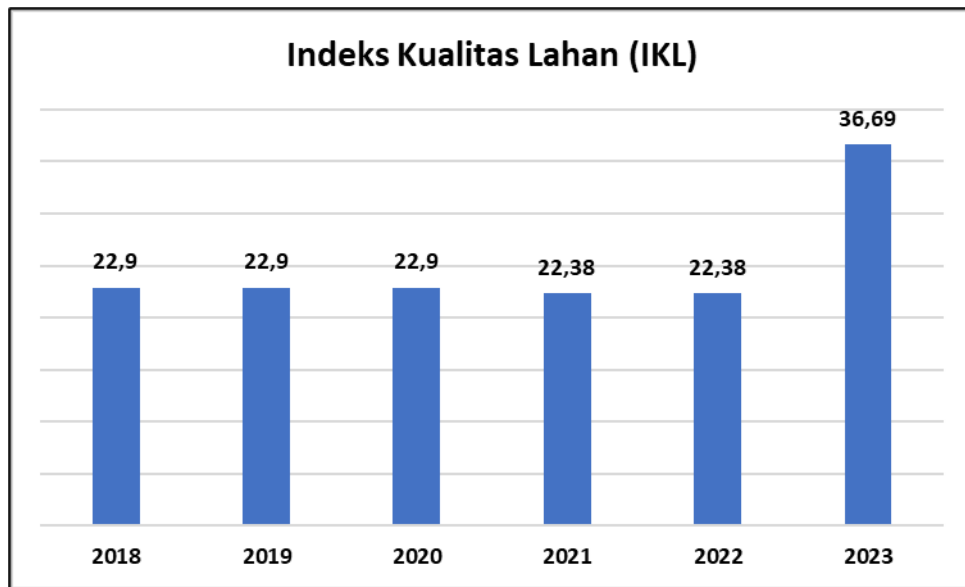
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Tutupan lahan menggambarkan kondisi penggunaan lahan di suatu wilayah. Kualitas tutupan lahan maksimal yang diharapkan adalah hutan, apabila tidak digunakan untuk hutan diharapkan lahan ditutupi oleh vegetasi sehingga fungsi ekologis dan hidrologisnya dapat terpenuhi. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi:

1. Tutupan Hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.
2. Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan.
3. Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng.
4. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau hutan kota.

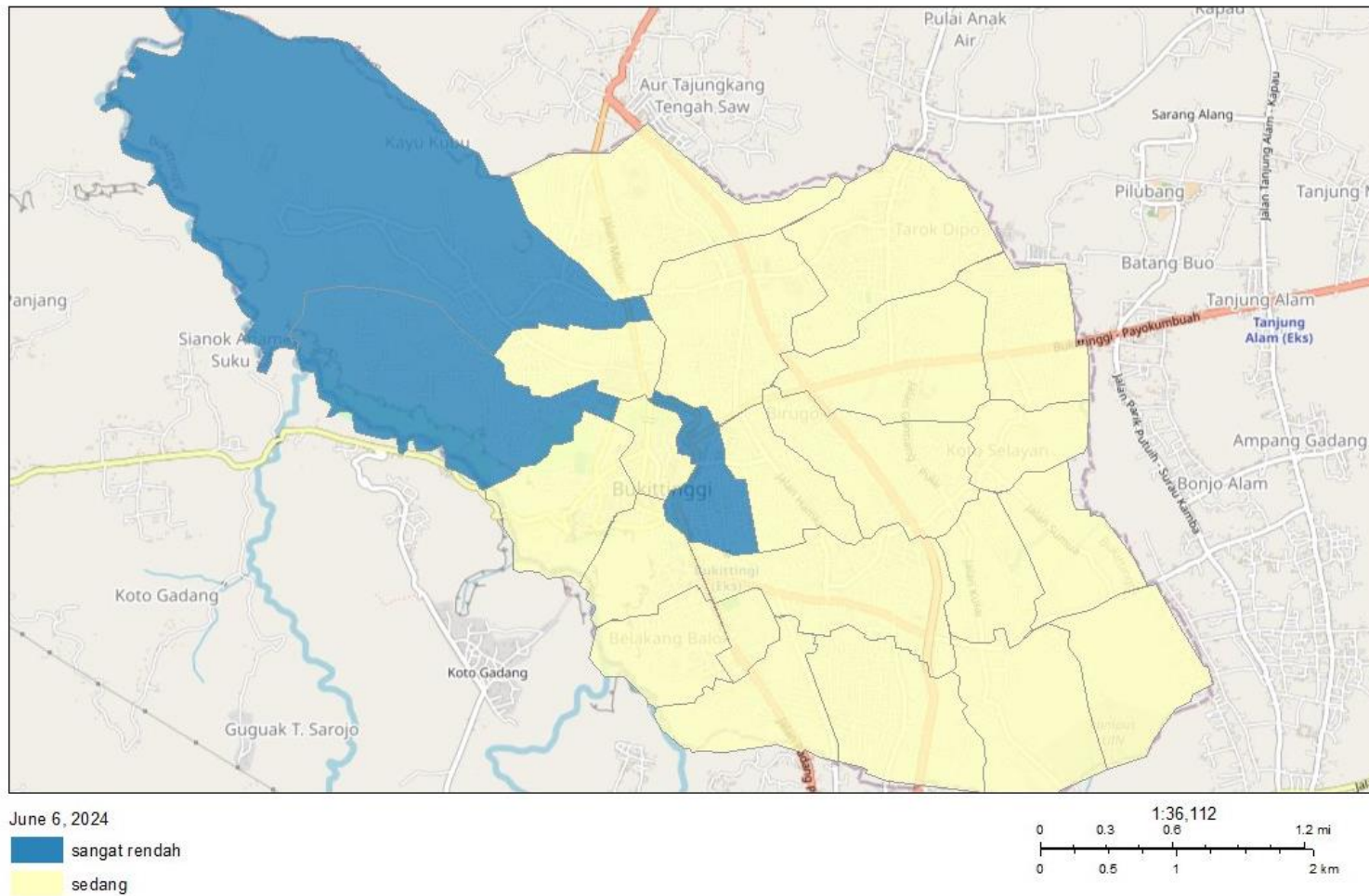


5. Kebun raya
6. Taman Keanekaragaman hayati.

Nilai indeks tutupan lahan Kota Bukittinggi berada pada tahun 2023 adalah 36,69, meningkat dari tahun 2022 yaitu 22,38. Nilai ini masih berada dalam kategori rendah, dikarenakan sebagian besar wilayah Kota Bukittinggi merupakan lahan terbangun.

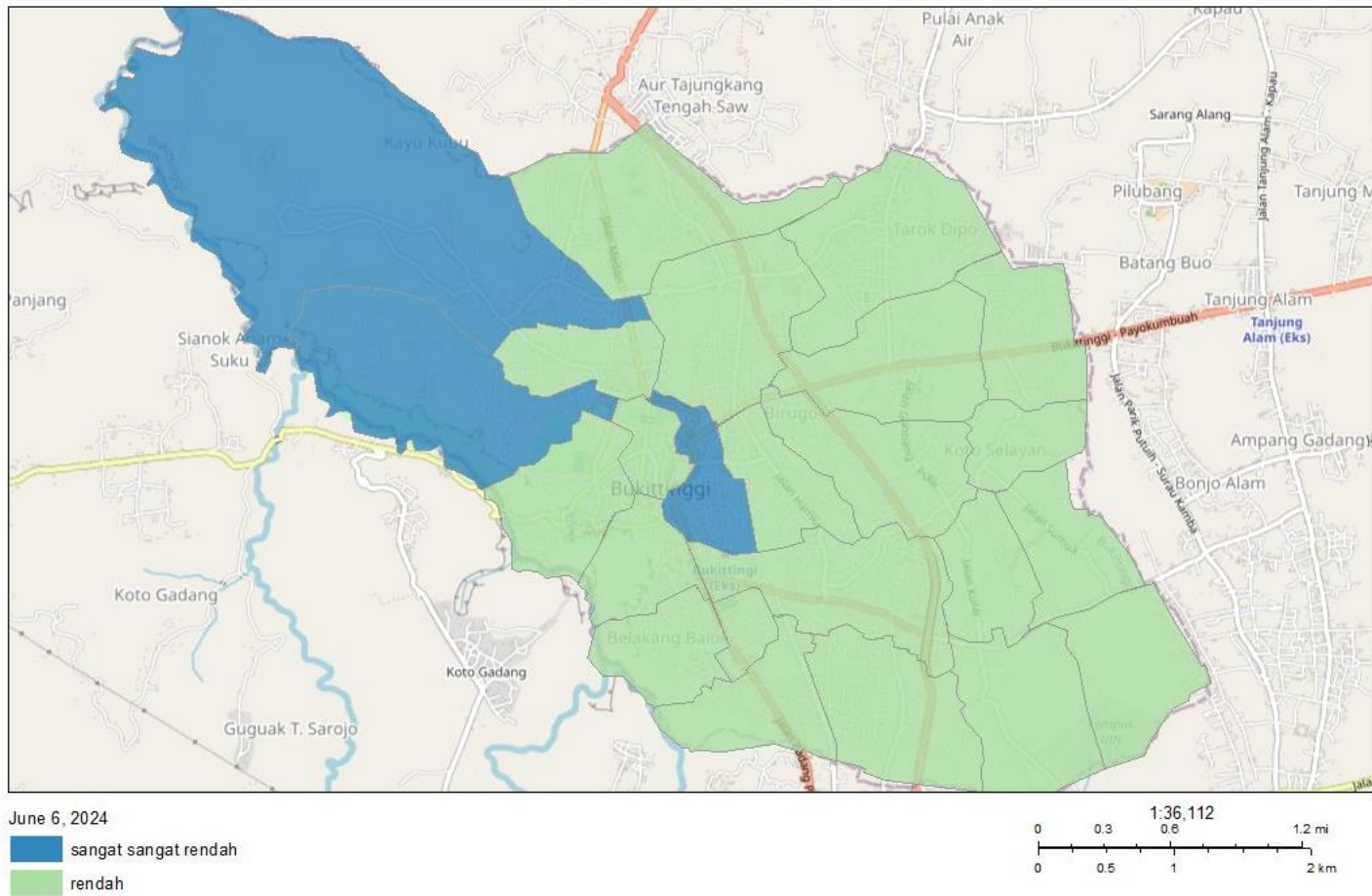


Gambar 3.76 Indeks Tutupan Lahan Kota Bukittinggi



Gambar 3.77 Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kota Bukittinggi

Sumber Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan KLHK



Gambar 3.78 Peta Resiko Perubahan Iklim Kota Bukittinggi

Sumber Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan KLHK



3.2.6 Keanekaragaman Hayati

3.2.6 1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan uraian Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bukittinggi tidak memiliki kawasan lindung.

1. Kawasan Konservasi (Kawasan Pelestarian Alam/KPA dan Kawasan Suaka Alam/KSA)

a. Kawasan Konservasi in situ

Pada saat studi Profil Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem ini dilakukan, bahwa belum satupun kawasan konservasi in situ yang dijumpai di wilayah kota Bukittinggi. Namun beberapa kawasan konservasi in situ terdapat pada daerah yang berdekatan dengan Kota Bukittinggi, seperti Cagar Alam Batang Palupuah dan KSA Maninjau.

b. Kawasan Konservasi eks situ

Kawasan konservasi eks-situ yang terdapat di Bukittinggi adalah Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) yang merupakan kebun binatang tertua di Sumatera. Kawasan ini terletak di jantung kota Bukittinggi dengan luas mencapai 4,5 ha. Kegiatan konservasi di TMSBK telah dimulai semenjak zaman kolonial Belanda. TMSBK yang sebelumnya bernama Strom Park merupakan taman bunga yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata para penguasa Belanda. Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) telah menjadi salah satu ikon yang menjadi daya tarik Bukittinggi. Pengembangan dan revitalisasi TMSBK telah ditingkatkan pengelolaannya menjadi kebun binatang dengan standar-standar yang sesuai dengan animal welfare. Saat ini status TMSBK telah menjadi salah satu kebun binatang tematik yang disebut sebagai Kinantan bird park dan Reptile Zone.

TMSBK memiliki potensi dan peluang pasar pariwisata yang dimiliki oleh Bukittinggi, oleh karena itu peningkatan kualitas TMSBK merupakan sesuatu yang akan sangat menjanjikan. Pemilihan satwa yang atraktif, menarik, dengan biaya pemeliharaan yang relative rendah serta membutuhkan lahan yang relatif lebih kecil mungkin bisa menjadi salah satu alternatif. Selain itu membentuk keunikan atau ciri khas yang berbeda dengan kebun binatang lainnya perlu dipertimbangkan dalam menyusun rencana pengelolaan TMSBK. Salah satu hal bisa dilakukan



dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti perguruan tinggi ataupun kebun Binatang lainnya. Selain itu TMSBK juga terhubung dengan tempat Wisata sejarah Benteng Fort de Kock yang menjadi satu paket Ketika berkunjung ke TMSBK. Untuk jenis flora dan fauna yang terdapat di TMSBK dan Benteng Fort de Kock dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.45 Jenis Flora dan Fauna Yang Terdapat di TMSBK dan Benteng Fort de Kock

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah	Keterangan
A. Jenis Flora di TMSBK			
1	Kembang Setahun	<i>Gombrena globosa</i>	Sedikit
2	Pinang	<i>Arenga pinnata</i>	Sedikit
3	Paku Sarang Burung	<i>Asplenium nidus</i>	Sangat Sedikit
4	Bunga Lilin	<i>Zinnia linearis</i>	Sedikit
5	Kenikir	<i>Cosmos caudatus</i>	Sedikit
6	Keterutan	<i>Spathodea campanulata</i>	Sangat Sedikit
7	Kenari	<i>Canarium indicum</i>	Sangat Sedikit
8	Cemara	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Sangat Sedikit
9	Katapiang	<i>Terminalia catappa</i>	Sangat Sedikit
10	Seri	<i>Muntingia calabura</i>	Sedikit
11	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	Sedikit
12	Buah Roda	<i>Hura crepitans</i>	Sedikit
13	Anqsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Cukup Banyak
14	Bayua	<i>Pterospermum javanicum</i>	Sedikit
15	Mahoni	<i>Switenia mahogany</i>	Sedikit
16	Beringin	<i>Ficus benjamina</i>	Sedikit
17	Pucuk Merah	<i>Syzygium oleana</i>	Sedikit
18	Pinus	<i>Pinus merkusii</i>	Sedikit
19	Sirih-sirih	<i>Piper aduncum</i>	Sangat Sedikit
20	Jeruk	<i>Citrus sp</i>	Sangat Sedikit
21	Kiara Payung	<i>Filicium decipiens</i>	Sangat Sedikit
22	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	Sedikit
23	Bonsai	<i>Durandha erecta</i>	Sangat Sedikit
B. Jenis Tumbuhan di Benteng Fort de Kock			
1	Hanjuang	<i>Cordylonefruticosa</i>	Cukup Banyak
2	Mangga	<i>Mangifera indica</i>	Sedikit
3	Sirsak	<i>Annona muricata</i>	Sedikit
4	Ginje	<i>Thevetia peruviana</i>	Cukup Banyak
5	Pinang	<i>Areca catechu</i>	Cukup Banyak
6	Saw it	<i>Elaeagnus</i>	Banyak
7	Paku Sarang Burung	<i>Asplenium nidus</i>	Sedikit
8	Bambu	<i>Bambusa sp.</i>	Sedikit
9	Cemara	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Sedikit
10	Seri	<i>Muntingia calabura</i>	Sedikit
11	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	Cukup Banyak
12	Albasa	<i>Albizia sinensis</i>	Sedikit
13	Akasia	<i>Acacia mangium</i>	Sedikit
14	Kepulanbedak	<i>Calliandra haematocephala</i>	Cukup Banyak
15	Kulit Manis	<i>Cinnamomum burmannii</i>	Sedikit
16	Alpukat	<i>Persea americana</i>	Sedikit
17	Madang	<i>Litsea umbellata</i>	Cukup Banyak
18	Bayua	<i>Pterospermum javanicum</i>	Cukup Banyak
19	Mahoni	<i>Switenia mahogany</i>	Banyak
20	Surian	<i>Toona sureni</i>	Cukup Banyak
21	Sukun	<i>Arthocarpus altalis</i>	Sedikit
22	Nangka	<i>Arthocarpus integra</i>	Sedikit



23	KaretKebo	<i>Ficuselastica</i>	Sedikit
24	Jambu Air	<i>Eugenia aquatica</i>	Sedikit
25	Bugenvil	<i>Bougenvil/easpectabilis</i>	Sedikit
26	Markisah	<i>Passiflorasp.</i>	Sangat Sedikit
27	Pi nus	<i>Pinusmerkusii</i>	Banyak
28	Matoa	<i>Pometiapinnata</i>	Sedikit
29	Sawo	<i>Achrazsapota</i>	Sedikit
30	Bonsai	<i>Duranthaerecta</i>	Banyak
31	Andaleh*	<i>Morus macroua</i>	Sangat Sedikit
32	Bungo bangkai*	<i>Amorphophallus titanum</i>	Sangat Sedikit
33	Tabebuia*	<i>Tabebuia aurea</i>	Banyak
34	Ginje*	<i>Cascabela thevetia</i>	Banyak

C. Daftar Jenis Hewan di TMSBK

1	Gajah Sumatera	<i>Elephas maximus sumatrensis</i>	Dilindungi
2	Tapir Malaya	<i>Acrocodia indica</i>	Dilindungi
3	Rusa Sambar	<i>Rusa unicolor</i>	Dilindungi
4	Kandi	<i>Dilindungi</i>	
5	Landak	<i>Zaglossus bruijni</i>	Dilindungi
6	Sugar Glider	<i>Petaurus breviceps</i>	Dilindungi
7	Rusa Tutul	<i>Axis axis</i>	Tidak Dilindungi
8	Rusa timor	<i>Rusa timorensis</i>	Tidak Dilindungi
9	Zebra	<i>Equus sp.</i>	Tidak Dilindungi
10	Beruang Madu	<i>Helarctos malayanus</i>	Dilindungi
11	Binturung	<i>Arctictis binturong</i>	Dilindungi
12	Musang Bulan	<i>Paguma larvata</i>	Tidak Dilindungi
13	Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	Dilindungi
14	Orang Utan Sumatera	<i>Pongo abelii</i>	Dilindungi
15	Lutung	<i>Trachypithecus auratus</i>	Dilindungi
16	Siamang	<i>Symphalangus syndactylus</i>	Dilindungi
17	Simpai merah	<i>Presbytis melalophos</i>	Dilindungi
18	Beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	Tidak Dilindungi
19	Ungko	<i>Hylobates agilis</i>	Dilindungi
20	Harimau Sumatera	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Dilindungi
21	Harimau Dahan	<i>Neofelis nebulosa</i>	Dilindungi
22	Kucing Ameh	<i>Ameh cattus</i>	Dilindungi
23	Berang-berang	<i>Lutra canadensis</i>	Dilindungi
24	Singa Afrika	<i>Panthera leo</i>	Tidak Dilindungi
25	Angsa	<i>Cygnus olor</i>	Tidak Dilindungi
26	Ayam Jambul/polandia	<i>Gallus gallus domesticus</i>	Tidak Dilindungi
27	Ayam Mutiara	<i>Acryllium vulturinum</i>	Tidak Dilindungi
28	Ayam Mutiara Putih	<i>Guinea Fowl</i>	Tidak Dilindungi
29	Ayam Wingki/ ohiki	<i>Tidak Dilindungi</i>	
30	Ayam hutan merah	<i>Gallus gallus</i>	Dilindungi
31	Bayan	<i>Electus roratus</i>	Dilindungi
32	Beo jawa	<i>Gracula religiosa</i>	Dilindungi
33	Elang Laut dada putih	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	Dilindungi
34	Elang Bondol	<i>Haliastur indus</i>	Dilindungi
35	Junai Mas	<i>Caloenas nicobarica</i>	Dilindungi
36	Kakatua raja/kakatua hitam	<i>Probosciger aterrimus</i>	Dilindungi
37	Kakatua Besar jambul merah/ maluku	<i>Cacatua moluccensis</i>	Dilindungi
38	Elang Hitam	<i>Ictinaetus malaiensis</i>	Dilindungi
39	Kakatua kecil jambul jingga	<i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	Dilindungi
40	Kakatua kecil jambul kuning	<i>Cacatua sulphurea</i>	Dilindungi
41	Nuri Merah Ambon	<i>Alisterus amboinensis</i>	Dilindungi
42	Nuri Merah Kepala Hitam	<i>Lorius lorry</i>	Dilindungi
43	Kuau raja	<i>Argusianus argus</i>	Dilindungi



44	Mandar	<i>Habroptila wallacii</i>	Dilindungi
45	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Dilindungi
46	Merpati Batu	<i>Columba livia</i>	Tidak Dilindungi
47	Kalkun	<i>Meleagris gallopavo</i>	Tidak Dilindungi
48	Merak Hijau	-	Dilindungi
49	Merak Biru Cross	<i>Pavo muticus</i>	Tidak Dilindungi
50	Sunconure	<i>Aratinga solstitialis</i>	Tidak Dilindungi
51	Cocatiel	<i>Nymphicus hollandicus</i>	Tidak Dilindungi
52	Ayam kinantan	-	Dilindungi
53	Kuau emas	<i>Argusianus argus</i>	Tidak Dilindungi
54	Poksay mantel	<i>Garrulax leucolophus</i>	Dilindungi
55	Sempidan biru sumatera	<i>Lophura ignita</i>	Dilindungi
56	Burung Hantu	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Tidak Dilindungi
57	Kasuari	<i>Casuaris unappendiculatus</i>	Dilindungi
58	Bebek mandarin	<i>Aix galericulata</i>	Tidak Dilindungi
59	Bernacle Goose	<i>Branta leucopsis</i>	Tidak Dilindungi
60	Pelikan	<i>Pelecanus conspicillatus</i>	Tidak Dilindungi
61	Elang Laut Dada Putih	<i>Haliaeetus leucogaster</i>	
62	Kenanga	<i>Vanellus miles</i>	
63	Ayam Jambul	<i>Gallus domesticus</i>	
64	Kuau Ladycross	<i>Syrmaticus rvesi</i>	

Sumber : Profil Keanekaragaman Hayati Kota Bukittinggi, 2021

2. Hutan Lindung

Berdasarkan uraian Rencana Tata Ruang Wilayah kota Bukittinggi tidak memiliki hutan lindung.

3. Kawasan perlindungan setempat (Sempadan sungai, sekitar mata air)

Berdasarkan penjelasan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka proporsi ruang terbuka hijau paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kota. Kawasan lindung tersebut bisa berupa sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam RTRW Kota Bukittinggi telah ditetapkan beberapa daerah sebagai kawasan lindung. Berdasarkan penggolongan pada UU No. 26 Tahun 2007, maka di Kota Bukittinggi terdapat kawasan lindung, berupa; kawasan perlindungan setempat ruang terbuka hijau, dan kawasan cagar budaya.

3.2.6 2 Keanekaragaman Jenis dan Genetik

Keanekaragaman jenis tumbuhan di Kota Bukittinggi tergolong tinggi sebagai konsekuensi dari bervariasinya tipe ekosistem yang ada. Peralihan dari Kawasan hutan menjadi pemukiman membentuk ko-eksistensi antara spesies *pioneer* dan *non pioneer*. Selanjutnya, adanya trend menjadikan pekarangan rumah menjadi salah satu alternatif lahan budidaya juga akan menambah jumlah kekayaan jenis



tumbuhan yang ada. Khusus untuk tumbuhan liar yang bersifat liar dan belum bernilai ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.46 Daftar Jenis Tumbuhan Liar yang ditemukan di Kota Bukittinggi

No	Nama lokal	Nama ilmiah	Kecamatan			Status	Status perlindungan	Habitat
			A	B	C			
1	Madang	<i>Actinodaphne sp</i>		✓		+	Belum dilindungi	H
2	Bandotan	<i>Ageratum conyzoides</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
3	Duku anggung	<i>Aglaia sp</i>		✓		+	Belum dilindungi	H
4	Sengon	<i>Albizia chinensis</i>	✓			++	Belum dilindungi	H
5	Akar wangi	<i>Andropogon nordus</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	S
6	Kayu Samuik	<i>Anthocephalus cadamba</i>		✓		++	Belum dilindungi	K
7	Langkok	<i>Arenga obstifolia</i>	✓			+++	Belum dilindungi	K
8	Anau	<i>Arenga pinnata</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
9	Juluak Antu	<i>Arthrophyllum diversifolium</i>		✓		+	Belum dilindungi	K
10	Sakek	<i>Asplenium nidus</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
11	Rumput israel	<i>Asystasia gangetica</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
12	Bunga putih	<i>Austro eupatorium inulifolium</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
13	Bambu	<i>Bambusa sp</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, H
14	Rami	<i>Boehmeria lanceolata</i>		✓		++	Belum dilindungi	K, B
15	Subang-subang	<i>Borreria alata</i>		✓		++	Belum dilindungi	K, B
16	Bunga terompet	<i>Brugmansia suaveolens</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
17	Kaliandra	<i>Calliandra calothyrsus</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
18	Kanis	<i>Carallia brachiata</i>			✓	+	Belum dilindungi	B
19	Sampia	<i>Caryota sp</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
20	Galinggang gadang	<i>Cassia alata</i>		✓		++	Belum dilindungi	B
21	Pegagan	<i>Centella asiatica</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
22	Jesamin	<i>Cestrum diurnum</i>	✓	✓		+++	Belum dilindungi	K, B
23	Laping budak	<i>Claoxylon indicum</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
24	Sicerek	<i>Clausena excavata</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
25	Bunga putih	<i>Clibadium surinamense</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
26	Paku Tiang	<i>Cyathea sp.</i>	✓	✓	✓	++	Belum dilindungi	H
27	Rumput baliang-baliang	<i>Cyperus alternifolius</i>	✓	✓		+++	Belum dilindungi	K, B
28	Rumput teki	<i>Cyperus rotundus</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
29	Kecubung	<i>Datura metel</i>	✓			++	Belum dilindungi	B
30	Totongan	<i>Debregeasia longifolia</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
31	Urang Aring	<i>Eclipta alba</i>	✓	✓		++	Belum dilindungi	B
32		<i>Engelhardia rigida</i>			✓	+	Belum dilindungi	H
33	Ampadu tanah	<i>Eringium foetidum</i>		✓		++	Belum dilindungi	B
34	Pua	<i>Etingera sp</i>	✓	✓		++	Belum dilindungi	K, B
35	Kalek	<i>Eugenia sp</i>	✓	✓	✓	++	Belum dilindungi	H
36	Patikan kebo	<i>Euphorbia hirta</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
37	Aro	<i>Ficus ampelas</i>	✓	✓		++	Belum dilindungi	H
38	Kubang	<i>Ficus crassiramea</i>		✓		++	Belum dilindungi	H
39	Aro	<i>Ficus globosa</i>	✓			++	Belum dilindungi	H
40	Aro	<i>Ficus hispida</i>		✓		++	Belum dilindungi	B, H

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



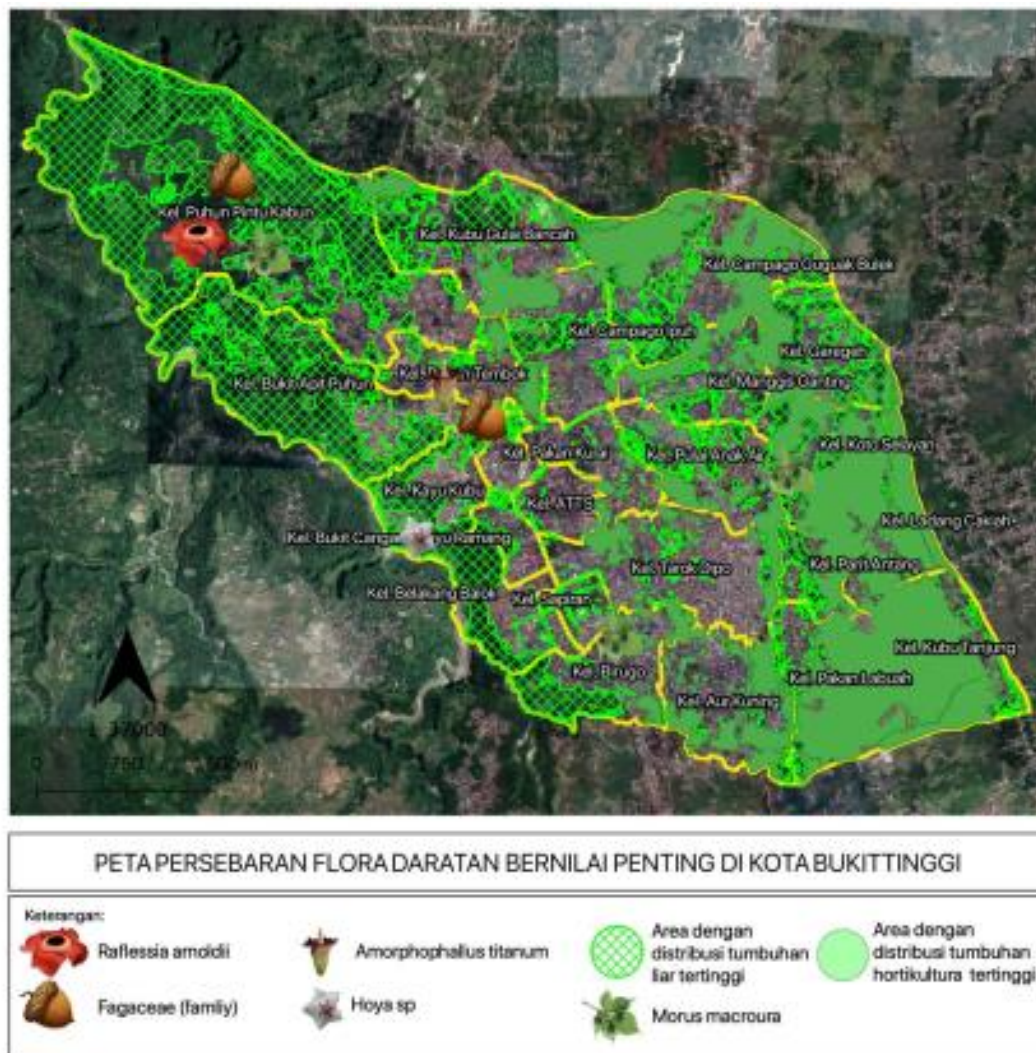
41	Baliak Angin	<i>Ficus pandana</i>	✓			++	Belum dilindungi	B, H
42	Aro	<i>Ficus racemosa</i>			✓	++	Belum dilindungi	B
43	Baringin	<i>Ficus sp</i>	✓			++	Belum dilindungi	B< H
44	Aro	<i>Ficus uniglandulosa</i>		✓		++	Belum dilindungi	H
45	Aro	<i>Ficus variegata</i>	✓			++	Belum dilindungi	H
46		<i>Gironniera nervosa</i>			✓	+	Belum dilindungi	H
47	Rasam	<i>Glichenia linearis</i>		✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
48	Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
49	Roda	<i>Glochidion obscurum</i>		✓		++	Belum dilindungi	H
50	Ambuang-ambuang	<i>Gynura crepidioides</i>	✓		✓	+++	Belum dilindungi	B
51	Kareumbi	<i>Homalanthus populneus</i>	✓			++	Belum dilindungi	H
52	Senggang	<i>Hornstedtia conica</i>			✓	++	Belum dilindungi	H
53	Subang-subang	<i>Hyptis capitata</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
54	Alang-alang	<i>Imperata cylindrica</i>	✓	✓		+++	Belum dilindungi	K, B
55	Katarak	<i>Isotoma longiflora</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
56	Bungo tai ayam	<i>Lantana camara</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
57	Paniang-paniang	<i>Lithocarpus elegans</i>			✓	+	Belum dilindungi	H
58	Paniang-paniang	<i>Lithocarpus hystrix</i>			✓	+	Belum dilindungi	H
59	Mahang	<i>Macaranga tanarius</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	H
60	Sapek	<i>Macaranga triloba</i>	✓	✓		++	Belum dilindungi	H
61	Mahang	<i>Mallotus philippensis</i>	✓			+	Belum dilindungi	H
62	Putri malu	<i>Mimosa pudica</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
63	Bio bio	<i>Mucuna sp</i>	✓			+++	Belum dilindungi	B
65	Seri	<i>Muntingia calabura</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
66	Gempol	<i>Nauclea officinalis</i>	✓			+	Belum dilindungi	H
67	Pandan	<i>Pandanus giganteus</i>		✓	✓	++	Belum dilindungi	H
68	Peperomia	<i>Peperomia pellucida</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
69	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	✓	✓		++	Belum dilindungi	B
70	Pinang rimbo	<i>Pinanga malayana</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	H
71	Pinus	<i>Pinus merkusii</i>		✓	✓	+++	Belum dilindungi	H
72	Siriah-siriah	<i>Piper aduncum</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
73	Jilatang	<i>Pipturus argenteus</i>	✓			++	Belum dilindungi	B
74	Aka	<i>Poikilospermum sp</i>	✓			+	Belum dilindungi	B
75	Lundang	<i>Poikilospermum suaveolens</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
76	Daun kayu putih	<i>Polygala paniculata</i>	✓			+++	Belum dilindungi	K, B
77	Matoa	<i>Pometia pinnata</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B, H
78	Bungo bangkai	<i>Rafflesia arnoldii</i>			✓	+	Dilindungi	H
79	Karamuntingang	<i>Rhodomirthus tomentosa</i>	✓			++	Belum dilindungi	B
80	Pancaringek	<i>Robus molucanus</i>	✓	✓		+++	Belum dilindungi	B
81	Galagah	<i>Sacharum spontaneum</i>	✓	✓		+++	Belum dilindungi	B
82	Pirdot	<i>Saurauia bracteosa</i>	✓	✓		++	Belum dilindungi	B, H
83	Daun katuk	<i>Sauropus androgynus</i>	✓			++	Belum dilindungi	B
84	Sidaguri	<i>Sida rhombifolia</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
85	Lobak-lobak	<i>Sonchus arvensis</i>		✓	✓	+++	Belum dilindungi	B



86	Anggrek Tanah	<i>Spathoglottis plicata</i>		✓	✓	++	Belum dilindungi	H
87	Subang-subang	<i>Spilanthes acmela</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
88	Bajang kalam	<i>Stachytarpetta indica</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
89	Aka	<i>Tetrastigma sp</i>			✓	+	Belum dilindungi	
90	Pimping	<i>Themeda gigantea</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
91	Bungo matahari	<i>Tithonia diversifolia</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	B
92	Indarung	<i>Trema orientalis</i>		✓		++	Belum dilindungi	H
93	Puluik-puluik	<i>Urena lobata</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K, B
94	kalempong gajah	<i>Voacanga foetida</i>		✓		+	Belum dilindungi	H
95	Subang-subang	<i>Wedelia triloba</i>	✓	✓	✓	+++	Belum dilindungi	K
96	Hoya	<i>Hoya sp</i>			✓	+	Belum dilindungi	H

Keterangan: A = Aur Birugo Tigo Baleh; B = Guguak Panjang; C = Mandiangin Koto Salayan; +++ = melimpah; ++ = sedang; + = jarang; K = kebun & sawah, B = belukar, H = hutan

Sumber : Profil Keaneekaragaman Hayati Kota Bukittinggi, 2021



Gambar 3.79 Peta Persebaran Flora Daratan Bernilai Penting di Kota Bukittinggi

Sumber: Profil Keaneekaragaman Hayati Kota Bukittinggi, 2021



Keanekaragaman satwa vertebrata di Kota Bukittinggi tergolong tinggi. Tingginya keanekaragaman jenis satwa berhubungan dengan bervariasinya tipe habitat yang ada di Kota Bukittinggi. Terdapat sebanyak 89 jenis satwa yang tergolong kedalam empat kelas vertebrata yaitu Kelas Amfibi, Reptil, Aves/burung dan Mamalia. Jumlah jenis vertebrata yang paling banyak ditemukan ialah dari kelompok burung yaitu sebanyak 59 jenis dan lebih banyak dibandingkan di Kota Padang dan Kota Payakumbuh yang berjumlah 34 dan 54 jenis secara berurutan.



Tabel 3.47 Daftar Satwa Daratan Jenis Liar Belum Bernilai Ekonomi di Kota Bukittinggi

No	Nama Lokal/ Indonesia	Nama Ilmiah	2013			2021			Status	Status perlindungan	Habitat	Ket.
			A	B	C	A	B	C				
Katak / Amfibi												
1	Kongkang jangkrik	<i>Hylarana nicobariensis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
2	Koncek sawah	<i>Fejervarya cancrivora</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S	
3	Koncek batanduak	<i>Megophrys nasuta</i>	-	-	-	-	✓	✓	++	-	H	
4	Koncek kasek	<i>Bufo melanostictos</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
5	Koncek kasek	<i>Phrynoidis asper</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
6	Katak sungai	<i>Limnonectes sp</i>	-	-	-	-	✓	✓	++	-	B, H	
7	Katak ijau	<i>Hylarana erythraea</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	S	
8	Katak pohon coklat	<i>Polypedates leucomystax</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	B	
9	Koncek pohon	<i>Amnirana chalconota</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	H, B	
10	Katak torrent sumatera	<i>Huia sumatrana</i>	-	-	-	-	-	✓	+	-	H	
Hewan Melata/ Reptil												
1	Kadal/ Bingkaruang	<i>Eutropis multifasciata</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
2	Biawak	<i>Varanus salvator</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	++	Dilindungi CITES	S, B	
3	Cicak tubin	<i>Draco sp.</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	++	-	K	
4	Bunglon/ kalilaso	<i>Bronchocela cristatella</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	++	-	B, K	
5	Cicak	<i>Cyrtodactylus sp.</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
6	Tokek	<i>Gekko monarchus</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	B, K	
7	Ula lidi	<i>Dendrelaphis pictus</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	++	-	B, K	
8	Ula pucuak	<i>Ahaetulla prasina</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	++	-	B, K	
9	Ula aia	<i>Xenochrophis trianguligerus</i>	✓	✓	-	✓	✓	✓	++	-	S	
10	Ula pamacik	<i>Ptyas sp.</i>	-	-	-	✓	✓	✓	++	-	S, B, K	
Sayap												
No	Nama Lokal/ Indonesia	Nama Ilmiah	2013			2021			Status	Status perlindungan	Habitat	Ket.
			A	B	C	A	B	C				
1	Kuntul kerbau	<i>Bubulcus ibis</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	S	
2	Kuntul kecil	<i>Egretta garzeta</i>	-	-	-	✓	✓	✓	++	-	S	
3	Datiak-datiak	<i>Cisticola juncidis</i>	✓	-	-	✓	✓	✓	+	-	S	
4	Elang	<i>Spilornis cheela</i>	✓	✓	-	✓	✓	✓	+	Dilindungi	M	
5	Elang hitam	<i>Ictinaetus malayensis</i>	-	✓	-	-	-	-	+	Dilindungi	M	
6	Elang-alap tikus	<i>Elanus caeruleus</i>	✓	-	-	✓	-	-	+	Dilindungi	M	
7	Merbah belukar	<i>Pycnonotus plumosus</i>	-	-	-	-	✓	✓	+	-	B	
8	Anggang/ rangkong	<i>Buceros rhinoceros</i>	-	-	-	-	-	✓	+	Dilindungi	H	
9	Unchal	<i>Macropigia ruficeps</i>	-	-	-	✓	✓	✓	++	-	H, K	
10	Punai	<i>Chalcophaps indica</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+	-	B, H, K	



11	Punai	<i>Treron vemans</i>	-	-	-	✓	✓	✓	++	-	S, B, K
12	Burung madu	<i>Anthreptes malaccensis</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	K
13	Burung madu	<i>Aetophyga temmickii</i>	✓	✓	-	-	-	-	+	-	H
14	Burung madu	<i>Aetophyga siparaja</i>	✓	✓	-	✓	-	✓	+	Dilindungi	B, H, K
15	Burung madu	<i>Anthreptes singalensis</i>	-	✓	-	-	-	-	+	-	B, H, K
16	Burung madu	<i>Cinnirys jugularis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	H, K
17	Pijantung kecil	<i>Arachnothera longirostra</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	++	-	H, K
18	Pijantung besar	<i>Arachnothera robusta</i>	-	✓	-	-	-	-	+	-	H
19	Burung madu	<i>Arachnothera hypogrammica</i>	-	-	-	-	✓	✓	++	-	H
20	Tagun tagun	<i>Psilopogon australis</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, H, K
21	Tagun tagun	<i>Megalaima chrysopogon</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+	Dilindungi	S, B, H, K
22	Tagun tagun	<i>Psilopogon mystacophanos</i>	-	-	-	-	-	✓	+	Dilindungi	H
23	Tagun-tagun	<i>Psilopogon pyrolophus</i>	-	✓	-	-	-	-	+	Dilindungi	H
24	Tagun tagun	<i>Psilopogon oorti</i>	-	-	-	-	-	✓	+	Dilindungi	H
25	Tagun tagun	<i>Psilopogon haemacephala</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
26	Raja udang	<i>Alcedo meninting</i>	✓	✓	-	✓	✓	✓	++	-	S, B, H, K
27	Raja udang	<i>Ceyx rufidorsa</i>	-	-	-	✓	✓	✓	++	-	B, H, K
28	Raja udang	<i>Halcyon smyrnensis</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
29	Sikiaki/ raja udang	<i>Todirhamphus chloris</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
30	Sempur hujan	<i>Cymbirhynchus macrochynchos</i>	-	✓	-	-	-	✓	+	-	H, K
31	Sempur hujan	<i>Eurylaimus ochromalus</i>	-	✓	-	-	✓	✓	++	-	H, K
32	Tepus	<i>Stachyris poliocephala</i>	-	✓	-	-	-	✓	+	-	H
33	Tepus	<i>Trichastoma rostratum</i>	-	✓	-	-	-	-	+	-	H
34	Kancilan	<i>Malaccocincla malaccense</i>	-	✓	-	-	-	✓	+	-	H
35	Murai cindang	<i>Enicurus ruficapillus</i>	-	✓	-	-	-	✓	++	-	H
36	Ruak-ruak	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
37	Puyuh/ puyuh	<i>Tumix sp.</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
38	Ayam-ayaman	<i>Galiocrex cinerea</i>	-	-	✓	-	-	-	+	-	S
39	Ayam-ayaman / bakiak	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	✓	-	✓	✓	-	✓	++	-	S, B
40	Cabean/ cabe	<i>Dicaeum concolor</i>	-	✓	-	-	-	-	+	-	H, K
41	Cinenen	<i>Orthotomus ruficeps</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, H, K
42	Ciung air	<i>Macronous gularis</i>	-	✓	-	-	-	✓	+	-	S, B, H, K
43	Bondol haji/ bundin	<i>Lonchura maja</i>	✓	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B
44	Bondol peking/ pipik	<i>Lonchura punctulate</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
45	Bondol tunggir putih/pipik	<i>Lonchura striata</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K
46	Burung gereja	<i>Passer montanus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B,
47	Tempual/ tampuo	<i>Ploceus philippinus</i>	✓	-	-	✓	✓	✓	++	-	S, B, K
48	Bentet	<i>Lanius cristatus</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+	-	S, B, K
49	Bentet loreng	<i>Lanius tigrinus</i>	-	✓	-	-	-	✓	+	-	S, B, K
50	Wiwik kelabu	<i>Cacomantis merulinus</i>	✓	-	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K



51	Bubuik/ bubut	<i>Centropus sinensis</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	++	-	S, B	
52	Kapinis	<i>Apus affinis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	++	-	M	
53	Walet	<i>Collocalia esculenta</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	M	
54	Layang-layang kawat	<i>Hirundo tahitica</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
55	Layang-layang kawat	<i>Hirundo rustica</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	S, B, K	
56	Kicuit	<i>Motacilla cinerea</i>	✓	✓	-	✓	✓	✓	++	-	S, B	
57	Sikatan	<i>Muscicapa dauurica</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+	-	K, H	
58	Jinjing batu	<i>Hemipus hirundinaceus</i>	-	-	-	-	✓	✓	+	-	H, K	
59	Tapekong	<i>Hemiprocne comate</i>	-	-	-	-	-	✓	+++	-	H, K	
Mamalia												

No	Nama Lokal/ Indonesia	Nama Ilmiah	2013			2021			Status	Status perlindungan	Habitat	Ket.
			A	B	C	A	B	C				
1	Bajing	<i>Callosciurus notatus</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	B, H, K	
2	Karo/kera	<i>Macaca fascicularis</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+++	-	B, H, K	
3	Kaluang/ kalong	<i>Pteropus vampyrus</i>	✓	-	-	-	-	-	+	-	H, K	
4	Kelelawar	<i>Cynopterus sp.</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	B, H, K	
5	Babi hutan	<i>Sus scrofa</i>	-	✓	-	✓	✓	✓	+++	-	S, B, H, K	
6	Baruak/ beruk	<i>Macaca nemestrina</i>	-	✓	-	-	✓	✓	+	-	H, K	
7	Tupai	<i>Tupaia minor</i>	-	-	-	-	✓	✓	+	-	H	
8	Simpai	<i>Presbytis melalophos</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	Dilindungi	H, K	
9	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>	-	✓	-	-	-	✓	+	-	H, K	
10	Musang	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i>	-	-	-	✓	✓	✓	+	-	K, H	

Sumber: Data Konsultan Tahun 2021

Keterangan: A = Aur Birugo Tigo Baleh; B = Guguak Panjang; C = Mandiangin Koto

Salayan; +++ = melimpah; ++ = sedang; + = jarang; M = Melayang, S = sawah, B = belukar, H = hutan, K = Kebun, * Endemik, introduksi, terancam, berlimpah, ** dilindungi, tidak dilindungi, *** pemanfaatan, potensi budidaya, dan upaya pengembangan (penangkaran, sumber bibit/ pemuliaan, dll)

Sumber : Profil Keanekaragaman Hayati Kota Bukittinggi, 2021

Satwa Invertebrata juga memiliki nilai penting dalam ekosistem dan kehidupan masyarakat. Jenis liar berupa satwa invertebrata yang belum bernilai ekonomi di Kota Bukittinggi yaitu kupu-kupu. Jumlah kupu-kupu di Kota Bukittinggi ditemukan sebanyak 54 jenis dan ditemukan lima famili yaitu, Papilionidae, Hesperidae, Pieridae, Nymphalidae dan Lycaenidae. Jenis kupu-kupu yang ditemukan di Kota Bukittinggi, dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.48 Jenis Kupu-Kupu yang Ditemukan di Kota Bukittinggi

No	Nama Lokal / Umum	Nama Ilmiah	Kecamatan			Status	Status perlindungan	Habitat
			A	B	C			
1	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Charaxes solon</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
2	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Chersonesia intermedia</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
3	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Cupha erymanthis</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
4	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Doleschallia bisaltide</i>		✓	✓	+	Tidak dilindungi	B, H
5	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Elymnias nesaea</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
6	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Euploea camaralzeman</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
7	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Euploea mulciber</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
8	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Euripus nyctelius</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
9	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Hypolimnas bolina</i>	✓	✓	✓	++	Tidak dilindungi	B, H
10	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Hypolimnas misippus</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B
11	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Ideopsis gaura</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
12	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Junonia atlites</i>			✓	++	Tidak dilindungi	B
13	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Junonia iphita</i>	✓	✓	✓	+++	Tidak dilindungi	B, H
14	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Junonia orithya</i>	✓		✓	++	Tidak dilindungi	B
15	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Lethe confusa</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
16	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Melanitis leda</i>	✓			+	Tidak dilindungi	S, B, H
17	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Mycalasis horsfieldi</i>			✓	++	Tidak dilindungi	B, H
18	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Mycalasis janardana</i>			✓	+++	Tidak dilindungi	B, H
19	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Mycalasis orseis</i>	✓	✓		++	Tidak dilindungi	B
20	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Neptis hylas</i>	✓	✓		+++	Tidak dilindungi	B, H
21	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Orsotriaena medus</i>	✓		✓	++	Tidak dilindungi	B, H
22	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Ragadia makuta</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
23	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Rohana nakula</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
24	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Rohana perisatis</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
25	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Tanaecia godartii</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
26	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Tanaecia munda</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
27	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Tanaecia pelea</i>	✓	✓	✓	+++	Tidak dilindungi	H
28	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Ypthima pandocus</i>	✓			+++	Tidak dilindungi	B, H
29	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Ypthima philomela</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
30	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Ampittia dioscorides</i>	✓			++	Tidak dilindungi	B, H



31	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Hidara irava</i>	✓		✓	+	Tidak dilindungi	B
32	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Pelopidas mathias</i>	✓			++	Tidak dilindungi	B, H
33	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Pseudocolania dan</i>	✓			+	Tidak dilindungi	B, H
34	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Arhopala horsfieldi</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
35	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Curetis santana</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
36	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Jamides electo</i>	✓			+++	Tidak dilindungi	B
37	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Prosotas nora</i>	✓			+++	Tidak dilindungi	B
38	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Surendra vivarna</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
39	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Graphium agamemnon</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
40	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Papilio demoleus</i>	✓			+	Tidak dilindungi	B, H
41	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Papilio helenus</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
42	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Papilio memnon</i>	✓		✓	+++	Tidak dilindungi	B, H
43	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Papilio nephelus</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
44	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Papilio polytes</i>	✓		✓	++	Tidak dilindungi	B, H
45	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Troides amphrysus</i>			✓	+	Dilindungi	H
46	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Appias hyparete</i>	✓			+	Tidak dilindungi	H
47	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Appias libythea</i>	✓	✓		++	Tidak dilindungi	B, H
48	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Catopsilia pomona</i>	✓			+	Tidak dilindungi	B
49	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Delias belisama</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
50	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Eurema blanda</i>			✓	+++	Tidak dilindungi	B, H
51	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Eurema briqitta</i>			✓	+	Tidak dilindungi	B, H
52	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Eurema hecabe</i>	✓	✓	✓	+++	Tidak dilindungi	B, H
53	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Eurema smilax</i>			✓	+	Tidak dilindungi	H
54	Ramo-ramo / Kupu-kupu	<i>Leptosia nina</i>		✓	✓	+++	Tidak dilindungi	B, H

Keterangan : A = Aur Birugo Tigo Baleh; B = Guguk Panjang; C = Mandiangin Koto Salayan; +++ = melimpah; ++ = sedang; + = jarang; B= Belukar, H = hutan, S = Sawah

Sumber : Profil Keanekaragaman Hayati Kota Bukittinggi, 2021



3.3 Gambaran Umum Keuangan Daerah

3.3.1 Kinerja Keuangan Daerah

3.3.1.1 Pendapatan Daerah

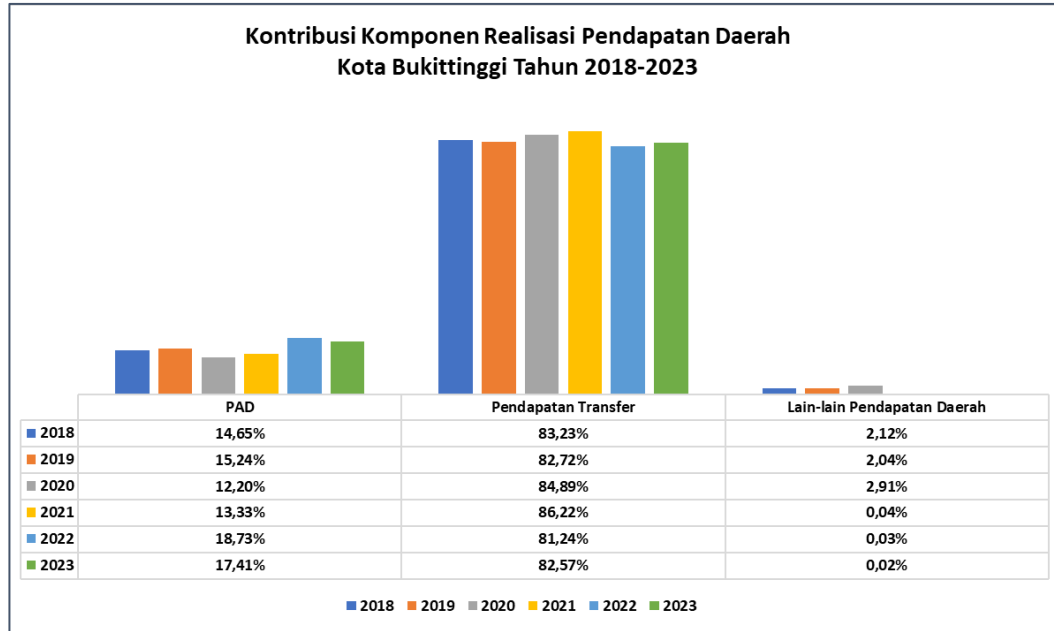
Komponen pendapatan daerah dibentuk oleh tiga sumber yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kota Bukittinggi selama 5 tahun (2018-2023) terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan anggaran rata-rata pertahun pendapatan daerah Kota Bukittinggi tahun 2018 hingga tahun 2023 meningkat dari Rp. 695.590.867.770,61 pada tahun 2018 menjadi Rp. 706.975.448.172,65 pada tahun 2023. Rata-rata tingkat pertumbuhan anggaran selama 5 tahun hanya sebesar 0,01%. Tingkat capaian realisasi dibandingkan dengan target secara umum sudah baik yakni rata-rata sebesar 98,25%. Penurunan signifikan pendapatan terjadi pada tahun 2020 yakni pertumbuhan realisasi turun (-6,61%) dibanding tahun 2019, namun pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan realisasi sebesar 6,03% dibanding tahun 2020.

Tabel 3.49 Target dan Realisasi, Tingkat Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	720.174.380.033,00	695.590.867.770,61	96,95	1,42	6,46
2019	749.055.030.480,00	734.106.696.896,05	98,00	4,01	5,54
2020	690.981.742.486,00	689.222.919.606,62	99,75	-7,75	-6,11
2021	684.347.061.146,00	688.635.054.453,61	100,63	-0,96	-0,09
2022	714.157.721.650,00	698.402.386.323,22	97,79	4,36	1,42
2023	733.692.996.334,00	706.975.448.172,65	96,36	2,74	1,23
Rata-rata			98,25	0,006	0,01

Sumber: LRA Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

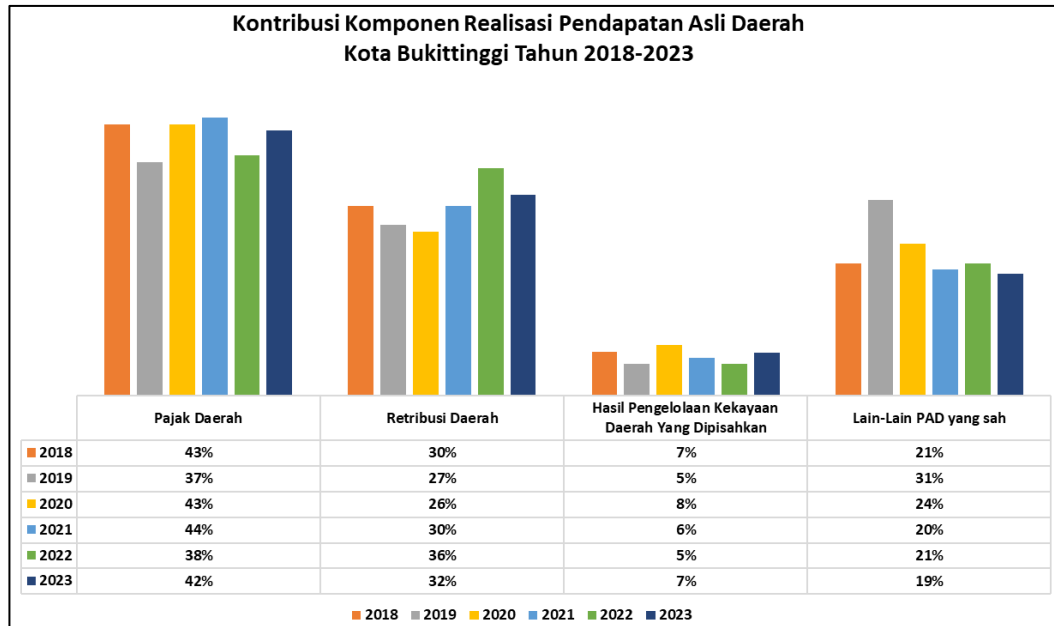
Berdasarkan kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2018-2023 didominasi oleh sumber dalam bentuk pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 83,48%, disusul oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,26% dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebesar 1,19%. Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah berkisar antara 12%-18%, dengan rata-rata 15,26%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi tergolong pada pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat sangat dominan kepada daerah. Berikut disajikan dalam Gambar 3.80, kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kota Bukittinggi.



**Gambar 3.80 Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2018-2023**

Sumber: LRA Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

Gambar 3.81 menjelaskan kontribusi masing-masing komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi serta rata-rata proporsi/kontribusi selama tahun 2018-2023. Pajak daerah merupakan komponen yang berkontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2018-2023 dengan rata-rata 41% dan diikuti oleh Retribusi Daerah dengan rata-rata 30%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 23%, dan terendah adalah dari komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni sebesar 6% rata-rata per tahunnya selama lima tahun terakhir.



Gambar 3.81 Kontribusi Komponen Realisasi PAD Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022

Sumber: LRA Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022

3.3.1 2 Belanja Daerah

Analisis belanja daerah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah Kota Bukittinggi pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Belanja merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.

Selama tahun 2018-2023 realisasi belanja daerah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan dari Rp. 703.783.285.315,95 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 751.239.962.696,31 pada tahun 2023 dan anggaran belanja pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 811.015.184.022,00 dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 2,04% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 4,88%. Tingkat realisasi penyerapan belanja daerah selama tahun 2018-2023 dengan memperbandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi belanja secara rata-rata mencapai 86,50%. Berikut disajikan target dan realisasi serta tingkat capaian dan pertumbuhan belanja daerah tahun 2018-2023.

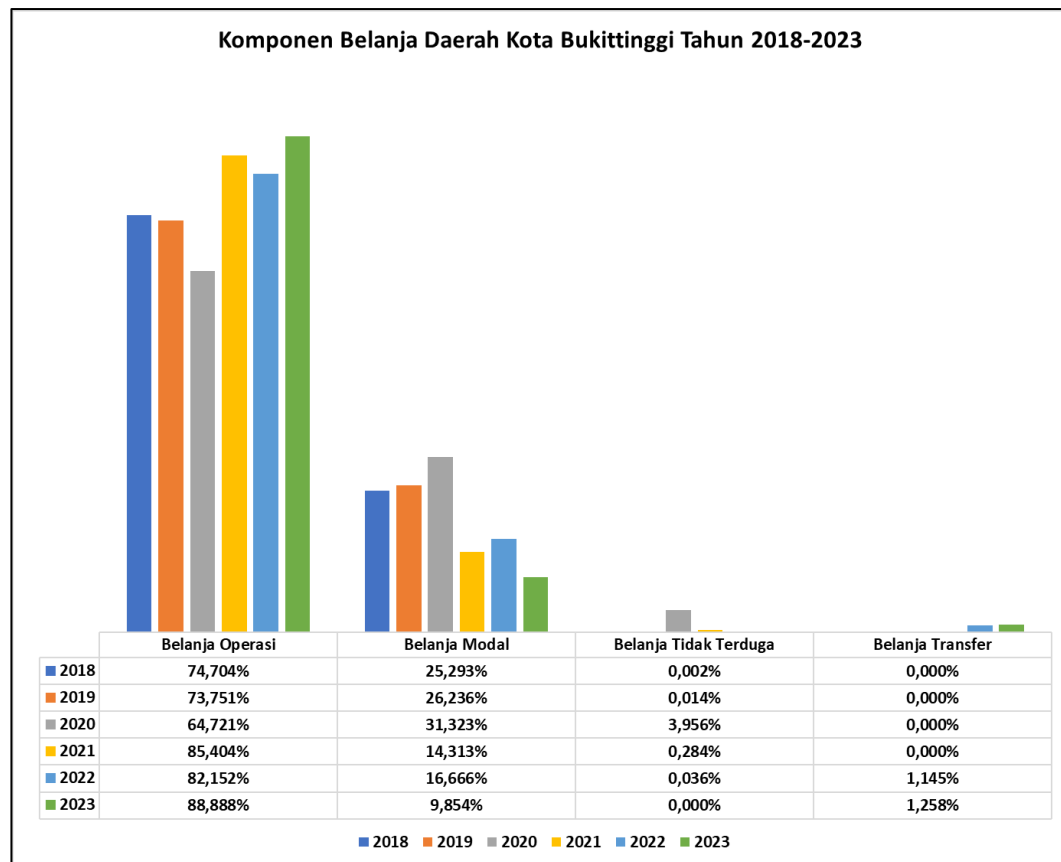


Tabel 3.50 Target dan Realisasi Belanja Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2018	838.430.535.411,22	703.783.285.315,95	83,94	0,14	0,19
2019	890.512.534.055,88	716.528.264.978,33	80,46	0,06	0,02
2020	882.978.637.855,10	795.954.479.299,97	90,14	-0,01	0,11
2021	783.759.843.834,00	650.051.328.563,46	82,94	-0,11	-0,18
2022	837.145.281.505,00	744.059.199.525,66	88,88	0,07	0,14
2023	811.015.184.022,00	751.239.962.696,31	92,63	-0,03	0,01
Rata-Rata			86,50%	2,04%	4,88%

Sumber: LRA Kota Bukittinggi Tahun 2017-2022

Ditinjau dari realisasi kontribusi setiap komponen pembentuk belanja daerah pada tahun 2018-2023, belanja daerah didominasi untuk pemenuhan belanja operasi dengan proporsi rata-rata sebesar 78,57%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengalokasian belanja daerah sebagian besar masih diarahkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan lainnya.



Gambar 3.82 Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023

Sumber: LRA Kota Bukittinggi Tahun 2018-2023



3.4 Peran Para Pihak Dalam Pencapaian TPB

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “No one left behind” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”.

Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kota Bukittinggi dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.51 Peran OPD Kota Bukittinggi dalam Pencapaian Target TPB/SDGs

No	OPD/Unit Leading Sector	TPB
1	Bagian Administrasi Pembangunan	Tujuan 17
2	Bagian Hukum	Tujuan 10 dan 16
3	Bagian Organisasi	Tujuan 16
4	Bagian pengadaan barang dan jasa	Tujuan 16 dan 17
5	Bagian Perekonomian dan SDA	Tujuan 1 dan 8
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Tujuan 1; 8 dan 10
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tujuan 5 dan 16
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tujuan 1; 11 dan 13



No	OPD/Unit Leading Sector	TPB
9	Badan Keuangan Daerah	Tujuan 1; 16 dan 17
10	Badan Pusat Statistik	Tujuan 17
11	Dinas Kesehatan Kota	Tujuan 1; 2; 3 dan 6
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tujuan 4; 9; 16 dan 17
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja	Tujuan 1; 8 dan 10
14	Dinas Lingkungan Hidup	Tujuan 6; 7; 11; 12 dan 15
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Tujuan 1; 3; 5 dan 16
16	Dinas Pariwisata	Tujuan 8
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tujuan 1; 4 dan 8
18	Dinas Perhubungan	Tujuan 9
19	Dinas Pertanian dan Pangan	Tujuan 2
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Tujuan 1 dan 6
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 1; 6 dan 11
22	Dinas Sosial	Tujuan 1 dan 10
23	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Tujuan 1; 3; 16 dan 17
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Tujuan 8 dan 9
25	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tujuan 8
26	Inspektorat	Tujuan 16
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Tujuan 10 dan 16

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan



peran dalam pelaksanaan TPB/SDGs baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendisemiasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi. Informasi ini dikumpulkan dari perwakilan masyarakat pada saat dilakukan Konsultasi Publik I Pembuatan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi, tanggal 2 Mei 2024.

Tabel 3.52 Peran Filantropi dalam Pembangunan Kota Bukittinggi

No	Pembangunan Fasilitas Publik	Lokasi	Perkiraan Biaya (Rp)	Tahun	Nama Yayasan-Badan Penanggungjawab Kegiatan	Peran dalam Ketercapaian TPB
1	Rumah Tahfiz	Jl Veteran		2016	Alfalah	TPB 4, TPB 16
2	Hibah Tanah untuk mesjid dan pembangunan	Jl Veteran	1.400.000.000,00	2010	Alfalah	TPB 4, TPB 16
3	Pembelian Tanah Jalan ke Mesjid	Jl Veteran	1.400.000.000,00	2018	Alfalah	TPB 4, TPB 16
4	Mesjid Jami'a	Surau Gadang Campag Ipuah	23.000.000.000,00	2022	Pengurus mesjid dan warga	TPB 4, TPB 16
5	Pengecoran Jalan Setapak	Jl Linggarjati Kel Belakang Balok	7.050.000,00	2023	Swadaya Masyarakat	TPB 9, TPB 11
6	Pembangunan TK	Balai Banyak	200.000.000,00	2020	Yayasan Melur Putih	TPB 4
7	Pembangunan Mesjid dan Pagar Mesjid	Jl Padang	12.000.000.000,00	2017	Mesjid Nurul Huda	TPB 4, TPB 16
8	Pembangunan MDA	Jl Padang		2019	Mesjid Nurul Huda	TPB 4

KLHS RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030



BAB IV ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB



BAB IV

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

4.1 Gambaran Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian TPB, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;



11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017, Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah:

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan
4. Ketentuan indikator RPJPD.

Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator kewenangan kota: 222

4.2 Rincian TPB Kota Bukittinggi

Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota adalah 222 indikator. Untuk Kota Bukittinggi sendiri, terdapat 12 indikator yang bukan menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Bukittinggi. Rincian indikator dengan kategori BK dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. Indikator dengan kategori BK diantaranya terkait dengan



kota pemukiman yang metropolitan, kota besar, dan sedang, dan kota yang menjadi Pelabuhan tol laut, dimana Kota Bukittinggi tidak termasuk ke dalam kategori tersebut berdasarkan RPJMN 2015-2019.

Tabel 4.1 Indikator TPB Bukan Kewenangan Daerah Kota Bukittinggi

No	No Indikator	Indikator TPB	Kekhususan Indikator
1	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Khusus untuk daerah yang terdapat salah satu dari 15 danau prioritas dan 5 wilayah sungai
2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Kewenangan provinsi
3	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Kewenangan provinsi
4	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Kewenangan pusat
5	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Kewenangan pusat
6	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Khusus daerah yang terdapat 24 pelabuhan tol laut
7	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Khusus daerah yang terdapat 24 pelabuhan tol laut
8	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	khusus daerah yang menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan
9	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	khusus untuk kota sedang dan kota baru
10	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Khusus kota besar
11	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	khusus 20 kota sedang di luar jawa (1 papua, 1 maluku, 2 Nusa Tenggara, 6 sulawesi, 4 kalimantan, 6 sumatera)
12	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	khusus kab/kota di luar jawa yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru sbg PKN

Berdasarkan pilar, TPB dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola. Indikator terbanyak terdapat pada pilar sosial dengan 97 indikator (44%). Pilar



sosial terdiri dari TPB 1 Tanpa Kemiskinan, TPB 2 Tanpa Kelaparan, TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, TPB 4 Pendidikan Berkualitas dan TPB 5 Kesetaraan Gender. Pilar Ekonomi terdiri dari 55 indikator (25%) mencakup TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, TPB 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan dan TPB 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pilar Lingkungan terdiri dari 49 indikator (22%) yang terdiri dari TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, TPB 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, TPB 12 Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab, TPB 13 Penanganan Perubahan Iklim dan TPB 15 Ekosistem Darat. Pilar Hukum dan Tata Kelola terdiri dari 21 indikator (9%) yang mencakup TPB 16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Tabel 4.2 Gambaran Indikator TPB Berdasarkan Pilar

No	Nama Pilar	Jumlah Indikator	Persentase
1	Sosial	97	44%
2	Ekonomi	55	25%
3	Lingkungan	49	22%
4	Hukum dan Tata Kelola	21	9%
Total		222	100%

4.3 Evaluasi Capaian TPB Kota Bukittinggi

Pembahasan capaian TPB Kota Bukittinggi dibagi menjadi 4 pokok bahasan utama yaitu:

1. Evaluasi Pelaksanaan TPB menurut kategori capaian;
2. Evaluasi Pelaksanaan TPB menurut pilar pembangunan;
3. Evaluasi Pelaksanaan TPB menurut OPD/Unit/Badan

4.3.1 Evaluasi Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Capaian

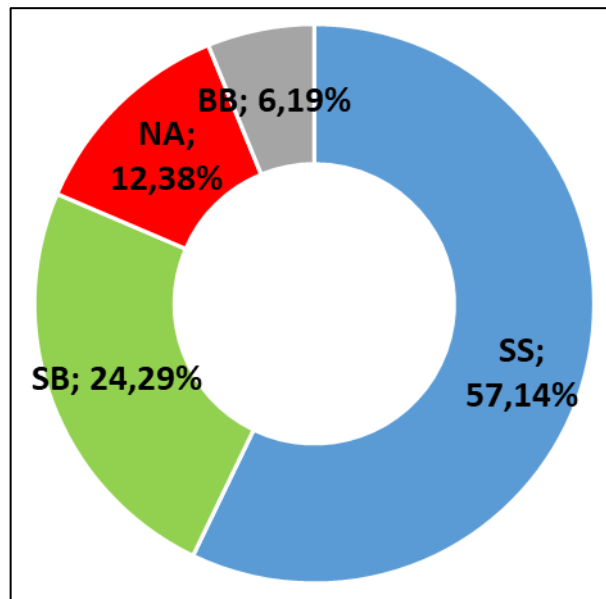
Pada Perpres No. 59 Tahun 2017 telah ditetapkan target pelaksanaan TPB secara nasional. Kategori evaluasi capaian TPB adalah sebagai Berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);







2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB);
3. Indikator TPB yang belum dikerjakan dan belum tercapai (BB); dan
4. Indikator TPB yang telah dikerjakan tetapi belum ada data (NA).

Berdasarkan hasil analisis data, dari 210 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi, didapatkan bahwa indikator TPB di Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) adalah 57,14% (120 dari total 210 indikator), sedangkan untuk kategori SB dan NA berturut-turut adalah 24,29% dan 12,38%. Untuk indikator dengan kategori belum dilaksanakan dan belum tercapai (BB) adalah 6,19%. Hasil capaian pelaksanaan TPB Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Gambar 4.1 dibawah.



Keterangan:

-  SS: **Sudah** Terlaksana dan **Sudah** Mencapai Target
-  SB: **Sudah** Terlaksana Tetapi **Belum** Mencapai Target
-  NA: **Sudah** Terlaksana Tetapi **Belum** Ada Data
-  BB: **Belum** Terlaksana dan **Belum** Mencapai Target

Gambar 4.1 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi



Terdapat 120 indikator TPB dengan kategori yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS). TPB dengan capaian tertinggi adalah TPB 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yakni 20 indikator seperti terlihat pada Tabel 4.3. Terdapat 51 indikator yang masuk kategori TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target (SB). TPB dengan capaian tertinggi untuk kategori SB ini juga merupakan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dengan 10 indikator.

Tabel 4.3 Capaian Indikator TPB Berdasarkan TPB Kota Bukittinggi

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Tanpa Kemiskinan	25	16	8	0	1
2	Tanpa Kelaparan	11	9	0	2	0
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	20	10	4	0
4	Pendidikan berkualitas	13	9	3	1	0
5	Kesetaraan gender	14	9	5	0	0
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	6	3	1	7
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	7	5	0
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	9	6	2	1	0
10	Mengurangi kesenjangan	6	5	0	1	0
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	15	11	2	0	2
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	1		
15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	2	1	1	
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	9	4	8	
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	9	4	2	
Total		210	120	51	26	13
Persentase			57,1%	24,3%	12,4%	6,2%

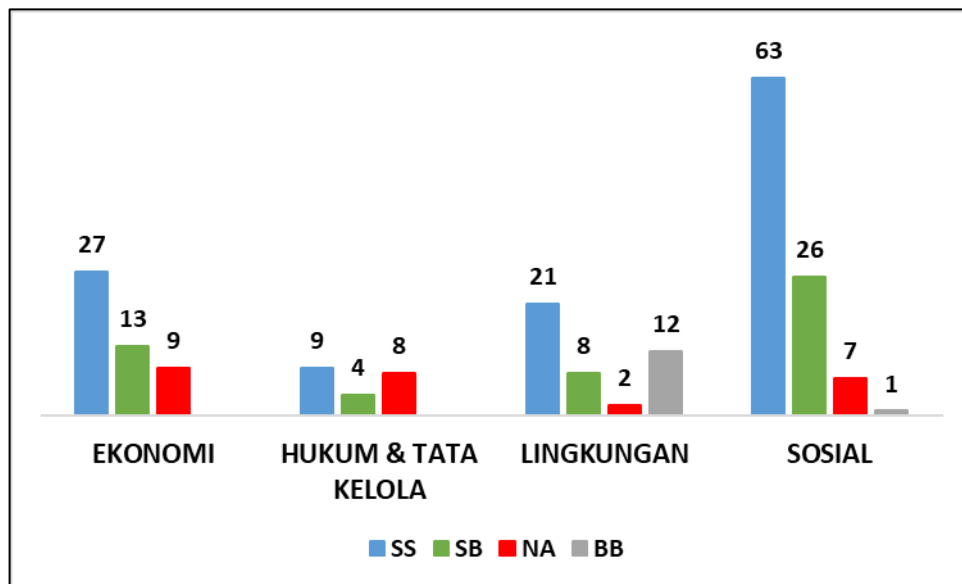
4.3.2 Evaluasi Pelaksanaan TPB Menurut Kategori Pilar

Menurut pilar, capaian TPB Kota Bukittinggi terlihat pada Tabel 4.4. Pilar dengan capaian tertinggi adalah pilar sosial (63 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar ekonomi (27 indikator dengan kategori SS) dan pilar lingkungan (21 indikator dengan kategori SS). Kategori SB tertinggi juga berada pada pilar sosial dengan 26 indikator dengan capaian SB. Sedangkan, kategori NA tertinggi berada pada pilar ekonomi dengan 9 indikator dengan capaian NA.



Tabel 4.4 Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar Kota Bukittinggi

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Capaian			
			SS	SB	NA	BB
1	Ekonomi	49	27	13	9	
2	Hukum & tata kelola	21	9	4	8	
3	Lingkungan	43	21	8	2	12
4	Sosial	97	63	26	7	1
Total		210	120	51	26	13
Persentase			57,1%	24,3%	12,4%	6,2%



Gambar 4.2 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi Berdasarkan Pilar

4.4 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Terdapat 120 indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS).

Tabel 4.5 Indikator TPB Capaian SS Kota Bukittinggi

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	4,96%	5,74%	5,03%	4,66%	SS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	83,70%	81,73%	87,11%	97,08%	SS
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	33%	35%	42%	45%	SS
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	27%	37%	37%	38%	SS
5	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	100%	100%	100%	100%	SS
6	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	56,10%	53,10%	68,30%	67,50%	SS
7	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	88,1%	91,5%	97,5%	97,0%	SS
8	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	96,00%	98,09%	98,29%	97,96%	SS
9	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	95,13%	95,08%	97,38%	97,79%	SS
10	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	100%	100%	100%	100%	SS
11	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	24 kel	24 kel	24 kel	24	SS
12	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	0	346	656	2799	SS
13	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	NA	346	656	2799	SS
14	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	0	0	0	0	SS
15	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1	1	1	1	SS



16	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,10%	0,14%	0,27%	0,62%	SS
17	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	4,27	3,86	8,1	6,21	SS
18	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	5,66%	7,70%	8,98%	7,30%	SS
19	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	0	0	0	0	SS
20	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	0	0	0	0	SS
21	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	10,85%	12,04%	11,03%	10,80%	SS
22	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	12,44%	11,15%	11,40%	11,04%	SS
23	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	4,41%	5,22%	5,22%	4,60%	SS
24	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	10,70%	13,47%	10,69	6,4	SS
25	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	75,95	72,4	67,3	66%	SS
26	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	0,26	0,2	0,00%	0,90%	SS
27	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	100%	100%	100%	100%	SS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



28	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	SS
29	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	1,52	2,49	1,80	0,44	SS
30	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	7,58	5,97	7,19	5,69	SS
31	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	1,01	5,97	7,19	7,01	SS
32	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	228,9	256,6	654,9	222,7	SS
33	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0	0	0	0	SS
34	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	100%	100%	100%	100%	SS
35	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	0	0	0	0	SS
36	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	100%	100%	100%	100%	SS
37	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Meningkat menjadi 35.	100%	100%	100%	100%	SS
38	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	100%	100%	100%	100%	SS
39	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	32,01%	32,84%	23,31%	23,93%	SS
40	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	3,7356	3,88448 9	4,15577 1	3,923	SS
41	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	0%	84%	94%	98%	SS
42	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	83,70%	81,73%	87,11%	97,08%	SS



43	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	0	0	0	0	SS
44	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS
45	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS
46	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS
47	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	87,69%	87,69%	87,69%	87,69%	SS
48	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	123%	115%	115%	111%	SS
49	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	11	11	11	11	SS
50	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	73,84	80,5	84,32	85,87	SS
51	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	SS
52	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	SS
53	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS



54	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	92,62%	81,36%	52,20%	79,40%	SS
55	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	31	31	33	35	SS
56	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,41	0,38	0,1	0,02%	SS
57	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0,16	0,31	0,46	0,12%	SS
58	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,18	0,19	0,68	0,002%	SS
59	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	70%	100%	100%	100%	SS
60	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,077	0,077	0,21	0	SS
61	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	23	23	24	24,3	SS
62	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	7,52%	0,62%	9,01%	8,56%	SS
63	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	95,47	95,2	92,15	95,51	SS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



64	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	248,50	248,50	248,50	248,50	SS
65	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	98,20%	99,80%	99,80%	99,80%	SS
66	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	100%	100%	100%	100%	SS
67	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	17%	100%	100%	100%	SS
68	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0	1	1	1	SS
69	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	0	0	0	2	SS
70	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	71,29	74,24	83,35	89,74	SS
71	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	49%	52%	51%	55%	SS
72	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	15525,26	15525,26	15703,37	17140,42	SS
73	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	7,51%	6,09%	4,90%	4,99%	SS
74	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	2337	17	491	20966	SS
75	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	NA	NA	3,62%	3,76%	SS
76	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	200-300 m	200-300 m	200-300 m	200-300 m	SS
77	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	13,65%	13,78%	13,98%	15,95%	SS
78	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	100%	100%	100%	100%	SS
79	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Meningkat	0,0139 %	0,0285 %	0,0128 %	0,0048 %	SS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



80	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	95%	95%	97%	97%	SS
81	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	95,47	95,2	92,15	95,51	SS
82	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	73,84	80,5	84,32	85,87	SS
83	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,265	0,286	0,317	0,255	SS
84	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	4,96%	5,74%	5,03%	4,66%	SS
85	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	15,20%	25,58%	29,53%	28,97%	SS
86	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0	0	0		SS
87	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	33%	35%	42%	45%	SS
88	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	0,00%	0,00%	50,99%	93,98%	SS
89	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	30%	40%	70%	70%	SS
90	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	100%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	SS
91	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	40	40	40	40	SS
92	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	24 kel	24 kel	24 kel	24 kel	SS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



93	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	3	3	3	3	SS
94	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	0	0	0	0	SS
95	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	89,75	94,02	89,09	86,91	SS
96	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	3	3	3	3	SS
97	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ada	1	1	1	1	SS
98	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	1	1	1	1	SS
99	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	1.088,33 ton/tahun	371,22 ton/tahun	1.761,51 ton/tahun	3.647,55 ton/tahun	SS
100	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1	1	1	1	SS
101	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	TIDAK ADA LAHAN KRITIS	TIDAK ADA LAHAN KRITIS	TIDAK ADA LAHAN KRITIS	TIDAK ADA LAHAN KRITIS	SS
102	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	ada	ada	ada	ada	SS
103	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	0,034	0,051	0,060	0,057	SS
104	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	0,24%	0,51%	0,41%	0,14%	SS
105	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	0,02	0,04	1,4	0,04%	SS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



106	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	90,15%	82,94%	88,88%	92,63%	SS
107	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP	WTP	SS
108	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	95,4%	96,4%	98,2%	98,4%	SS
109	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	91,45	95,84	99,11	95,82	SS
110	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	95,13%	95,08%	97,38%	97,79%	SS
111	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	0	0	0	0	SS
112	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	95%	95%	97%	97%	SS
113	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	73,84	80,5	84,32	85,87	SS
114	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	3	6	4	5	SS
115	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	89,43%	91,85%	93,73	100%	SS
116	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	83,87	90,32	97,14%	100,00 %	SS



117	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	10	10	10	11	SS
118	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	ada	ada	SS
119	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	18097	20493	25087	26819	SS
120	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	97%	100%	100%	100%	SS

4.5 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Terdapat 51 indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB).

Tabel 4.6 Indikator TPB Capaian SB Kota Bukittinggi

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	1.203	1.850	2.048	2.177	SB
2	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	68,08%	67,72%	69,02	63%	SB
3	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	88,62	84,92	88,65	89,10	SB

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



4	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,25	89,93	85%	87%	SB
5	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta			9,30%	11,23%	SB
6	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00001	0,00002	0,00011	0,00017	SB
7	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	130	130	128,01	128,01	SB
8	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	44,42%	39,65%	36,12%	32,33%	SB
9	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	25,00%	25,00%	29,17%	29,17%	SB
10	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,05%	0,04%	0,09%	0,84%	SB
11	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	54%	57%	66,97	63,31	SB
12	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	1,45%	1,64%	1,89%	8,70%	SB
13	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	9,50%	9,34%	9,07%	31,20%	SB
14	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	0,52%	0,52%	0,47%	21,80%	SB
15	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	68,08%	67,72%	69,02%	63,24%	SB
16	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	68,08%	67,72%	69,02%	63,24%	SB

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



17	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	1,85%	2,39%	2,23%	2,38%	SB
18	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurun	0,02%	0,02%	0,02%	0,88%	SB
19	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	80%	80%	80%	80%	SB
20	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	127%	114%	111%	110%	SB
21	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	70%	43%	40%	41,27%	SB
22	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	8%	8%	8%	8%	SB
23	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	11%	15%	30%	19%	SB
24	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	68,08%	67,72%	69,02	63,24% (data real)	SB
25	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	12,93%	11,46%	18,59%	16,04%	SB
26	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	68%	68%	54%	61%	SB
27	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	88,62	84,92	88,65	89,10	SB
28	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	90,3%	89,9%	85,1%	86,6%	SB
29	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	47,33	48,06	30	23,85	SB
30	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	5,39	2,95	8,61	6,89	SB

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



31	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	36,87%	35,39%	39,30%	35,85%	SB
32	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	2,0%	2,9%	3,6%	2,6%	SB
33	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	0%	0%	26%	22%	SB
34	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	37,35%	32,27%	20,76%	26,34%	SB
35	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	510586	749922	##### ###	##### ###	SB
36	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	140,006 6	139,402 7	134,652 2	127,821 1	SB
37	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	0,00060 %	0,00057 %	##### ###	##### ###	SB
38	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	#DIV/0!	-1%	-4%	1,42%	SB
39	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00001	0,00002	0,00011	0,00017	SB
40	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	130	130	128,01	128,01	SB
41	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	67	81	93	48	SB
42	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00001	0,00002	0,00011	0,00017	SB
43	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	34,40%	34,40%	34,40%	34,40%	SB
44	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	8,59%	6,99%	9,31%	27,20%	SB



45	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	8%	8%	8%	8%	SB
46	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	11,11%	14,81%	29,63%	19,44%	SB
47	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkat	5	5	5	5	SB
48	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	85,48%	81,94%	76,48%	69,92%	SB
49	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	9,75%	10,17%	12,83%	11,06%	SB
50	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	10,56%	14,12%	17,58%	16,39%	SB
51	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	75,24	75,24	75,24	75,24	SB

4.6 Indikator TPB Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Ada Data

Terdapat 26 indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan tetapi belum ada data (NA).



Tabel 4.7 Indikator TPB Capaian NA Kota Bukittinggi

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
1	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	85/40,5	82,3/41	82,1/45,2	"Data belum dikeluarkan/ 45,68	NA
2	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	NA	NA	NA		NA
3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	0	1	2		NA
4	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%					NA
5	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun					NA
6	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%					NA
7	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	SD: 92:115 ; SMP: 95:115	SD: 92:115 ; SMP: 98:115	SD: 88:105 ; SMP: 73:105		NA
8	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	95,33	95,21	92,96		NA



9	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	-4,84	3,49	0,35		NA
10	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	10,04%	11,33%	11,63%		NA
11	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%					NA
12	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	721960,42	1118570,19	1847646,16		NA
13	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat					NA
14	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat					NA
15	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87					NA
16	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat					NA
17	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun					NA
18	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun					NA
19	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun					NA



20	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat					NA
21	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0					NA
22	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	BB	BB	BB	NA	NA
23	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%					NA
24	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	75%	80%	85%		NA
25	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi					NA
26	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk persiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	NA	NA	NA	NA	NA

4.7 Indikator TPB Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target

Terdapat 13 indikator yang termasuk dalam kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target (BB).



Tabel 4.8 Indikator TPB Capaian BB Kota Bukittinggi

No	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022	2023	Capaian
1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	0	0	0	0	BB
2	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	0	0	0	0	BB
3	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0	0	0		BB
4	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	0	0	0		BB
5	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	0	0	0		BB
6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	0	0	0	0	BB
7	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	0	0	0	0	BB
8	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	0	0	0	0	BB



9	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	0	0	0		BB
10	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Meningkat/ada	0	0	0	0	BB
11	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	0	0	0	0	BB
12	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	0	0	0	0	BB
13	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	0	0	0	0	BB

4.8 Isu Strategis

Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Strategis dirumuskan setelah dilakukan analisis dengan empat kelompok isu, yaitu:

1. Isu Berdasarkan Hasil Konsultasi Publik 1
2. Isu Berdasarkan Capaian TPB
3. Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah (Muatan KLHS)
4. Isu Berdasarkan Dokumen Perencanaan Lainnya.

4.8.1 Isu Hasil Konsultasi Publik 1

Konsultasi Publik 1 Pembuatan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 telah dilaksanakan pada 1 Mei 2024 dengan melibatkan beberapa kelompok tokoh masyarakat seperti Bundo Kandung, LKAM, akademisi, LSM, dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi. Berdasarkan konsultasi publik tersebut, didapatkan 24 isu Panjang yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok isu



yang selanjutnya akan disandingkan dengan kelompok isu lainnya. Hasil inventarisasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Hasil Inventarisasi Isu Hasil Konsultasi Publik

No	Isu Hasil Konsultasi Publik	Pengelompokan Isu
1	Pengelolaan sampah yang belum maksimal	Belum optimalnya pengelolaan sampah
2	Pengolahan sampah yang belum efektif	
3	Belum optimalnya pengelolaan sampah menjadi bahan yang bermanfaat	
4	Belum optimalnya pengelolaan sampah	
5	Masih kurangnya penanganan sampah oleh masyarakat	
6	Masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke drainase	
7	Masih banyaknya sampah yang bertumpuk di jalan	
8	Retribusi sampah rumah tangga, perkantoran, dan rumah makan tidak seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan	
9	Masyarakat masih banyak membeli air untuk minum, dll	Tingkat pelayanan air bersih masih rendah
10	Pelayanan air bersih perpipaan belum optimal	
11	Belum optimalnya pelayanan untuk air bersih	
12	Belum adanya sarana dan prasarana umum yang ramah anak, dan orang tua	Belum adanya SPU yang ramah anak dan orang tua
13	Pelayanan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan masih ada	
14	Terjadinya degradasi moral	LGBT, Degradasi Moral
15	Tidak tertibnya pengendara berjalan di jalan raya	
16	Maraknya kasus LGBT	
17	Peningkatan jalan tidak diiringi dengan drainase yang baik	Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan drainase
18	Drainase yang tersumbat	
19	Drainase yang belum memadai	
20	Belum optimalnya saluran air ke drainase, sehingga menyebabkan banjir	
21	Saluran drainase belum optimal	
22	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan



23	Pembentukan dan penguatan kelompok usaha mikro berbasis karakteristik lokasi atau daerah masyarakat masih belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dan SDA lokal dalam peningkatan ekonomi masyarakat
24	Masyarakat bergantung pada sektor pariwisata	
25	Masih kurangnya pemasaran produk daerah	

Adapun hasil pengelompokan isu Konsultasi Publik 1 Pembuatan KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Tingkat pelayanan air bersih masih rendah
3. Maraknya LGBT dan Degradasi Moral
4. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan
5. Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dan SDA lokal dalam peningkatan ekonomi masyarakat
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan drainase
7. Belum adanya SPU yang ramah anak dan orang tua

4.8.2 Isu Berdasarkan Analisis Capaian TPB

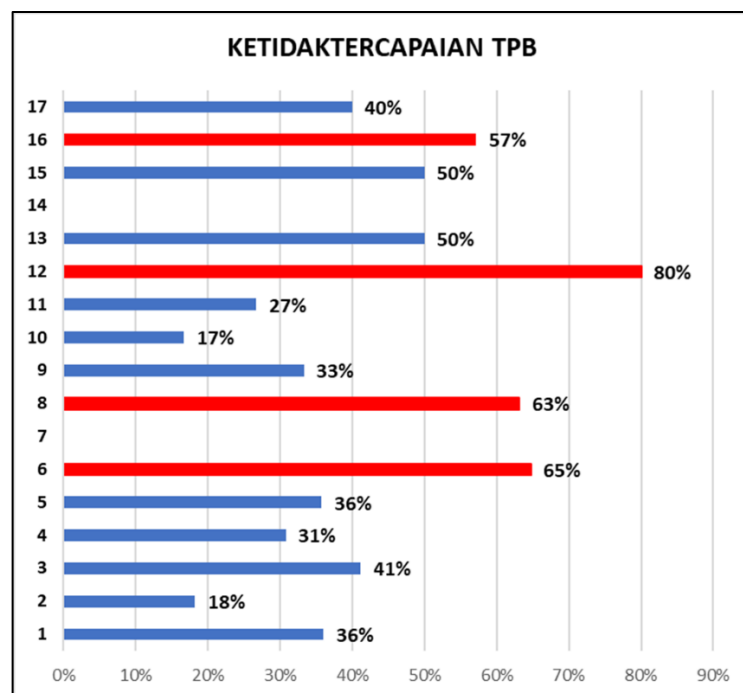
Berdasarkan evaluasi indikator TPB, dari 210 indikator TPB yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Bukittinggi ada 51 indikator TPB yang tergolong kedalam kategori sudah dikerjakan tetapi belum tercapai (SB), 26 indikator yang tergolong ke dalam kategori telah dikerjakan tetapi tidak ada data (NA), dan 13 indikator dalam kategori belum dikerjakan dan belum ada data. Indikator yang belum tercapai dan belum dilaksanakan ini menjadi Isu dalam KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030.

Tabel 4.10 Isu Berdasarkan Analisis Capaian TPB

	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Capaian				GAP Data	Rank GAP
			SS	SB	NA	BB		
1	Tanpa Kemiskinan	25	16	8	0	1	36%	8
2	Tanpa Kelaparan	11	9		2	0	18%	12
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	20	10	4	0	41%	6
4	Pendidikan berkualitas	13	9	3	1	0	31%	10
5	Kesetaraan gender	14	9	5		0	36%	8



	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Capaian				GAP Data	Rank GAP
			SS	SB	NA	BB		
6	Air bersih dan sanitasi layak	17	6	3	1	7	65%	2
7	Menjamin akses energi	0	0	0	0	0		
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	7	7	5		63%	3
9	Infrastruktur, industri dan inovasi	9	6	2	1		33%	9
10	Mengurangi kesenjangan	6	5		1		17%	13
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	15	11	2		2	27%	11
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	5	1	1	1	2	80%	1
13	Penanganan perubahan iklim	2	1	1			50%	5
14	Ekosistem Laut	0	0	0	0	0		
15	Ekosistem Darat	4	2	1		1	50%	5
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	9	4	8		57%	4
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	9	4	2		40%	7



Gambar 4.3 Ketidaktercapaian TPB



Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan Isu Berdasarkan TPB yang belum tercapai adalah:

1. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (TPB 12)
2. Air Bersih dan Sanitasi Layak (TPB 6)
3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak (TPB 8)
4. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh (TPB 16)
5. Perubahan Iklim (TPB 13)
6. Ekosistem Daratan (TPB 15)

4.8.3 Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah (Muatan KLHS)

Berdasarkan karakteristik wilayah (Muatan KLHS) Kota Bukittinggi, didapatkan isu sebagai terdapat dalam Tabel 4.11

Tabel 4.11 Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah

No	Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah (Muatan KLHS)
1	Adanya potensi defisit pangan
2	Indeks Kualitas Air Kota Bukittinggi tergolong rendah
3	Risiko Bencana di Kota Bukittinggi masih tinggi
4	Masih ada warga yang belum memiliki dan memanfaatkan septic tank sebagai tempat pembuangan akhir tinja
5	Pengelolaan sampah pada sumbernya belum berkurang
6	23 kelurahan di Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori sedang terhadap resiko perubahan iklim
7	Peningkatan penggunaan lahan sawah menjadi lahan terbangun (pemukiman, ruko)
8	Pertumbuhan PDRB Industri mengalami penurunan
9	Belum terimplementasinya dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati secara optimal

4.8.4 Isu Berdasarkan Dokumen Perencanaan Lainnya

Berdasarkan dokumen perencanaan lainnya, dalam hal ini digunakan Isu KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045, dan Isu RPPLH Kota Bukittinggi, sebagai berikut:

Isu RPPLH Kota Bukittinggi

1. Alih fungsi dan penurunan kualitas lahan



2. Penurunan kualitas dan kuantitas air serta fluktuasi debit sungai pada musim hujan dan kemarau;
3. Timbulan sampah tinggi dan kurang terkelola
4. Tingginya Kejadian dan Intensitas Bencana (Banjir, longsor, kekeringan dll)
5. Peningkatan suhu udara

Isu KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045

1. Belum terintergrasinya upaya pengentasan kemiskinan
2. Belum optimalnya pola konsumsi pangan masyarakat sesuai pola pangan harapan (PPH)
3. Belum optimalnya upaya mewujudkan kehidupan sehat dan Sejahtera
4. Belum terselenggaranya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan berkualitas
5. Upaya penyetaraan gender belum optimal
6. Belum meratanya akses air minum yang bersih dan layak untuk Masyarakat
7. Belum adanya manajemen pengelolaan sistem kepariwisataan yang komprehensif dan terintegrasi pada setiap sektor
8. Belum terbentuknya konsep pengembangan fungsi layanan berbasis digitalisasi yang inklusif sebagai faktor pendukung aktivitas pengembangan sistem perekonomian Kota Bukittinggi dan daerah sekitarnya
9. Belum meratanya pola pengembangan potensi produktifitas masyarakat pada semua kawasan dalam mendukung aktifitas peningkatan perekonomian
10. Belum terciptanya sistem manajemen transportasi yang baik
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang mendukung Pembangunan berkelanjutan



12. Belum terimplementasinya aturan-aturan dalam konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab secara optimal
13. Meningkatnya risiko bencana alam akibat perubahan iklim
14. Belum adanya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
15. Belum terwujudnya kelembagaan yang damai, adil, dan tangguh
16. Belum adanya kajian KPBU untuk Kota Bukittinggi

4.8.5 Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis

Setelah didapatkan isu dari keempat kelompok isu diatas, maka dilakukan analisis untuk mendapatkan Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis. Metode analisis yang digunakan ialah metode *crosscutting* antar isu tersebut. Crosscutting dilakukan antara setiap kelompok isu dengan TPB.



Tabel 4.12 Hasil Analisis Crosscutting antara Isu Konsultasi Publik dan TPB

Pengelompokan Isu KP		TPB																Jumlah	Ranking	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
1	Belum optimalnya pengolahan sampah	x		x	x		x				x	x	x	x		x			9	1
2	Tingkat pelayanan air bersih masih rendah	x	x	x	x		x					x		x		x			8	2
3	Maraknya LGBT dan Degradasi Moral			x	x	x											x		4	5
4	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan	x		x	x		x					x		x		x			7	3
5	Belum optimalnya pemanfaatan kearifan lokal dan SDA lokal dalam peningkatan ekonomi masyarakat	x			x				x	x	x	x						x	7	4
6	Drainase yang masih belum memadai			x			x					x							3	6
7	Belum adanya SPU yang ramah anak dan orang tua			x		x						x					x	x	5	5



Tabel 4.13 Hasil Analisis Crosscutting antara Isu Karakteristik Wilayah (6 Muatan) dan TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu Berdasarkan Karakteristik Wilayah (Muatan KLHS)									Jumlah	Ranking
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Tanpa Kemiskinan	x	x	x	x		x	x	x		7	1
2	Tanpa Kelaparan	x	x	x			x	x			5	3
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	x	x	x	x	x	x				6	2
4	Pendidikan berkualitas	x	x	x	x	x					5	3
5	Kesetaraan gender				x						1	6
6	Air bersih dan sanitasi layak	x	x		x	x	x	x		x	7	1
7	Menjamin akses energi										0	7
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	x		x		x		x	x		5	3
9	Infrastruktur, industri dan inovasi			x					x		2	5
10	Mengurangi kesenjangan	x						x	x		3	4
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan		x	x	x	x	x		x	x	7	1
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan		x			x			x		3	4
13	Penanganan perubahan iklim	x	x	x		x	x	x		x	7	1
14	Ekosistem Laut										0	7
15	Ekosistem Darat	x	x	x		x	x	x		x	7	1
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	x						x			2	5
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	x							x	x	3	4



Tabel 4.14 Hasil Analisis Crosscutting antara Isu RPPLH Kota Bukittinggi dan TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Isu RPPLH					Jumlah	Ranking
		1	2	3	4	5		
1	Tanpa Kemiskinan	x	x	x	x		4	2
2	Tanpa Kelaparan	x	x		x	x	4	2
3	Kehidupan sehat dan sejahtera		x	x	x	x	4	2
4	Pendidikan berkualitas		x	x	x		3	3
5	Kesetaraan gender						0	6
6	Air bersih dan sanitasi layak	x	x	x		x	4	2
7	Menjamin akses energi						0	
8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	x			x		2	4
9	Infrastruktur, industri dan inovasi				x		1	5
10	Mengurangi kesenjangan	x		x			2	4
11	Kota dan pemukiman berkelanjutan		x	x	x	x	4	2
12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan		x	x			2	4
13	Penanganan perubahan iklim	x	x	x	x	x	5	1
14	Ekosistem Laut						0	
15	Ekosistem Darat	x	x	x	x	x	5	1
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	x					1	5
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan			x			1	5



Tabel 4.15 Hasil Analisis Crosscutting antara Isu KLHS RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2045 dan TPB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Isu RPJPD 2025-2045																Jumlah	Ranking
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1 Tanpa Kemiskinan	x	x	x	x		x			x	x	x		x	x			10	1
2 Tanpa Kelaparan	x	x	x			x				x	x						6	5
3 Kehidupan sehat dan sejahtera	x	x	x			x					x		x				6	5
4 Pendidikan berkualitas	x	x	x	x		x				x	x						7	4
5 Kestaraan gender				x	x												2	9
6 Air bersih dan sanitasi layak	x	x	x			x	x			x	x		x				8	3
7 Menjamin akses energi																	0	10
8 Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	x			x			x	x	x			x		x	x		8	3
9 Infrastruktur, industri dan inovasi							x	x	x		x					x	5	6
10 Mengurangi kesenjangan	x							x	x								3	8
11 Kota dan pemukiman berkelanjutan						x	x	x		x	x	x	x	x			8	3
12 Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan								x			x	x					3	8
13 Penanganan perubahan iklim		x				x					x		x				4	7
14 Ekosistem Laut																	0	10
15 Ekosistem Darat		x				x					x		x	x			5	6
16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh				x	x		x	x			x	x		x	x	x	9	2
17 Kemitraan untuk mencapai tujuan				x	x		x	x	x		x	x		x	x	x	10	1



Dari hasil proses *cross-cutting* TPB terhadap masing-masing isu diatas, dilakukan akumulasi dari jumlah terhadap hasil-hasil tersebut. Dengan menjumlahkan seluruh ranking pada tiap isu, maka didapatkan TPB Prioritas. Semakin tinggi nilai akumulasi ranking TPB berarti, prioritas TPB tersebut semakin rendah. Hasil penjumlahan proses *cross-cutting* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.16 Peringkat Isu TPB Prioritas Kota Bukittinggi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Rangking Isu					Jumlah	Ranking (Prioritas)
	KP1	GAP TPB	KARAKTERISTIK WIALAYAH (MUATAN KLHS)	RPJPD 2025-2045	RRPLH		
1 Tanpa Kemiskinan	3	8	1	1	2	15	2
2 Tanpa Kelaparan	6	12	3	5	2	28	10
3 Kehidupan sehat dan sejahtera	1	6	2	5	2	16	3
4 Pendidikan berkualitas	2	10	3	4	3	22	8
5 Kesetaraan gender	5	8	6	9	6	34	12
6 Air bersih dan sanitasi layak	3	2	1	3	2	11	1
8 Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	6	3	3	3	4	19	6
9 Infrastruktur, industri dan inovasi	6	9	5	6	5	31	11
10 Mengurangi kesenjangan	5	13	4	8	4	34	12
11 Kota dan pemukiman berkelanjutan	1	11	1	3	2	18	5
12 Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	6	1	4	8	4	23	9
13 Penanganan perubahan iklim	4	5	1	7	1	18	5
15 Ekosistem Darat	4	5	1	6	1	17	4
16 Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	5	4	5	2	5	21	7
17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	5	7	4	1	5	22	8

Berdasarkan hasil analisa tersebut urutan TPB Prioritas di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. TPB 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
2. TPB 1: Tanpa Kemiskinan
3. TPB 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4. TPB 15: Ekosistem Darat
5. TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim
6. TPB 11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Kemudian, untuk Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan sampah
2. Tingkat Pelayanan Air Bersih Masih Rendah
3. Semakin Maraknya Penyakit Sosial (LGBT, Kenakalan remaja, dll)



4. Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan

KLHS RPJMD KOTA BUKITINGGI TAHUN 2025-2030



BAB V ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TPB PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)



BAB V

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

5.1 Capaian Indikator TPB Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Evaluasi TPB menurut opd/unit/badan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada Tabel 5.1. Dinas Kesehatan merupakan OPD dengan jumlah indikator TPB paling banyak yakni sebanyak 44 indikator. Dari indikator yang menjadi urusan Dinas Kesehatan tersebut, indikator yang sudah mencapai target nasional sebesar 73% atau sebanyak 32 indikator, dan indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target yakni sebanyak 8 indikator (18%), dan terdapat 4 (9%) indikator yang belum memiliki data. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan OPD peringkat kedua yang memiliki indikator terbanyak, yaitu sebanyak 19 indikator. Untuk Dinas P3AP2KB, dari 19 indikator ini ada 11 indikator (58%) yang sudah tercapai, 8 indikator (42%) yang sudah dilaksanakan tetapi belum tercapai.

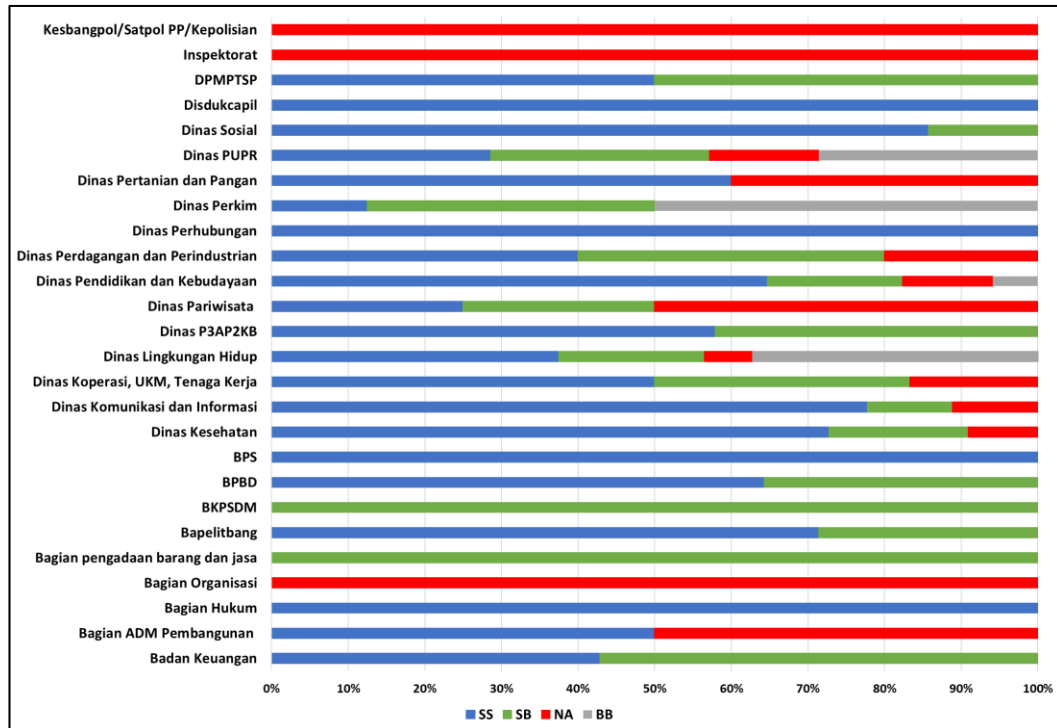
Tabel 5.1 Capaian Indikator TPB Berdasarkan OPD/ Badan/ Unit Kota Bukittinggi

No	Nama OPD/Badan/Unit Leading Sector	Jumlah Indikator	Capaian							
			SS	%	SB	%	NA	%	BB	%
1	Bagian Administrasi Pembangunan	2	1	50%	0	0%	1	50%	0	0%
2	Bagian Hukum	2	2	100%	0	0%	0	0%	0	0%
3	Bagian Organisasi	3	0	0%	0	0%	3	100%	0	0%
4	Bagian pengadaan barang dan jasa	1	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	7	5	71%	2	29%	0	0%	0	0%
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	0	0%	2	100%	0	0%	0	0%
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	9	64%	5	36%	0	0%	0	0%
8	Badan Keuangan Daerah	7	3	43%	4	57%	0	0%	0	0%
9	Badan Pusat Statistik	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
10	Dinas Kesehatan	44	32	73%	8	18%	4	9%	0	0%

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



11	Dinas Komunikasi dan Informatika	9	7	78%	1	11%	1	11%	0	0%
12	Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja	12	6	50%	4	33%	2	17%	0	0%
13	Dinas Lingkungan Hidup	16	6	38%	3	19%	1	6%	6	38%
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	19	11	58%	8	42%	0	0%	0	0%
15	Dinas Pariwisata	4	1	25%	1	25%	2	50%	0	0%
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17	11	65%	3	18%	2	12%	1	6%
17	Dinas Perhubungan	1	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%
18	Dinas Pertanian dan Pangan	5	3	60%	0	0%	2	40%	0	0%
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8	1	12%	3	38%	0	0%	4	50%
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	2	29%	2	29%	1	14%	2	29%
21	Dinas Sosial	7	6	86%	1	14%	0	0%	0	0%
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	100%	0	0%	0	0%	0	0%
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5	2	40%	2	40%	1	20%	0	0%
24	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%
25	Inspektorat	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%
26	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik/ Satpol PP/ Kepolisian	5	0	0%	0	0%	5	100%	0	0%
Grand Total		210	120		51		26		13	



Gambar 5.1 Grafik Persentase Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi Berdasarkan OPD/Unit/Badan

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan disajikan Tabel indikator TPB yang menjadi kewenangan masing-masing OPD/Unit/Badan di Kota Bukittinggi.

Tabel 5.2 Capaian Indikator TPB Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	5	ada	SS
2	17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	NA	ada	NA

Tabel 5.3 Capaian Indikator TPB Bagian Hukum Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan	0	Menurun/ tidak ada	SS



			diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			
2	16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	Menurun/ tidak ada	SS

Tabel 5.4 Capaian Indikator TPB Bagian Organisasi Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	NA	Meningkat menjadi: Kabupaten /Kota: 50%	NA
2	16	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	NA	Meningkat menjadi: Kabupaten /Kota: 45%	NA
3	16	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	NA	Meningkat menjadi: Kabupaten /Kota: 80%	NA

Tabel 5.5 Capaian Indikator TPB Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	27,20%	Meningkat menjadi: 80%	SB

Tabel 5.6 Capaian Indikator TPB Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	8	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6,89%	Meningkat	SB
2	8	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	89,74 juta	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	SS
3	9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	0,0048%	Meningkat	SS



4	10	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,255	Menurun menjadi 0,36	SS
5	10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,66%	Menurun menjadi 7-8%	SS
6	11	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	100%	Meningkat	SS
7	17	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target.	75,24%	Meningkat	SB

Tabel 5.7 Capaian Indikator TPB Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	19,44%	Meningkat	SB
2	16	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	19,44%	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	SB

Tabel 5.8 Capaian Indikator TPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,00017	Menurun	SB
2	1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	24 kel	Meningkat	SS
3	1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	128,01	Menurun menjadi 118,6	SB
4	1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0	Menurun	SS
5	1	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	ada	SS
6	1	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,00017	Menurun	SB
7	11	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	128,01	Menurun 30%	SB



8	11	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	24 kel	Meningkat	SS
9	11	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	3	ada	SS
10	11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	0	Menurun	SS
11	11	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	1	Meningkat /ada	SS
12	11	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	1	ada	SS
13	13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	1	ada	SS
14	13	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,00017	Menurun	SB

Tabel 5.9 Capaian Indikator TPB Badan Keuangan Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	0,62%	Meningkat	SS
2	1	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	32,33%	Meningkat	SB
3	16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	92,63%	Meningkat	SS
4	16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	100%	Meningkat menjadi Kota: 65%	SS
5	17	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	69,92%	Meningkat	SB
6	17	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	11,06%	Meningkat diatas 12%	SB
7	17	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	16,39%	Meningkat	SB



Tabel 5.10 Capaian Indikator TPB Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	17	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100%	Meningkat	SS
2	17	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	100%	Meningkat	SS
3	17	17.18.1.(c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	11	Meningkat	SS
4	17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	26819	Meningkat	SS
5	17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100%	Meningkat	SS

Tabel 5.11 Capaian Indikator TPB Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	97,08%	Meningkat menjadi 95%	SS
2	1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100%	Meningkat menjadi 70%	SS
3	1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	67,50%	Meningkat menjadi 63%.	SS
4	2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	7,30%	Menurun menjadi 17%	SS
5	2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	10,80%	Menurun	SS
6	2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	11,04%	Menurun menjadi 28%	SS
7	2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	4,60%	Menurun	SS



8	2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	6,4%	Menurun menjadi 28%	SS
9	2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	66%	Meningkat menjadi 50%	SS
10	3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	0,90	Menurun menjadi 306	SS
11	3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	100%	Meningkat menjadi 95%	SS
12	3	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	100%	Meningkat menjadi 85 %	SS
13	3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	0,44	Menurun	SS
14	3	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	5,69	Menurun	SS
15	3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	7,01	Menurun menjadi 24	SS
16	3	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	29,17%	Meningkat menjadi 95%	SB
17	3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,84%	Menurun menjadi <0,5%	SB
18	3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	222,7	Menurun menjadi 245	SS
19	3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0	Menurun	SS
20	3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	100%	Meningkat menjadi 300	SS
21	3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B. (kecamatan)	63,31%	Meningkat	SB
22	3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	0	Menurun	SS
23	3	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan/kelurahan) dengan eliminasi Kusta.	100%	Meningkat menjadi 34 provinsi	SS
24	3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan) dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	sudah eliminasi	Meningkat menjadi 35.	SS



25	3	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	8,70%	Menurun menjadi 5,4%	SB
26	3	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	31,20%	Menurun menjadi 24,3%	SB
27	3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	21,80%	Menurun	SB
28	3	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	NA	Menurun	NA
29	3	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	100%	Meningkat menjadi 280	SS
30	3	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	NA	Menurun menjadi angka 0,02%	NA
31	3	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA	Menurun	NA
32	3	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	3,92	Menurun menjadi 38	SS
33	3	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,38%	Menurun menjadi 2,28	SB
34	3	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	NA	Menurun menjadi 9,91%	NA
35	3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	98%	Meningkat	SS
36	3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	97,08%	Meningkat menjadi minimal 95%	SS
37	3	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	Menurun	SS
38	3	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	0,88%	Menurun	SB
39	3	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	Meningkat	SS
40	3	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	100%	Meningkat	SS
41	5	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	8,56	Menurun menjadi 38 tahun	SS
42	6	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	99,80%	Meningkat	SS
43	6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	100%	Meningkat	SS



44	6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	100%	Meningkat	SS
----	---	-----------	--	------	-----------	----

Tabel 5.12 Capaian Indikator TPB Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	85,57%	Meningkat	SS
2	5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	95,51%	Meningkat	SS
3	9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	97%	Meningkat	SS
4	9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	95,51%	Meningkat	SS
5	9	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	85,87%	Meningkat	SS
6	16	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	5	Meningkat	SB
7	17	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	NA	Meningkat	NA
8	17	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	97%	Meningkat	SS
9	17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	85,87%	Meningkat	SS

Tabel 5.13 Capaian Indikator TPB Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	45%	Meningkat	SS
2	8	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	NA	Meningkat	NA



3	8	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	35,85	Meningkat	SB
4	8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	55%	51%	SS
5	8	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	2,6%	Meningkat	SB
6	8	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	22%	Meningkat menjadi 25%	SB
7	8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	17140,37	Meningkat	SS
8	8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4,99%	Menurun	SS
9	8	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	26,34	Menurun	SB
10	8	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	3,76	Meningkat	SS
11	8	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	NA	Meningkat	NA
12	10	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	45%	Meningkat	SS

Tabel 5.14 Capaian Indikator TPB Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	6	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	23,85	Meningkat	SB
2	6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	1	ada	SS
3	6	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	0	10 WS (skala nasional)	BB
4	6	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0	ada	BB
5	11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	86,91%	Meningkat menjadi 80%	SS
6	11	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	0	Meningkat /ada	BB
7	11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	3	Meningkat /ada	SS
8	12	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang	48 ton	Meningkat menjadi	SB



			diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		150 juta ton (skala nasional)	
12	12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	3.647,55 ton/hari	20 ton per hari (skala nasional)	SS
13	12	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	NA	Meningkat	NA
14	12	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	0	Meningkat	BB
15	12	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	0	Meningkat	BB
16	15	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	34,40%	Meningkat	SB
17	15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Tidak ada lahan kritis	5,5 juta ha (skala nasional)	SS
18	15	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	ada	BB
19	15	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	ada	Ada/ Meningkat	SS

Tabel 5.15 Capaian Indikator TPB Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	63%	Meningkat menjadi 65%	SB
2	3	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	63,24%	Meningkat menjadi 66%	SB
3	3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	63,24%	Meningkat menjadi 65%	SB
4	3	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	23,93%	Meningkat menjadi 23,5%	SB
5	5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	35	bertambah sebanyak 16	SS



6	5	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,02%	Menurun	SS
7	5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0,12%	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	SS
8	5	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,002%	Menurun	SS
9	5	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100%	Meningkat menjadi 70%	SS
10	5	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	0	Menurun	SS
11	5	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	24,3	Meningkat menjadi 21 tahun	SS
12	5	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	9,01	Menurun	SB
13	5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	8%	Meningkat	SB
14	5	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	63,24%	Meningkat	SB
15	5	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	16,04%	Menurun menjadi 9,9%	SB
16	5	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	61%	Meningkat menjadi 85%	SB
17	16	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	0,057%	Menurun	SS
18	16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	0,14%	Menurun	SS



19	16	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	0,04	Menurun	SS
20	16	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8%	Meningkat	SB

Tabel 5.16 Capaian Indikator TPB Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	8	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	NA	Meningkat menjadi 8%	NA
2	8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	20966	Meningkat	SS
3	8	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	1041476	Meningkat	SB
4	8	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	NA	Meningkat	NA

Tabel 5.17 Capaian Indikator TPB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	97,0%	Meningkat menjadi 94,78%	SS
2	1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	97,96%	Meningkat menjadi 82,2%	SS
3	1	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	Meningkat menjadi 450	BB
4	4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100%	Meningkat	SS
5	4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	87,69%	Meningkat menjadi 84,2%	SS
6	4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	80%	Meningkat menjadi 81%	SB



7	4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	110%	Meningkat menjadi 114,09%	SB
8	4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	111%	Meningkat menjadi 106,94%	SS
9	4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	11	Meningkat menjadi 8,8 tahun	SS
10	4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	41,27%	Meningkat menjadi 77,2%	SB
11	4	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	NA	Meningkat	NA
12	4	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	100%	Meningkat menjadi 96,1%	SS
13	4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	100%	Meningkat	SS
14	4	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	100%	Meningkat	SS
15	4	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	79,40%	Meningkat	SS
16	8	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	Meningkat	NA
17	11	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	40	ada	SS



Tabel 5.18 Capaian Indikator TPB Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	9	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	0,00045 %	Meningkat	SB
2	9	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	1,42%	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	SB
3	9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	15,95%	Meningkat	SS
4	9	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	100%	Meningkat	SS
5	9	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	NA	Meningkat	NA

Tabel 5.19 Capaian Indikator TPB Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	11	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	70%	Meningkat menjadi 32%	SS

Tabel 5.20 Capaian Indikator TPB Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	87%	Meningkat menjadi 100%	SB
2	1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	11,23%	Meningkat menjadi 18,6 juta	SB
3	6	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	86,6%	Meningkat menjadi 100%	SB
4	6	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	0	Meningkat	BB
5	6	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	0	Meningkat	BB
6	6	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan	0	Meningkat menjadi 409	BB



			dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).		kabupaten /kota	
7	6	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	0	Meningkat	BB
8	11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	93,98%	3,7 juta rumah tangga; Meningkat	SS

Tabel 5.21 Capaian Indikator TPB Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	2	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	6,21%	Menurun	SB
2	2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	0	Menurun	SS
3	2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	0	Menurun menjadi 8,5 %	SS
4	2	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Data belum dikeluarkan	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	NA
5	2	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	NA	Meningkat	NA

Tabel 5.22 Capaian Indikator TPB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2023	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	89,1%	Meningkat menjadi 100%	SB
2	6	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	89,1%	Meningkat menjadi 100%	SB
3	6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,	248,50	Meningkat menjadi	SS



			perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.		118,6 m ³ /detik	
4	6	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	NA	Meningkat menjadi 100%	NA
5	6	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	0	ada	BB
6	6	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	2	8 WS	SS
7	11	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	0	Ada	BB

Tabel 5.23 Capaian Indikator TPB Dinas Sosial Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2022	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	4,66%	Menurun menjadi 7-8%	SS
2	1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	38%	Meningkat menjadi 17,12%	SS
3	1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	2.177	Menurun menjadi 2,8 juta	SB
4	1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	100%	Meningkat menjadi 100%	SS
5	1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	2799	Meningkat menjadi 151 ribu	SS
6	1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	2799	Meningkat menjadi 81,5 ribu	SS
9	10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	28,97	Menurun	SS



Tabel 5.24 Capaian Indikator TPB Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2022	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	97,97%	Meningkat menjadi 77,4%.	SS
2	16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	98,4%	Meningkat	SS
3	16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	95,82%	Meningkat menjadi 77,4%	SS
4	16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	97,79%	Meningkat menjadi 85%	SS
5	17	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	SS

Tabel 5.25 Capaian Indikator TPB Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2022	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	8	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	127,82	Meningkat	SB
2	8	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	200-300 m	Menurun / Mendekat	SS

Tabel 5.26 Capaian Indikator TPB Inspektorat Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2022	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	16	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	NA	Meningkat menjadi 4	NA

Tabel 5.27 Capaian Indikator TPB Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik / Satuan Polisi dan Pamong Praja/ Kepolisian Kota Bukittinggi

No	No TPB	No Indikator	Indikator TPB	Baseline Tahun 2022	Target Perpres 59/2017	Capaian
1	10	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	NA	Meningkat menjadi 87	NA



2	16	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	NA	Menurun	NA
3	16	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	NA	Menurun	NA
4	16	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	NA	Menurun	NA
5	16	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	NA	Meningkat	NA

5.2 Proyeksi Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Proyeksi capaian indikator TPB dilakukan dengan menggunakan analisis GAP. Analisis gap dilakukan dengan forecasting (peramalan) data yang akan datang dari data historis. Analisis menggunakan metode regresi linier. Hasil analisis GAP mengelompokkan indikator TPB menjadi 2 kelompok yaitu:

1. TPB dengan Business as Usual (BaU): jika program yang ada saat ini dilanjutkan pelaksanaannya, maka diprediksi target akan tercapai sebelum tahun 2030 atau disebut juga TPB BAU; dan
2. TPB dengan Upaya Tambahan (UT): jika program yang ada saat ini dilanjutkan pelaksanaannya, maka diprediksi target TPB tidak akan tercapai pada tahun 2030. Oleh karena itu dibutuhkan upaya tambahan atau disebut juga dengan TPB UT.

Namun tidak semua indikator TPB dapat dilakukan analisis gap, yang disebabkan karena:

1. Tidak ditetapkan target spesifik atau hanya ditetapkan target secara nasional. Misanya:
 - a. Indikator TPB 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Target: Menurun.
2. Data historis tidak lengkap (min 3 tahun berturut-turut) atau data historis sama dalam 3 tahun berturut-turut.

Hasil analisis proyeksi capaian indikator dapat dilihat pada Tabel 5.28 berikut.



Tabel 5.28 Proyeksi Capaian Indikator TPB Kota Bukittinggi

No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Basel ine	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi di 95%	Data Historis	46%	28%	35%	84%	82%	87%								BAU
				Skenario BAU						87,11 %	101,76 %	101,76 %	101,76 %	101,76 %	101,76 %	101,76 %	101,76 %	
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						87,11 %								
				Skenario Pencapaian Target 2045						87,11 %								
2	1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi di 100%	Data Historis	100,00%	100,00%	83,69%	88,62%	84,92%	88,65%								UT
				Skenario BAU						89%	81%	79%	76%	73%	70%	67%	65%	
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						89%	90%	91%	93%	94%	96%	97%	99%	
				Skenario Pencapaian						89%	89,1%	89,6%	90,1%	90,6%	91,1%	91,6%	92,1%	



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
				Target 2045														
3	1.4.1. (e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi di 100%	Data Historis	63%	58%	64%	90%	90%	85%								BAU
				Skenario BAU						85%	98%	105%	105%	105%	105%	105%		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						85%								
				Skenario Pencapaian Target 2045						85%								
4	1.5.1. (e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi di 118,6	Data Historis	130	130	130	130	130	128,01								UT
				Skenario BAU						128,01	128,67	128,39	128,10	127,82	127,54	127,25	126,97	
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						128,01	126,83	125,66	124,48	123,31	122,13	120,95	119,78	



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyek	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
				Skenario Pencapaian Target 2045						128,01	127,60	127,19	126,78	126,37	125,96	125,56	125,15		
5	3.2.2. (b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi di 95%	Data Historis	92%	88%	83%	25%	25%	29%									UT
				Skenario BAU						29,17%	1%	-15%	-31%	-47%	-63%	-79%	-95%		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						29,17%	37%	46%	54%	62%	70%	79%	87%		
				Skenario Pencapaian Target 2045						29,17%	32%	35%	38%	41%	43%	46%	49%		
6	3.3.2. (a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi di 245	Data Historis	194	353	344	229	257	655									UT
				Skenario BAU						655	529	583	637	691	746	800	854		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						655	604	552	501	450	399	347	296		



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyek	Historis					Basel ine	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
				Skenario Pencapaian Target 2045						655	630	605	579	554	529	504	479		
7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	Data Historis	51%	50%	51%	13%	11%	19%									UT
				Skenario BAU						19%	0,9%	8,2%	17,3%	26,3%	35,4%	44,5%	53,5%		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						19%	25%	30%	36%	42%	48%	54%	60%		
				Skenario Pencapaian Target 2045						19%	21%	23%	25%	27%	29%	31%	33%		
8	3.7.1. (a)	Angka prevalensi penggunaan metode	Meningkat menjadi	Data Historis	53%	53%	56%	68%	76%	55%									BAU
				Skenario BAU						54,60%	69%	71%	74%	76%	79%	81%	84%		



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyek	Historis					Basel	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	di 65%	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						54,60 %									
				Skenario Pencapaian Target 2045						54,60 %									
9	3.7.1. (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi di 23,5%	Data Historis	19,5 %	20,8 %	21,5 %	32,0 %	32,8 %	23,3 %								BAU	
				Skenario BAU						23,3 %	31,6%	33,4 %	35,3 %	37,2 %	39,1 %	40,9 %	42,8 %		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						23,3 %									
				Skenario Pencapaian Target 2045						23,3 %									
10	3.7.2. (a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi	Data Historis	5,30 %	5,80 %	2,50 %	5,84 %	5,80 %	6,18 %								UT	
				Skenario BAU						6,18 %	6,01%	6,23 %	6,45 %	6,67 %	6,89 %	7,11 %	7,33 %		



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Baseline 2022	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
			di 2,28	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						6,18 %	5,69%	5,20 %	4,71 %	4,23 %	3,74 %	3,25 %	2,77 %		
				Skenario Pencapaian Target 2045						6,18 %	6,01%	5,84 %	5,67 %	5,50 %	5,33 %	5,16 %	4,99 %		
11	3.8.2. (a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menja di minimal 95%	Data Historis	74%	70%	76%	84%	82%	87%									BAU
				Skenario BAU						87%	90%	93%	96%	99%	102%	102%	102%		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						87%									
				Skenario Pencapaian Target 2045						87%									
12	4.1.1. (b)	Persentase SMP/MTs berakredit	Meningkat menja	Data Historis	85%	80%	80%	80%	80%	80%									UT
				Skenario BAU						80,0 %	78,46 %	77,80 %	77,15 %	76,49 %	75,83 %	75,17 %	74,51 %		



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyek	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		asi minimal B.	di 81%	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						80,0 %	80,1%	80,3 %	80,4 %	80,5 %	80,6 %	80,8 %	80,9 %		
				Skenario Pencapaian Target 2045						80,0 %	80,04 %	80,09 %	80,13 %	80,17 %	80,22 %	80,26 %	80,30 %		
13	4.1.1. (d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/serajat.	Meningkat menjadi di 114,09%	Data Historis	138,45	129,75	127,48	127	114	111									UT
				Skenario BAU						111	106,12	100,83	95,55	90,26	84,97	79,69	74,40		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						111	111,39	111,77	112,16	112,55	112,93	113,32	113,70		
				Skenario Pencapaian Target 2045						111	111,13	111,27	111,40	111,54	111,67	111,81	111,94		
14	4.2.2. (a)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Meningkat menjadi	Data Historis	50%	51%	49%	70%	43%	40%								UT	
				Skenario BAU						40%	45%	44%	42%	41%	39%	38%	36%		

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi
Tahun 2025-2030



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	di 77,2%	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						40%	44%	49%	54%	58%	63%	68%	73%		
				Skenario Pencapaian Target 2045						40%	41%	43%	45%	46%	48%	50%	51%		
15	5.6.1. (a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana /KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	Data Historis	10,1%	9,8%	7,1%	12,9%	11,5%	18,6%									UT
				Skenario BAU						18,6%	17,0%	18,5%	20,0%	21,5%	23,1%	24,6%	26,1%		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						18,6%	17,5%	16,4%	15,3%	14,2%	13,2%	12,1%	11,0%		
				Skenario Pencapaian Target 2045						18,6%	18,2%	17,8%	17,5%	17,1%	16,7%	16,3%	15,9%		
16	5.6.1. (b)	Pengetahuan dan pemahaman	Meningkat menjadi	Data Historis	51%	50%	51%	68%	68%	54%									BAU
				Skenario BAU						54,30%	65,5%	67,9%	70,3%	72,7%	75,1%	77,4%	79,8%		



No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	di 85%	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						54,30%	58%	62%	66%	70%	73%	77%	81%	
				Skenario Pencapaian Target 2045						54,30%								
17	6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi di 100%	Data Historis	86%	87%	89%	89%	85%	89%								UT
				Skenario BAU						89%	87,8%	88,0%	88,1%	88,2%	88,3%	88,4%	88,6%	
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						89%	90%	91%	93%	94%	96%	97%	99%	
				Skenario Pencapaian Target 2045						89%	89,1%	89,6%	90,1%	90,6%	91,1%	91,6%	92,1%	
18	6.2.1. (b)	Persentase rumah tangga yang	Meningkat menjadi	Data Historis	63%	58%	64%	90%	90%	85%								BAU
				Skenario BAU						85%	98,42%	105,12%	105,12%	105,12%	105,12%	105,12%	105,12%	



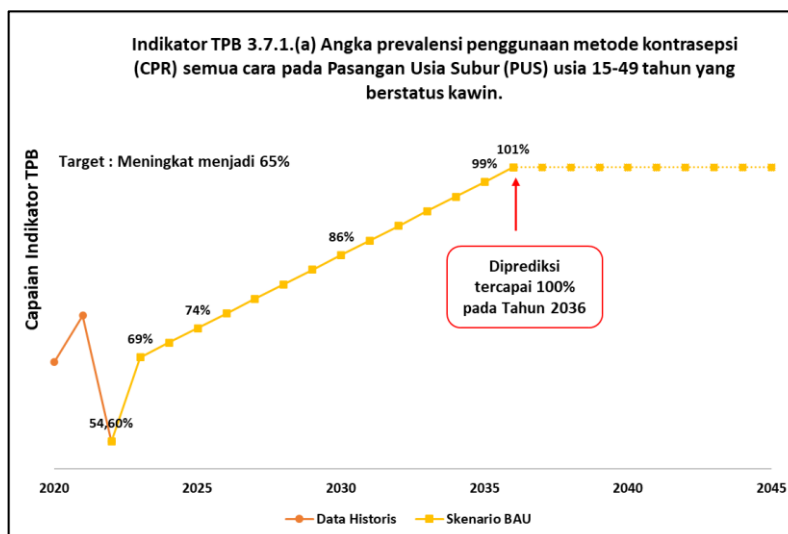
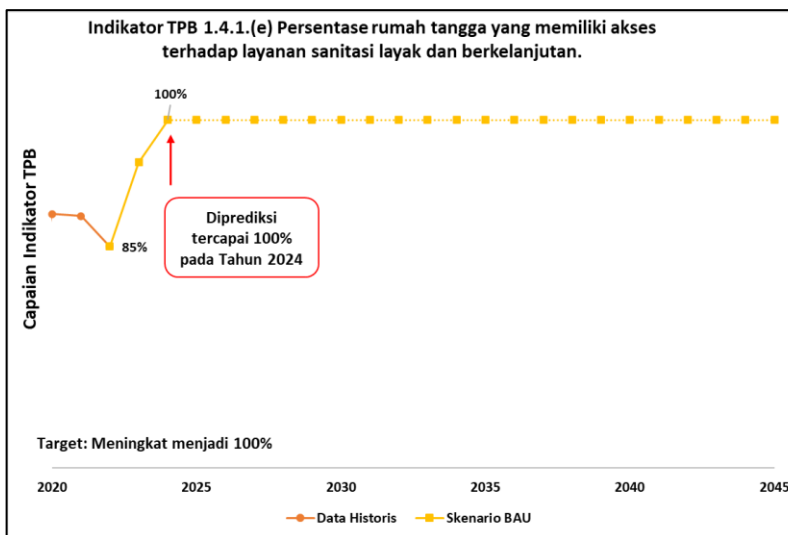
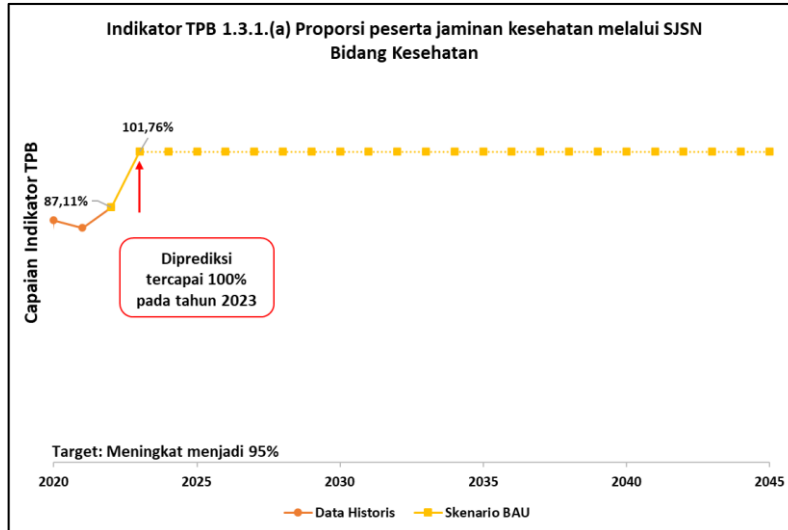
No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	di 100%	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						85%								
				Skenario Pencapaian Target 2045						85%								
19	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	Data Historis	20%	20%	20%	25%	22%	25%								UT
				Skenario BAU						25,26%	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						25,26%	28%	32%	35%	38%	41%	45%	48%	
				Skenario Pencapaian Target 2045						25,26%	26%	28%	29%	30%	31%	32%	33%	
20	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana	Menurun menja	Data Historis	130	130	130	130	130	128,01								UT
				Skenario BAU						128,01	128,67	128,39	128,10	127,82	127,54	127,25	126,97	

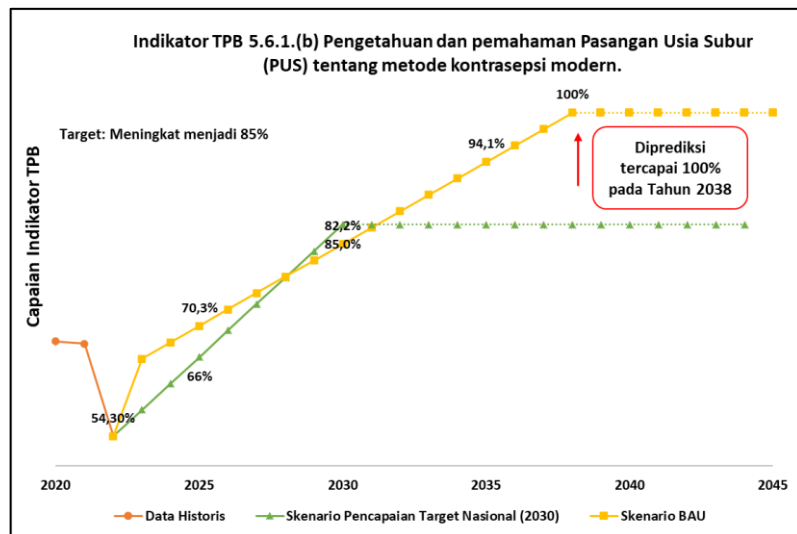
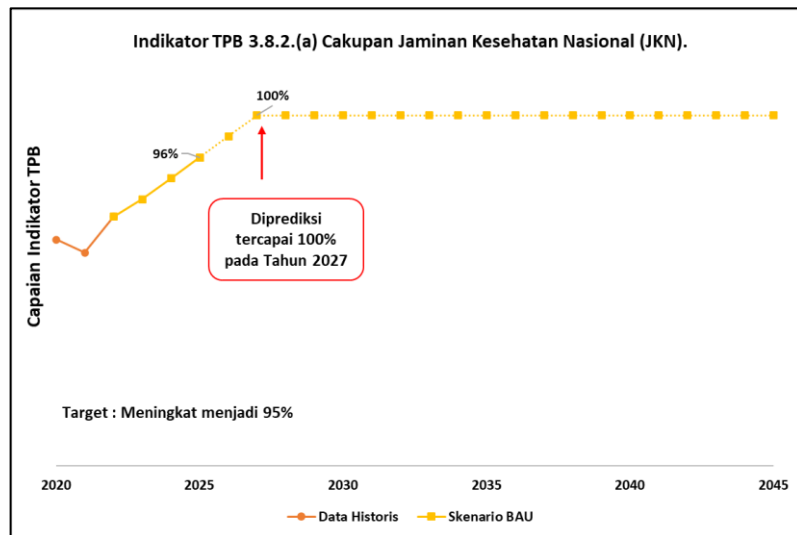
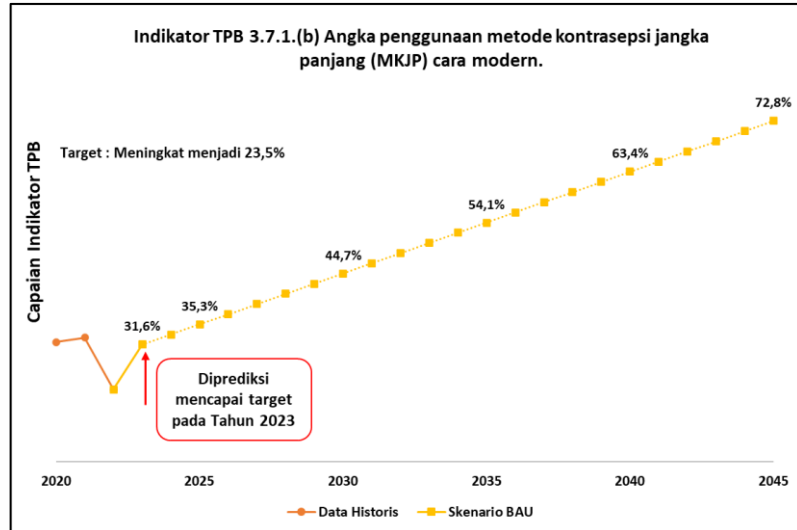


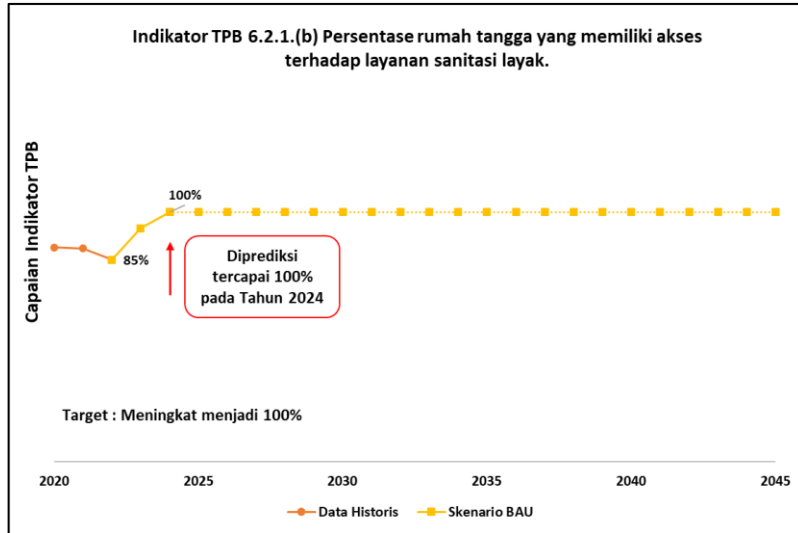
No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyek	Historis					Basel ine	Proyeksi Pencapaian							Hasil Anal isis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		Indonesia (IRBI).	di 30%	Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						128,01	115,75875	103,5075	91,25625	79,005	66,75375	54,5025	42,2513		
				Skenario Pencapaian Target 2045						128,01	123,75	119,49	115,23	110,96	106,70	102,44	98,18		
21	16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Menjadi menjadi di 80%	Data Historis	25%	49%	54%	9%	7%	9%								UT	
				Skenario BAU						9,3%	0,7%	6,3%	-	13,4%	20,4%	27,5%	34,5%		41,6%
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						9,3%	18,1%	27,0%	35,8%	44,7%	53,5%	62,3%	71,2%		
				Skenario Pencapaian Target 2045						9,3%	12,4%	15,5%	18,5%	21,6%	24,7%	27,8%	30,8%		
22	17.1.1 (a)	Rasio penerimaa		Data Historis	0,27%	0,28%	0,18%	0,42%	0,45%	0,49%								UT	



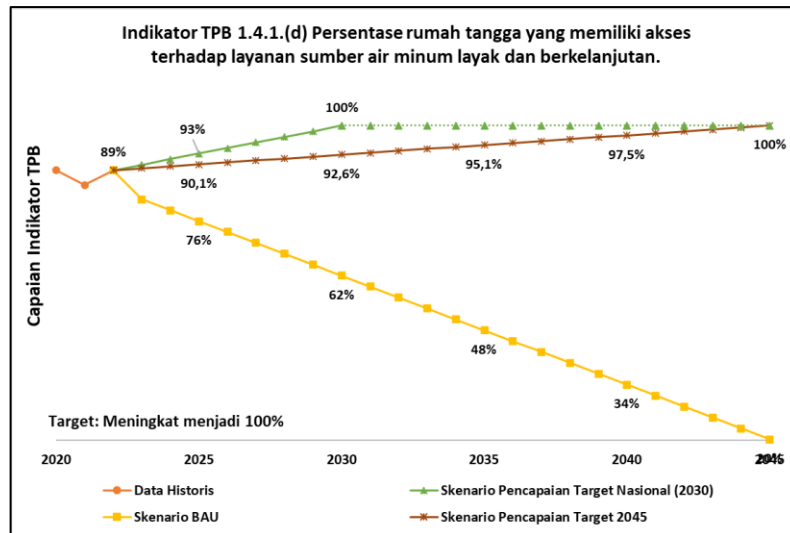
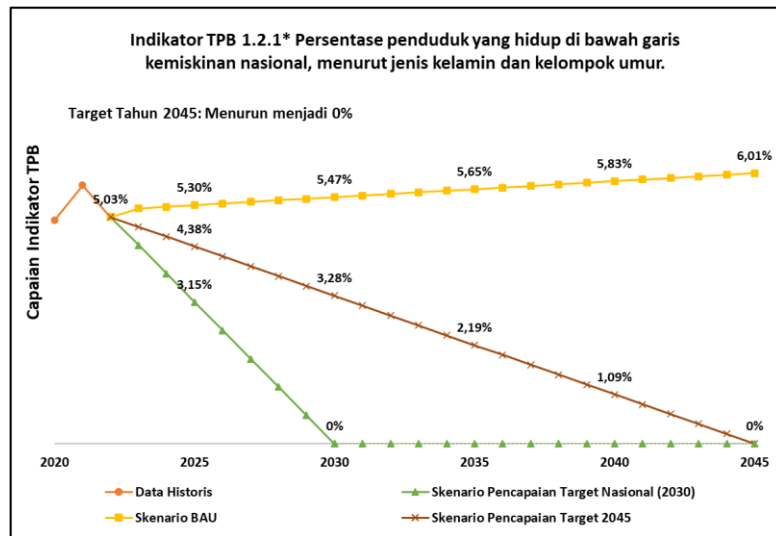
No	Kode	Indikator	Target	Jenis Proyeksi	Historis					Baseline	Proyeksi Pencapaian							Hasil Analisis GAP	
					2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		2029
		n pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	Skenario BAU						0,49 %	0,53%	0,58 %	0,64 %	0,69 %	0,74 %	0,79 %	0,85 %		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						0,49 %	1,93%	3,36 %	4,80 %	6,24 %	7,68 %	9,12 %	10,56 %		
				Skenario Pencapaian Target 2045						0,49 %	1,33%	2,18 %	3,03 %	3,88 %	4,73 %	5,58 %	6,43 %		
23	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatkan menjadi 100%	Data Historis	93,29 %	95,81 %	97,12 %	95,33 %	95,21 %	92,96 %									UT
				Skenario BAU						92,96 %	94,43 %	94,28 %	94,13 %	93,98 %	93,83 %	93,68 %	93,53 %		
				Skenario Pencapaian Target Nasional (2030)						92,96 %	93,84 %	94,72 %	95,60 %	96,48 %	97,36 %	98,24 %	99,12 %		
				Skenario Pencapaian Target 2045						92,96 %	93,27 %	93,57 %	93,88 %	94,18 %	94,49 %	94,80 %	95,10 %		

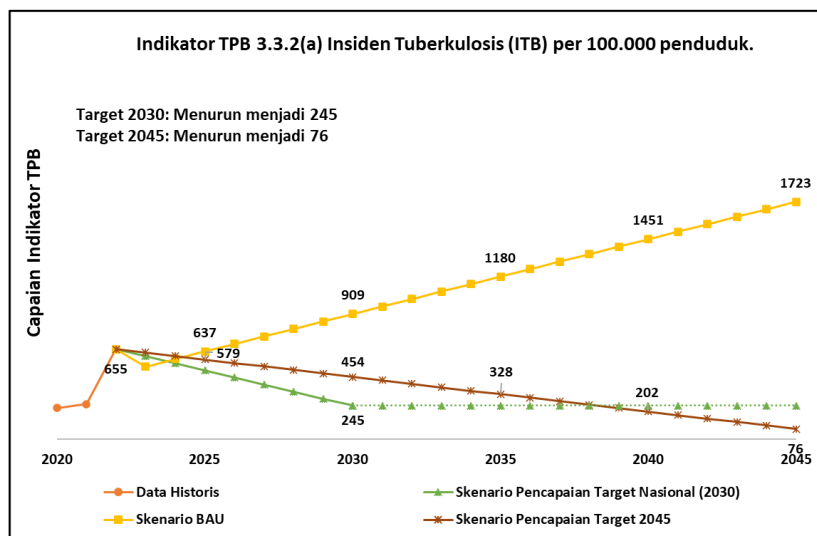
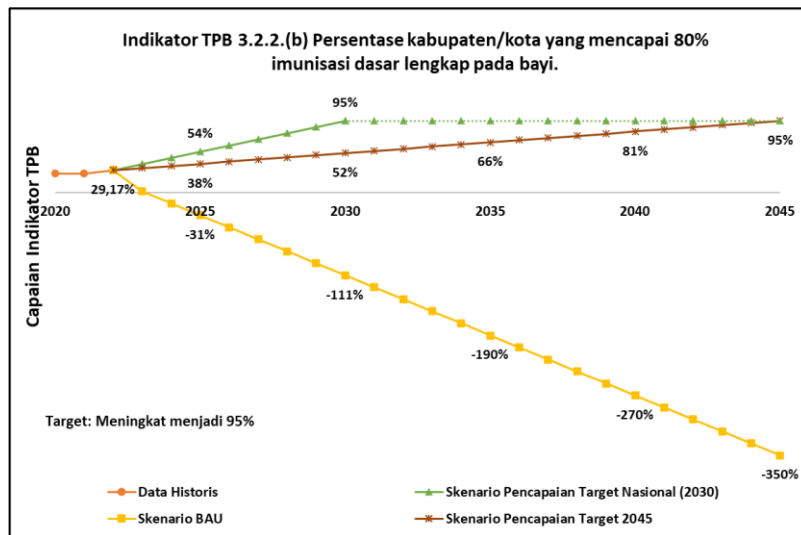
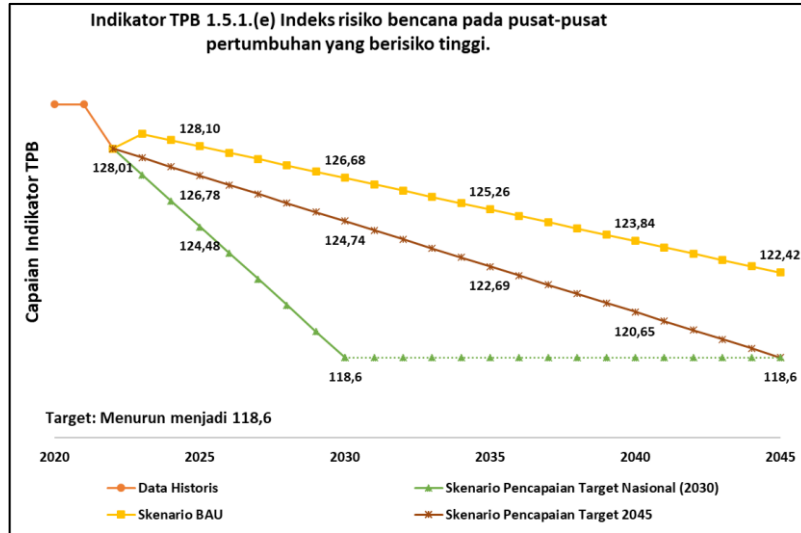


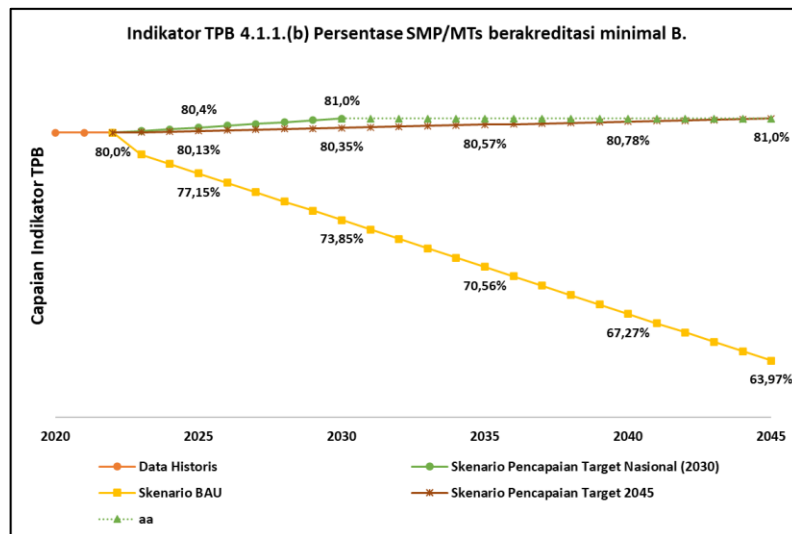
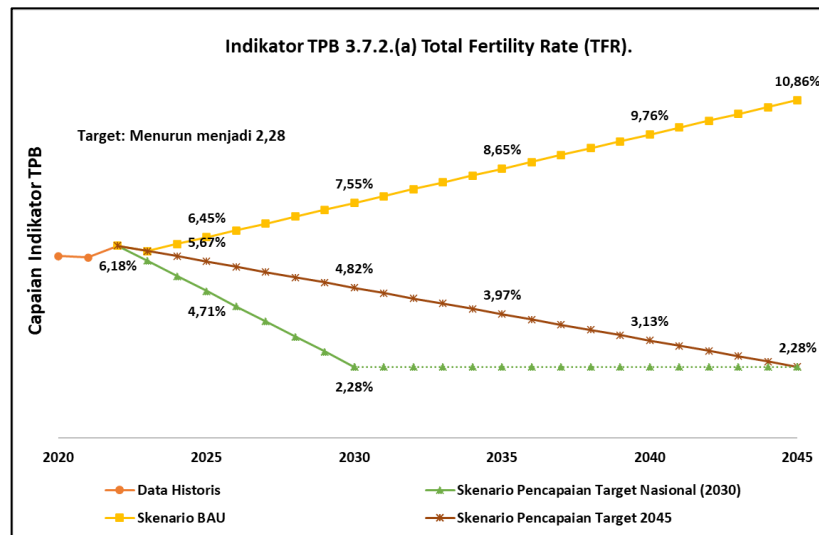
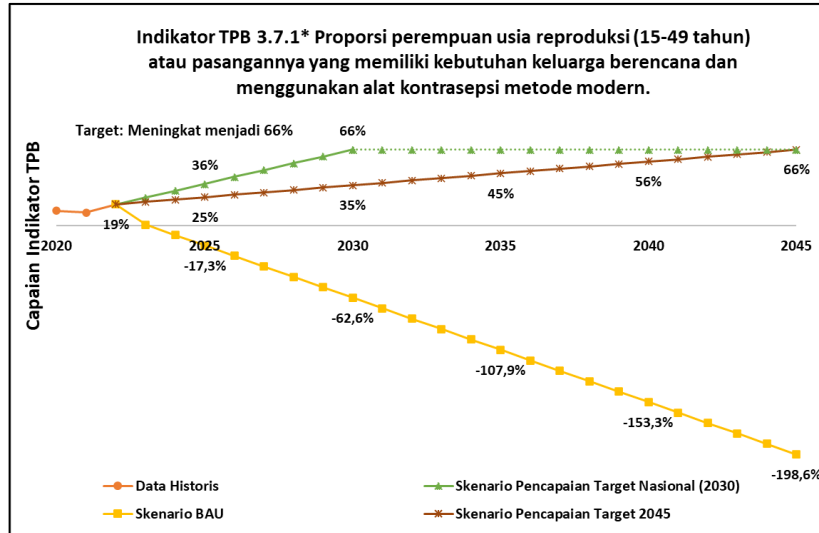


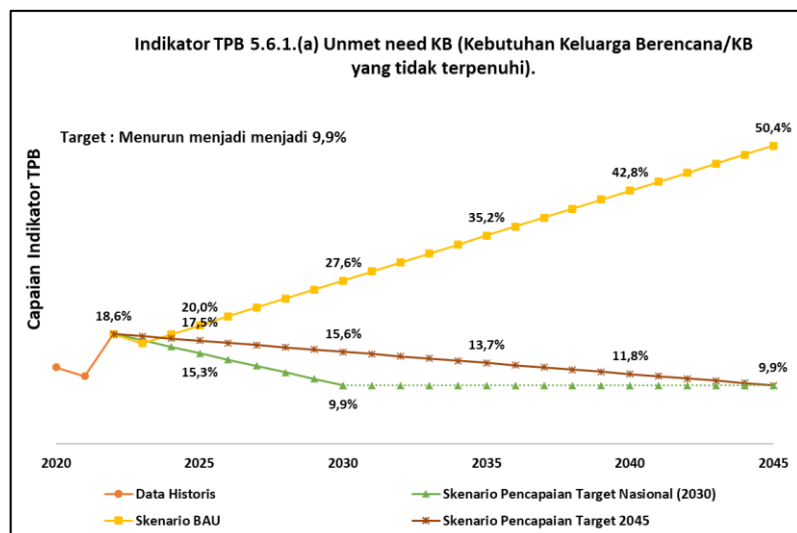
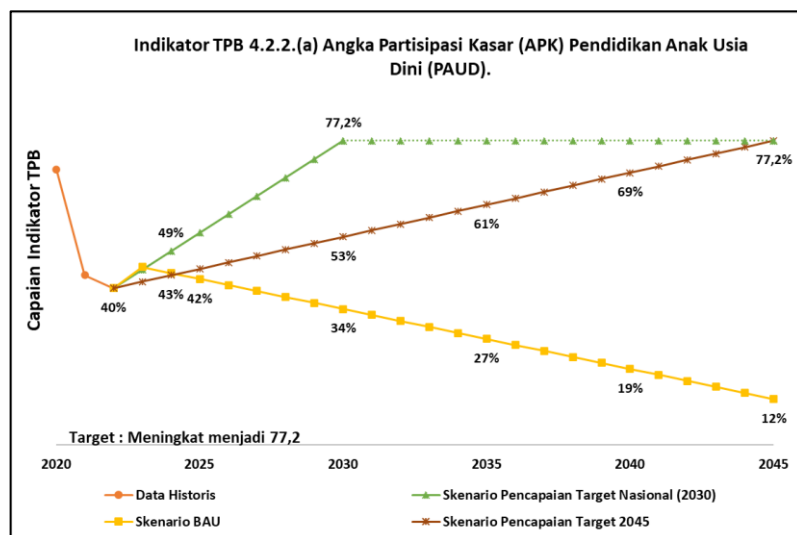
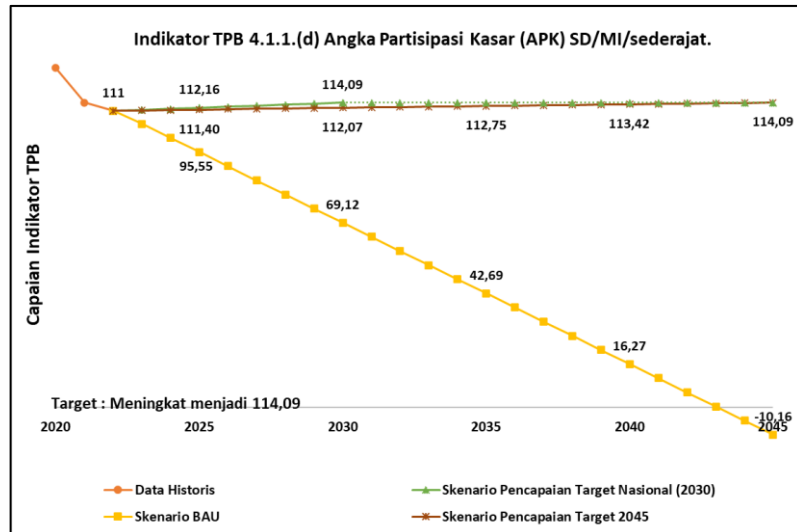


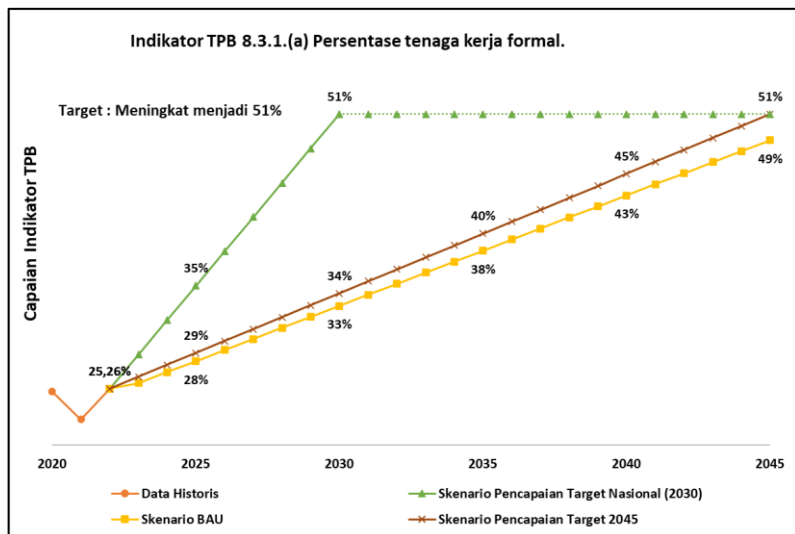
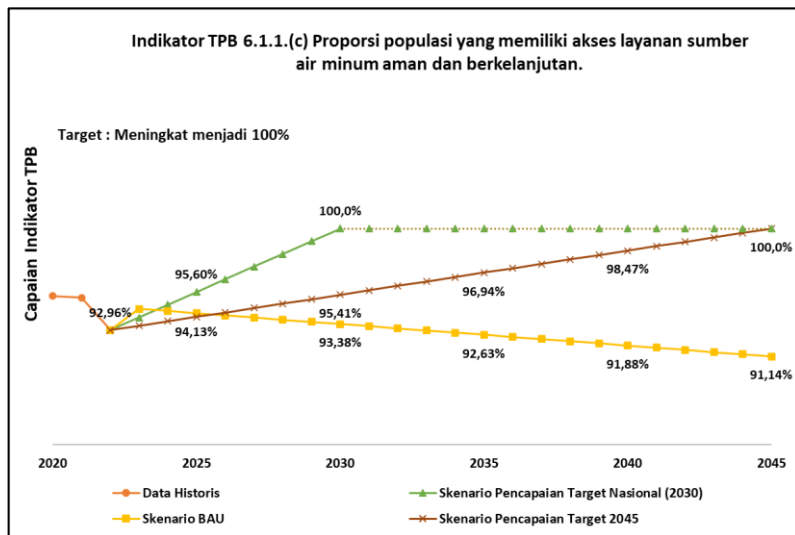
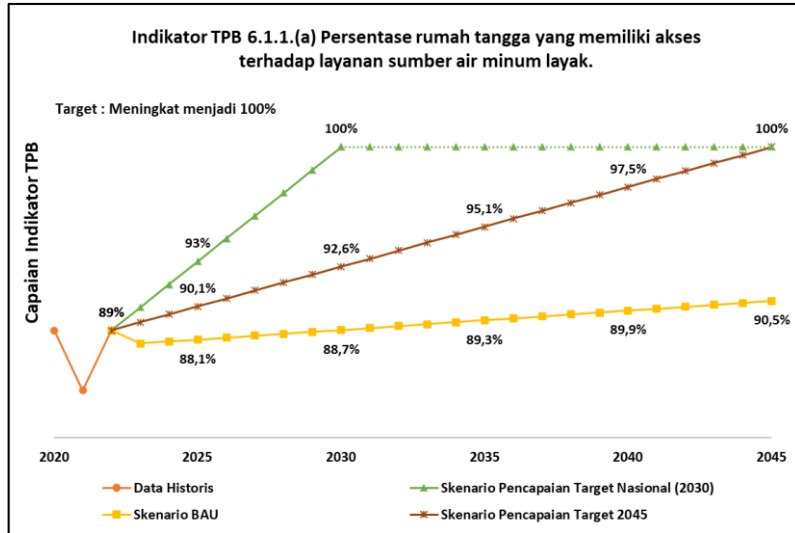
Gambar 5.2 Grafik Hasil Analisis Gap untuk skenario TPB BaU (Business as Usual)

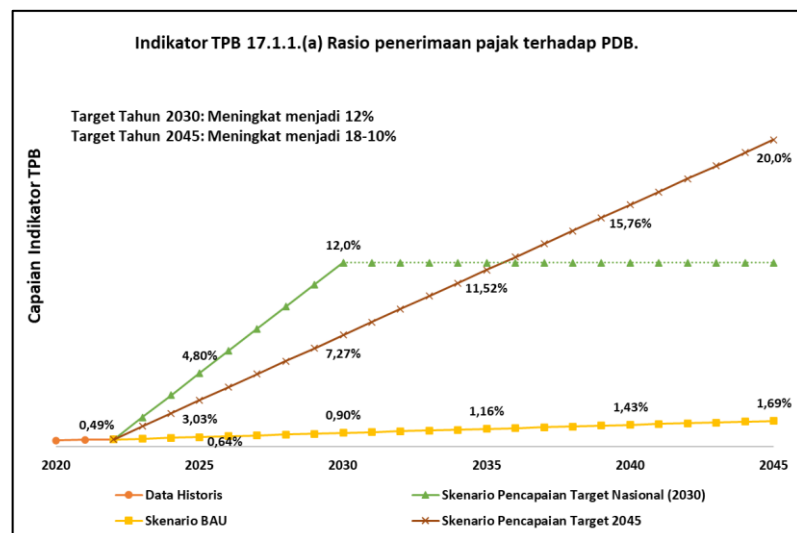
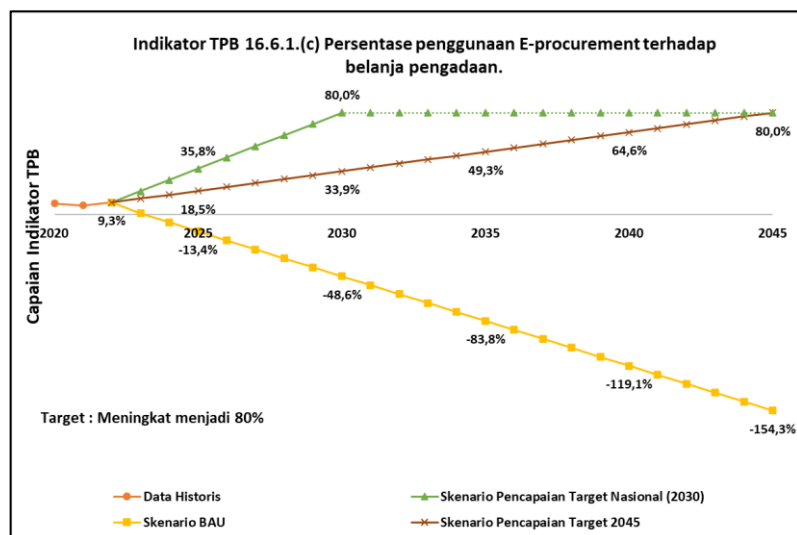
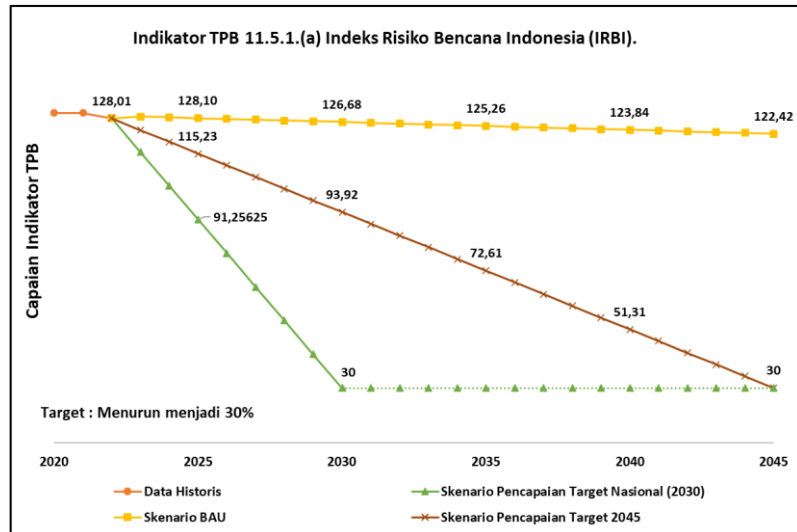












Gambar 5.3 Grafik Hasil Analisis Gap untuk skenario TPB dengan Upaya Tambahan (UT)



KLHS RPJMD KOTA BUKITINGGI TAHUN 2025-2030



BAB VI ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI



BAB VI

ALTERNATIF SKENARIO DAN REKOMENDASI

Setelah dilakukan serangkaian analisis pada pembahasan sebelumnya, dari 210 indikator yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi, didapatkan indikator TPB yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target (SS) sebanyak 120 indikator, indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebanyak 51 indikator, indikator TPB yang telah dilaksanakan tetapi belum ada data (NA) sebanyak 26 indikator, dan indikator yang belum dikerjakan dan belum tercapai (BB) sebanyak 13 indikator. Untuk pencapaian target, tentu saja arah kebijakan dan program yang telah dijalankan saat ini perlu dilanjutkan dan dipertahankan. Akan tetapi, ada beberapa indikator yang tidak akan tercapai, apabila hanya melanjutkan kebijakan dan program yang telah berjalan selama ini. Untuk itu diperlukan arah kebijakan dan program baru yang memerlukan inovasi atau memerlukan upaya tambahan untuk mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2030. Memperhatikan lebih jauh kondisi pencapaian target saat ini diperkirakan penyebab belum tercapainya target TPB karena beberapa hal di bawah ini:

1. Target yang ditetapkan adalah target nasional sesuai Perpres No 59/ 2017, dan sulit dijangkau oleh Kota/Kabupaten.
2. Adanya perbedaan nomenklatur dalam indikator untuk pencapaian target.
3. Belum adanya kesesuaian antara arah kebijakan departemen terkait yang membawahi OPD pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. OPD pelaksana masih merujuk pada indikator dan target yang ditetapkan oleh kementerian terkait.
4. Terlalu detailnya indikator yang terdapat dalam pencapaian TPB yang sebagian sudah tercakup dalam indikator yang telah ada.
5. Terdapat indikator yang secara budaya dan pandangan hidup masyarakat memerlukan penyesuaian kembali. Indikator tentang gender dan HAM yang merujuk kepada standar internasional perlu didiskusikan lebih saksama.

Untuk itu arah kebijakan yang telah ada memerlukan penyesuaian sedemikian rupa sehingga dapat diterjemahkan kedalam program dan kegiatan yang memang terarah kepada pencapaian target. Dalam bab ini dituliskan arah



kebijakan, indikasi program, program, dan kegiatan berdasarkan capaian indikator TPB di Kota Bukittinggi.

6.1 Skenario Arah Kebijakan

6.1.1 Skenario Arah Kebijakan Berdasarkan Capaian TPB SS (Sudah Dikerjakan dan Sudah Tercapai)

Tabel 6.1 Skenario Arah Kebijakan Capaian TPB SS (Sudah Dikerjakan dan Sudah Tercapai)

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah	
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	1. Meningkatnya kesejahteraan sosial keluarga PPKS(Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) keluar dari basis DTKS 2. Meningkatkan upaya kemandirian ekonomi bagi PPKS	1. Mengoptimalkan PPKS yang tertangani 2. Meningkatkan Persentase PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang berpartisipasi 3. Meningkatkan Persentase PSKS yang berpartisipasi	Peningkatan Kesejahteraan bagi PPKS	1. Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis Filantropi dalam mendukung pembiayaan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Basnas) 2. Peningkatan Kapasitas pendamping PKH 3. Peningkatan Kerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan terkait validasi dan	Dinas Sosial

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
						Inventarisasi Data	
1	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Menguatkan dukungan anggaran untuk mempertahankan cakupan kepesertaan tetap pada posisi aman UHC	Mendorong kepesertaan mandiri bagi warga mampu dan kepesertaan bagi tenaga kerja perusahaan	Penguatan regulasi untuk mendorong kepesertaan mandiri dan kepesertaan tenaga kerja perusahaan	Pemberian reward dan punishment bagi perusahaan yang mendaftarkan/ tidak tenaga kerja nya	Dinas Kesehatan, Disnaker, Kecamatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah	
1	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	- Mengoptimalkan sistem pembiayaan iuran BPJS TK bagi pekerja rentan di Kota Bukittinggi - Meningkatkan pembinaan kepada perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS TK - Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Tim Kepatuhan BPJS TK	- Mengembangkan regulasi yang mengatur tentang kepesertaan tenaga kerja ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja - Mengembangkan persyaratan tambahan terkait BPJS TK bagi pengesahan peraturan perusahaan - Meningkatkan monitoring dan evaluasi kepesertaan BPJS TK pada perusahaan - Meningkatkan koordinasi dengan filantropi terkait	Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya BPJS TK	Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya BPJS TK Pengembangan insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang sudah/belum memenuhi ketentuan pengesahan perusahaan. Peningkatan koordinasi dengan DPMPTSP untuk menjadikan kepesertaan BPJS TK bagi tenaga kerja sebagai salah satu syarat	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
				pembiayaan BPJS TK		dalam pengurusan izin perusahaan	

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
1	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak	1. Memberikan peningkatan kapasitas perekonomian bagi penyandang disabilitas 2. Meningkatkan kesempatan bekerja bagi penyandang disabilitas	Peningkatan sarana dan prasarana umum bagi penyandang disabilitas	1. Peningkatan keberantaraan akses disabilitas terhadap permodalan dan jaminan kredit modal, kemitraan, pemanfaatan teknologi digital, pasar dan manajemen usaha 2. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan	Dinas Sosial

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat pada seluruh faskes baik FKTP maupun rujukan yang terakreditasi paripurna dalam memberikan pelayanan persalinan di faskes		1. Penguatan quality control standar layanan kesehatan pada seluruh FKTP dan Rujukan	1. Penguatan kerja sama dengan seluruh FKTP dan Rujukan, 2. Peningkatan fasilitasi bagi seluruh faskes dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam pelayanan persalinan	Dinas Kesehatan
1	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatkan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat terkat dan lintas program dalam pencapaian target imunisasi	Meningkatkan peran institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat baik peserta didik maupun orang tua akan pentingnya imunisasi, Meningkatkan kerja sama	Penguatan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan terpadu	Penguatan koordinasi program imunisasi sebagai kegiatan bersama antar lembaga/institusi pemerintah ataupun swasta dan masyarakat	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
				dengan lembaga dan institusi baik formal maupun non formal dalam menyukkseskan program imunisasi			

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan		a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan b. Pengembangan sumber pembiayaan pendidikan berbasis filantropi untuk anak usia sekolah c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan d. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Peningkatan muatan kurikulum berbasis agama		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatkan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan		a. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan b. Pengembangan sumber pembiayaan pendidikan berbasis filantropi untuk anak usia sekolah c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan d. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan e. Peningkatan muatan kurikulum berbasis agama		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
1	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	1. Mengembangkan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran umur 0 sd 17 tahun 2. Mengembangkan layanan terintegrasi penerbitan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan se Kota Bukittinggi 3. Meningkatkan azas stelsel aktif dalam penerbitan akta kelahiran umur 0 sd 17 tahun	Mengembangkan aplikasi layanan digital penerbitan akta kelahiran	1. Pengembangan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran 2. Pengembangan layanan terintegrasi dengan semua fasilitas kesehatan se-Kota Bukittinggi 3. Optimalisasi pelayanan dengan azas stelsel aktif	Pengembangan layanan adminduk digital	Disdukcapil

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.		Mempertahankan kemampuan masyarakat yang sudah teraliri listrik untuk memenuhi kebutuhannya	Mengoptimalkan pemakaian listrik sesuai kebutuhan dan mematikan listrik disaat tidak berada dirumah		Dinas Sosial
1	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.					BPBD

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
1	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	1. Meningkatkan Database korban bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban pasca Bencana 2. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Korban Bencana tepat waktu dan tepat sasaran	Mengoptimalkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di setiap kelurahan	Peningkatan kapasitas untuk masyarakat KSB	1. Pengembangan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana 2. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim 3. Peningkatan koordinasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan berbagai pihak	Dinas Sosial

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
1	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan dampak dari suatu bencana	Mengoptimalkan SDM Tagana untuk penagulangan pasca bencana	Peningkatan efektifitas perlindungan korban bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim	Dinas Sosial
1	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.					BPBD
1	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.					BPBD

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
1	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan peruntukan penganggaran publik yang memadai untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial	Meningkan fokus kepada kebijakan yang mendorong kemandirian ekonomi	1. Peningkatan penyerapan anggaran 2. Peningkatan realisasi anggaran 3. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran	1. Peningkatan Verifikasi dan validasi program-program pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat	Badan Keuangan
2	2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	1. Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat berbasis sumberdaya lokal dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.	1. Meningkatkan kepedulian sosial untuk pemenuhan gizi berbasis kearifan lokal minangkabau. 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makanan bergizi tinggi.	Peningkatan Konsumsi Energi dan Protein per Kapita masyarakat	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemenuhan gizi masyarakat 2. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam memenuhi konsumsi	Dinas Pertanian dan Pangan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
						pangan masyarakat	
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	1. Meningkatkan pengetahuan dan kerampilan kader dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu 2. Meningkatkan peran lintas sektor dalam mengaktifkan posyandu	1. Meningkatkan peran lintas sektor dalam mengaktifkan posyandu	1. Peningkatan kapasitas kader dalam pemantauan pertumbuhan balita di posyandu	1. Penguatan advokasi dengan pengambil kebijakan dan koordinasi dengan OPD dan lintas sektor terkait	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
2	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	1) Meningkatkan Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 2) Meningkatkan Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 3) Meningkatkan Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;		Pengoptimalan Inventarisasi (1) ketersediaan Pangan, (2) keterjangkauan Pangan, dan (3) pemanfaatan Pangan Utama Kota Bukittinggi		Dinas Pertanian dan Pangan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
2	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	1) Meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; 2) Meningkatkan Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi. 3) Mengintensifkan gerakan pangan murah		Peningkatan Penyediaan Bahan Pokok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah		Dinas Pertanian dan Pangan
2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Meningkatkan kesadaran seluruh lintas program & lintas sektor terkait dalam pencegahan kejadian stunting pada balita	Meningkatkan peran lintas sektor dan peran aktif OPD terkait dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting	Penguatan dalam pelaksanaan program pencegahan stunting pada balita dimulai dari masa remaja putri, bumil & balita	Penerapan implementasi Intervensi Sensitif pada masing-masing OPD terkait dalam pencegahan stunting	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah	
2	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Meningkatkan kesadaran seluruh lintas program & lintas sektor terkait dalam pencegahan kejadian kurang gizi pada baduta	Meningkatkan pemahaman seluruh lintas program & lintas sektor terkait upaya yang tepat dalam pencegahan kejadian kurang gizi pada baduta	Penguatan dalam pelaksanaan program pencegahan stunting pada balita dimulai dari masa remaja putri, bumil & baduta	Penerapan implementasi Intervensi Sensitif pada masing-masing OPD terkait dalam pencegahan stunting	Dinas Kesehatan
2	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Meningkatkan KIE masyarakat & kader tentang pentingnya gizi seimbang untuk balita.	Meningkatkan peran lintas sektor dan peran masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta bundo kanduang	Penguatan dalam pelaksanaan pelatihan/workshop/orientasi /promosi tentang gizi seimbang untuk balita	Peningkatan peran lintas sektor di dalam mendukung dan memfasilitasi KIE kepada masyarakat. Meningkatkan Pemberian PMT Pemulihan bagi balita malnutrisi.	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
2	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Meningkatkan KIE masyarakat & kader tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan konsumsi TTD minimal 90 tablet	Meningkatkan KIE masyarakat & kader tentang pentingnya gizi selama kehamilan dan konsumsi TTD minimal 90 tablet	Penguatan dalam pelaksanaan ANC berkualitas	Peningkatan peran lintas program dalam meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk memnuhi gizi selama kehamilan dan mengkonsumsi TTD	Dinas Kesehatan
2	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkatkan KIE tentang pentingnya ASI Eksklusif serta meningkatkan pelaksanaan konseling menyusui bagi ibu hamil dan ibu menyusui	Menyediakan pojok asi di kantor-kantor dan ditempat keramaian seperti terminal atau pasar	Penguatan pemberian KIE tentang pentingnya ASI Eksklusif bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta pelatihan konseling menyusui bagi petugas dan kader	Perumusan Perda ASI, pembentukan kelompok pendukung ASI di setiap kelurahan dan penyediaan pojok ASI di kantor dan TTU	Dinas Kesehatan
3	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Meningkatkan KIE tentang kesehatan pra kehamilan, selama kehamilan dan nifas	Mengoptimalkan pelaksanaan cakupan sasaran dalam kegiatan skrining layak hamil	Penguatan dalam pemberian KIE tentang kehamilan dan nifas sehat	Penerapan konseling Catin/Pra Nikah tentang Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
						dan pola hidup sehat	
3	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatkan KIE dan kualitas layanan persalinan		Penguatan dalam pemberian KIE tentang persalinan yang aman dengan tenaga terlatih	Peningkatan kualitas layanan persalinan dengan melengkapisu mber daya manusia, sarana & prasarana	Dinas Kesehatan
3	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatkan KIE dan kualitas layanan persalinan		Penguatan dalam pemberian KIE tentang persalinan yang aman di fasilitas kesehatan	Peningkatan kualitas layanan persalinan dengan melengkapisu mber daya manusia, sarana & prasarana	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatkan pelayanan Kesehatan Balita	Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, imunisasi lengkap dan pemberian MP.ASI yang tepat sesuai usia	Pengoptimalisasian pelaksanaan MTBS di faskes serta peningkatan kemampuan Nakes dan Kader tentang DDTK & KPSP	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan balita & rujukan	Dinas Kesehatan
3	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatkan pelayanan Kesehatan Neonatal (KN)	Mengoptimalkan pelaksanaan cakupan sasaran ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan sesuai standar (K6)	Pengoptimalisasian pelaksanaan MTBM di faskes	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan neonatal & rujukan	Dinas Kesehatan
3	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Meningkatkan pelayanan Kesehatan Bayi	Mengoptimalkan pelaksanaan cakupan sasaran ibu hamil, ibu nifas dan bayi dalam mendapatkan pelayanan sesuai standar	Pengoptimalisasian pelaksanaan MTBM di faskes serta peningkatan kemampuan Nakes dan Kader tentang DDTK & KPSP	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bayi & rujukan	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Meningkatkan dukungan pemerintah dalam menanggulangi TB	Mensosialisasi dan Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam menekan angka kasus TB di Kota Bukittinggi	Peningkatan ilmu petugas	Pemenuhan sarana dan prasarana	Dinas Kesehatan
3	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Melakukan pemantauan dan penyelidikan epidemiologi terhadap laporan kasus malaria	mengkoordinasikan dengan lintas sektor dan lintas program	Peningkatan KIE	Peningkatan kapasitas petugas	Dinas Kesehatan
3	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatkan pengawasan terhadap kasus import	Mensosialisasikan dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program	Penguatan dan kerjasama lintas sektor	Peningkatan supervisi dan bimbingan teknis	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
3	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Meningkatkan pengawasan terhadap kasus import	Mensosialisasikan dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program	Penguatan dan kerjasama lintas sektor	Peningkatan Supervisi dan bimbingan teknis	Dinas Kesehatan
3	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatkan kewaspadaan kemungkinan adanya kasus baru	Melakukan refresh penanggulangan kasus kusta dengan pengelola kusta di puskesmas oleh dinas kesehatan	Peningkatan Skrining di lokasi pernah ditemukan kasus	Peningkatan supervisi dan bimbingan teknis	Dinas Kesehatan
3	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	Meningkatkan pengawasan terhadap kasus import	mensosialisasikan dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program	Penguatan dan kerjasama lintas sektor	Peningkatan supervisi dan bimbingan teknis	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.					Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	<p>1.Meningkatkan akses bagi PUS untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana MKJP.</p> <p>2.Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program KB MKJP</p> <p>3.Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait tentang Pelayanan KB</p> <p>4.Mengoptimalkan kinerja PKB yang ada.</p> <p>5.Memberdayakan Mitra kerja (IBI, Kesehatan, IDI, TNI) dalam Pelayanan KB</p> <p>6.Mengadvokasi Pengambil kebijakan untuk fasilitasi layanan</p>	Memberikan reward bagi PUS yang menggunakan kontrasepsi MKJP	<p>Peningkatan kualitas SDM PKB dan kader untuk Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pelayanan KB.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM petugas pelayanan KB dengan berkoordinasi dengan SKPD dan mitra kerja terkait.</p> <p>Peningkatan informasi layanan KB kepada pengambil kebijakan dan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan pemahaman Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya program KB MKJP melalui KIE,</p>		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
			KB. 7, Meningkatkan kualitas layanan KB MKJP				

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).					Dinas Kesehatan
3	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.					Dinas Kesehatan
3	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Menguatkan dukungan anggaran untuk mempertahankan cakupan kepesertaan tetap pada posisi aman UHC	Mendorong kepesertaan mandiri bagi warga mampu dan kepesertaan bagi tenaga kerja perusahaan	Penguatan regulasi untuk mendorong kepesertaan mandiri dan kepesertaan tenaga kerja perusahaan	Pemberian reward dan punishment bagi perusahaan yang mendaftarkan/ tidak tenaga kerjanya	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.					Dinas Kesehatan
3	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.					Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.					Dinas Kesehatan
4	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		1.. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Peningkatan kuallitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		1.. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Peningkatan kuallitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Pemberian bantuan/beasiswa kepada anak usia sekolah 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Peningkatan pertemuan orang tua siswa dengan pendidik yang lebih berkualitas		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Pemberian bantuan/beasiswa kepada anak usia sekolah 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Peningkatan pertemuan orang tua siswa dengan pendidik yang lebih berkualitas 		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Mengoptimalkan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang TIK.		<p>1. Peningkatan kemampuan orang dewasa dan remaja dalam pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan keterampilan teknis dan kewirausahaan</p> <p>2. Peningkatan etika dan keamanan digital.</p>	<p>1. Pembangunan aturan pemanfaatan teknologi digital dalam masyarakat.</p> <p>2. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan ekonomi masyarakat (kontencreator)</p> <p>3. Peningkatan lingkup kerjasama komunitas TIK dan pemda.</p>	Dinas Komunikas i dan Informasi

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan		1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Pemberian bantuan/beasiswa kepada anak usia sekolah 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan		1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Peningkatan pembiayaan kepada masyarakat pada sekolah non formal/kesetaraan 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan pada sekolah Formal dan non forma/kesetaraan 4. Peningkatan kuallitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah Formal dan non forma/kesetaraan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan		1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkatkan kompetensi guru	Memfasilitasi pembiayaan pelaksanaan PPG	Peningkatan pemberian bimbingan dan pendidikan latihan profesi guru	Memfasilitasi pembiayaan pelaksanaan PPG	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1. Meningkatkan pengetahuan/kapasitas Perencana OPD tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD dalam rangka Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2. Meningkatkan advokasi, komunikasi dan informasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).		1. Peningkatan SDM Perencana Perangkat Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 2. Peningkatan komitmen OPD tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	1. Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak 2. Memberikan jaminan keamanan privacy korban 3. Meningkatkan pendidikan bagi calon pengantin		1. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan & Anak Korban Kekerasan. 3. Pengintegrasian data antar lintas sektor.		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
5	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak 2. Meningkatkan peran serta lintas sektor, tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak 3. Meningkatkan layanan kekerasan anak yang lebih komprehensif. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengasuhan anak	1. Membuat regulasi tentang perlindungan anak	1. Penguatan kerja sama lintas sektor untuk Perlindungan khusus Anak. 2. Peningkatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Perlindungan khusus Anak. 3. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan khusus Anak. 4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK.		Dinas P3AP2KB

5	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan 2. Meningkatkan peran serta lintas sektor, tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan 3. Meningkatkan layanan kekerasan perempuan dan anak perempuan yang lebih komprehensif. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif penggunaan teknologi digital 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kerja sama lintas sektor untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan 2. Peningkatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan. 3. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Perempuan 4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perempuan dan anak perempuan. 5. Peningkatan kualitas layanan terhadap kasus perempuan dan anak perempuan 6. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan 	Dinas P3AP2KB
---	--------	--	--	---	---	------------------

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	1. Meningkatkan kualitas lembaga layanan yang terstandarisasi 2. Meningkatkan peran serta lintas sektor, tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan 3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur layanan	Memberdayakan perempuan korban kekerasan dengan meningkatkan keterampilan	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. 3. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga perlindungan perempuan		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan usia anaki. 2. Meningkatkan komitmen sektor terkait dalam pencegahan perkawinan usia anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat regulasi tentang pencegahan perkawinan usia anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak perkawinan usia anak 2. Peningkatan pengawasan pemerintah daerah dalam pencegahan perkawinan usia anak 3. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak 		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
5	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	1. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi generasi berencana bagi remaja 2, Menumbuhkan minat remaja untuk menjadi remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan keluarga 3. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor		Peningkatan pengetahuan remaja tentang generasi berencana Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektor membangun generasi berencana.		Dinas P3AP2KB
5	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).					Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi untuk peningkatan kapasitas perempuan khususnya dibidang ekonomi		Pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan/membangun konten-konten positif		Dinas Komunikasi dan Informasi
6	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Tersusunnya dokumen LH untuk pembuatan baru Bendungan dan embung dan penampungan air bersih untuk penambahan kapasitas intake air minum	Dinas PUPR

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
6	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.					Dinas Kesehatan
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	1. Meningkatkan dukungan infrastruktur sanitasi layak dan sarana air minum layak bagi masyarakat, 2. Mengoptimalkan pemetaan, pelaksanaan 5 pilar STBM, 3. Meningkatkan sinergitas dengan LP dan LS	1. Meningkatkan peran institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat baik peserta didik maupun orang tua agar menerapkan STBM, 2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan institusi baik formal maupun non formal dalam	1. Peningkatan infrastruktur sanitasi layak dan sarana air minum layak bagi masyarakat, 2. Tersedianya peta 5 pilar STBM, 3. Peningkatan sinergitas dengan LP dan KS dalam pelaksanaan STBM	1. Peningkatan peran institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat baik peserta didik maupun orang tua agar menerapkan STBM, 2. Peningkatan kerja sama dengan lembaga dan institusi baik formal maupun non formal dalam	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
				menyukseskan STBM		menyukseskan STBM	
6	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar melakukan SBS dengan menggunakan jamban aman	Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mempertahankan kebiasaan SBS dan menginginkan Jamban Aman	Peningkatan masyarakat dalam penggunaan jamban aman	Penguatan koordinasi dengan lintas sektor dalam upaya mempertahankan Stop BAB Sembarangan (SBS) serta penggunaan jamban aman	Dinas Kesehatan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
6	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Meningkatkan irigasi hemat air		Pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan air tanah untuk irigasi serta menyediakan sumber irigasi (alternatif) pada saat sumber irigasi utama tidak mampu memenuhi kebutuhan air tanaman		Dinas Lingkungan Hidup
6	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.		Mengembangkan koordinasi lebih intensif dengan Dinas SDABK Prov Sumbar dan BWS		Peningkatan kerja sama dengan kota dan kabupaten tetangga Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal	Dinas PUPR

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
8	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi teknis terkait penyumbang sektor peningkatan PDRB	1. Meningkatkan kerjasama antar daerah 2. Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informasi 3. Mengembangkan potensi peluang usaha selain sektor perdagangan dan industri	1. Peningkatan koordinasi pengendalian inflasi 2. Peningkatan kompetensi SDM tenaga kerja, 3. Peningkatan koordinasi pengendalian tingkat pengangguran	Menumbuhkan iklim stabilitas politik	Bapelitban g
8	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Meningkatkan pelatihan dan produktifitas berbasis kompetensi terhadap pekerja formal UKM	Meningkatkan kualitas SDM pekerja	Meningkatkan kualitas pekerja	Melakukan pendataan ke lapangan terhadap kebutuhan pasar kerja yang tersedia	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkatkan pembinaan serta perlindungan terhadap tenaga kerja	Pengembangan SDM pekerja melalui pembinaan	Peningkatan pemahaman para pekerja terhadap pentingnya perlindungan upah	- Peningkatan pemahaman bagi pemberi kerja terhadap hak pekerja	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja
8	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pelatihan yang berbasis kompetensi - Mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan kepada pencari kerja 	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja baik di dalam maupun di luar Kota Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan jumlah pencari kerja yang kompeten - Terciptanya tenaga kerja baru/ entrepreneur - Peningkatan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas kesempatan kerja bagi disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta tanpa diskriminasi - Peningkatan akses pelatihan kepada pencari kerja 	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
8	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	1. Meningkatkan pengelolaan daya tarik wisata yang berbasis potensi alam, lembaga konservasi budaya dan kearifan lokal	meningkatkan sdm untuk pengelolaan daya tarik wisata	Peningkatan pengelolaan daya tarik wisata	1. Optimalisasi pembinaan daya tarik wisata dengan cara memalukan pelatihan	Dinas Pariwisata
8	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor pariwisata	Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan	Peningkatan pelatihan dan produktivitas kepariwisataan	Memberikan pelatihan kepada para pelaku pariwisata	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahkan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahkan	
8	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	1. mengembangkan strategi promosi investasi 2. meningkatkan Penyelenggaraan promosi investasi		1. peningkatan perizinan pelaku usah pada jasa perbankan 2. peningkatan kerjasama dengan lembaga perbankan		DPMPSTP
9	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.		- Meningkatnya jumlah IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan		Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	Dinas Perdagang an dan Perindustri an

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
9	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.		Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Industri		Persentase Peningkatan nilai investasi sektor industri	Dinas Perdagang an dan Perindustri an
9	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	1. meningkatkan SKPD yang difasilitasi dalam penerapan kajian dan inovasi daerah 2. meningkatkan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan riset untuk kebutuhan pemerintah daerah	meningkatkan koordinasi dengan BRIN	1. Peningkatan pemanfaatan hasil kajian untuk pembangunan daerah dan kebijakan daerah 2. Peningkatan jumlah inovasi	1. Menumbuhkan iklim berinovasi pada semua sektor	Bapelitban g

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
9	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningakkan pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK		1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK di Kota Bukittinggi 2. Peningkatan budaya cerdas menggunakan perangkat teknologi 3. Peningkatan kerja sama dengan provider dalam penyediaan <i>mobile broadband</i> .		Dinas Komunikasi dan Informasi
9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningakkan pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK		1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK di Kota Bukittinggi 2. Peningkatan budaya cerdas menggunakan perangkat teknologi		Dinas Komunikasi dan Informasi

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
9	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkatkan pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK		1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK di Kota Bukittinggi		Dinas Komunikasi dan Informasi
10	10.1.1*	Koefisien Gini.	1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan SKPD perekonomian 2. Mengintegrasikan seluruh program kegiatan terkait faktor pendukung pertumbuhan ekonomi	1. Meningkatkan pemberdayaan UMKM	1. Peningkatan koordinasi pengendalian inflasi 2. Peningkatan koordinasi kompetensi SDM tenaga kerja, 3. Koordinasi pengendalian tingkat pengangguran, 4. Koordinasi pengendalian tingkat kemiskinan	1. Peningkatan kompetensi SDM, 2. Peningkatan Iptek, 3. Peningkatan pemberdayaan UMKM. 4. Pengembangan kebijakan kemudahan penciptaan wirausaha baru	Bapelitbang

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
10	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Peningkatan penerapan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi daerah	1. Peningkatan riset dan inovasi untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, 2. Pengembangan lapangan kerja baru dengan menarik investor baik lokal maupun nasional bahkan internasional	1. Peningkatan Ketersediaan data base seluruh sektor pembentuk PDRB, 2. Peningkatan koordinasi berkala dengan SKPD pembentuk sektor PDRB	1. Penyederhanaan birokrasi untuk menarik minat investor, 2. Peningkatan lapangan kerja baru baik di sektor formal ataupun informal	Bapelitban g
10	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Meningkatkan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Aplikasi SIGN-G			Peningkatan pengelolaan dan pengawasan data terpadu kesejahteraan sosial Pengembangan sistem pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial\	Dinas Sosial

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
10	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	perumusan produk hukum daerah tanpa ada disrikiminasi	perumusan produk hukum daerah tanpa ada disrikiminasi	seluruh produk hukum daerah tidak ada pelanggan diskriminasi menurut hukum HAM intensional	seluruh produk hukum daerah tidak ada pelanggan diskriminasi menurut hukum HAM intensional	Bagian Hukum
10	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	- Mengoptimalkan sistem pembiayaan iuran BPJS TK bagi pekerja rentan di Kota Bukittinggi - Meningkatkan pembinaan kepada perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS TK	- Mengembangkan regulasi dalam pemanfaatan insentif fiskal guna mendorong kepesertaan BPJS TK bagi pengusaha - Mengembangkan kebijakan dalam peningkatan sinergi antara BPJS Kesehatan dan BPJS TK. - Mendorong pemberian insentif fiskal bagi perusahaan	Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya BPJS TK	1. Peningkatan pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya BPJS TK 2. Pengembang an insentif dan disinsentif bagi perusahaan yang sudah/belum memenuhi ketentuan pengesahan perusahaan. 3. Peningkatan koordinasi dengan DPMPSTP	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
				yang mentaati peraturan		untuk menjadikan kepesertaan BPJS TK bagi tenaga kerja sebagai salah satu syarat dalam pengurusan izin perusahaan	
11	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.					Dinas Perkim

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
11	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	<p>1. Meningkatkan pelayanan angkutan umum dengan cara memberikan pelayanan yang aman, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur terutama bagi anak-anak, lansia dan disabilitas.</p> <p>2. Mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai alat sarana informasi bagi masyarakat</p> <p>4. Mengoptimalkan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya seperti rambu, marka, cermin dan lampu lalu lintas.</p> <p>5. Meningkatkan</p>	<p>1. Optimalisasi kebijakan persyaratan penyedia jasa transportasi umum. Mengembangkan dukungan bagi perwujudan transportasi umum yang aman, dan terjangkau.</p> <p>2. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kendaraan umum</p> <p>3. Mengembangkan layanan transportasi berbasis wisata.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas jaringan transportasi umum</p>	<p>1.-Peningkatkan pelayanan jasa angkutan umum dengan cara peremajaan angkutan</p> <p>-Pengoptimalan fungsi halte agar ramah untuk anak-anak lansia dan disabilitas</p> <p>2.-Pengembangan website untuk update informasi transportasi</p> <p>-Integrasi sistem informasi transportasi dengan media sosial untuk pemberitahuan real-time</p> <p>4.Pemasangan dan perawatan rambu lalu lintas, marka jalan, dan cermin tikungan ditempat yang diperlukan</p> <p>5.Pelatihan dan pengawasan berkala terhadap juru parkir.</p> <p>6.Penyelenggaraan uji berkala dan uji laik jalan secara teratur.</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas SDM pengemudi transportasi umum</p> <p>2. Peningkatan kualitas pelayanan pada transportasi umum</p> <p>3. Peningkatan insentif dan disinsentif terhadap penyedia jasa transportasi umum</p>	Dinas Perhubungan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
			pengawasan terhadap juru parkir yang bertugas di lapangan 6. Menumbuhkan budaya tertib administrasi seperti uji berkala atau uji laik jalan				

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
11	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Penyelenggaraan forum perencanaan pembangunan sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Pemanfaatan media digital seperti google form, quizizz, zoom meeting, dan live streaming pada penyelenggaraan forum dialog perencanaan	Meningkatnya tingkat partisipasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya partisipasi perencanaan melalui pemanfaatan media digital seperti google form, quizizz, zoom meeting, dan live streaming pada forum dialog perencanaan pembangunan	Bapelitban g
11	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Meningkatkan pelestarian Kebudayaan Daerah	Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota tetangga untuk pelestarian kebudayaan daerah	1. Peningkatan Pemajuan Pelestarian Cagar Budaya 2. Peningkatan Pemajuan Peningkatan pelestarian budaya tak benda 3. Pengelolaan Kebudayaan Daerah	1. Melaksanakan Koordinasi dan Komunikasi dengan Kabupaten/Kot a untuk peningkatan Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
11	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.					BPBD
11	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.					BPBD

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
11	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.					BPBD

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
11	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Mengembangkan rencana kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kota Bukittinggi	1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah 2. Pengembangan usaha masyarakat berbasis pengolahan sampah 3. Peningkatan pengolahan sampah terpilah	Pengembang an strategi pengelolaan sampah dari sumbernya	Dinas Lingkunga n Hidup

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
11	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	1.Mengembalikan fungsi RTH sesuai RTRW 2. Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat		Mendorong penyediaan RTH yang mencukupi dan memadai (jalur hijau pada jaringan jalan, sempadan sungai, gedung perkantoran dan fasilitas publik lainnya)		Dinas Lingkungan Hidup
11	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.					BPBD

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
11	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.					BPBD

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
12	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan	Mengembangkan rencana kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kota Bukittinggi	1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah 2. Pengembangan usaha masyarakat berbasis pengolahan sampah 3. Peningkatan pengolahan sampah terpilah	Pengembangan strategi pengelolaan sampah dari sumbernya	Dinas Lingkungan Hidup

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
13	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.					BPBD
15	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Mengendalikan pemanfaatan lahan dan mencegah terjadinya lahan kritis				Dinas Lingkunga n Hidup

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
15	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Mengembangkan basis data tentang pemanfaatan keanekaragaman hayati Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati berkelanjutan		Pengembangan teknologi sederhana dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati Peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan pemanfaatan keanekaragaman hayati Meningkatkan kerjasama dengan Dinas Pertanian kedalam pengembangan peternakan galo-galo (<i>Trigona spp</i>)		Dinas Lingkungan Hidup

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
16	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak 2. Meningkatkan peran serta lintas sektor, tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak 3. Meningkatkan layanan kekerasan anak yang lebih komprehensif. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengasuhan anak	1. Membuat regulasi tentang perlindungan anak	1. Penguatan kerja sama lintas sektor untuk Perlindungan khusus Anak. 2. Peningkatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Perlindungan khusus Anak. 3. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan khusus Anak. 4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK.		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
16	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan terhadap anak 2. Meningkatkan peran serta lintas sektor, tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak 3. Meningkatkan layanan kekerasan anak yang lebih komprehensif. 4. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengasuhan anak	1. Membuat regulasi tentang perlindungan anak	1. Penguatan kerja sama lintas sektor untuk Perlindungan khusus Anak. 2. Peningkatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam Perlindungan khusus Anak. 3. Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan khusus Anak. 4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK.		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
16	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	1. Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki 2. Meningkatkan pengawasan dan pembatasan situs-situs berbahaya dalam dunia maya. 3. Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pengasuhan		1. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki 2. Peningkatan pengawasan pemerintah daerah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki 3. Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki 4. Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan korban kekerasan		Dinas P3AP2KB

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambaha n	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambaha n	
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	1. Menyempurnakan regulasi keuangan daerah 2. Optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi	Meningkatkan evaluasi anggaran untuk fokus pada sektor kunci dan pengurangan pemborosan	1. Peningkatan kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan keterbukaan dan transparansi informasi keuangan daerah	Menetapkan aturan dan mekanisme yang jelas dalam proses pengajuan dan pengeluaran anggaran untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan.	Badan Keuangan
16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan penguatan sistem pengendalian internal 3. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam mewujudkan transparansi dan	1. Mengoptimalkan pengembangan kapasitas staf keuangan dalam hal manajemen keuangan yang efektif, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. 2. Memastikan keahlian yang	1. Peningkatan kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan pengawasan keuangan daerah. 3. Peningkatan keterbukaan dan transparansi informasi keuangan daerah	1. Pengembangan fungsi audit internal yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan keuangan, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi	Badan Keuangan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
			akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	cukup dalam bidang akuntansi dan audit		masalah secara proaktif sebelum menjadi isu yang lebih besar.	
16	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	1. Mengembangkan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran umur dibawah 5 tahun 2. Mengembangkan layanan terintegrasi penerbitan akta kelahiran dengan fasilitas kesehatan se Kota Bukittinggi 3. Meningkatkan azas stelsel aktif	Mengembangkan aplikasi layanan digital penerbitan akta kelahiran	1. Pengembangan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran 2. Pengembangan layanan terintegrasi dengan semua fasilitas kesehatan se-Kota Bukittinggi 3. Optimalisasi pelayanan dengan azas stelsel aktif	Pengembang an layanan adminduk digital	Disdukcap i

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
			dalam penerbitan akta kelahiran umur dibawah 5 tahun				
16	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran penduduk 40% berpendapatan rendah Mengembangkan layanan terintegrasi penerbitan akta kelahiran dengan 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan aplikasi layanan digital penerbitan akta kelahiran Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait data penduduk 40% terbawah (DTKS) 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran Pengembangan layanan terintegrasi dengan semua fasilitas kesehatan se-Kota Bukittinggi Optimalisasi pelayanan dengan azas stelsel aktif 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan layanan adminduk digital Peningkatan koordinasi penyediaan data penduduk 40% terbawah 	Disdukcapil

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
			fasilitas kesehatan se Kota Bukittinggi 3. Meningkatkan azas stelsel aktif dalam penerbitan akta kelahiran penduduk 40% berpendapatan rendah				
16	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	1. Mengembangkan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran berpendapatan rendah 2. Mengembangkan layanan terintegrasi penerbitan akta kelahiran dengan fasilitas	Mengembangkan aplikasi layanan digital penerbitan akta kelahiran	1. Pengembangan inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran 2. Pengembangan layanan terintegrasi dengan semua fasilitas kesehatan se-Kota Bukittinggi 3. Optimalisasi pelayanan dengan azas stelsel aktif	Pengembangan layanan adminduk digital	Disdukcapil

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
			kesehatan se Kota Bukittinggi 3. Meningkatkan azas stelsel aktif dalam penerbitan akta kelahiran				
16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	perumusan produk hukum daerah tanpa ada disrikiminasi	perumusan produk hukum daerah tanpa ada disrikiminasi	seluruh produk hukum daerah tidak ada pelanggan diskriminasi menurut hukum HAM intensional	seluruh produk hukum daerah tidak ada pelanggan diskriminasi menurut hukum HAM intensional	Bagian Hukum

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
17	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningakkan pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK		1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK di Kota Bukittinggi 2. Peningkatan budaya cerdas menggunakan perangkat teknologi 3. Peningkatan kerja sama dengan provider dalam penyediaan <i>mobile broadband</i> .		Dinas Komunikasi dan Informasi
17	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Mengoptimalkan sumber daya teknologi Informasi dan Komunikasi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat tentang TIK.		Peningkatan kemampuan orang dewasa dan remaja dalam pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan keterampilan teknis dan kewirausahaan Peningkatan etika dan keamanan digital.	1. Pembangunan aturan pemanfaatan teknologi digital dalam msyarakat. 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan	Dinas Komunikasi dan Informasi

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
						ekonomi masyarakat (kontencreator) 3. Peningkatan lingkup kerjasama komunitas TIK dan pemda.	

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambah an	
17	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	1. Mengoptimalkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah 2. Mengoptimalkan Promosi dari Pihak Terkait	-Meningkatkan data pemetaan urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik SKPD pengampu Kerja Sama - Menginterintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada SKPD pengampu - Mengoptimalkan Kerangka Acuan Kerja SKPD pengampu kerja sama - Mengoptimalkan Pengkajian Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan dengan Tim Koordinasi Kerja	-Optimalisasi Kesepakatan Kerja Sama yang ditindaklanjuti ke Perjanjian Kerja Sama	-Integrasi Program/Kegiatan dan pendanaan pada masing-masing SKPD dan penganggarannya	Bagian ADM Pembangu nan

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
				<p>Sama Daerah (TKKSD) terhadap Kerangka - Mengoptimalkan peninjauan kerja sama dengan pihak tiga untuk menentukan ruang lingkup kerja sama yang dapat di kerja samakan</p>			

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
17	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.					BPS

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
17	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.					BPS

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
17	17.18.1.(c))	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).					BPS
17	17.19.2.(b))	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Meningkatkan sistem pendataan registrasi kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Mengembangkan aplikasi digital pendataan registrasi kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Optimalisasi sistem pendataan registrasi kelahiran dan kematian	Pengembangan aplikasi digital pendataan Vital Statistics Register	Disdukcapil

N O. TP B	NO INDIKAT OR	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
17	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.					BPS
17	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).					BPS

6.1.2 Skenario Arah Kebijakan Berdasarkan Capaian TPB SB (Sudah Dikerjakan dan Belum Tercapai)

Tabel 6.2 Skenario Arah Kebijakan Capaian TPB SB (Sudah Dikerjakan dan Belum Tercapai)

NO TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Meningkatkan Kapasitas Kelompok Penerima Manfaat (KPM) agar Graduasi dengan meningkatkan peran serta Pendamping PKH	Memberikan Reward kepada sdm pendamping PKH yang berhasil menggradusikan KPM	Memberdayakan pendamping PKH untuk Graduasi KPM		Dinas Sosial

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	<p>Meningkatkan akses bagi PUS untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana.</p> <p>Meningkatkan pemahaman Pasangan usia Subur terhadap pentingnya program KB</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait tentang Pelayanan KB</p> <p>Mengoptimalkan kinerja PKB yang ada.</p> <p>Memberdayakan Mitra kerja (IBI, Kesehatan, IDI, TNI) dalam Pelayanan KB</p> <p>Mengadvokasi Pengambil kebijakan untuk fasilitasi layanan KB.</p>		<p>Peningkatan kualitas SDM PKB dan kader untuk Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pelayanan KB.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM petugas pelayanan KB dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan informasi layanan KB kepada pengambil kebijakan dan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan pemahaman Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya program KB melalui KIE,</p>		Dinas P3AP2KB

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan basis data penduduk terjangkau akses air minum layak dan berkelanjutan 2. Meningkatkan kelembagaan pada penyediaan air bersih bersama PDAM 3. Meningkatkan kerja sama dengan lintas terkait dalam kerja sama pemeliharaan infrastruktur pelayanan air non perpipaan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan basis data penduduk yang belum mempunyai akses air minum layak dan berkelanjutan. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sumber air bersih 	Dinas PUPR

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.					Dinas Perkim
1	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.					Dinas Perkim

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.					BPBD
1	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.					BPBD

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
1	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	1. Mengoptimalkan penetapan prioritas dalam alokasi anggaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) 2. Mengoptimalkan pengidentifikasian i dan pengurangan pemborosan serta penyalahgunaan dana didalam sistem pengeluaran untuk layanan pokok	Mengembangkan sumber pembiayaan alternatif melalui kemitraan publik, swasta, dana hibah internasional atau penggunaan dana filantropi	1. Peningkatan penyerapan anggaran 2. Peningkatan realisasi anggaran 3. Peningkatan efisiensi penggunaan anggaran	Pengembangan sumber pembiayaan alternatif berbasis filantropi	Badan Keuangan
3	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatkan kesadaran bersama seluruh elemen masyarakat terkat dan lintas program dalam pencapaian target imunisasi	Meningkatkan peran institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat baik peserta didik maupun orang tua akan pentingnya imunisasi, Meningkatkan kerja sama dengan lembaga	Penguatan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan terpadu	Penguatan koordinasi program imunisasi sebagai kegiatan bersama antar lembaga/institusi pemerintah ataupun swasta dan masyarakat	Dinas Kesehatan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahkan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahkan	
				dan institusi baik formal maupun non formal dalam menyukseskan program imunisasi			
3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	1. Meningkatkan dukungan pemerintah dalam penanggulangan HIV	1. Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk membangun dan memperkuat tatanan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat yang peduli terhadap HIV	1. Penguatan wilayah untuk membentuk kampung bebas HIV	1. Penguatan sosialisasi secara masif disemua lini, mulai dari kelompok dasawisma, karangtaruna, remaja mesjid dan kelompok lainnya dalam masyarakat	Dinas Kesehatan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
3	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkatkan pengawasan terhadap penemuan kasus hepatitis pada ibu hamil reaktif dan nakes yang belum di vaksin hepatitis B	Mensosialisasikan dan koordinasi dengan lintas sektor dan lintas program	Penguatan dan kerjasama lintas sektor	Peningkatan Supervisi dan Bimbingan Teknis	Dinas Kesehatan
3	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	1. Melakukan sosialisasi Perda KTR di 7 tatanan 2. melakukan Monev Program dengan LP/LS	1. Melaksanakan dan menegakkan Perda KTR sesuai aturan. 2.melakukan Revisi Perda KTR. 3.membentuk SATGAS KTR Tingkat kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota. 4.Membuat Inovasi KTR . 5.Menjalankan Denda KTR sesuai Perda bagi Perokok yang tertangkap di 7 tatanan. 6.mewujudkan Kota Bukittinggi	penguatan,kerjasama, dan komitmen bersama Pimpinan daerah, Perguruan Tinggi, lintas sektor dan lintas program, serta peran tokoh masyarakat dalam mengawasi penerapan Perda KTR.	1. sosialisasi. 2. membentuk satgas KTR yang di awasi dan diarahkan Langsung Penerapannya oleh Pimpinan daerah.	Dinas Kesehatan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahannya	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahannya	
				Kota Wisata Bebas Asap rokok setara dengan negara Tetangga seperti Singapore dan Malaysia.			
3	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	1.Mempermudah akses skrining ke masyarakat 2.Meningkatkan peran lintas sektor terkait skrining penyakit tidak menular	1.Meningkatkan Sosialisasi dan koordinasi dengan lintas sektor 2.Membuat posko - posko untuk skrining yg	Penguatan dan kerjasama lintas sektor	Peningkatan supervisi dan bimbingan teknis	Dinas Kesehatan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahhan	
				mudah diakses dan dekat dimasyarakat			
3	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	1.Meningkatkan aktivitas fisik spt senam rutin 2.Memasukkan menu makan sehat disetiap pertemuan pada instansi pemerintah dan dimasyarakat	Melakukan senam rutin sesuai anjuran 30 menit sehari disemua instansi pemerintah maupun swasta dan masyarakat 2.Mengganti menu makan biasa dengan makanan sehat disetiap pertemuan atau kegiatan yang ada instansi pemerintah dan dimasyarakat	Penguatan dan kerjasama lintas sektor	Peningkatan supervisi dan bimbingan teknis	Dinas Kesehatan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	<p>Meningkatkan akses bagi PUS untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana.</p> <p>Meningkatkan pemahaman Pasangan usia Subur terhadap pentingnya program KB</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait tentang Pelayanan KB</p> <p>Mengoptimalkan kinerja PKB yang ada.</p> <p>Memberdayakan Mitra kerja (IBI, Kesehatan, IDI, TNI) dalam Pelayanan KB</p> <p>Mengadvokasi Pengambil kebijakan untuk fasilitasi layanan KB.</p>		<p>Peningkatan kualitas SDM PKB dan kader untuk Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pelayanan KB.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM petugas pelayanan KB dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan informasi layanan KB kepada pengambil kebijakan dan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan pemahaman Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya program KB melalui KIE,</p>		Dinas P3AP2KB

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	<p>Meningkatkan akses bagi PUS untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana.</p> <p>Meningkatkan pemahaman Pasangan usia Subur terhadap pentingnya program KB</p> <p>Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait tentang Pelayanan KB</p> <p>Mengoptimalkan kinerja PKB yang ada.</p> <p>Memberdayakan Mitra kerja (IBI, Kesehatan, IDI, TNI) dalam Pelayanan KB</p> <p>Mengadvokasi Pengambil kebijakan untuk fasilitasi layanan KB.</p>		<p>Peningkatan kualitas SDM PKB dan kader untuk Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>Mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pelayanan KB.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM petugas pelayanan KB dengan berkoordinasi dengan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan informasi layanan KB kepada pengambil kebijakan dan SKPD terkait.</p> <p>Peningkatan pemahaman Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya program KB melalui KIE,</p>		Dinas P3AP2KB

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
3	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).					Dinas Kesehatan
3	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	meningkatkan Skrining Anak Baru Masuk Sekolah.	menyediakan Layanan Upaya berhenti Merokok di fasyankes	1.Membuat Regulasi dan Kebijakan Larangan Menjual Rokok kepada Anak Sekolah. 2.Membuat Regulasi dan Kebijakan tidak merokok selama pendidikan sebagai persyaratan utama Penerimaan Siswa dan Mahasiswa Baru. 3.membuat Regulasi dan Kebijakan serta aturan Tidak Merokok dan Bukan Perokok Aktif bagi Pencari Kerja.	pemberiaan sanksi Tegas bagi pelanggar sesuai Regulasi, Kebijakan, dan Aturan	Dinas Kesehatan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		1.. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 2. Peningkatan kuallitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Pemberian bantuan/beasiswa kepada anak usia sekolah 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Peningkatan kuallitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Peningkatan pertemuan orang tua siswa dengan pendidik yang lebih berkualitas		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
4	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan		1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Pemberian bantuan/beasiswa kepada anak usia sekolah 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 4. Peningkatan kuallitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Peningkatan Kerjasama dengan OPD terkait yang menunjang peningkatan kualitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	1. Meningkatkan kapasitas SDM Perempuan dalam dunia politik 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran perempuan di parlemen 3. Mengintegrasikan pemberdayaan perempuan di bidang politik dengan lintas sektor terkait 4. Mengadvokasi pengambil kebijakan pentingnya peran Pemerintah mendorong dan menyediakan akses bagi perempuan untuk berperan serta di dalam politik.	Meningkatkan kapasitas Perempuan dalam dunia politik melalui pelatihan	1. Peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam dunia politik 2. Peningkatan pemahaman organisasi perempuan di bidang politik		Dinas P3AP2KB

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Mendorong pejabat struktural perempuan untuk mengikuti pendidikan kepemimpinan dalam peningkatan kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas pendidikan dan keterampilan manajemen kaum perempuan. 2. Meningkatkan pelaksanaan assesment kinerja sebagai dasar promosi jabatan 	Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah untuk pengembangan kompetensi ASN dengan memperhatikan prinsip keadilan bagi perempuan dan laki-laki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penjarangan pegawai perempuan yang potensial untuk mengikuti assesment guna mengetahui potensi yang dimiliki, sebagai bahan dalam pemetaan kinerja ASN 2. Peningkatan upaya pengembangan regulasi untuk proporsi perempuan yang menduduki jabatan struktural. 	BKPSDM

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	1. Meningkatkan pengawasan orang tua , Lembaga terkait, dan tokoh masyarakat agar tidak terjadi pergaulan bebas 2. Meningkatkan pemahaman agama di kalangan perempuan.		1.Peningkatan pengetahuan perempuan tentang dampak pergaulan bebas. 2. Pemberdayaan Forum organisasi remaja dalam edukasi generasi berencana. 3. Peningkatan SDM anggota forum organisasi remaja.		Dinas P3AP2KB

NO · TP B	NO INDIKATO R	INDIKATOR TPB	ARAH KEBIJAKAN UNTUK RPJMD		INDIKASI PROGRAM		OPD / UNIT LEADING SECTOR
			Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	Business As Usual (BAU)	Upaya Tambahan	
5	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	<p>1. Menyebar luaskan Komunikasi, informasi dan edukasi program KB.</p> <p>2. Meningkatkan Pengetahuan PUS tentang pentingnya Program KB.</p> <p>3. Meningkatkan koordinasi Program KB dengan majelis ulama.</p>		<p>Peningkatan kualitas SDM PKB dan kader untuk Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.</p> <p>Peningkatan intensitas komunikasi informasi dan edukasi program KB.</p> <p>Peningkatan pemahaman Pasangan Usia Subur terhadap pentingnya program KB melalui KIE,</p>		Dinas P3AP2KB

KLHS RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025-2030



BAB VII KESIMPULAN



BAB VII

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan analisis pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), jumlah indikator yang sudah terlaksana dan sudah mencapai target (SS) adalah 120 indikator (57,14%). Indikator TPB yang sudah terlaksana tetapi belum mencapai target adalah 51 indikator (24,29%) indikator dengan kategori sudah terlaksana tetapi tidak ada data (NA) adalah 26 indikator (12,38%), dan indikator dengan kategori belum terlaksana dan belum mencapai target (BB) adalah 13 indikator (6,19%) dari total 210 indikator yang menjadi kewenangan Kota Bukittinggi
2. Isu Pembangunan Berkelanjutan Prioritas (Isu PB Prioritas) didapatkan setelah menganalisis empat kelompok isu, yaitu: Isu berdasarkan konsultasi publik, Isu berdasarkan karakteristik wilayah (Muatan KLHS), Isu berdasarkan laporan atau dokumen perencanaan lainnya, dan Isu berdasarkan Capaian TPB.
3. Isu PB Prioritas KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 adalah:
 - a. Belum optimalnya pengelolaan sampah
 - b. Tingkat Pelayanan Air Bersih Masih Rendah
 - c. Semakin Maraknya Penyakit Sosial (LGBT, Kenakalan remaja, dll)
 - d. Belum optimalnya infrastruktur pengelolaan lingkungan
4. Hasil dari KLHS akan diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030.



7.2 Saran

Saran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari KLHS RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025-2030 ini hendaknya dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tiap instansi/opd.
2. Perlunya meningkatkan kerja sama antar instansi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
3. Perlunya meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 2022. Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2024*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2023*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2022*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2021*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Kota Bukittinggi Dalam Angka Tahun 2020*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024*. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2023*. Padang.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Statistik Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023*. Padang
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022*. Padang
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2022*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2021*. Bukittinggi.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kesejahteraan Masyarakat Kota Bukittinggi Tahun 2020*. Bukittinggi.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. 2021. *Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi*. Bukittinggi.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. 2023. *Dokumen Induk Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2022*. Bukittinggi
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 2022. *Dokumen Induk Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021*. Padang



Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2024. Sistem Informasi
Pengelolaan Sampah Nasional 2019-2022.
<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/capaian>

